



**“PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN  
SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT”**

*The Refusal of Religious Groups towards Same-Sex  
Marriage in the United States*

**SKRIPSI**

Oleh

**Amaliatul Izzah  
NIM 120910101022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**



**“PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN  
SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT”**

*The Refusal of Religious Groups towards Same-Sex  
Marriage in the United states*

**SKRIPSI**

diajukan guna melengkapai dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hubungan Internasional (SI)  
dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Amaliatul Izzah  
NIM 120910101022**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2016**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi saya yang berjudul “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat”, saya persembahkan untuk :

1. Dosen pembimbing saya yang sabar membimbing hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik
2. Guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

## **MOTTO**

.

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amaliatul Izzah

NIM : 120910101022

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 September 2016

Yang menyatakan,

Amaliatul Izzah

NIM 120910101022

**SKRIPSI**

**“PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN  
SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT”**

*The Refusal of Religious Groups towards Same-Sex  
Marriage in the United States*

Oleh

**Amaliatul Izzah  
NIM 120910101022**

Pembimbing

**Dosen Pembimbing Utama : Drs. M. Nur Hasan. M. Hum**

**Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy, S.Sos., M.A**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Selasa, 13 September 2016  
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
jam : 09.00

Tim Penguji:  
Ketua,

Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA. Ph.D  
NIP. 196108281992011001

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Drs. M. Nur Hasan, M.Hum  
NIP. 195904231987021001

Honest Dody Molasy. S.Sos., M.A  
197611122003121002

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Agung Purwanto, M.Si  
196810221993031002

Drs. Pra Adi Sulistiyono, M.Si  
196105151988021001

Mengesahkan  
Dekan,

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.  
NIP. 195207271981031003

## RINGKASAN

**Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat;** Amaliatul Izzah, 2016:195 Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Dalam Amendemen Pertama Konstitusi AS menyebutkan “...*freedom of (or from) religion; freedom of speech; freedom to assemble; freedom to petition the government.*” Artinya, AS membebaskan setiap warga negaranya untuk menganut (ataupun tidak) suatu agama tertentu. Pada umumnya, ahli *modernism* dan *secularism* akan melihat bahwa dengan adanya konsep “*freedom of (or from) religion*” akan membawa AS menjadi negara sekuler yang memisahkan lembaga pemerintah (termasuk orang-orang yang bekerja di pemerintahan) dengan keagamaan tertentu. Namun demikian, hal tersebut perlu ditinjau kembali karena fakta yang terjadi justru sebaliknya. Kelompok keagamaan, baik dalam bentuk perserikatan maupun intitusi gereja, justru tumbuh dengan pesat di AS. Sebagai negara demokrasi, religiusitas masyarakat AS kemudian juga berpengaruh terhadap politik dan pemerintahan AS. Hal tersebut juga membawa kelompok agama-kelompok agama yang ada di AS untuk turut serta mengambil peranan dalam pemerintahan AS, atau setidaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah AS.

Skripsi ini akan membahas mengenai kelompok agama dalam politik dan pemerintahan AS, khususnya bagaimana kelompok tersebut berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan AS. Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, penulis akan memfokuskan pada isu pernikahan sesama jenis yang dalam beberapa dekade terakhir menjadi salah satu isu penting di AS. Sebagian besar kelompok agama di AS, terutama kelompok agama mayoritas, menolak diakuinya pernikahan sesama jenis secara hukum. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan

oleh kelompok pro-LGBT, prinsip penolakan kelompok agama terhadap pernikahan sesama jenis kemudian menjadi terancam. Penolakan tersebut yang akan menjadi fokus utama dalam karya tulis ini, khususnya mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok agama untuk melindungi kelompoknya dari ancaman legalnya pernikahan homoseksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Selanjutnya, untuk membantu penulis mendapatkan gambaran yang jelas, penulis akan menggunakan konsep kelompok kepentingan sebagai kerangka pemikiran. Dalam konsep kelompok kepentingan tersebut, penulis kemudian akan memaparkan 4 metode atau cara yang digunakan oleh kelompok agama untuk menolak dan mencegah legalisasi pernikahan sesama jenis di AS, yaitu lobi, kampanye media massa, membangun jaringan politik melalui pemilu, dan demonstrasi.

## **PRAKATA**

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penolakan Kelompok Agama Terhadap Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat”. Sholawat serta salam, semoga senantiasa tetap tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Jember
2. Drs. M. Nur Hasan, M.Hum selaku dosen Pembimbing I dan Honest Dody Molasy, S.Sos., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang memberikan segenap waktu dan pemikiran untuk membimbing dan memberi arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu dalam proses akademik hingga penulis dapat menyelesaikan studi.
4. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 13 September 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
SKRIPSI.....	i
SKRIPSI.....	ii
PERSEMBAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN.....	v
SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN .....	vii
RINGKASAN .....	viii
PRAKATA.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB 1    PENDAHULUAN.....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
1.2.1    Batasan Materi .....	9
1.2.2    Batasan Waktu .....	9
1.3    Rumusan Masalah .....	10
1.4    Tujuan Penelitian.....	10
1.5    Kerangka Pemikiran.....	10
1.5.1    Kelompok Kepentingan .....	11
1.5.1.1    Lobi ( <i>Lobbying</i> ).....	16
1.5.1.2    Kampanye Media Massa .....	18

1.5.1.3	Pemilu (Membangun Jaringan Politik dalam Pemerintahan Amerika Serikat) .....	18
1.5.1.4	Demonstrasi.....	20
1.6	Argumen Utama .....	21
1.7	Metode Penelitian.....	21
1.7.1	Teknik Pengumpulan Data.....	21
1.7.2	Teknik Analisa Data .....	22
1.8	Sistematika Penulisan.....	22
<b>BAB 2</b>	<b>PROFIL DAN POLITIK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT.....</b>	<b>24</b>
2.1	Gambaran Umum Amerika Serikat.....	24
2.2	Politik dan Pemerintahan .....	26
2.2.1	Pemisahan Kekuasaan.....	28
2.2.2	<i>Check and Balance Mechanism</i> .....	34
2.2.3	<i>Federalism</i> .....	36
2.2.4	Supremasi Hukum Nasional .....	37
2.3	Pengambilan Keputusan.....	38
2.3.1	Legislatif.....	38
2.3.2	Eksekutif.....	41
2.3.3	Yudikatif.....	42
2.4	Pemerintahan Negara Bagian.....	45
<b>BAB 3</b>	<b>KELOMPOK KEPENTINGAN DI AMERIKA SERIKAT DALAM ISU-ISU MORAL DAN SOSIAL.....</b>	<b>50</b>
3.1	Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat .....	51
3.2	Sejarah dan Perjuangan Kelompok LGBT di Amerika Serikat .....	55
3.3	Kelompok Kepentingan Agama .....	63
3.4	Kelompok Agama dalam Isu Aborsi dan Kesejahteraan .....	71
3.4.1	Isu Aborsi.....	71
3.4.2	Kesejahteraan.....	76

BAB 4	UPAYA KELOMPOK AGAMA DALAM MENOLAK PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT .....	79
4.1	<i>Lobbying</i> .....	80
4.1.1	<i>Defense of Marriage Act (DOMA)</i> .....	81
4.1.2	<i>Federal Marriage Amendment (FMA) dan Marriage Protection Act (MPA)</i> .....	91
4.1.3	Kebijakan Negara Bagian .....	99
4.1.3.1	Vermont .....	99
4.1.3.2	Massachusetts.....	101
4.1.3.3	Negara Bagian pada Tahun 2015-2016 .....	107
4.2	<i>Mass Media Campaign</i> .....	115
4.3.1	Kampanye Dukungan Terhadap Penolakan Pernikahan Sesama Jenis.....	115
4.3.2	Kampanye dalam Ballot Negara Bagian: California <i>Prop. 8</i> ....	122
4.3	Membangun Jaringan dalam Pemerintahan Amerika Serikat Melalui Pemilu.....	127
4.3.1	Super PAC dan PAC: <i>Family Research Council</i> .....	129
4.3.2	Partai Politik: <i>Platform GOP</i> .....	137
4.3.3	Kandidat Presiden: Pemilu 2016.....	141
4.4	Demonstrasi.....	147
4.5	Keberhasilan Upaya Kelompok Agama dalam Menolak Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat .....	156
BAB 5	KESIMPULAN .....	161
	DAFTAR PUSTAKA .....	164
	LAMPIRAN .....	182
	Lampiran 1. Mekanisme Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Negara Bagian Amerika Serikat .....	182
	Lampiran 2. Jumlah PAC yang Digunakan Oleh FRC Pada Pemilu 2014 ....	184

Lampiran 3. Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat .....	187
Lampiran 4. Protes Kelompok Kristen di Puerto Rico .....	188
Lampiran 5. <i>March for Marriage</i> 2013 .....	189
Lampiran 6. <i>March for Marriage</i> 2015 .....	192
Lampiran 7. <i>March for Marriage</i> 2016 .....	194

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Diagram Alur Perjuangan Kelompok Kepentingan .....	16
Gambar 2.1 Proses Pembuatan Undang-Undang di Amerika Serikat.....	39
Gambar 2.2 Cabang Pemerintahan AS.....	45
Gambar 2.3 Pemisahan Kekuasaan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian AS.....	46
Gambar 3.1 Persentase Pelobi Kelompok Agama di AS.....	68
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelobi Kelompok Agama di AS .....	70
Gambar 4.1 Peta Penolakan Pernikahan Sesama Jenis di AS .....	108
Gambar 4.2 Peta <i>Religious Bills</i> di AS.....	112
Gambar 4.3 Poster Kampanye Kelompok Agama untuk Mendukung <i>Prop. 8</i> .....	126

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Persentase Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis .....	5
Tabel 3.1 Tipe-Tipe Kelompok Kepentingan di AS .....	52
Tabel 3.2 Aktivitas Kelompok Katolik dalam Isu Aborsi .....	73
Tabel 4.1 Ballot untuk Menolak Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Negara Bagian AS .....	122
Tabel 4.2 <i>Independent Expenditure Faith Family Freedom Fund</i> pada Pemilu Pertengahan Tahun 2014.....	130
Tabel 4.3 PAC FRC Pada Pemilu 2016.....	135
Tabel 4.4 Kutipan Pidato dalam <i>March for Marriage</i> 2015.....	151

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Mekanisme Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Negara Bagian Amerika Serikat .....	182
Lampiran 2. Jumlah PAC yang Digunakan Oleh FRC Pada Pemilu 2014 .....	184
Lampiran 3. Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat .....	187
Lampiran 4. Protes Kelompok Kristen di Puerto Rico .....	188
Lampiran 5. <i>March for Marriage</i> 2013.....	189
Lampiran 6. <i>March for Marriage</i> 2015.....	192
Lampiran 7. <i>March for Marriage</i> 2016.....	194

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amerika Serikat (AS) dikenal sebagai negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara dan sistem pemerintahannya. Artinya, tidak ada satupun agama yang diakui sebagai agama resmi Amerika Serikat. Kebebasan Amerika Serikat dari agama tercermin dalam Amandemen Pertama Konstitusi AS yang menyebutkan bahwa setiap warga negara Amerika Serikat bebas menganut atau tidak menganut agama tertentu. Lebih lanjut, berdasarkan klausul yang telah ditetapkan, pemerintah (kongres) dilarang untuk mendirikan sebuah agama resmi melalui undang-undang ataupun memilih salah satu agama dibanding yang lain.<sup>1</sup> Meskipun secara eksplisit Amandemen Pertama Konstitusi AS hanya menyebutkan Kongres AS, namun Mahkamah Agung AS telah menetapkan bahwa klausul tersebut berlaku bagi seluruh pemerintah federal.<sup>2</sup>

Pada tahun 1996, pemerintah AS menetapkan sebuah undang-undang yang mengatur mengenai perkawinan di AS. Undang-undang tersebut dikenal dengan *Defense of Marriage Act* (DOMA) dan terdiri dari 3 bagian. Meskipun tidak menekankan pada agama atau kepercayaan tertentu, DOMA sejalan dengan berbagai kepercayaan atau agama yang ada di AS mengenai pernikahan, yaitu bahwa pernikahan merupakan ritual sakral penyatuan antara laki-laki dengan perempuan.

DOMA diusulkan oleh Bob Barr, seorang perwakilan Partai Republik dari negara bagian Georgia dan ditandatangani oleh Bill Clinton pada 21 September 1996. Bill Clinton yang merupakan presiden dari Partai Demokrat pada dasarnya merupakan orang yang terbuka dengan isu *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* LGBT. Keputusan Bill Clinton untuk menandatangani DOMA lebih merupakan tindakan

---

<sup>1</sup>Legal Information Institute. *First Amendment*, diakses dari [https://www.law.cornell.edu/wex/first\\_amendment](https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment), pada tanggal 12 April 2016

<sup>2</sup>*Ibid.*

politis dibandingkan keberpihakan kepada penentang hak kaum gay.<sup>3</sup> Namun demikian, Bill Clinton yang pada masa itu sedang melakukan kampanye untuk kembali terpilih menjadi Presiden AS justru menggunakan DOMA sebagai salah satu alat kampanyenya. Dalam sebuah iklan radio yang ditujukan kepada kelompok agama konservatif, Clinton mengkampanyekan penandatanganan undang-undang larangan pernikahan sesama jenis (DOMA).<sup>4</sup>

Lahirnya DOMA dilatarbelakangi oleh gugatan Nina Baehr (1993) terhadap konstitusi negara bagian Hawaii yang menolak untuk mengeluarkan surat nikah pasangan sesama jenis. Dalam gugatan tersebut, Mahkamah Agung Negara Bagian Hawaii memutuskan bahwa pasangan sesama jenis atau homoseksual di Hawaii memiliki hak yang sama atas surat keterangan menikah seperti halnya pasangan heteroseksual. Meskipun keputusan tersebut hanya berlaku di negara bagian Hawaii, keputusan tersebut justru membesarkan hati pendukung kaum gay sekaligus mendorong penentangan terhadap hak kaum gay untuk menikah diseluruh negara bagian Amerika Serikat.<sup>5</sup> Massalnya penolakan terhadap kaum gay pada masa itu diakibatkan oleh klausul “*Full Faith and Credit*” *Article IV Section I* pada Konstitusi AS. Klausul tersebut menyebutkan bahwa seluruh negara bagian di AS wajib mengakui hasil keputusan hukum di negara bagian lainnya. Dalam konteks pernikahan sesama jenis, karena keputusan negara bagian Hawaii mengakui eksistensi pernikahan homoseksual, maka negara bagian lain juga harus melakukan hal yang serupa.

Bagian kedua DOMA yang berjudul “*Power Reserved to The States*” menyebutkan bahwa tidak ada negara, wilayah, atau kepemilikan Amerika Serikat, atau suku Indian yang wajib mengakui undang-undang publik ataupun proses hukum di

---

<sup>3</sup>Peter Barker, 2013. Now in Defense of Gay Marriage, Bill Clinton, *New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2013/03/26/us/politics/bill-clintons-decision-and-regret-on-defense-of-marriage-act.html>, pada 12 April 2016

<sup>4</sup>New York Times. 1996. *Ad Touts Clinton's Opposing Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/10/15/us/ad-touts-clinton-s-opposing-gay-marriage.html>, pada 12 April 2016

<sup>5</sup>FindLaw.1993: *The Hawaii Case of Baehr v. Lewin*. Diakses dari [http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com\\_marriage\\_1993-the-Hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf](http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com_marriage_1993-the-Hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf) pada 12 April 2016

negara bagian lain yang mengakui pernikahan sesama jenis berdasarkan hukum di negara tersebut.<sup>6</sup> Artinya setiap negara bagian AS boleh (ataupun tidak) mengakui pernikahan sesama jenis pasangan yang telah menikah di negara tersebut ataupun negara bagian lainnya. Sementara bagian ketiga menjelaskan secara singkat definisi pernikahan menurut hukum federal AS: *'kata 'menikah'hanya berarti persatuan hukum antara satu lelaki dengan satu perempuan sebagai suami dan istri, dan kata 'pasangan' mengacu pada seseorang yang berlawanan jenis yang merupakan suami atau istri'*.<sup>7</sup>

Dengan berlakunya DOMA sedikit mengurangi kekhawatiran legalnya pernikahan homoseksual terutama bagi kalangan konservatif. Namun bagi aktivis gay, mereka terus berusaha memperjuangkan hak-hak mereka terutama melalui *judicial review* baik di tingkatan negara bagian ataupun tingkatan federal. Kasus *Lawrence v. Texas* contohnya, dimana Mahkamah Agung memutuskan bahwa undang-undang negara bagian Texas yang melarang sodomi homoseksual tidak konstitusional yang merupakan pelanggaran terhadap hak privasi.<sup>8</sup> Serta gugatan Edith Windsor pada 2013 terhadap pemerintah federal AS (dikenal dengan *Windsor v. United States*) yang menolak permintaan pengembalian dana pajak yang diwariskan oleh pasangannya, Thea Spyer.<sup>9</sup>

Selain itu, aktivis kaum gay juga melakukan aksi-aksi demonstrasi yang menuntut pemerintah melegalkan pernikahan homoseksual. Terutama pemerintah negara bagian yang diberikan kebebasan penuh untuk menentukan apakah negara tersebut mengakui atau menolak pernikahan sesama jenis. Kelompok *lobbyist* kaum gay juga bermunculan di Amerika Serikat, seperti *Gay And Lesbian Activist Alliance*

---

<sup>6</sup>U.S. Government Publishing Office. Diakses dari <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf> pada 12 April 2016

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Alex McBride. *Lawrence v. Texas (2003)*. Diakses dari [http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/future/landmark\\_lawrence.html](http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/future/landmark_lawrence.html) pada 12 April 2016

<sup>9</sup>Ryan J. Reilly dan Sabrina Siddiqui. 2013. Supreme Court DOMA Decision Rules Federal Same-Sex Marriage Ban Unconstitutional. *Huffington Post*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/supreme-court-doma-decision\\_n\\_3454811.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/supreme-court-doma-decision_n_3454811.html) pada 12 April 2016

(GLAA), kelompok *lobbyist* hak kaum gay kepada Dewan Perwakilan Washington DC<sup>10</sup>, serta *Garden State Equality* di New Jersey.<sup>11</sup>

Perjuangan aktivis gay yang terus menerus di berbagai negara bagian Amerika Serikat juga diiringi oleh penolakan berbagai kelompok yang menentang pernikahan homoseksual, termasuk kelompok keagamaan. Pada tahun 2008 contohnya, ketika California mengadakan referendum mengenai pelarangan pernikahan sesama jenis di California (*California proposition 8*).<sup>52</sup> persen masyarakat California menyatakan persetujuannya untuk melarang pernikahan sesama jenis di California. Jajak pendapat menunjukkan bahwa pandangan agama memiliki efek mendalam pada hasil tersebut, dengan:

- 84 persen orang yang menghadiri misa mingguan memilih ya
- 81 persen Evangelis memilih ya
- 65 persen Protestan memilih ya
- 64 persen umat Katolik memilih ya<sup>12</sup>

Selengkapnya, persentase penolakan kelompok agama di AS terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis pasca keputusan Mahkamah Agung dapat dilihat dalam tabel 1.1 berikut:

---

<sup>10</sup>GLAA. Diakses dari <http://www.glaa.org/aboutglaa.shtml> pada 12 April 2016

<sup>11</sup>Garden State Equality. Diakses dari <http://www.gardenstateequality.org/about/> pada 12 April 2016

<sup>12</sup>Matthai Kuruvila. 2008. *Catholics, Mormons allies to pass Prop. 8*. Diakses dari <http://www.sfgate.com/news/article/Catholics-Mormons-allied-to-pass-Prop-8-3185965.php> pada 12 April 2016

Tabel 1.1 Persentase Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis

<b>Do you favor or oppose allowing gay and lesbian couples to marry legally?</b>				
	<b>Favor</b>	<b>Oppose</b>	<b>Don't Know/Refused</b>	<b>N=</b>
All Americans	53	37	8	42,586
White evangelical Protestant	26	67	8	7,972
White mainline Protestant	59	32	9	6,406
Black Protestant	38	54	9	3,591
Hispanic Protestant	32	59	9	1,232
Other non-white Protestant	38	48	14	1,379
Catholic	58	32	10	8,946
<i>White Catholic</i>	59	32	8	5,878
<i>Hispanic Catholic</i>	56	31	13	2,287
<i>Other non-white Catholic</i>	56	33	10	781
Jehovah's Witness	11	72	16	271
Mormon	26	66	7	740
Orthodox Christian	61	32	7	217
Unitarian/Universalist	96	3	1	111
Jewish	76	20	4	765
Muslim	41	45	14	299
Buddist	85	11	4	290
Hindu	66	22	12	218
Unaffiliated	78	17	6	8,591

Sumber: PRRI. 2015. *Beyond Same-Sex Marriage: Attitudes on LGBT Nondiscrimination Laws and Religious Exemptions from the 2015 American Values Atlas*. Diakses dari <http://www.prii.org/research/beyond-same-sex-marriage-attitudes-on-lgbt-nondiscrimination-and-religious-exemptions-from-the-2015-american-values-atlas/>

Dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa meskipun dukungan terhadap legalisasi pernikahan kaum gay tinggi, penolakan terhadap hal tersebut juga masih ada yaitu 37%. Penolakan tersebut terutama datang dari kelompok agama Jehovah's Witness. Akan tetapi kelompok agama yang memiliki peran aktif dalam politik pemerintahan AS

adalah kelompok agama Protestan yang sebagian besar penganutnya menolak legalisasi pernikahan sesama jenis. Sementara beberapa kelompok agama minoritas seperti *Unitarian/Universalist*, Yahudi, dan Buddha, sebagian penganutnya mendukung hak kaum LGBT untuk menikah secara legal.

Kelompok yang menentang legalisasi pernikahan sesama jenis berpendapat bahwa hubungan homoseksual merupakan hubungan yang tidak bermoral, melawan kehendak Tuhan dan merusak tujuan seksualitas manusia, yaitu menghasilkan keturunan.<sup>13</sup> *The American Society for the Defense of Tradition, Family and Property* (TFP) yang memiliki afiliasi dengan kelompok Katolik, menyatakan bahwa pernikahan bukanlah buatan suatu negara tertentu. Sebaliknya, pernikahan merupakan ketetapan Tuhan dan siapapun yang melanggar tatanan moral alam yang ditetapkan oleh Tuhan adalah pendosa dan penentang Tuhan.<sup>14</sup>

Namun demikian, pada tahun 2015, aktivis gay kembali meraih kemenangan telak dalam kacamata hukum Amerika Serikat. Melalui *judicial review* di Mahkamah Agung AS, diputuskan bahwa DOMA tidak sesuai dengan konstitusi Amerika Serikat yang menjamin kebebasan individu. Keputusan tersebut juga mengakibatkan pengakuan terhadap pernikahan pasangan homoseksual di seluruh negara bagian Amerika Serikat tanpa terkecuali.<sup>15</sup>

Kemenangan aktivis gay dalam upaya legalisasi pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat menimbulkan berbagai reaksi. Presiden Barack Obama menyatakan bahwa hal tersebut merupakan ‘kemenangan untuk Amerika’ dimana ketika seluruh warga negara Amerika Serikat diperlakukan sama, semua lebih bebas.<sup>16</sup> Legalisasi

---

<sup>13</sup>Debate.org. *History and Debate of Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.debate.org/gay-marriage/> pada 12 April 2016

<sup>14</sup>TFPStudent Action. 2014. *10 Reasons Why Homosexual “Marriage” is Harmful and Must be Opposed*. Diakses dari [http://www.tfpstudentaction.org/politically-incorrect/homosexuality/10-reasons-why-homosexual-marriage-is-harmful-and-must-be-opposed.html#disqus\\_thread](http://www.tfpstudentaction.org/politically-incorrect/homosexuality/10-reasons-why-homosexual-marriage-is-harmful-and-must-be-opposed.html#disqus_thread) pada 12 April 2016

<sup>15</sup> Dan Roberts dan Sabrina Siddiqui. 2015. Gay marriage declared legal across the US in historic supreme court ruling. *The Guardian*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/society/2015/jun/26/gay-marriage-legal-supreme-court> pada 12 April 2016

<sup>16</sup> BBC News. 2015. *US Supreme Court rules gay marriage is legal nationwide*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33290341> pada 12 April 2016

pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat memang tidak lepas dari peran Obama yang pada tahun 2011 menetapkan bahwa DOMA tidak konstitusional.<sup>17</sup> Pernyataan Obama tersebut menunjukkan dukungan besar Gedung Putih terhadap keputusan Mahkamah Agung mengenai legalisasi pernikahan gay. Terlebih, pasca keputusan tersebut, Gedung Putih disinari dengan sinar pelangi, simbol kaum LGBT.

Secara teori keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS merupakan keputusan final yang harus ditaati oleh seluruh elemen pemerintah dan warga negara AS. Tetapi pada faktanya, setelah keputusan Mahkamah Agung AS, beberapa negara bagian justru menolak untuk mengimplentasikan keputusan Mahkamah Agung AS dengan menolak memberikan surat keterangan menikah bagi pasangan homoseksual. Dari 13 negara bagian AS yang belum melegalkan pernikahan sesama jenis, Texas dan Alabama secara tegas menyatakan penolakan terhadap legalisasi pernikahan homoseksual di dua negara tersebut. Sementara itu, negara bagian lainnya seperti Michigan, Mississippi, dan Missouri menyatakan akan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung AS dengan tangan terbuka.

Meskipun sebagian besar dari 13 negara bagian AS bersedia melaksanakan keputusan Mahkamah Agung AS, pemimpin masing-masing negara bagian menyatakan keberatannya terhadap keputusan tersebut. Jaksa Agung Texas, Ken Paxton menyatakan tidak ada pengadilan, hukum, aturan ataupun kata-kata yang dapat mengubah kebenaran bahwa pernikahan adalah penyatuan antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>20</sup> Sementara Robert J. Bentley, gubernur Alabama menyatakan bahwa ia tidak akan melegalkan pernikahan sesama jenis di Alabama dan bahwa keputusan Mahkamah Agung AS merupakan pemaksaan terhadap negara bagian Alabama, sebuah

---

<sup>17</sup>Charlie Savage dan Sheryl Gay Stolberg. 2011. In Shift, U.S. Says Marriage Act Blocks Gay Rights. *New York Times*. Diakses dari [http://www.nytimes.com/2011/02/24/us/24marriage.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/02/24/us/24marriage.html?pagewanted=all&_r=0) pada 12 April 2016

<sup>20</sup> Elliott C. McLaughlin. 2015. Most states to abide by Supreme Court's same-sex marriage ruling but... . *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2015/06/29/us/same-sex-marriage-state-by-state/> pada 12 April 2016

tirani federal.<sup>21</sup> Mereka menekankan pada keyakinan bahwa pernikahan adalah ketetapan Tuhan yang—seharusnya—dilaksanakan oleh pasangan lawan jenis dan bahwa Mahkamah Agung AS telah melampaui otoritasnya. Beberapa juga berjanji untuk melindungi mereka yang menolak untuk melayani pasangan sesama jenis—dalam pemerintahan ataupun institusi agama—melalui undang-undang negara bagian. Negara bagian Tennessee dan Arkansas contohnya.

Pasca dilegalkannya pernikahan sesama jenis diseluruh negara bagian AS, protes terhadap keputusan tersebut yang berdasarkan pada kepercayaan agama justru lebih besar daripada sebelumnya. Tokoh agama konservatif yang menentang pernikahan homoseksual mengatakan bahwa perjuangan mereka untuk menentang pernikahan sesama jenis tidak akan berakhir meskipun Mahkamah Agung AS telah menetapkan untuk melegalkannya.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan analisa lebih dalam mengenai kelompok agama di Amerika Serikat dan menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul:

**“PENOLAKAN KELOMPOK AGAMA TERHADAP PERNIKAHAN SESAMA  
JENIS DI AMERIKA SERIKAT”**

## **1.2 Ruang Lingkup Pembahasan**

Dalam sebuah penelitian ilmiah, ruang lingkup pembahasan sangat penting untuk membantu penulis tetap fokus pada tema atau objek penelitian. Lebih jauh, batasan-batasan atau ruang lingkup yang jelas dapat membantu penulis mempertegas apa yang ingin disampaikan melalui penelitiannya, serta membantu pembaca untuk lebih mudah memahami penelitian itu sendiri, seperti dijelaskan oleh Sutrisno Hadi (1948:8) mengatakan:

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Tamara Audi dan Jacob Gershman. 2015. Religious Groups Vow to Fight Gay Marriage Despite Supreme Court. *Wall Street Journal*. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/religious-groups-vow-to-fight-same-sex-marriage-despite-supreme-court-1435329751> pada 12 April 2016

*“Bagi penyelidik sendiri, penegasan batas-batas ini akan menjadikan pedoman kerja dan bagi orang lain kepada siapa saja laporan ini hendak disajikan atau diserahkan. Penegasan selalu berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya kerapuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalannya.”*

Terdapat dua ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini yaitu batasan materi dan batasan waktu.

### 1.2.1 Batasan Materi

Penulis membatasi materi penelitian pada reaksi penolakan kelompok agama terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di AS, dimana yang dimaksud kelompok agama dalam penelitian ini adalah kelompok kontra-legalisasi pernikahan sesama jenis yang berpegang teguh pada keyakinan agama sebagai rasionalisasi penolakannya. Selanjutnya penulis akan memaparkan upaya-upaya kelompok tersebut untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS dalam memperjuangkan penolakannya terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis. Semua materi tersebut yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan konsep kelompok kepentingan.

### 1.2.2 Batasan Waktu

Penulis membatasi materi penelitian pada reaksi penolakan kelompok agama terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis di AS, dimana yang dimaksud kelompok agama dalam penelitian ini adalah kelompok kontra-legalisasi pernikahan sesama jenis yang berpegang teguh pada keyakinan agama sebagai rasionalisasi penolakannya. Selanjutnya penulis akan memaparkan upaya-upaya kelompok tersebut untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS dalam memperjuangkan penolakannya terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis. Semua materi tersebut yang kemudian akan dianalisa dengan menggunakan konsep kelompok kepentingan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dijawab melalui pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu :

**Bagaimana upaya kelompok agama dalam menolak pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat dan sejauh mana keberhasilan upaya tersebut?**

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian berkaitan erat dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi fakta-fakta terkait peranan agama di Amerika Serikat, khususnya mengacu pada legalisasi pernikahan sesama jenis. Lebih jauh, melalui penelitian ini penulis berharap dapat menganalisa mengenai korelasi agama dengan kehidupan masyarakat serta politik dan pemerintahan di Amerika Serikat.

### **1.5 Kerangka Pemikiran**

Secara sederhana, fenomena legalisasi pernikahan sesama jenis di AS dapat dipandang dari dua sisi kelompok, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menolak. Penelitian ini menekankan pada analisa kelompok yang menolak berikut faktor-faktor yang mendorongnya, terutama dalam faktor agama. Sebelum menganalisa lebih jauh mengenai bagaimana faktor agama memotivasi kelompok tertentu untuk menolak legalisasi pernikahan homoseksual di AS, penulis memerlukan sebuah konsep pemikiran yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami fenomena tersebut. Konsep kelompok kepentingan menurut penulis merupakan salah satu konsep yang tepat untuk digunakan menganalisa fenomena penolakan legalisasi pernikahan sesama jenis di AS.

### 1.5.1 Kelompok Kepentingan

Seperti halnya konsep ilmu sosial lainnya, istilah kelompok kepentingan sangat luas dan tidak dapat didefinisikan secara konkrit. Mendefinisikan dan mengklasifikasikan kelompok-kelompok sungguh tidak mudah, karena tidak bakunya watak dari kelompok-kelompok dan keragaman bentuk-bentuk mereka.<sup>23</sup> Beberapa ahli sosial juga menawarkan berbagai pengertian yang berbeda sesuai dengan pemahamannya. Diantaranya:

- a. Kelompok kepentingan adalah organisasi swasta yang berusaha memengaruhi kebijakan publik dan memengaruhi perilaku pembuat keputusan politik.<sup>24</sup>
- b. Kelompok kepentingan adalah individu-individu yang menggabungkan diri menjadi suatu kelompok yang mengharapkan agar tuntutan mereka lebih didengar oleh pemerintah.<sup>25</sup>
- c. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa, pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik.<sup>26</sup>
- d. Kelompok kepentingan adalah salah satu mekanisme penting di AS dimana masyarakat dapat menyampaikan ide, kebutuhan, dan pandangannya kepada pemerintah terpilih.<sup>27</sup>
- e. Kelompok kepentingan adalah entitas non-negara yang berupaya untuk mempengaruhi pemerintah.<sup>28</sup>

---

<sup>23</sup> Andrey Heywod. 2014. *Politik*. Ahmad Lintang Lazuardi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 432

<sup>24</sup> Stephen Sussman. 2013. *Kelompok Kepentingan dan Pluralisme*. Dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (editor). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 87.

<sup>25</sup> Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 382-383

<sup>26</sup> Colin MacAndrews. *Kelompok Kepentingan dan Partai Politik*, dalam Mochtar Mas'ood dan Colin MacAndrews (editor) . 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hlm. 53

<sup>27</sup>R. Allen Hays. *The Role of Interest Group*. Diakses dari <http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/Demopaper/dmpaper9.html> pada 13 April 2016

<sup>28</sup> Richard Meissner. 2015. *Interest Groups, Water Politics and Governance: The Case of the Lesotho Highlands Water Project*. South Africa: Springer. Hlm. 8

- f. Kelompok kepentingan adalah sebuah badan terorganisir individu yang berbagi beberapa tujuan dan yang mencoba untuk mempengaruhi kebijakan publik.<sup>29</sup>

Dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki kepentingan tertentu yang bergabung untuk bersama-sama menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah atau pejabat publik. Tujuan dari kelompok kepentingan itu sendiri berbeda-beda sesuai dengan jenis kelompok dan kepentingannya. Sebagian besar adalah untuk mempengaruhi kebijakan publik yang berkenaan dengan kepentingan kelompok ataupun masyarakat luas.

Salah satu klasifikasi yang umum digunakan untuk membedakan antara jenis dasar kelompok kepentingan yaitu berdasarkan paparan Gabriel Almond dan G. Bingham Powell, yaitu: (1) kelompok kepentingan asosiasional; (2) kelompok kepentingan nonasosiasional; (3) kelompok kepentingan institusional; dan (4) kelompok kepentingan anomi.<sup>30</sup> Berikut penjelasannya:

- a. Kelompok kepentingan asosiasional

Kelompok kepentingan asosiasional adalah kelompok kepentingan yang memiliki struktur formal dengan tujuan-tujuan eksplisit yang konkrit. Kelompok kepentingan asosiasional memiliki nama khas, markas nasional, staf profesional, dan agenda politik terkait dengan karakteristik, tujuan, keyakinan, dan nilai-nilai kelompok itu sendiri.<sup>31</sup> Kelompok ini meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama, dan sebagainya.<sup>32</sup>

- b. Kelompok kepentingan nonasosiasional

---

<sup>29</sup> Jeffrey Berry. 1989. *The Interest Group Society*. Dalam R. Allen Hays. *The Role of Interest Group*. Diakses dari <http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/Demopaper/dmpaper9.html> pada 13 April 2016

<sup>30</sup>Gabriel Almond dan G. Bingham Powell. 1966. *Comparative Politics: A Development Approach*. Dalam Thomas M. Magstadt. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. Amerika Serikat: Wadsworth Cengage Learning. Hlm. 379

<sup>31</sup> Thomas M Magstadt. 2008. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. Amerika Serikat: Wadsworth Cengage Learning. Hlm. 379

<sup>32</sup>Colin MacAndrews. *Kelompok Op.Cit*. Hlm. 56

Kelompok kepentingan nonasosiasional tidak memiliki struktur formal yang resmi namun mencerminkan kepentingan ras, etnis, budaya, atau agama yang mampu berartikulasi kedalam kekuatan politik yang kuat pada situasi tertentu.<sup>33</sup> Kelompok kepentingan ini memiliki solidaritas yang kuat karena pada umumnya terbentuk atau melekat pada diri individu semenjak lahir. Secara teoritis, kegiatan kelompok nonasosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat belum-maju, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan dimana kelompok kepentingan yang terorganisir dan mengkhusus tidak ada atau masih lemah.<sup>34</sup>

c. Kelompok kepentingan institusional

Kelompok kepentingan institusional adalah kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer.<sup>35</sup> Kelompok kepentingan institusional akan memiliki peranan atau pengaruh yang besar dalam politik ketika kelompok tersebut memiliki hubungan yang erat dengan birokrat-birokrat yang menjabat dalam pemerintahan.

d. Kelompok kepentingan anomie

Kelompok kepentingan anomie terbentuk diantara unsur-unsur dalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika.<sup>36</sup> Individu-individu yang terlibat dalam kelompok ini memiliki perasaan frustrasi dan ketidakpuasan yang sama.<sup>37</sup> Meskipun hanya spontan dan seketika, kelompok kepentingan anomie dapat menjadi kekuatan kelompok yang *massive* apabila tingkat kepentingan atau permasalahan yang diusung mendesak. Apabila keresahan kelompok kepentingan ini tidak segera diatasi, maka masyarakat dapat memasuki keadaan anomie, yaitu situasi *chaos* dan *lawlessness* yang diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, tanpa

---

<sup>33</sup> Thomas M. Magstadt. 2008. *Understanding... Loc. Cit.*

<sup>34</sup> Colin MacAndrews. *Kelompok... Op. Cit.* Hlm. 55

<sup>35</sup> Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar... Op. Cit.* Hlm 388

<sup>36</sup> Colin MacAndrews. *Kelompok... Op. Cit.* Hlm. 54

<sup>37</sup> Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-Dasar... Op. Cit.* Hlm 387

diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum.<sup>38</sup> Salah satu contohnya adalah protes masyarakat AS menentang Perang Vietnam pada tahun 1960-an.

Tujuan kelompok kepentingan ataupun kelompok penekan bermacam-macam sesuai dengan jenis dan isu kepentingan yang dibawanya. Namun secara umum, tujuannya adalah untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut. Kebijakan merupakan hasil tawar-menawar dan kompromi antar kelompok dimana negara berperan sebagai wasit/juru pisahnya.<sup>39</sup> Sebelum kebijaksanaan-kebijaksanaan (kebijakan-kebijakan) dan tujuan-tujuan dapat ditetapkan, individu-individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, yaitu apa yang ingin mereka dapatkan dari politik.<sup>40</sup> Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan ini kemudian harus digabungkan menjadi alternatif-alternatif kebijakan.<sup>41</sup>

Sebelum memaparkan lebih jauh mengenai bagaimana kelompok-kelompok kepentingan mencapai tujuannya, perlu dipahami bahwa beberapa ahli membedakan kelompok kepentingan dengan kelompok penekan (*pressure group*). Richard Meissner menyatakan bahwa kelompok penekan memfokuskan kegiatan mereka utamanya dalam kebijakan pemerintah atau proses pemerintahan, sementara kelompok kepentingan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, proses pemerintahan, dan organisasi sosial lainnya melalui berbagai cara.<sup>42</sup> Kelompok penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk satu tujuan khusus dan setelah tujuan tercapai, maka mereka akan membubarkan diri.<sup>43</sup>

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Geoffrey Ponton dan Peter Gill.1993.*Introduction to Politics*. United Kingdom: Wiley-Blackwell. Hlm 134-135.

<sup>40</sup>Colin MacAndrews. *Studi Perbandingan Sistem Politik*, dalam Mochtar Mas'oe'd dan Colin MacAndrews (editor). 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah MadaUniversity Press. Hlm. 31

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup> Richard Meissner. 2015. *Interest Groups, ... Loc.Cit*

<sup>43</sup> Linda Rahwamati. 2008. "Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat".Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember. Hlm. 14

Meskipun demikian, beberapa ahli politik juga tidak membedakan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan. Hal tersebut hanya merupakan perbedaan istilah dengan makna yang sama. David Truman mendefinisikan kelompok kepentingan sebagai:

*“a shared-attitude group that makes certain claims upon other groups in society. If and when it makes its claim through or upon any of the institutions of government, it becomes a political interest groups.”*<sup>44</sup>

Kelompok tersebut juga sering dinamakan sebagai ‘kelompok kepentingan’ atau ‘pelobi’.<sup>45</sup> Milton C. Cummings dan David Wise juga menyatakan bahwa apapun istilah kelompok tersebut—entah kelompokkepentingan, kelompok penekan ataupun pelobi—tujuan mereka adalah sama, yaitu untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan pemerintah.<sup>46</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendapat Cummings dan Wise yang tidak membedakan kelompok kepentingan dengan kelompok penekan. Ada kalanya sebuah kelompok kepentingan menjadi kelompok penekan dan begitu pula sebaliknya, boleh jadi kelompok penekan kemudian menjadi kelompok kepentingan yang terus bertahan untuk mengawal dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan kepentingan kelompok tersebut. Kita menamakannya kelompok kepentingan ketika merasa klinis (*feeling clinical*), kelompok penekan ketika merasa genting, dan pelobi ketika kita melihat mereka bekerja di lima puluh satu ibukota.<sup>47</sup>

Untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi pemerintah, ada banyak jalur yang digunakan oleh kelompok kepentingan. Thomas M. Magstadt dalam *Understanding Politics Ideas, Institutions, and Issues*, menyatakan bahwa dalam mempengaruhi pejabat terpilih, kelompok kepentingan biasanya menggunakan tiga

---

<sup>44</sup>David Truman. 1951. *The Governmental Process*. Dalam William J. Keefe, dkk. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 238

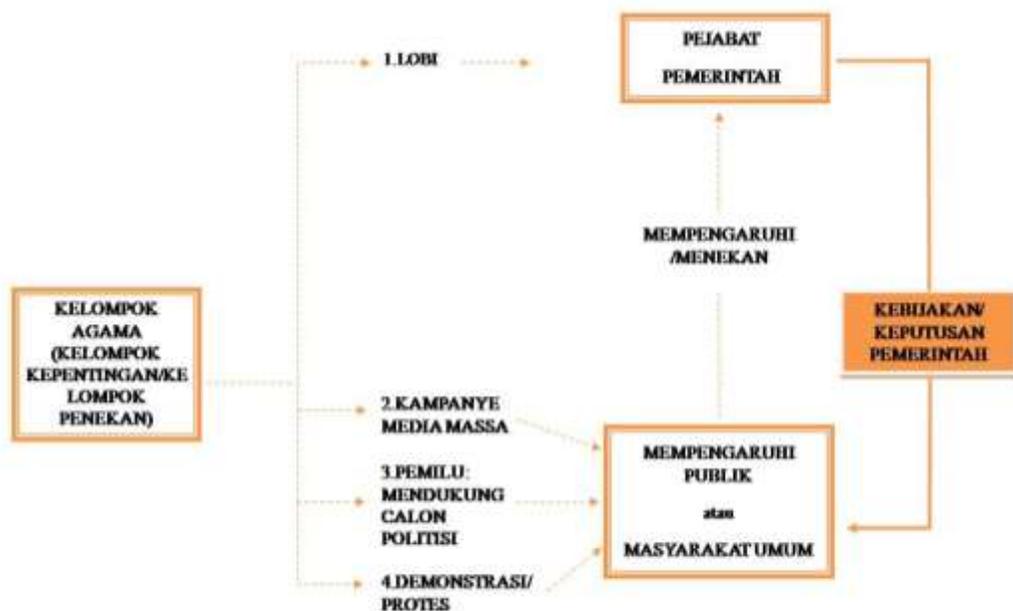
<sup>45</sup>William J. Keefe, dkk. 1983. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 238

<sup>46</sup>Milton C. Cummings, JR. dan David Wise. 1971. *Democracy Under Pressure: An Introduction to the American Political System*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc. Hlm. 200

<sup>47</sup>Clinton Rossiter. 1960. *Parties and Politics in America*, dalam William J. Keefe, dkk. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 238

cara utama, yaitu: (1) dengan pemilihan wakil terpilih yang dipercaya; (2) melalui akses terhadap pejabat terpilih; (3) melalui kampanye media massa. Sementara Mochtar Mas'oeed dan Colin Mac Andrews menyebutkan saluran kelompok kepentingan yaitu: demonstrasi dan tindak kekerasan, hubungan pribadi (dengan pejabat pemerintahan), perwakilan langsung, serta saluran formal dan institusi lain.

Di Amerika Serikat, bagaimana kelompok kepentingan mempengaruhi pemerintah dapat dijelaskan dalam alur berikut:



Gambar 1.1 Diagram Alur Perjuangan Kelompok Kepentingan

Dalam gambar 1.1 diatas, terdapat 4 jalur utama kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah, yaitu lobi, kampanye media massa, dukungan terhadap calon pejabat publik dalam pemilu, dan demonstrasi. Sebuah kelompok kepentingan dapat menggunakan satu ataupun lebih jalur-jalur tersebut. Selanjutnya penjelasan detail mengenai keempat jalur tersebut akan dipaparkan berikut.

#### 1.5.1.1 Lobi (*Lobbying*)

*Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.<sup>48</sup> Dalam literatur politik dan pemerintahan AS, *lobi* sering dibagi menjadi lobi langsung (*direct lobbying*) dan lobi tidak langsung (*indirect lobbying*). Namun yang dimaksud disini adalah lobi langsung, yaitudimana terdapat kontak langsung antara pelobi–kelompok kepentingan–dengan pejabat pemerintah.<sup>49</sup> Sementara lobi tidak langsung yang berupaya mempengaruhi pemerintah melalui opini publik akan dijelaskan dalam bentuk selanjutnya, kampanye media massa.

Pelobi berhubungan dengan berbagai kegiatan untuk mempengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Hal tersebut termasuk, dalam skala minimal, kegiatan dibawah ini:

- a. Berhubungan dalam rapat pribadi dengan pejabat pemerintah, termasuk penasihat presiden, untuk memberitahukan kepentingan pelobi. Apa yang disampaikan oleh perwakilan kelompok kepentingan dalam pertemuan tersebut akan menjadi dasar atau alasan bagi pejabat yang ditemui untuk berargumen dalam pemerintahan.
- b. Bersaksi didepan komite kongres untuk mendukung atau melawan perundang-undangan yang sedang dipertimbangkan oleh kongres.
- c. Bersaksi didepan agen pembuat peraturan eksekutif untuk mendukung atau melawan sebuah peraturan.
- d. Membantu legislator atau birokrat dalam mengkonsepkan undang-undang atau peraturan tertentu.
- e. Mengundang legislator ke acara-acara sosial. Pelobi merasa menghubungi pemerintah dalam acara informal merupakan salah satu cara yang efektif.
- f. Menyediakan informasi kepada anggota legislatif atau pejabat pemerintah lainnya.

---

<sup>48</sup> Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 16

<sup>49</sup>William J. Keefe, dkk. 1983. *American...Op.Cit*. Hlm. 258

g. Menyediakan nominasi untuk penunjukan federal dalam cabang eksekutif.<sup>50</sup>

#### 1.5.1.2 Kampanye Media Massa

Kampanye media massa dapat merupakan salah satu bentuk lobi tidak langsung, yaitu upaya untuk mempengaruhi pemerintah melalui pihak ketiga—yang bisa jadi merupakan konstituen, masyarakat umum, atau kelompok kepentingan lain.<sup>51</sup> Dengan menggunakan televisi, majalah dan iklan koran, dan surat langsung (*direct mailings*) kepada masyarakat umum dan penonton yang spesifik, kelompok kepentingan menciptakan iklim yang kondusif untuk tujuan-tujuannya.<sup>52</sup>

Dalam kampanye media massa, teknologi memiliki peranan yang sangat penting. Selain mudah dan murah, teknologi dapat menjangkau seluruh masyarakat. Hal ini menjadi sebuah alat yang sangat strategis untuk digunakan. Tidak hanya melalui televisi atau koran, kampanye media massa kini juga melalui internet yang juga memungkinkan kelompok kepentingan untuk: (1) menyampaikan informasi dan mempengaruhi opini publik; dan (2) mengirimkan petisi *online (e-petition)* terhadap pemerintah. *Change.org* contohnya. Selain itu, biasanya beberapa kelompok kepentingan juga menggunakan *website* untuk menyampaikan informasi atau kepentingannya sekaligus menjaring suara masyarakat.

#### 1.5.1.3 Pemilu (Membangun Jaringan Politik dalam Pemerintahan Amerika Serikat)

Pemilihan umum merupakan salah satu sarana demokrasi yang sangat krusial di Amerika Serikat. Momen ini juga sangat strategis bagi kelompok kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan mempengaruhi pejabat pemerintah yang mungkin terpilih kemudian. Apa yang dimaksud dengan pemilihan umum disini tidak terbatas dengan cara memberikan suara (*vote*) tetapi juga dalam memberikan bantuan kampanye. Di

---

<sup>50</sup>Barbara A. Bardes, dkk. 1998. *American Government and Politics Today: The Essentials*. United States: Wadsworth Publishing Company. Hlm. 139-240

<sup>51</sup>*Ibid.* Hlm. 244

<sup>52</sup>Milton C. Cummings, JR. dan David Wise. 1971. *Democracy ... Op.Cit.* Hlm. 206

sebagian besar negara bagian AS yang terdapat kelompok kepentingan skala besar, kandidat atau calon pejabat bertanding untuk dukungan kelompok tersebut selama masa kampanye.<sup>53</sup>

Selain itu, kelompok kepentingan juga terlibat dalam pendanaan kandidat yang bertanding dalam pemilu. Bahkan, dalam dua dekade terakhir, bentuk bantuan kampanye yang paling penting dari kelompok kepentingan adalah komite aksi kelompok kepentingan (PAC: *Political Action Committee*).<sup>54</sup> Hal ini merupakan salah satu bentuk yang menarik dari politik Amerika Serikat karena sebagian besar dana kampanye yang dimiliki oleh kandidat umumnya berasal dari kelompok kepentingan.<sup>55</sup>

Selain PAC, ada juga *Super PAC*. *Super PAC* merupakan bentuk baru PAC yang dibuat setelah keputusan Pengadilan Banding AS dalam kasus *Speechnow.org v. Federal Election Commission* pada tahun 2010.<sup>56</sup> Berbeda dengan PAC biasa, *Super PAC* dilarang memberikan bantuan dana secara langsung kepada calon pejabat publik. Dengan demikian, tidak ada batasan dana ataupun sumber dana yang dapat digunakan oleh *Super PAC*. Secara teknis, *Super PAC* dikenal dengan komite *independent expenditure-only* yang mengumpulkan dana tak terbatas dari perusahaan, *unions*, asosiasi dan insividu untuk mendukung atau menolak kandidat politik.<sup>57</sup>

*Federal Election Commission* mendefinisikan *independent expenditure* sebagai:

*“an expenditure for a communication "expressly advocating the election or defeat of a clearly identified candidate that is not made in cooperation, consultation, or concert with, or at the request or suggestion of, a candidate, a candidate’s authorized committee, or their agents, or a political party or its agents”*<sup>58</sup>

---

<sup>53</sup>Barbara A. Bardes, dkk. 1998. *American ... Loc.Cit.* Hlm. 240

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup>Selengkapnya mengenai PAC dan jumlah kontribusinya terhadap partai politik atau kandidat dapat dilihat di <https://www.opensecrets.org/pacs/> pada 15 April 2016

<sup>56</sup>Open Secret.org. *What is PAC?*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php> pada 13 April 2016

<sup>57</sup>Open Secret.org. *Super PACs*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/superpacs.php?cycle=2014> pada 13 April 2016

<sup>58</sup>Federal Election Commission. 2007. *Coordinated Communication and Independent Expenditures*. Diakses dari <http://www.fec.gov/pages/brochures/indexp.shtml#CC> pada 13 April 2016

Dengan demikian, cara yang digunakan oleh Super PAC adalah dengan membuat komunikasi massa yang mendukung atau menolak calon pejabat publik. Komunikasi massa tersebut dapat berupa iklan televisi, surat edaran, brosur, dan cara komunikasi lainnya.

Dalam memberikan bantuan baik berupa *human resource* untuk kampanye, dana, ataupun suara, kelompok kepentingan tidak memilih secara acak, melainkan dengan berbagai cara. Selain melalui debat calon seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok kepentingan juga dapat menggunakan permainan rating (*the ratings game*). Setiap tahun, kelompok kepentingan memilih mereka yang memberikan suara terhadap undang-undang yang dirasa penting bagi kelompok tersebut.<sup>59</sup> Selain memberi dukungan pada seorang kandidat, kelompok kepentingan juga dapat menjadi media penjangkauan kandidat dengan mencalonkan anggotanya. Umumnya, kelompok kepentingan memiliki kontrak politik dengan kandidat yang didukung atau dicalonkan. Kontrak politik tersebut dapat berupa bermacam-macam hal sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

#### 1.5.1.4 Demonstrasi

Pilihan terakhir yang digunakan oleh kelompok kepentingan apabila mereka tidak dapat menjangkau pemerintah adalah melalui demonstrasi. Demonstrasi dapat bertujuan untuk mempengaruhi atau menekan pemerintah mengenai sebuah keputusan tertentu atau dapat juga menjadi cara untuk mempengaruhi opini publik dan menjangkauan dukungan publik yang lebih luas.

Kebebasan masyarakat AS untuk melakukan demonstrasi (di Amerika lebih sering disebut dengan *protest* atau *peaceful assembly*) dijamin dalam Amandemen Konstitusi Pertama AS yang menyatakan:

*“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof: or abridging the freedom of*

---

<sup>59</sup>Barbara A. Bardes, dkk. 1998. *American ... Loc.Cit.* Hlm. 240

*speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”*<sup>60</sup>

## 1.6 Argumen Utama

Berdasarkan latar belakang dan konsep pemikiran diatas, argumen utama penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah kelompok agama yang menolak pernikahan sesama jenis di AS berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Amerika Serikat melalui berbagai cara seperti *lobbying* terhadap badan legislatif, demonstrasi dan kampanye-kampanye terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis, serta penolakan secara langsung melalui individu-individu yang menjabat di pemerintahan—baik pemerintahan federal maupun negara bagian—atas dasar agama. Kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok nonasosiasional maupun asosiasional yang mencerminkan kepentingan agama dan mampu mengartikulasikan nilai-nilai agama menjadi kekuatan politik untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah AS.

## 1.7 Metode Penelitian

### 1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu data-data yang berasal dari sumber yang telah ada sebelumnya. Data-data yang tercantum dalam penelitian ini berasal, di antaranya adalah dari:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Jember
- b. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- c. Situs internet
- d. Media Massa

---

<sup>60</sup>Andrew M. Winston. 2014. *Right to Peaceful Assembly: United States*. Diakses dari <https://www.loc.gov/law/help/peaceful-assembly/us.php> pada 15 April 2016

### 1.7.2 Teknik Analisa Data

Karya tulis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis data yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut, kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan.

### 1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menyusunnya menjadi beberapa bab yang saling berkaitan, yaitu:

#### **BAB 1 Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2 Profil dan Politik Pemerintahan Amerika Serikat**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai sistem politik dan pemerintahan AS. Sebagai referensi, paparan tersebut akan mengacu pada konstitusi AS yang mengatur sistem pemerintahan AS beserta wewenang dan mekanisme kerja sistem tersebut.

#### **BAB 3 Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan posisi kelompok kepentingan dalam pembuatan keputusan atau kebijakan pemerintah AS. Penulis juga akan sedikit memaparkan penelitian terdahulu mengenai bagaimana partisipasi kelompok kepentingan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah AS.

#### **BAB 4 Upaya Kelompok Agama dalam Menolak Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat.**

Dalam bab ini penulis akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu bagaimana upaya kelompok agama dalam menolak legalisasi pernikahan sesama

jenis di AS, dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah dijelaskan pada Bab 1. Selain itu, penulis juga akan mneuraikan hal-hal yang dicapai oleh kelompok agama melalui upaya-upaya yang telah dilakukan.

### **BAB 5 Kesimpulan**

Bab terakhir ini akan berisi kesimpulan mengenai penelitian ini.

## BAB 2 PROFIL DAN POLITIK PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT

### 2.1 Gambaran Umum Amerika Serikat

Amerika Serikat (AS) merupakan negara terbesar ketiga didunia dalam skala ukuran besar negara.<sup>1</sup> Terletak di Amerika Utara, di sebelah barat AS berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik di sebelah timurnya. Sementara di bagian utara AS berbatasan dengan Kanada dan di bagian selatan berbatasan dengan Meksiko. Sesuai dengan nama resminya, AS merupakan kumpulan atau perhimpunan dari negara-negara di wilayah Amerika Utara yang menggabungkan diri semenjak Deklarasi Kemerdekaan AS. Berawal dari 13 negara bagian, hingga saat ini AS memiliki 50 negara bagian dan 1 distrik khusus. Distrik tersebut dikenal sebagai *District of Columbia* atau Washington, D.C. Selain berfungsi sebagai ibu kota negara, Washington D.C juga merupakan pusat pemerintahan negara AS.

Dari kelima puluh negara bagian, dua negara bagian AS tidak terletak dalam wilayah yang sama dengan negara bagian lainnya. Kedua negara bagian tersebut adalah negara bagian Alaska dan negara bagian Hawaii. Negara bagian Alaska terletak di bagian barat laut Amerika Utara sedangkan negara bagian Hawaii merupakan sebuah pulau di pertengahan Pasifik.<sup>2</sup> Selain itu, AS juga memiliki lima wilayah berpenduduk dan sembilan wilayah tidak berpenduduk di wilayah Pasifik dan Karibia.<sup>3</sup>

Secara populasi, AS juga tercatat sebagai salah satu negara dengan populasi besar ketiga di dunia. Populasi tersebut beragam dengan orang-orang dari seluruh dunia yang mencari perlindungan dan cara hidup yang lebih baik.<sup>4</sup> Sepanjang sejarahnya, AS memang dikenal sebagai negara pelarian orang-orang yang mencari kebebasan.

---

<sup>1</sup> National Geographic Kids. *United States*. Diakses dari <http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-bridge.jpg> pada 15 April 2016

<sup>2</sup> Mapnall. Dalam *Map – United States*. Diakses dari [http://www.mapnall.com/en/Map-United-States\\_1072816.html](http://www.mapnall.com/en/Map-United-States_1072816.html) pada 13 April 2016

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>*Ibid.*

Masyarakat AS awal juga merupakan orang-orang Inggris yang meninggalkan negaranya dengan berbagai macam alasan, terutama kebebasan. Terbukanya AS kepada para imigran dari berbagai belahan dunia kemudian menjadikan AS sebagai salah satu negara dengan beragam etnis dan multikultural di dunia.

Didorong oleh doktrin *manifest destiny*, yaitu keyakinan bahwa AS ditakdirkan untuk melintasi benua, AS memulai ekspansi di Amerika Utara sepanjang abad ke-19. Pada akhir abad ke-19 AS juga memulai ekspansi ke wilayah Samudera Pasifik dan ekonominya mulai melambung.<sup>5</sup> Hingga saat ini Amerika Serikat memiliki perekonomian nasional terbesar di dunia. Selain karena faktor kelimpahan sumber daya alam dan produktivitas yang tinggi, sebagian besar perekonomian AS bergantung pada perdagangan internasional

AS terbagi dalam 6 wilayah besar, yaitu *New England*, *mid-Atlantic*, *the South*, *the Midwest*, *the Southwest* dan *the West*. Keenam wilayah tersebut memiliki ciri khas tersendiri, yaitu:

- a. *New England* (Connecticut, Maine Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, dan Vermont) merupakan tempat pelarian masyarakat Eropa yang mencari kebebasan beragama.<sup>6</sup>
- b. *Mid-Atlantic* (Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, dan Washington, D.C.) merupakan kawasan industri yang menjadi tujuan imigran-imigran Eropa.
- c. *The South* (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia, dan West Virginia) berdasarkan survey oleh Gallup, Inc., merupakan wilayah negara bagian yang paling religius.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup> Niraj Chockshi. 2015. *The Religious States of America, in 22 Maps*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2015/02/26/the-religious-states-of-america-in-22-maps/> pada 13 April 2016

- d. *The Midwest* (Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, South Dakota, dan Wisconsin) adalah wilayah dari negara-negara yang berbasis agrikultur dan dikenal dengan *nation's breadbasket*.<sup>8</sup>
- e. *The Southwest* (Arizona, New Mexico, Oklahoma, dan Texas) merupakan tempat bagi keajaiban alam di dunia dengan pemandangan rumput dan gurun yang indah.<sup>9</sup>
- f. *The West* (Alaska, Colorado, California, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, dan Wyoming) merupakan simbol dari semangat perintis AS.<sup>10</sup>

## 2.2 Politik dan Pemerintahan

Pada awal abad ke-20, masyarakat AS merasa bahwa mereka tidak membutuhkan hubungan dengan dunia luar atau negara manapun, sehingga setelah Perang Dunia I AS kembali ke kebijakan isolasionisme.<sup>11</sup> Dengan kebijakan tersebut, artinya AS menghindari keterlibatan dalam perselisihan atau konflik internasional apapun yang dapat memicu perang. Namun kebijakan tersebut berubah ketika Jepang menyerang angkatan laut AS di Pearl Harbor, Hawaii, pada 7 Desember 1941.<sup>12</sup> Semenjak serangan tersebut, AS mulai membuka diri, bergabung dengan negara-negara Eropa dalam Perang Dunia II serta terus menjalin hubungan luar negeri dengan berbagai negara di dunia hingga AS menjadi salah satu negara yang memiliki peranan penting dalam skala global.

Dalam kebijakan publiknya, AS menganut sistem liberal demokrasi yang sangat menjunjung tinggi nilai kebebasan individu. Dua hal yang menginspirasi nilai-nilai

---

<sup>8</sup>National Geographic Kids. *United States*. Diakses dari <http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-bridge.jpg> pada 1 Mei 2016

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>*Ibid.*

<sup>11</sup> BBC. *The USA and The Wider World*. Diakses dari [http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/tch\\_wjec/usa19292000/3foreignpolicy1.shtml](http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/tch_wjec/usa19292000/3foreignpolicy1.shtml)

<sup>12</sup>*Ibid.*

kebebasan individu AS yaitu pengaruh filsuf hak natural<sup>13</sup> serta pengaruh Kristen protestan. Filsuf hak natural percaya bahwa manusia pernah hidup dalam keadaan alami dimana manusia memiliki kebebasan penuh atas dirinya. Tetapi, keadaan alami juga mengandung kesengsaraan dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh kebebasan manusia itu sendiri. Maka dari itu, untuk bertahan hidup, manusia menjalin kontrak sosial atau bersatu dalam kedaulatan, sepakat untuk meninggalkan beberapa kebebasan tertentu tetapi tanpa meninggalkan hak fundamental seperti: hak hidup, hak untuk berkespresi, dan hak memiliki properti.<sup>14</sup> Sementara pengaruh Kristen protestan juga masih mempengaruhi kehidupan AS dengan kepercayaan bahwa diatas segala-galanya, manusia merupakan individu yang memiliki kebebasan yang tidak dapat dikekang oleh siapapun. Kebebasan tersebut juga tercermin dalam sistem ekonomi dimana setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan ekonomi, memperkaya dirinya dan mengejar kebahagiaan.

Namun demikian, meskipun AS dibangun atas dasar kebebasan, AS juga menyadari pentingnya aturan untuk mencegah kebebasan yang tidak terkontrol dan meminimalisir keadaan natural yang mengerikan. Aturan-aturan tersebut digambarkan dalam konstitusi AS yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai bentuk politik dan pemerintahan AS. Terdiri atas satu pembukaan, 7 pasal dan 27 amandemen, konstitusi AS menyebutkan pemisahan dan wewenang antara badan-badan pemerintah AS.<sup>15</sup> Selengkapnya, Richard J.Hardy menyebutkan ciri dasar konstitusi AS yaitu pemisahan kekuasaan, *check and balances*, *federalism*, dan supremasi hukum nasional.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Richard J. Hardy. 2013. *Pembentukan Sistem Politik Amerika*. Dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (editor). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 1101.

<sup>14</sup> *Ibid.*, Hlm. 1101-1102.

<sup>15</sup> Selengkapnya mengenai Konstitusi Amerika Serikat dapat dilihat di <http://constitutioncenter.org/media/files/constitution.pdf>

<sup>16</sup> Richar J. Hardy. 2013. *Pembentukan ... Op.Cit.* Hlm.1112-1114.

### 2.2.1 Pemisahan Kekuasaan

Latar belakang pemisahan kekuasaan AS dalam konstitusinya dapat ditelusuri pada para pendiri negara AS. James Madison, salah satu pendiri AS, akrab dengan konsep pemisahan kekuasaan Montesquieu (1748/1989) dan keharusan untuk mencegah kepentingan siapapun menjadi terlalu kuasa.<sup>17</sup> Pemisahan kekuasaan mengacu pada pembagian tanggung jawab pemerintah dalam cabang yang berbeda untuk membatasi salah satu cabang dari menjalankan fungsi cabang lainnya.<sup>18</sup>

Cabang-cabang yang dimaksud dalam pemisahan kekuasaan di AS yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Setiap badan tersebut memiliki kerangka kerja masing-masing yang terpisah namun masih dalam satu kerangka demokrasi. Karena dibatasi untuk berfungsi secara spesifik, maka lembaga-lembaga pemerintahan yang berbeda itu mengembangkan keahlian dan kebanggaan akan peran masing-masing.<sup>19</sup>

#### a. Legislatif

Dalam *Article I, Section I* Konstitusi AS menyebutkan : ‘semua kekuasaan legislatif harus diberikan kepada Kongres AS, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (HOR)’. *Section* selanjutnya juga mengatur mengenai syarat-syarat anggota Senat dan HOR, mekanisme pemilihan Senat dan HOR, serta tugas-tugasnya.

Secara luas, berikut wewenang Kongres dalam *Article I* Konstitusi AS:

1. Mengadakan dan memungut pajak
2. Meminjam uang untuk keuangan rakyat
3. Membuat undang-undang dan peraturan-peraturan untuk mengatur perdagangan di antara negara-negara bagian dan dengan negara-negara asing
4. Membuat peraturan-peraturan yang seragam untuk naturalisasi (perwarganegaraan) warga asing

---

<sup>17</sup>*Ibid.* Hlm. 1112

<sup>18</sup> NCSL. *Separation of Powers – An Overview*. Diakses dari <http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx> pada 1 Mei 2016

<sup>19</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*. Hlm. 43.

5. Membuat mata uang, mencantumkan nilainya, dan menangani hukuman untuk para pemalsu uang
6. Menetapkan standar untuk bobot dan langkah-langkah atau tindakan
7. Membentuk undang-undang kepailitan bagi negara secara keseluruhan
8. Mendirikan kantor-kantor pos dan jalur pos
9. Mengeluarkan hak-hak paten dan hak cipta
10. Menghukum pelaku pembajakan
11. Menyatakan perang
12. Meningkatkan dan mendukung militer/tentara
13. Membentuk Angkatan Laut
14. Mengerahkan wajib militer untuk menegakkan undang-undang federal, menekan pelanggaran hukum atau melawan invasi
15. Membuat semua undang-undang ditempatkan di pusat pemerintahan (Washington, D.C)
16. Membuat semua undang-undang menjadi penopang ditegakkannya konstitusi<sup>20</sup>

Sementara hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Kongres yaitu:

1. Menunda perintah *habeas corpus*—kewajiban untuk mengajukan mereka yang dituduh melakukan kejahatan kemuka pengadilan atau hakim sebelum dihukum—kecuali karena terjadi pemberontakan atau invasi
2. Menetapkan undang-undang yang menyalahkan atau menghukum orang lain karena kejahatan atau melakukan tindakan yang tidak sah tanpa proses pengadilan
3. Menetapkan undang-undang retroaktif yang menetapkan suatu tindakan tertentu sebagai tindak kejahatan
4. Mengadakan pemungutan pajak langsung kepada penduduk, kecuali jika berdasarkan pada sensus yang telah dilaksanakan

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, Hlm. 83-84

5. Pajak untuk barang-barang ekspor dari salah satu negara bagian
6. Memberikan pelayanan khusus yang menguntungkan dalam perdagangan atau perpajakan bagi pelabuhan-pelabuhan di negara bagian manapun atau untuk kapal-kapal yang digunakan mereka
7. Memberi gelar kebangsawanan<sup>21</sup>

Dalam hal perundang-undangan, cabang legislatif memiliki peranan terdepan, yaitu membuat dan mengesahkan undang-undang. *Article I* Konstitusi AS memberikan kekuasaan tersebut kepada kedua dewan, HOR maupun Senat, yang merupakan hasil ‘*Great Compromise*’ dengan tujuan untuk menyeimbangkan efek dari mayoritas dengan kepentingan negara.<sup>22</sup> Selengkapnya mengenai mekanisme pembuatan undang-undang di AS akan dijelaskan dalam subbab berikutnya yang akan dikaitkan dengan mekanisme pengambilan keputusan dua cabang lainnya.

b. Eksekutif

Cabang Eksekutif AS, biasa disebut dengan Lembaga Kepresidenan, dipimpin oleh seorang presiden yang memiliki kekuasaan penuh dalam cabang eksekutif. Dalam menjalankan tugas selama masa jabatannya, Presiden AS dibantu oleh Wakil Presiden AS yang dipilih bersamaan dengan Presiden AS, serta Kabinet Presiden. Wakil Presiden AS bertugas untuk membantu presiden dan menggantikannya apabila presiden sedang dalam keadaan tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sementara Kabinet Presiden berfungsi sebagai penasihat Presiden AS dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan tata cara pemilihan dan persyaratan anggota Kongres AS, tata cara pemilihan Presiden AS juga diatur secara jelas dalam konstitusi AS *Article II*:

*“The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice President, chosen for the same Term,..”*

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 84

<sup>22</sup> Congress.Gov. *The Legislative Process*. Diakses dari <https://www.congress.gov/legislative-process> pada 1 Mei 2016

Uniknya, berbeda dengan negara demokrasi lain yang pada umumnya menggunakan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, pemimpin negara AS tidak serta merta hanya dipilih oleh rakyat AS. Berdasarkan konstitusi AS, presiden dipilih oleh sebuah badan unik yang bernama *electoral college*.<sup>23</sup> Sistem pemilihan presiden melalui *electoral college* dianggap sebagai sistem yang sesuai karena menurut para penyusun Konstitusi AS, *electoral college* merupakan sekelompok orang bijak yang memiliki pengetahuan luas dengan penilaian terbaik.<sup>24</sup> *Electoral College* itu sendiri beranggotakan 538 pemilih (*electors*) yang berasal dari setiap negara bagian AS serta *District of Columbia*, dan untuk menjadi presiden, seorang calon harus mendapatkan 270 suara dari total 538.<sup>25</sup>

Namun demikian, sebelum dipilih oleh *electoral college*, seorang bakal calon harus melakukan kampanye dan memenangkan suara terbanyak di setiap negara bagian di AS. Bakal calon itu sendiri dapat berasal dari partai besar di AS—Partai Republik atau Partai Demokrat—atau juga bisa merupakan bakal calon independen yang memiliki kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan bakal calon-bakal calon dari partai di AS. Bakal calon yang diusung oleh partai bisa jadi merupakan anggota partai atau bisa pula seseorang yang diajukan oleh kelompok kepentingan di AS yang memiliki afiliasi dengan partai tersebut. Selain itu, bakal calon yang berasal dari anggota partai juga bisa mendapat dukungan dari kelompok kepentingan tertentu yang merasa memiliki tujuan yang sama dengan bakal calon.

Selain sebagai kepala cabang eksekutif, Presiden AS juga sekaligus berperan sebagai pemimpin negara AS dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata AS.<sup>26</sup> Presiden AS bertanggung jawab untuk mengeksekusi dan melaksanakan undang-

---

<sup>23</sup> William J. Keefe, dkk. 1983. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 319

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> U.S Electoral College. *What is Electoral College?*. Diakses dari <http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html> pada 1 Mei 2016

<sup>26</sup> The White House: President Barack Obama. *The Executive Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch> pada 1 Mei 2016

undang yang telah disahkan oleh Kongres AS.<sup>27</sup> Namun, Presiden AS juga mendapatkan hak untuk memveto undang-undang yang telah disetujui Kongres AS. Apabila undang-undang tersebut diveto oleh presiden, maka undang-undang tersebut tidak dapat disahkan dan gagal dalam proses menjadi undang-undang.

Selama masa jabatannya, Presiden AS memimpin lima belas departemen eksekutif untuk melaksanakan administrasi sehari-hari pemerintah federal.<sup>28</sup> Kelima belas departemen tersebut bekerja bersama lembaga lainnya yang bukan merupakan bagian Kabinet AS tetapi berada dibawah otoritas penuh Presiden AS, seperti CIA dan Badan Perlindungan Lingkungan.<sup>29</sup> Masing-masing departemen eksekutif dipimpin oleh anggota Kabinet Presiden AS yang ditunjuk langsung oleh AS. Selain memiliki wewenang untuk memilih kepala departemen eksekutif, Presiden AS juga berwenang untuk menunjuk lebih dari 50 komisi federal independen, hakim federal yang mengepalai cabang yudikatif, duta besar, dan anggota kantor federal lainnya.<sup>30</sup>

Keleluasaan Presiden AS untuk memveto undang-undang dari cabang legislatif serta wewenang untuk menunjuk cabang yudikatif seringkali dimaknai dengan kekuasaan cabang eksekutif yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari mekanisme *check and balances* yang melengkapi konsep pemisahan kekuasaan di AS. Selengkapnya mekanisme *check and balances* akan diuraikan setelah penjelasan mengenai cabang yudikatif berikut.

### c. Yudikatif

Cabang ketiga dari pemerintah federal adalah yudikatif, yang terdiri dari suatu sistem peradilan yang tersebar diseluruh negara, dipimpin oleh Mahkamah Agung AS.<sup>31</sup> Dibawah Mahkamah Agung, terdapat 13 pengadilan banding, 94 pengadilan distrik, dan dua pengadilan yurisdiksi khusus.<sup>32</sup> Berbeda dengan cabang legislatif dan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. *Garis ... Op.Cit.* Hlm. 96

<sup>32</sup>*Ibid.*

eksekutif yang dipilih oleh rakyat, cabang yudikatif ditunjuk oleh Presiden AS dan harus disetujui oleh Kongres AS. Lama jabatan hakim-hakim federal tidak terbatas seperti di cabang-cabang pemerintahan lainnya. Para hakim tersebut dapat menduduki jabatannya hingga meninggal, pensiun atau mengundurkan diri. Selain itu, konstitusi AS juga melindungi independensi pengadilan dengan syarat bahwa para hakim federal memegang jabatan ‘selama berkelakuan baik’. Namun, hakim-hakim federal tersebut juga dapat dikenai *impeachment* oleh HoR dengan persetujuan Senat AS.<sup>33</sup>

Mahkamah Agung mempunyai hak yuridis asli hanya dalam dua macam kasus: yang melibatkan orang-orang penting asing dan yang melibatkan negara bagian.<sup>34</sup> Namun demikian, dalam praktek dan perkembangannya, Mahkamah Agung juga bertugas untuk menafsirkan makna hukum, memutuskan apakah sebuah hukum sesuai dengan ketentuan fakta-fakta tertentu, atau memutuskan bagaimana hukum harus diterapkan.<sup>35</sup> Sebagai pintu terakhir dan tertinggi, Mahkamah Agung juga seringkali menerima kasus-kasus banding dari pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.

Kekuasaan yang paling dikenal dalam Mahkamah Agung AS adalah *judicial review*, yaitu kekuasaan untuk memutuskan tindakan cabang legislatif atau yudikatif melanggar Konstitusi AS. Kekuasaan ini pada dasarnya tidak diatur dalam Konstitusi AS, tetapi ditetapkan oleh Mahkamah Agung AS sendiri melalui kasus *Marbury v. Madison* (1803).<sup>36</sup> Lebih detail, melalui kekuasaan *judicial review*, setiap pengadilan di AS, baik pengadilan tinggi atau rendah, dapat memutuskan bahwa undang-undang atau tindakan pemerintah tidak konstitusional dan karenanya tidak dapat dilaksanakan.<sup>37</sup> Pengadilan AS juga dapat memutuskan bahwa tindakan pejabat publik

---

<sup>33</sup> The White House: President Barack Obama. *The Judicial Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch> pada 3 Mei 2016

<sup>34</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. *Garis... Op. Cit.* Hlm. 97-98

<sup>35</sup> The White House: President Barack Obama. *The Judicial Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch> pada 3 Mei 2016

<sup>36</sup> United States Courts. *About the Supreme Court*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> pada 3 Mei 2016

<sup>37</sup> William J. Keefe, dkk. 1983. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 370

illegal, apabila setelah mempertimbangkan keputusan hukum di masa lalu, sang hakim memutuskan tindakan tersebut melawan hukum dasar AS (Konstitusi AS).<sup>38</sup>

Sebelum sebuah kasus sampai di Mahkamah Agung AS, pihak-pihak yang berkepentingan biasanya mengajukan kasusnya di pengadilan distrik terlebih dahulu. Apabila pihak tersebut tidak dapat menerima keputusan yang ditetapkan di pengadilan distrik, pihak tersebut diberikan hak untuk mengajukan gugatan banding di pengadilan banding AS. Seorang penggugat yang kalah dalam pengadilan banding federal, dapat mengajukan permohonan '*certiorari*', yang merupakan dokumen permohonan terhadap Mahkamah Agung untuk meninjau kembali kasus sang penggugat.<sup>39</sup>

Namun demikian, Mahkamah Agung tidak berkewajiban untuk melaksanakan *judicial review* bagi setiap kasus yang diajukan kepada Mahkamah Agung AS. Mahkamah Agung akan melakukan *judicial review* apabila kasus yang diajukan melibatkan prinsip hukum baru dan penting, atau ketika dua atau lebih pengadilan banding federal menafsirkan hukum berbeda.<sup>40</sup> Lebih dari 7.000 kasus yang diajukan setiap tahunnya, Mahkamah Agung AS hanya menyetujui sekitar 100-150 kasus.<sup>41</sup>

### 2.2.2 Check and Balance Mechanism

Adanya pemisahan kekuasaan antar badan pemerintah AS dilengkapi dengan mekanisme *check and balances* yang merupakan salah satu ciri khas—tidak hanya konstitusi AS, tetapi juga—dalam sistem pemerintahan AS dalam fungsi nyata. Melalui mekanisme *check and balances*, salah satu cabang pemerintahan AS diberikan

---

<sup>38</sup>*Ibid.* Hlm. 370-371

<sup>39</sup> United States Courts. *About the Supreme Court*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> pada 3 Mei 2016

<sup>40</sup> The White House: President Barack Obama. *The Judicial Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch> pada 3 Mei 2016

<sup>41</sup> United States Courts. *About the Supreme Court*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> pada 3 Mei 2016

wewenang konstitusional untuk menentang dua cabang lainnya sehingga menyulitkan kepentingan tertentu untuk mendapatkan kontrol terlalu besar dalam pemerintahan nasional.<sup>42</sup>

Berikut contoh bagaimana ketiga cabang pemerintahan AS bekerja sama dalam kerangka mekanisme *check and balances*:

- a. Cabang legislatif membuat undang-undang, namun Presiden dalam cabang eksekutif dapat memveto undang-undang tersebut menggunakan hak veto Presiden
- b. Cabang legislatif membuat undang-undang, namun cabang yudisial dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak konstitusional
- c. Cabang eksekutif, melalui lembaga federal, memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan menjalankan undang-undang federal
- d. Presiden dapat memveto undang-undang yang dibuat cabang legislatif, tetapi dengan suara yang cukup, Kongres AS dapat mengalahkan veto tersebut
- e. Kongres AS memiliki kekuasaan untuk menyetujui nominasi pemerintah federal yang diajukan presiden, mengontrol anggaran cabang eksekutif, serta memberhentikan presiden
- f. Cabang eksekutif dapat mendeklarasikan *Executive Orders*, yaitu proklamasi pemaksaan hukum, tetapi cabang yudisial dapat menyatakan tindakan tersebut tidak konstitusional
- g. Cabang yudisial bertugas untuk menafsirkan undang-undang, tetapi disisi lain, cabang eksekutif (presiden) yang mencalonkan hakim Mahkamah Agung, hakim pengadilan banding, dan hakim pengadilan distrik
- h. Penunjukan calon hakim Mahkamah Agung, hakim pengadilan banding, dan hakim pengadilan distrik harus disetujui oleh cabang legislatif dan Kongres As

---

<sup>42</sup> Richar J. Hardy. 2013. *Pembentukan ... Op.Cit.* Hlm. 1112

dapat memberikan *impeach* kepada hakim-hakim yang sedang menduduki jabatannya<sup>43</sup>

### 2.2.3 *Federalism*

Pada mulanya, AS dibangun diatas perdebatan antara kaum federalis yang menginginkan pemerintahan nasional yang kuat dengan kaum anti-federalis yang sangsi pada pemerintahan persatuan. Solusi yang ditempuh oleh para *founding fathers* AS adalah dengan menciptakan sistem negara federal, yaitu sistem pemerintahan yang memisahkan kekuasaan menjadi dua level pemerintahan: nasional dan regional (negara bagian).<sup>44</sup> Tidak hanya menguatkan pemerintah federal di ibu kota negara, Konstitusi AS juga memberikan kekuasaan tertentu kepada pemerintah negara bagian. Dengan jaminan tersebut, kemudian menciptakan hubungan ‘berbagi’ kekuasaan, sehingga persatuan federal pada dasarnya menjadi ‘kerjasama’ (*partnership*).<sup>45</sup>

Penguatan pemerintahan federal dapat dilihat dalam *Article I* Konstitusi AS yang menjamin 17 kekuasaan Kongres AS.<sup>46</sup> Selain itu, pada *Article I Section 8* Konstitusi AS menyatakan bahwa Kongres AS memiliki kekuasaan “*to make all laws which shall be necessary and proper for carrying into execution the foregoing powers.*” Hal tersebut memberikan jaminan tersirat bagi kekuasaan pemerintah federal: kewenangan untuk mengambil tindakan yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Konstitusi AS tetapi mendukung tindakan yang ditegaskan.<sup>47</sup>

Sementara kekuasaan pemerintah negara bagian disebutkan dalam Amandemen ke-10 Konstitusi AS yang menyatakan bahwa, “kekuasaan yang tidak didelegasikan Konstitusi kepada Amerika Serikat, juga tidak dilarang Konstitusi untuk negara-negara

---

<sup>43</sup> Ben’s Guide. *Check and Balances*. Diakses dari <http://bensguide.gpo.gov/j-check-balance> pada 3 Mei 2016

<sup>44</sup> Thomas E. Patterson. 2003. *The American Democracy*. New York: McGraw-Hill. Hlm. 69

<sup>45</sup> William J. Keefe, dkk. 1983. *American ... Op.Cit.* Hlm. 44

<sup>46</sup> Thomas E. Patterson. 2003. *The ... Op.Cit.* Hlm. 73

<sup>47</sup> *Ibid.*

bagiannya, merupakan kekuasaan yang diserahkan kepada masing-masing negara bagian atau untuk rakyat.<sup>48</sup> Selain itu, pemerintah negara bagian wajib menghargai keputusan-keputusan di bagian lainnya. *Article IV, Section I* Konstitusi AS menyebutkan “*Full Faith and Credit*” diantara negara bagian, artinya bahwa setiap negara bagian diharuskan untuk menghargai ‘keputusan publik, dokumen, dan proses peradilan’ yang diambil di negara bagian lain.<sup>49</sup>

#### 2.2.4 Supremasi Hukum Nasional

Terlepas dari jaminan yang diberikan kepada negara-negara bagian oleh konstitusi, tidak dapat dipungkiri bahwa sejak berdirinya AS sudah ada upaya untuk memperkuat pemerintah federal secara progresif terhadap pemerintah negara bagian, tidak hanya melalui amandemen konstitusional tetapi juga melalui berbagai keputusan yang menafsirkan konstitusi di Mahkamah Agung federal.<sup>50</sup> Namun bagi para pendiri negara AS, penafsiran tersebut dipahami sebagai jalan keluar akan konflik periodik antara hukum negara bagian dengan hukum federal.

*“This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.”<sup>51</sup>*

Melalui *Article VI* diatas, Konstitusi AS secara tegas menyebutkan bahwa hukum negara bagian—termasuk termasuk konstitusinya—berada dibawah Konstitusi AS, sehingga pemerintah negara bagian dilarang membuat konstitusi ataupun undang-undang yang berlawanan dengan Konstitusi AS. Apabila terdapat undang-undang yang

---

<sup>48</sup>*Ibid*

<sup>49</sup> Benjamin Ginsberg, dkk. 2007. *We The People: An Introduction to American Politics*. New York: W.W. Norton & Company, Inc. Hlm. 80

<sup>50</sup> C.F. Strong. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Penerbit Nusa Media. Hlm. 147

<sup>51</sup>Legal Information Institute. *Article VI*. Diakses dari <https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi> pada 3 Mei 2016

berlawanan dengan konstitusi, pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh undang-undang negara bagian tersebut diberikan hak untuk mengajukan kasusnya kepada pengadilan-pengadilan di AS.

Selain berfungsi untuk menyelesaikan konflik antar hukum federal dengan hukum negara bagian, adanya supremasi hukum nasional yang diberikan kepada Mahkamah Agung AS juga berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak individu AS dan mencegah diskriminasi oleh pemerintah negara bagian. Melalui Amandemen ke-14 contohnya, yang melarang pemerintah negara bagian untuk: merampas hak hidup, kebebasan, atau hak untuk memiliki properti tanpa proses hukum; menyangkal untuk memberikan perlindungan yang sama kepada setiap warga negara dalam yurisdiksinya; dan mengurangi hak istimewa atau kekebalan warga negara AS.<sup>52</sup>

## **2.3 Pengambilan Keputusan**

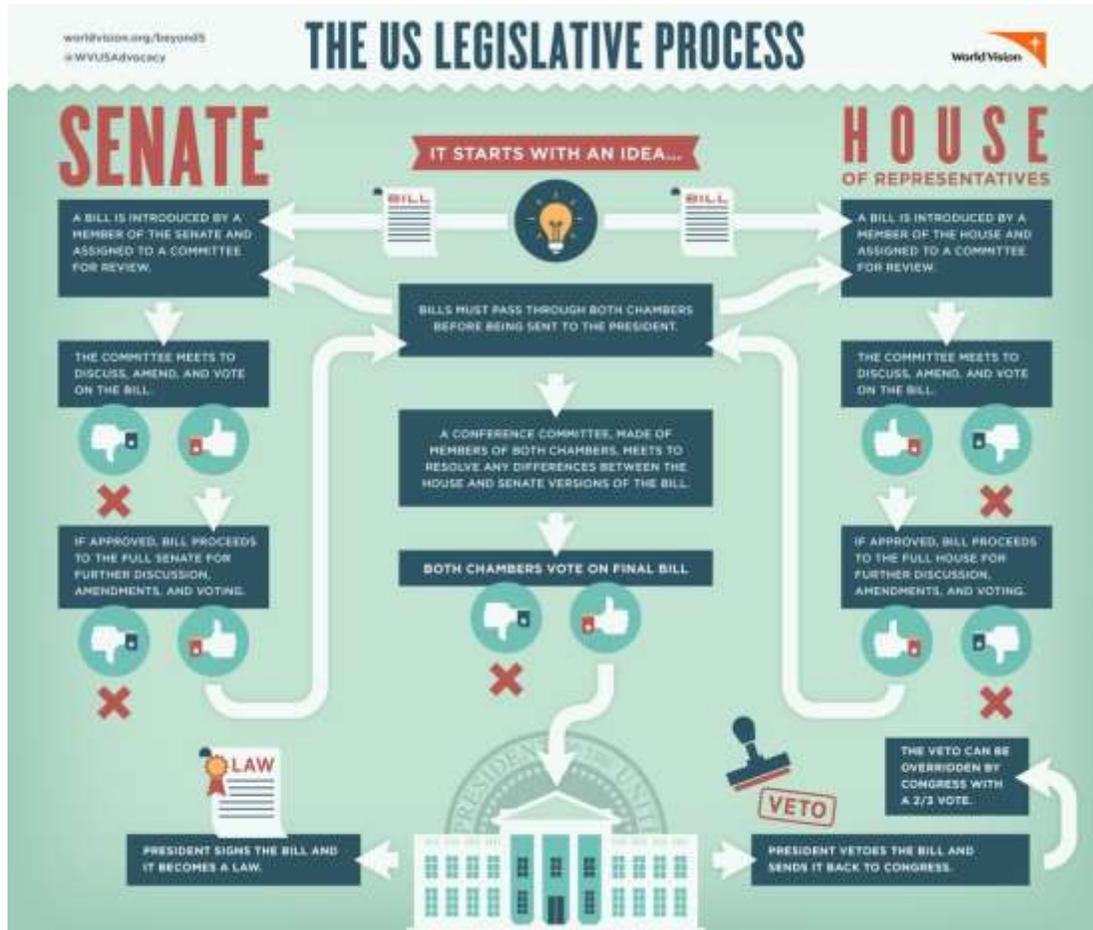
### **2.3.1 Legislatif**

Produk utama sebuah negara adalah aturan yang disepakati bersama baik oleh anggota pemerintahan maupun dengan seluruh lapisan masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan diikuti oleh sanksi apabila ada pelanggaran. Dalam pemerintahan AS, produk utama cabang pemerintahan berupa undang-undang, keputusan presiden, serta keputusan Mahkamah Agung. Dalam membuat kebijakan atau keputusannya, setiap cabang memiliki mekanisme yang berbeda-beda. Namun demikian, karena diikuti oleh mekanisme *check and balances*, keputusan ketiga cabang tersebut saling berkaitan satu sama lain.

Cabang legislatif yang memiliki tanggung jawab utama untuk membuat undang-undang, berikut gambaran mekanismenya:

---

<sup>52</sup> Thomas E. Patterson. 2003. *The ... Op.Cit.* Hlm. 79



Gambar 2.1 Proses Pembuatan Undang-Undang di Amerika Serikat

Sumber: World Vision. 2015. *U.S. Congress Passes Critical Legislation to Increase Child Protection Through Birth Certification*. Diakses dari <http://www.worldvision.org/news-stories-videos/birth-registration-child-protection>

Dari gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa langkah pertama dalam pembuatan undang-undang melalui Kongres AS adalah dengan mengenalkan rancangan undang-undang di HoR atau di Senat oleh anggota HoR atau Senat. Apabila rancangan undang-undang tersebut diusulkan di HOR dan telah mendapat persetujuan dari HoR, rancangan undang-undang tersebut akan diusulkan kepada Senat untuk didiskusikan lebih lanjut, diamandemen apabila diperlukan, dan kemudian divoting untuk disetujui atau ditolak. Begitu pula sebaliknya apabila rancangan undang-undang diusulkan di

Senat, rancangan undang-undang tersebut akan diusulkan kepada HoR dengan proses yang sama.

Apabila rancangan undang-undang sudah disetujui baik oleh HoR ataupun Senat, rancangan undang-undang tersebut akan dikirimkan kepada Presiden AS untuk ditandatangani. Sebaliknya, apabila rancangan undang-undang tidak disetujui oleh salah satu dewan, Kongres AS akan membentuk *conference committee* yang beranggotakan dari kedua dewan untuk mendiskusikan mengenai perbedaan pendapat di kedua dewan.

Setelah kedua dewan memutuskan untuk menyetujui, rancangan undang-undang akan dibawa kepada Presiden AS yang memiliki dua pilihan, yaitu menandatangani atau menolak melalui hak veto-nya. Dalam menggunakan hak veto-nya, presiden harus memiliki alasan kuat mengapa ia menolak meloloskan rancangan undang-undang tersebut. Apabila Presiden AS melakukan veto, Kongres AS dapat mengagalkan veto tersebut dengan persetujuan dua pertiga HoR maupun Senat. Namun apabila presiden memutuskan untuk menandatangani rancangan undang-undang, maka rancangan undang-undang tersebut secara otomatis akan menjadi undang-undang dan pemerintah AS (eksekutif) akan membuat aturan untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Apabila dalam waktu 10 hari kerja presiden tidak menandatangani atau memveto rancangan undang-undang yang dikirimkan oleh Kongres AS, rancangan undang-undang tersebut akan secara otomatis menjadi undang-undang yang sah. Ketika sebuah rancangan undang-undang telah menjadi undang-undang publik yang sah, badan eksekutif memiliki wewenang untuk menegakkan dan memastikan undang-undang tersebut dilaksanakan. Presiden AS juga memiliki hak untuk mengajukan rancangan undang-undang, apabila dibutuhkan, pada pertemuan tahunan antara eksekutif dengan legislatif.

### 2.3.2 Eksekutif

Setiap Presiden AS mengeluarkan perintahnya dalam bentuk yang berbeda-beda, Pada masa pemerintahan Barack Obama, misalnya, cabang eksekutif membuat tiga jenis keputusan, yaitu *Executive Orders*, perintah presiden (terkadang disebut memoranda), dan proklamasi.<sup>53</sup> Dari ketiga jenis keputusan tersebut yang selalu digunakan oleh Presiden AS adalah *Executive Orders*. *Executive Orders* merupakan keputusan formal Presiden AS untuk mengatur cabang eksekutif yang berhubungan dengan apa dan bagaimana cabang eksekutif melakukan tanggung jawabnya.<sup>54</sup> *Executive Orders* yang dibuat oleh Presiden AS tidak dapat memerlukan persetujuan dari Kongres AS. Namun apabila Kongres AS tidak menyetujui *Executive Orders*, Kongres AS dapat membuat undang-undang yang menentang *Executive Orders* tersebut. Cabang yudikatif juga dapat memutuskan *Executive Orders* tidak konstitusional melalui *judicial review*.<sup>55</sup> Selain itu, *Executive Orders* juga dapat dibatalkan oleh Presiden AS selanjutnya.

Dalam pengambilan keputusan, Presiden AS dibantu oleh Kabinet AS, yaitu badan penasehat yang beranggotakan Wakil Presiden AS dan kepala 15 departemen eksekutif.<sup>56</sup> Kelima belas departemen tersebut yaitu: Departemen Pertanian, Perdagangan, Pertahanan, Pendidikan, Energi, Kesehatan dan Layanan Manusia, Keamanan Dalam Negeri, Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Interior, Tenaga Kerja, Departemen Luar Negeri, transportasi, Keuangan, Departemen Urusan Veteran, dan Departemen Keadilan.<sup>57</sup> Ditetapkan dalam *Article II, Section II*, Konstitusi AS, peran Kabinet AS adalah untuk memberikan nasehat kepada Presiden AS berkaitan

---

<sup>53</sup> The White House: President Barack Obama. *Presidential Actions*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions> pada 3 Mei 2016

<sup>54</sup> Yale University Library. *Government Documents and Information: Executive Orders and Proclamations*. Diakses dari <http://guides.library.yale.edu/c.php?g=296022&p=1976184> pada 3 Mei 2016

<sup>55</sup> USA.gov. *How Laws Are Made and How to Research Them*. Diakses dari <https://www.usa.gov/how-laws-are-made> pada 3 Mei 2016

<sup>56</sup> The White House: President Barack Obama. *The Executive Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch> pada 3 Mei 2016

<sup>57</sup> *Ibid.*

dengan topik apapun yang dibutuhkan oleh Presiden AS sesuai dengan bidang masing-masing anggota.<sup>58</sup>

Selain dibantu oleh anggota kabinetnya, Presiden AS juga dibantu oleh *Executive Office of the President*. Badan ini pertama kali dibentuk pada 1939 oleh Presiden Franklin D. Roosevelt untuk menyediakan kebutuhan Presiden AS dalam menjalankan pemerintahan.<sup>59</sup> Anggotanya adalah penasihat terdekat Presiden AS yang diawasi oleh Kepala Staf Gedung Putih. Berbeda dengan anggota Kabinet AS yang ditunjuk oleh Presiden AS dengan persetujuan Senat, penunjukan anggota *Executive Office of the President* sepenuhnya wewenang Presiden AS.

### 2.3.3 Yudikatif

Sumber Untuk menjamin hak-hak individu terpenuhi dan memastikan bahwa kedua cabang pemerintahan AS—Kongres dan Lembaga Kepresidenan—tidak melanggar hukum dasar AS, cabang yudikatif melalui *judicial review*nya memiliki wewenang untuk memutuskan hal tersebut. Meskipun wewenang *judicial review* tersebut tidak disebutkan secara langsung dalam Konstitusi AS, tetapi Konstitusi AS menyebutkan bahwa Mahkamah Agung AS memiliki yurisdiksi asli dan yurisdiksi banding.<sup>60</sup> Yurisdiksi asli membatasi kasus-kasus yang diatangani oleh Mahkamah Agung pada kasus-kasus antar negara bagian atau pertentangan diantara duta besar dan menteri-menteri (anggota Kabinet AS) tingkat tinggi. Sementara yurisdiksi banding artinya Mahkamah Agung sebagai pengadilan federal tertinggi memiliki wewenang untuk meninjau keputusan pengadilan-pengadilan dibawahnya. Wewenang tersebut yang kemudian memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat AS untuk

---

<sup>58</sup> The White House: President Barack Obama. *The Cabinet*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet> pada 3 Mei 2016

<sup>59</sup> The White House: President Barack Obama. *The Executive Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch> pada 3 Mei 2016

<sup>60</sup> United States Court. *Supreme Court Procedures*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1> pada 3 Mei 2016

mengirimkan petisi terhadap Mahkamah Agung AS untuk melakukan *review* terhadap kasusnya di pengadilan federal di bawah Mahkamah Agung AS.

Tahap pertama dalam proses *judicial review* adalah pengiriman petisi kepada Mahkamah Agung AS oleh pihak yang berkepentingan dalam suatu kasus. Tujuan utama petisi tersebut adalah untuk meminta Mahkamah Agung AS memberikan *writ of certiorari*, yaitu perintah Mahkamah Agung AS kepada pengadilan federal dibawahnya untuk mengirimkan berkas kasus kepada Mahkamah Agung AS.<sup>61</sup> Tidak seluruh petisi yang dikirimkan kepada Mahkamah Agung AS bisa mendapatkan *writ of certiorari*. Untuk menentukan kasus mana yang layak untuk didengarkan, Mahkamah Agung AS menggunakan “*Rule of Four*”. Artinya, apabila empat dari sembilan hakim Mahkamah Agung AS setuju untuk mendengarkan kasusnya, maka Mahkamah Agung AS akan mengirimkan *writ of certiorari*.

Meskipun setiap hakim memiliki wewenang penuh untuk menentukan keputusannya sendiri, dalam mengambil keputusan tersebut hakim Mahkamah Agung AS dibantu oleh panitera (*Law Clerks*). Panitera merupakan individu-individu yang baru menyelesaikan sekolah hukum dan pada umumnya merupakan lulusan terbaik. Pada setiap masa jabatannya, setiap hakim diperbolehkan untuk memiliki 3 sampai 4 panitera yang tugasnya adalah melakukan penelitian hukum yang membantu hakim dalam memutuskan kasus apa yang harus diterima, membantu untuk menyiapkan pertanyaan selama tahap argumen lisan, dan membantu menyusun opini setelah proses *review* selesai.<sup>62</sup> Ketika hakim menerima berkas petisi yang diajukan, hakim akan meminta kepada panitera untuk meringkas berkas tersebut beserta rekomendasi apakah kasus tersebut layak diberikan *writ of certiorari* atau tidak.

Setelah Mahkamah Agung AS memutuskan untuk menerima kasusnya, Mahkamah Agung memberikan waktu kepada pemohon untuk menulis ringkasan mengenai kasus dan posisi pemohon yang tidak lebih dari 50 halaman.<sup>63</sup> Setelah

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> *Ibid.*

Mahkamah Agung AS menerima ringkasan tersebut, Mahkamah Agung AS juga memberikan kesempatan kepada pihak lain, yang dikenal sebagai responden, untuk mengajukan ringkasan responden mengenai kasus dari sudut pandang pihaknya.<sup>64</sup> Ketika masing-masing pihak telah memberikan ringkasannya, Mahkamah Agung AS memberikan masing-masing pihak untuk memberikan ringkasan mengenai respon terhadap ringkasan posisi masing-masing.

Selanjutnya adalah tahap argumen lisan (*oral arguments*). Dalam tahap ini Mahkamah Agung AS mendengarkan argumentasi lisan pihak-pihak yang bersengketa. Setiap pihak memiliki waktu 30 menit untuk mempresentasikan kasusnya di hadapan para hakim Mahkamah Agung AS. Namun demikian, para hakim Mahkamah Agung AS cenderung menggunakan forum argumen lisan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang dikembangkan dari ringkasan pihak-pihak yang berkepentingan pada tahap sebelumnya.<sup>65</sup> Apabila salah satu pihak yang bersengketa adalah pemerintah AS, pemerintah AS akan diwakili oleh pengacara agung (*The Solicitor General*) untuk mempresentasikan kasusnya.

Tahap selanjutnya setelah argumen lisan adalah rapat hakim (*Justice' Conference*). Dalam tahap ini para hakim Mahkamah Agung AS memutuskan mengenai kasus yang telah diperdebatkan selama argumen lisan. Untuk memutuskan mengenai sebuah kasus, setiap hakim akan kembali meminta pendapat dari para paniteranya. Namun demikian, dalam ruang rapat hakim, tidak diperbolehkan ada pihak selain hakim yang hadir. Dalam mengambil keputusan, masing-masing hakim memiliki satu suara untuk menyetujui atau menolak keputusan pengadilan dibawahnya. Setelah keputusan diperoleh, Kepala Hakim Mahkamah Agung AS akan memerintahkan salah satu hakim yang memilih mayoritas (yang menyetujui ataupun menolak) untuk menuliskan opininya mengenai kasus yang dibahas yang nantinya akan dipublikasikan kepada publik AS.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid.*

Dari uraian pengambilan keputusan ketiga cabang pemerintahan federal diatas, dalam hal perundang-undangan, ketiga cabang memiliki peranan terpisah namun berkaitan satu sama lain. Cabang legislatif memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, cabang eksekutif memiliki wewenang untuk menjalankan aturan melalui perintah eksekutifnya, dan cabang yudikatif memiliki wewenang untuk memastikan segala aturan dan tindakan pemerintah AS tidak bertentangan dengan Konstitusi AS. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar 2.2 berikut ini:



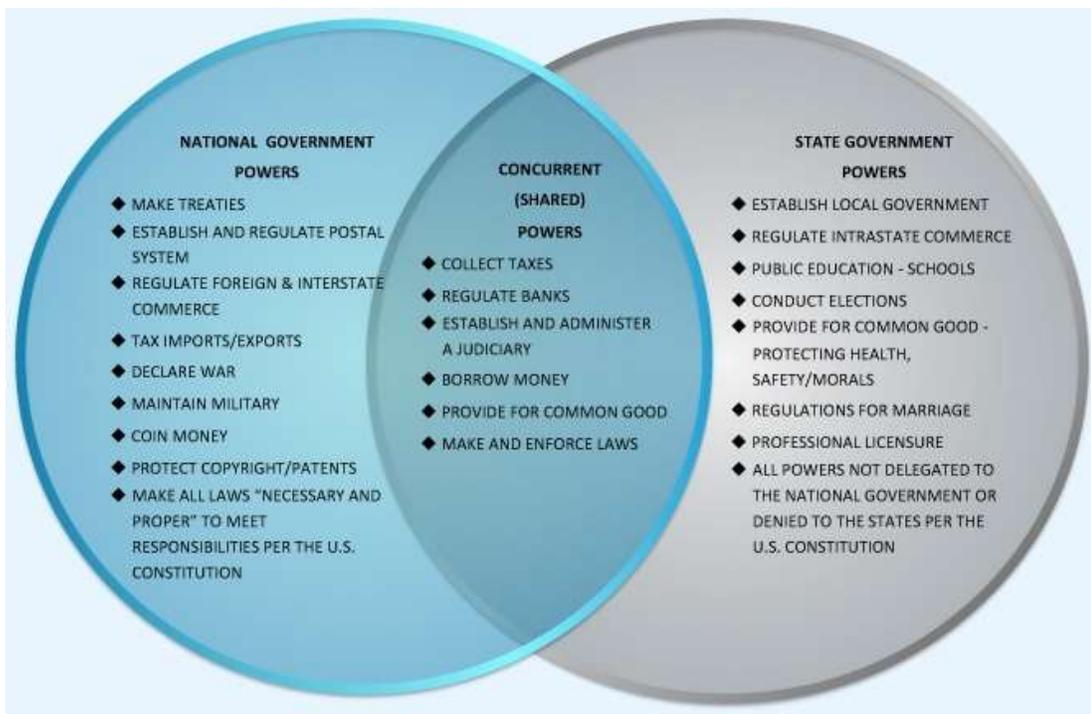
Gambar 2.2 Cabang Pemerintahan AS

#### 2.4 Pemerintahan Negara Bagian

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, AS merupakan negara federal yang terdiri dari 50 negara bagian yang juga memiliki kedaulatan pemerintahan dan wilayah. Hal tersebut disebutkan dan diatur oleh Konstitusi AS. Berdasarkan Amandemen

Kesepuluh Konstitusi AS, semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada pemerintah federal, diserahkan sepenuhnya kepada negara bagian dan rakyat.<sup>67</sup> Apa yang disebutkan oleh Konstitusi AS tersebut masih dalam tahap umum dan tidak menyebutkan secara detail. Secara garis besar, segala urusan yang terjadi dalam batas negara bagian menjadi urusan pemerintah negara bagian saja.<sup>68</sup>

Meskipun ada pemisahan kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, ada juga beberapa bidang yang dikelola bersama oleh kedua pemerintahan. Contohnya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Pemisahan Kekuasaan Pemerintah Federal dan Pemerintah Negara Bagian AS

Sumber : Civics Education. *American Federalism Under the U.S Constitution*. Diakses dari <http://www.civiceducationva.org/federalism5.php> pada 3 Mei 2016

<sup>67</sup> The White House: President Barack Obama. *State & Local Government*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/state-and-local-government> pada 3 Mei 2016

<sup>68</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. *Garis ... Op.Cit.* Hlm. 117

Dari gambar 2.3 dapat dilihat bahwa ada beberapa bidang penting yang menjadi wewenang bagi kedua pemerintahan, baik federal maupun negara bagian. Bidang-bidang tersebut yaitu pajak, perbankan, membangun dan mengelola peradilan, peminjaman uang, penyediaan barang-barang publik serta penegakan hukum. Sementara itu, pemerintah bagian juga memiliki wewenang khusus, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam mengatur bidang-bidang tersebut, pemerintah federal mewajibkan pemerintah negara bagian untuk terbentuk secara demokratis dan tidak menerapkan undang-undang yang bertentang atau melanggar Konstitusi AS atau undang-undang federal dan perjanjian-perjanjian AS.<sup>69</sup>

Konstitusi AS mengamanatkan kepada seluruh negara bagian untuk berpegang teguh pada bentuk republik, meskipun struktur 3 cabang kekuasaan tidak diwajibkan.<sup>70</sup> Namun demikian, seperti halnya pemerintahan nasional, pemerintahan negara bagian memiliki tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Fungsi dan cakupan ketiga cabang-cabang tersebut kurang lebih sama dengan lembaga-lembaga serupa di tingkat federal.<sup>71</sup>

Kecuali di negara bagian Nebraska, cabang legislatif negara bagian terdiri dari dua dewan yaitu Senat dan HoR. Masa jabatan Senat adalah empat tahun sementara HoR menjabat selama dua tahun. Cabang ini bertanggung jawab untuk mempertimbangkan hal-hal yang dibawa oleh gubernur sebagai kepala cabang eksekutif atau hal-hal yang diusulkan oleh anggotanya menjadi undang-undang yang kemudian menjadi hukum negara bagian. Selain itu, cabang legislatif juga berwenang untuk menyetujui anggaran negara bagian dan menginisiasi peraturan pajak.

Berbeda dengan kepala cabang eksekutif tingkat federal yang dipilih oleh *Electoral College*, kepala cabang eksekutif di tingkat negara bagian dipilih langsung oleh rakyat negara bagian tersebut. Disebut sebagai gubernur, di sebagian besar negara

---

<sup>69</sup>*Ibid.*

<sup>70</sup> The White House: President Barack Obama. *State & Local Government*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/state-and-local-government> pada 3 Mei 2016

<sup>71</sup> Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. *Garis ... Op.Cit.* Hlm. 117

bagian kepala eksekutif memiliki jabatan empat tahun dan di beberapa negara bagian tertentu hanya dua tahun.<sup>72</sup>

Sebagai negara yang memiliki kedaulatan, negara-negara bagian AS memiliki konstitusi negara bagian yang disesuaikan dengan pola kebutuhan warga negara bagiannya tanpa bertentangan dengan Konstitusi AS. Karena beragamnya masyarakat AS dan kondisi yang berbeda-beda di setiap negara bagian, seringkali terdapat perbedaan hukum diantara satu negara bagian dengan negara bagian lainnya. Hal tersebut yang kemudian juga menimbulkan masalah antar negara bagian atau kasus yang diputuskan dengan hasil berbeda-beda antar negara bagian. Untuk mengatasi hal tersebut, Konstitusi AS menetapkan *Full Faith and Credit* yang diatur dalam *Article IV Section I*:

*“Full faith and credit shall be given in each state to the public acts, records, and judicial proceedings of every other state. And the Congress may by general laws prescribe the manner in which such acts, records, and proceedings shall be proved, and the effect thereof.”*

Berdasarkan pasal diatas, setiap negara bagian harus menghormati hasil pengadilan dari negara bagian lain. Sebagai contoh, apabila ada seorang warga negara California yang diadili di Alabama karena suatu hal, warga negara tersebut harus mematuhi keputusan pengadilan Alabama meskipun ada perbedaan hukum atau sanksi di Alabama dengan California. Dengan adanya pasal tersebut seringkali warga negara bagian mencari keadilan di negara bagian lain yang menurutnya lebih baik dibandingkan hukum di negara bagian asalnya. Namun demikian, pasal diatas juga membantu menjaga persatuan dan kedaulatan antar negara.<sup>73</sup>

Selain digunakan oleh pengadilan negara bagian, *Full Faith and Credit* juga sering digunakan oleh Mahkamah Agung AS untuk memaksa pengadilan negara bagian untuk turut andil dalam suatu kasus yang diadili dinegara bagian lainnya. Mengacu pada contoh diatas, apabila warga negara California menolak untuk mematuhi

---

<sup>72</sup>*Ibid.* Hlm. 118

<sup>73</sup> Ashley Dugger. *Full Faith & Credit Clause: Definition & Examples*. Diakses dari <http://study.com/academy/lesson/full-faith-credit-clause-definition-examples.html> pada 3 Mei 2016

keputusan pengadilan Alabama, pengadilan California wajib memaksa warga negaranya untuk mematuhi keputusan pengadilan Alabama.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa pasal *Full faith and Credit* dapat diterapkan dalam tiga cara berbeda, yaitu:

- a. Untuk memaksa sebuah negara bagian untuk mengambil yurisdiksi atau kontrol terhadap sebuah kasus yang dimulai dinegara bagian lainnya
- b. Untuk menentukan hukum negara bagian mana yang harus diterapkan apabila melibatkan dua negara bagian dengan dua hukum yang berbeda

Untuk mengarahkan sebuah negara bagian mengakui dan memberlakukan putusan pengadilan di negara bagian lainnya<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>*Ibid.*

### **BAB 3 KELOMPOK KEPENTINGAN DI AMERIKA SERIKAT DALAM ISU-ISU MORAL DAN SOSIAL**

Seperti yang telah dijelaskan dalam Bab 1, banyak definisi mengenai kelompok kepentingan. Namun secara umum, kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai sebuah kelompok yang berupaya untuk mempengaruhi keputusan atau kebijakan pemerintah. Kelompok kepentingan berupaya untuk menyampaikan kepentingannya mengenai sebuah isu kepada para pejabat publik yang terkait sehingga kepentingannya dapat diperhatikan oleh pemerintah. Begitu pentingnya peranan kelompok kepentingan dalam kebijakan pemerintah demokratis, Geoffrey Ponton dan Peter Gill mendefinisikan kebijakan sebagai hasil tawar-menawar dan kompromi antar kelompok dimana negara berperan sebagai wasit/juru pisahnya.<sup>1</sup>

Dalam Bab 2, penulis telah memaparkan mengenai sistem politik dan pemerintahan AS dan mekanisme pengambilan keputusan dalam masing-masing cabang pemerintahan. Dari mekanisme tersebut, banyak jalan yang dapat digunakan oleh kelompok kepentingan, termasuk kelompok agama untuk berkontribusi terhadap pembuatan kebijakan pemerintah. Sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah pada bab selanjutnya, dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai kelompok kepentingan agama di AS. Selain itu, karena tulisan ini membahas isu LGBT, penulis juga akan memaparkan mengenai kelompok LGBT. Selanjutnya, untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kelompok agama dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, dalam bab ini juga akan memaparkan penelitian serupa dengan isu berbeda, yaitu isu aborsi dan kesejahteraan.

---

<sup>1</sup> Geoffrey Ponton dan Peter Gill. 1993. *Introduction to Politics*. United Kingdom: Wiley-Blackwell. Hlm 134-135.

### 3.1 Kelompok Kepentingan di Amerika Serikat

Karena berupaya untuk mempengaruhi program dan kebijakan pemerintah, kelompok kepentingan di AS juga sering disebut dengan pelobi yang berupaya untuk menyampaikan pendapat kelompok yang diwakilinya. Selain itu, kelompok kepentingan di AS juga sering diidentikkan dengan *Political Action Committees* (PAC), yaitu kelompok yang berusaha untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum, bukan kebijakan pemerintah secara langsung.<sup>2</sup> Namun demikian, dalam penelitian ini, menurut penulis PAC dapat dikategorikan sebagai salah satu cara bagi kelompok kepentingan untuk mempengaruhi pejabat publik. Sebuah PAC bisa jadi bukan merupakan kelompok kepentingan, ia hanya didirikan sementara untuk mendukung seorang calon. Namun bagi kelompok kepentingan, PAC merupakan sebuah cara potensial namun bukan satu-satunya untuk membangun jaringan yang mengadvokasikan kepentingannya dalam pemerintahan. Selain itu, PAC yang bukan merupakan bagian dari kelompok kepentingannya hanya berupaya untuk mempengaruhi hasil pemilu, tidak seperti kelompok kepentingan yang berupaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Jumlah kelompok kepentingan di AS sangat besar, dan jutaan warga negara AS merupakan anggota dari satu atau lebih kelompok di AS.<sup>3</sup> Besarnya jumlah kelompok kepentingan di AS tersebut merupakan salah satu ciri khas demokrasi AS untuk menjamin suara masyarakat dapat tersalurkan kepada pemerintah. Bahkan, politik Amerika terkadang dilihat sebagai wujud perjuangan kelompok di AS, dimana kelompok-kelompok kepentingan berkompetisi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat diberikan oleh pemerintah AS.<sup>4</sup> Layaknya sebuah kompetisi, ada pihak yang menang dan juga pihak yang kalah, sehingga dalam sebuah kebijakan ada kelompok yang diuntungkan dan ada pula kelompok yang dirugikan.

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.* Hlm. 402

<sup>4</sup> William J. Keefe, dkk. 1983. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press. Hlm. 239

Ada beberapa tipe kelompok kepentingan di AS, dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Tipe-Tipe Kelompok Kepentingan di AS

No	Tipe Kelompok Kepentingan	Penjelasan
11	<i>Trade and professional association</i>	Merupakan kelompok yang memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya. Kelompok ini cukup kuat karena memiliki kantor yang permanen di Washington yang dapat memudahkan anggotanya untuk melakukan lobi. Anggota kelompok ini dapat berupa individu maupun kelompok.
22	<i>Corporations</i>	Merupakan suatu kelompok yang juga melakukan aktivitas politik demi mencapai kepentingannya. Kelompok ini terus memonitor kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingannya dan berupaya untuk mempengaruhi pemerintah melalui pandangan atau komentar serta lobi melalui persatuan profesionalnya.
33	<i>Labor Unions</i>	Kelompok ini berfokus pada kepentingan para pekerja. Kelompok ini merupakan pendukung utama dalam hal kebijakan pemerintah mengenai hak-hak sipil.

44	<i>Citizen Groups</i>	Berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan sebelumnya, kelompok ini beranggotakan individu dari berbagai profesi dan level ekonomi yang berbeda-beda. Contoh dari kelompok ini yaitu <i>National Organization for Women</i> (NOW) yang berupaya untuk meningkatkan tingkat gaji pekerja wanita di AS.
55	<i>State and Local Government Organizations</i>	Kelompok ini terdiri dari negara bagian, kota, distrik, dan batas kekuasaan politik lokal yang lain. Kelompok ini berpartisipasi secara aktif di Washington dengan memberikan kesaksian sebelum proses pembuatan UU di Kongres AS atau dengan mempengaruhi proses yudisial tingkat federal.
66	<i>Religious, Charitable, and Community Groups</i>	Meskipun tidak secara eksklusif bertujuan untuk berpolitik, kelompok ini juga secara signifikan berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tujuan utama kelompok ini adalah kepentingan institusi dimana partisipasi politiknya digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pendirian ekonomi dan sosial organisasi ( <i>economic and social standing of the organization</i> ).

Sumber: John R. Wright. 2003. Dalam Linda Rachmawati. 2008. "*Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat*". Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember. Hlm. 30-31

Selain bentuk-bentuk diatas, William Keefe dkk, menyebutkan dua bentuk kelompok lain dalam politik AS, yaitu kelompok kepentingan pemerintah dan *single issue and "cause" groups*. Kelompok kepentingan pemerintah yang dijelaskan oleh William Keefe dkk adalah pelobi eksekutif.<sup>5</sup> Kelompok ini terdiri dari kepala eksekutif, pejabat utama departemen dan lembaga pemerintah, serta personel penghubung pemerintah. Kelompok lobi ini berupaya untuk melobi Kongres AS untuk mendapatkan dukungan dalam program presiden, persetujuan program baru, dukungan untuk program-program pemerintah sebelumnya, dan yang paling utama adalah untuk meningkatkan dana bagi program dan kebijakan pemerintah.<sup>6</sup>

Sementara *single issue and "cause" groups* merupakan kelompok kepentingan yang berfokus pada sebuah isu tertentu. Kelompok ini berjuang keras untuk mempengaruhi Kongres AS seperti dalam isu nuklir, kontrol senjata, moral publik, aborsi, pembatasan dana pemerintah, persamaan hak, pelestarian dan perlindungan lingkungan, serta kebijakan pemerintah mengenai berdoa di sekolah negeri.<sup>7</sup> Bentuk baru kelompok kepentingan ini yang memiliki pengaruh signifikan di Kongres AS adalah *Moral Majority* yaitu sebuah kelompok konservatif, kelompok aksi Kristen fundamental yang mengawasi isu-isu moral. Kelompok ini menentang keputusan-keputusan pemerintah dalam hal aborsi, hak kaum homoseksual, komunisme, dan amandemen persamaan hak.<sup>8</sup>

Dalam penelitian ini, kelompok yang akan menjadi fokus utama termasuk dalam kategori *religious group* dan atau *moral majority group*. Kelompok ini berupaya untuk memanifestasikan nilai-nilai ajaran agamanya dalam politik dan pemerintahan AS,

---

<sup>5</sup>*Ibid.* Hlm. 253

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.* Hlm. 254

<sup>8</sup>*Ibid.* Hlm. 255

khususnya dalam isu pernikahan sesama jenis. Kelompok ini beranggapan bahwa kebijakan mengenai pernikahan sesama jenis dapat mempengaruhi aspek-aspek umat beragama di AS sehingga penting bagi mereka untuk melindungi kebebasannya dalam melaksanakan kepercayaan agama.

Selengkapnya, terdapat dua kelompok yang berkepentingan dalam hal pernikahan sesama jenis. Pertama, yaitu kelompok agama yang berupaya untuk menolak legalisasi pernikahan sesama jenis dan menjadi fokus utama diskusi dalam karya tulis ini. Kedua, yaitu kelompok LGBT yang berjuang untuk mendapatkan haknya dalam hal pernikahan. Dalam kategorisasi kelompok kepentingan, Kelompok LGBT dapat dikategorikan sebagai *citizen groups* yang berjuang untuk mendapatkan hak pernikahan. Penting untuk turut mengkaji mengenai kelompok LGBT tersebut agar dapat melihat bagaimana proses legalisasi pernikahan sesama jenis di AS dan kaitannya dengan kelompok agama.

### 3.2 Sejarah dan Perjuangan Kelompok LGBT di Amerika Serikat

Peneliti Sejarah LGBT di AS dapat ditelusuri kembali pada tahun 1924 dimana pada tahun itu, Henry Gerber mendirikan sebuah organisasi bernama *The Society for Human Rights* yang mengadvokasi hak-hak kaum gay.<sup>9</sup> Hak-hak yang dituntut oleh aktivis gay pada masa itu berbeda jauh dengan tuntutan aktivis gay masa kini. Pada masa itu, hak yang dituntut oleh kaum gay adalah hak untuk hidup tenang seperti halnya masyarakat lainnya. Diskriminasi terhadap kaum gay di AS pada masa itu memang sering terjadi. Gay bukanlah hal yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena dianggap melawan ketentuan alam. Bahkan pada tahun 1814 istilah '*crime against nature*' pertama kali digunakan dalam keputusan hukum di AS yang mengacu pada kaum gay.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> PBS.org. *Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/> pada 10 Mei 2016

<sup>10</sup> American History USA. *LGBT History*. Diakses dari <https://www.americanhistoryusa.com/category/gay-lesbian-bisexual-transgender-history/> pada 3 Mei 2016

Dibatasi oleh hukum AS yang melarang kegiatan-kegiatan berbau gay, kaum gay masih sering mengadakan pertemuan tersembunyi di hotel-hotel ataupun bar. Hal tersebut juga memicu berbagai kericuhan ketika polisi AS melakukan razzia. Salah satunya razzia di Hotel Ariston pada 21 Februari 1903 dimana polisi New York menahan 60 orang dan menangkap 14 orang.<sup>11</sup> Kekerasan tersebut juga sering terjadi dalam razzia-razzia polisi lainnya. Hukum-hukum federal AS juga semakin banyak yang dibuat lebih mendiskriminasi kaum gay, terutama dalam hal mencari pekerjaan. Hingga pada tahun 1958, dalam kasus *One, Inc. v. Olesen*, Mahkamah Agung AS mendukung hak kaum LGBT dalam majalah bernama “*One: The Homosexual Magazine*.”<sup>12</sup>

Namun demikian, keputusan Mahkamah Agung AS untuk mendukung kaum gay tersebut tidak mengurangi diskriminasi terhadap kaum gay. Puncaknya, pada 28 Juni 1969, polisi New York merazzia *Stonewall Inn*, sebuah bar gay pupilar di *Greenwich Village*. Razzia tersebut berkembang menjadi protes dan demonstrasi yang disertai kekerasan antara pemuda gay dengan polisi New York yang berlangsung selama 6 hari.<sup>13</sup> Kejadian tersebut kemudian menjadi titik balik bagi gerakan modern kaum gay di AS dan juga di seluruh dunia.<sup>14</sup> Dimulai pada tahun 1970, setiap tahun pada bulan Juni aktivis kaum gay melaksanakan *pride parade* untuk mengenang kejadian Stonewall.<sup>15</sup>

Sebelumnya, pada akhir tahun 1960-an, *the American Psychiatric Association* (APA) mengklasifikasikan homoseksualitas sebagai gangguan jiwa, dan kaum gay dan

---

<sup>11</sup> Andrew Belonsky. 2010. *Remembering The Ariston Baths, New York's First Anti-Gay Raid*. Diakses dari <http://www.towleroad.com/2010/10/remembering-the-ariston-baths-new-yorks-first-anti-gay-raid/> pada 10 Mei 2016

<sup>12</sup>PBS.org. *Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/> pada 10 Mei 2016

<sup>13</sup>PBS.org. *Introduction: Stonewall Uprising*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/> pada 10 Mei 2016

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Bonnie J.Morris. *History of Lesbian, Gay, & Bisexual Social Movements*. Diakses dari <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history.aspx> pada 10 Mei 2016

lesbian mendapatkan kutukan secara moral dari agama-agama mainstream.<sup>16</sup> Akan tetapi kemudian APA menghapuskan klasifikasi tersebut pada 15 Desember 1973.<sup>17</sup> Banyak hal yang mempengaruhi keputusan APA untuk menghapuskan homoseksualitas dari *Diagnostic and Statistical of Mental Disorders* (DSM). Namun yang paling utama adalah dikarenakan adanya perubahan budaya dikalangan masyarakat AS yang merupakan akibat dari gerakan protes sosial pada tahun 1950-an hingga 1970-an: dimulai dengan gerakan hak-hak sipil Afrika-Amerika, kemudian berkembang menjadi gerakan perempuan dan gerakan hak-hak kaum gay.<sup>18</sup>

Selain itu, keputusan APA juga dilandaskan pada penelitian mengenai homoseksualitas pada tahun 1940-an hingga 1950-an. Alfred Kinsey bersama koleganya mengenai seksualitas pria dan wanita menandai awal dari pergeseran budaya dari pandangan homoseksualitas sebagai patologi menjadi pandangan bahwa homoseksualitas merupakan bagian dari varian normal seksualitas manusia.<sup>19</sup> Melalui bukunya *Sexual Behavior in the Human Male*, Kinsey mengkritik kecenderungan para ilmuwan untuk mempresentasikan homoseksual dan heteroseksual sebagai ‘perbedaan tipe individual’.

Pada 19 Juli 1993, Presiden AS Bill Clinton mengumumkan kebijakan yang dikenal dengan *Don't Ask Don't Tell Policy* (DADT).<sup>20</sup> DADT merupakan kebijakan pemerintah AS yang melarang perwira militer untuk secara terbuka mengakui dirinya sebagai homoseksual. Militer AS juga dilarang menanyakan hal tersebut. Dengan demikian, kaum gay dapat menjadi anggota militer namun dilarang keras untuk mengakui dirinya gay dan melakukan hubungan homoseksual selama dinas militernya.

---

<sup>16</sup>PBS.org. *Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/> pada 10 Mei 2016

<sup>17</sup>PBS.org. *Introduction: Stonewall Uprising*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/> pada 10 Mei 2016

<sup>18</sup> The Association of LGBTQ Psychiatrist (AGLP). *The History of Psychiatry & Homosexuality*. Diakses dari [http://www.aglp.org/gap/1\\_history/](http://www.aglp.org/gap/1_history/) pada 10 Mei 2016

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Ethan Klapper. 2013. *On This Day in 1993, Bill Clinton Announced 'Don't Ask, Don't Tell'*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell\\_n\\_3623245.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell_n_3623245.html) pada 10 Mei 2016

Kebijakan tersebut resmi diberlakukan pada 21 Desember 1993 dimana Kementerian Pertahanan AS mengeluarkan surat perintah pemberlakuan kebijakan presiden kepada militer AS. Meskipun tidak banyak yang setuju dengan kebijakan tersebut—baik kaum gay maupun mereka yang menentang homoseksualitas—akan tetapi pada masa itu DADT dapat dilihat sebagai upaya Bill Clinton untuk sedikit menghilangkan diskriminasi pada kaum gay. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Bill Clinton yang pada dasarnya terbuka terhadap isu LGBT.

Kebijakan DADT yang dikeluarkan pemerintah AS hanya mengurangi diskriminasi terhadap kaum LGBT dalam hal partisipasi militer, tidak hal lainnya. Pada tahun 1993 dua pasangan LGBT menuntut pemerintah negara bagian Hawaii yang menolak untuk mengeluarkan surat keterangan menikah bagi kedua pasangan tersebut. Pengadilan tinggi negara bagian Hawaii memutuskan bahwa larangan pernikahan sesama jenis merupakan bentuk diskriminasi terhadap jenis kelamin<sup>21</sup> dan bahwa hal tersebut melawan Konstitusi Negara Bagian Hawaii. Akan tetapi kasus tersebut tidak berakhir dengan adanya keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii. Berdasarkan Amandemen Persamaan Hak negara bagian Hawaii, pengadilan tinggi memutuskan bahwa negara bagian harus membentuk *compelling interest*<sup>22</sup> dalam mendukung larangan pernikahan sesama jenis di negara bagian Hawaii. Pengadilan tinggi kemudian mengirimkan kasus tersebut ke pengadilan lebih rendah, yaitu *circuit court*, untuk menentukan apakah negara (Hawaii) bisa membuktikan adanya *compelling interest* dalam larangan pernikahan homoseksual di Hawaii.<sup>23</sup>

Namun demikian, keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii memicu banyaknya resistensi terhadap pernikahan sesama jenis di AS. Berdasarkan pasal *Full Faith and Credit* yang berbunyi: “*Full Faith and Credit shall be given in each state to*

---

<sup>21</sup> US Legal. *United States Gay Couples*. Diakses dari <http://lawdigest.uslegal.com/family-laws/gay-couples/7343/> pada 13 Mei 2016

<sup>22</sup>*Compelling interest* merupakan konsep hukum dimana pemerintah berwenang untuk melakukan suatu tindakan. Contohnya pemerintah memiliki kepentingan atau wewenang dalam membatasi akses terhadap obata-obatan yang tidak terdaftar. Selengkapnya dapat dilihat di <http://encyclopedia.thefreedictionary.com/compelling+interest>

<sup>23</sup>*Ibid.*

*the public Acts, Records and judicial Proceedings of every other state,*” keputusan pengadilan negara bagian Hawaii kemudian juga harus diakui oleh negara bagian lainnya. Pemerintah Federal AS melihat adanya potensi konflik antar negara bagian yang mungkin dapat terjadi karena pasal tersebut. Sehingga pada tahun 1996, Kongres AS membuat undang-undang yang mengatur mengenai pernikahan sesama jenis di AS yang dikenal dengan *Defense of Marriage Act* (DOMA). DOMA menyebutkan bahwa pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal adalah antara lelaki dengan perempuan dan bahwa negara bagian memiliki hak untuk menolak ataupun mengakui pernikahan sesama jenis di wilayah negara bagiannya. DOMA kemudian resmi menjadi UU ketika ditandatangani oleh Presiden Bill Clinton pada 21 September 1996.<sup>24</sup>

Meskipun secara jelas pemerintah federal tidak mengakui pernikahan sesama jenis, gerakan kaum LGBT tidak secara signifikan terhenti. Sebaliknya, kaum LGBT semakin progresif mengkampanyekan haknya untuk mendapatkan lisensi pernikahan dari negara. Pada tahun 2000, negara bagian Vermont kemudian mengakui persatuan sipil (*civil union*) yang mengacu pada pernikahan kaum LGBT.<sup>25</sup> Akan tetapi persatuan sipil tidak sama dengan pernikahan. Beberapa akses yang dapat diperoleh pasangan yang menikah, seperti hak untuk mengadopsi dan bercerai, tidak dapat didapatkan dalam persatuan sipil.

Selanjutnya pada tahun 2004, negara bagian Massachusetts menjadi negara bagian pertama yang melegalisasi pernikahan sesama jenis di AS.<sup>26</sup> Seiring perkembangannya, satu per satu negara bagian AS juga mulai melegalisasi pernikahan sesama jenis di wilayahnya. Hingga tahun 2015, pernikahan sesama jenis diakui oleh 37 negara bagian di AS. Legalisasi tersebut dilalui dengan 3 cara, yaitu melalui badan yudisial, badan legislatif, dan *popular vote* dimana masyarakat negara bagian memiliki

---

<sup>24</sup>PBS.org. *Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/> pada 13 Mei 2016

<sup>25</sup>Jeannine Pitas. *History of the Gay Rights Movement in the US*. Diakses dari <http://www.lifeintheusa.com/people/gaypeople.htm> pada 13 Mei 2016

<sup>26</sup>Utah Valley University. *Milestones of LGBT History in the United States*. Diakses dari <https://www.uvu.edu/multicultural/lgbt/education/history.html> pada 13 Mei 2016

suara untuk mendukung atau menolak pernikahan sesama jenis. Dari 37 negara bagian yang telah melegalisasi pernikahan sesama jenis hingga tahun 2015, hanya 10 negara bagian yang melegalisasi pernikahan sesama jenis melalui badan legislatif atau *popular vote*<sup>27</sup>. Sementara negara bagian lainnya mengakui pernikahan sesama jenis melalui proses yudisial.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun kelompok LGBT terus mengadvokasi hak-haknya dengan melakukan berbagai kampanye, di sebagian besar negara bagian AS, pendekatan kaum LGBT melalui badan legislatif serta masyarakat langsung tidak cukup kuat untuk menjadikan pernikahan sesama jenis legal. Hanya ketika mereka melalui jalur hukum atau pengadilanlah kaum LGBT dapat mencapai tujuannya dalam hal pernikahan. Hal tersebut serupa dengan bagaimana pernikahan sesama jenis kemudian diakui oleh pemerintah federal AS dan menjadi legal di seluruh negara bagian AS pada tahun 2015.

Sebelum tahun 2015, Mahkamah Agung AS telah beberapa kali mengadili kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan sesama jenis baik dalam level negara bagian maupun level federal. Contohnya pada tahun 2003 dalam kasus *Lawrence v. Texas* dimana Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa undang-undang negara bagian Texas tentang sodomi melanggar Konstitusi AS.<sup>28</sup> Karena dikeluarkan oleh Mahkamah Agung AS, keputusan tersebut tidak hanya mempengaruhi undang-undang negara bagian Texas, akan tetapi juga menghapus undang-undang serupa yang melarang hubungan seksual kaum gay di seluruh negara bagian AS. Hal tersebut merupakan sebuah kemenangan bagi kaum LGBT. Akan tetapi, hal tersebut juga meningkatkan perhatian publik terhadap FMA yang sebelumnya tidak populer. Dengan adanya perhatian publik yang lebih besar, sedikit banyak juga meningkatkan dukungan terhadap FMA dari anggota Kongres AS.

---

<sup>27</sup>*Popular Vote* merupakan bagian dari *ballot measure* dimana masyarakat diberikan kesempatan untuk mendukung atau menolak sebuah undang-undang yang gagal dalam cabang legislatif. Selengkapnya dapat dilihat di [https://ballotpedia.org/Laws\\_governing\\_local\\_ballot\\_measures](https://ballotpedia.org/Laws_governing_local_ballot_measures)

<sup>28</sup>Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech. *Lawrence v. Texas*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2002/02-102> pada 13 Mei 2016

Selain *Lawrence v. Texas*, pada tahun 2013 Mahkamah Agung AS kembali mengeluarkan keputusan pro-LGBT melalui kasus *United States v. Windsor*. Kasus tersebut berawal ketika Edith Windsor mewarisi *estate* dari pasangannya, Clara Spyer, yang meninggal pada tahun 2009. Keduanya menikah di Toronto, Kanada, pada tahun 2007 dimana pernikahan tersebut juga diakui oleh pemerintah negara bagian New York.<sup>29</sup> Karena berdasarkan DOMA pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal adalah pernikahan heteroseksual, dan bahwa pasangan LGBT tidak dapat menerima berbagai keuntungan dari pemerintah federal (termasuk bebas pajak), Windsor dikenakan pajak *estate* sebesar US\$363.000. Pada 9 November 2010 Windsor mengajukan gugatan kepada pengadilan distrik mengenai DOMA, khususnya *Section 3* mengenai pernikahan yang diakui oleh pemerintah federal.<sup>30</sup>

Pada 18 April 2011, *the Bipartisan Legal Advisory Group* dari HoR AS membuat petisi untuk mengintervensi kasus tersebut dan mempertahankan DOMA.<sup>31</sup> Namun pada 26 Juni 2013, memutuskan bahwa DOMA (*Section 3*) melanggar Konstitusi AS yang menjamin kebebasan yang sama bagi semua orang melalui Amandemen Kelima Konstitusi AS.<sup>32</sup> Dengan menolak untuk menerima definisi DOMA tentang pernikahan, Mahkamah Agung AS mengakui bahwa pasangan sesama jenis di AS memiliki akses yang sama terhadap keuntungan-keuntungan yang disediakan oleh pemerintah federal seperti halnya pasangan heteroseksual.<sup>33</sup> Mengikuti keputusan tersebut, pemerintah AS juga mengumumkan bahwa untuk tujuan pajak federal, pasangan sesama jenis dipertimbangkan sebagai pasangan yang menikah

---

<sup>29</sup>Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech. *United States v. Windsor*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2012/12-307> pada 13 Mei 2016

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup> Jonathan A. Kenter dan Evelyn Small Traub. 2013. *United States v. Windsor: The Impact of the Supreme Court's DOMA Ruling on Employee Benefits*. Diakses dari <http://www.troutmansanders.com/united-states-v-windsor-the-impact-of-the-supreme-courts-doma-ruling-on-employee-benefits-07-01-2013/> pada 18 Mei 2016

<sup>33</sup> Hollis J. Fishman. *The Effect of United States v. Windsor on Same Sex Estate Planning*. Diakses dari <http://www.curtinheefner.com/the-effect-of-united-states-v-windsor-on-same-sex-estate-planning/> pada 18 Mei 2016

apabila mereka berada di negara bagian yang mengakui pernikahan sesama jenis, terlepas dari domisili pasangan tersebut.<sup>34</sup>

Meskipun melalui kasus *United States v. Windsor* pemerintah federal mengakui pernikahan sesama jenis, negara bagian masih memiliki wewenang untuk mengakui atau tidak pernikahan sesama jenis di wilayah negara bagian tersebut berdasarkan DOMA *Section 2*. Hingga pada tahun 2015, Mahkamah Agung AS kembali menyatakan DOMA tidak konstitusional melalui kasus *Obergefell v. Hodges*. Empat kasus pernikahan sesama jenis dikonsolidasikan oleh Mahkamah Agung AS dengan judul *Obergefell v. Hodges* ketika Mahkamah Agung AS menerima *certiorari* pada 16 Januari 2015.<sup>35</sup> Keempat kasus tersebut berasal dari empat wilayah negara bagian yang berbeda dimana pasangan homoseksual menggugat lembaga atau pemerintah negara bagian yang menolak pernikahan sesama jenis: Ohio, Michigan, Kentucky, dan Tennessee.<sup>36</sup> Ohio merupakan salah satu wilayah penganut Kristen Evangelis terbesar di AS yang undang-undangnya sangat ketat menolak pernikahan sesama jenis. Begitu pula Michigan, Kentucky, dan Tennessee yang mayoritas masyarakatnya menolak pernikahan sesama jenis melalui *ballot*.

Dalam kasus *Obergefell v. Hodges*, pada 26 Juni 2015 Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis melanggar Amandemen Keempatbelas Konstitusi AS.<sup>37</sup> Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penolakan terhadap pernikahan sesama jenis sebagian besar bertumpu pada alasan agama. Meskipun pemerintah negara bagian maupun pemerintah federal tidak secara eksplisit menggunakan faktor agama, kebijakan untuk menolak legalisasi pernikahan sesama jenis merupakan hasil dari lobi-lobi kelompok agama untuk melindungi keyakinannya. Dalam pengadilan *Obergefell v. Hodges* Mahkamah Agung AS menyatakan bahwa

---

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup> Ballotpedia. *Obergefell v. Hodges*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Obergefell\\_v.\\_Hodges](https://ballotpedia.org/Obergefell_v._Hodges) pada 18 Mei 2016

<sup>36</sup> Chicago-Kent College of Law at Illinois Tech. *Obergefell v. Hodges*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2014/14-556> pada 18 Mei 2016

<sup>37</sup>*Ibid.*

Amandemen Pertama Konstitusi AS melindungi hak organisasi keagamaan untuk mempraktekan prinsip-prinsipnya, namun hal tersebut bukan berarti bahwa negara bagian dapat menolak hak untuk menikah pasangan sesama jenis.<sup>38</sup> Dengan demikian, pernikahan sesama jenis resmi legal di seluruh negara bagian AS semenjak Juni 2015.

Perkembangan hak-hak LGBT di AS diatas jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya di Eropa. Belanda dan Belgia misalnya, telah melegalisasi pernikahan sesama jenis semenjak tahun 2000 dan 2003.<sup>39</sup> Selain kedua negara tersebut, 16 negara lainnya, termasuk yang diluar Eropa, juga telah mengakui pernikahan sesama jenis didepan hukum sebelum AS melegalisasi pada tahun 2015. AS, yang merupakan salah satu negara demokrasi tertua didunia justru menjadi negara kesekian yang menjamin hak-hak individu kaum LGBT. Bahkan meskipun Mahkamah Agung AS telah mendeklarasikan legalisasi pernikahan sesama jenis diseluruh negara bagian AS, pertentangan dengan kelompok agama yang menolak pernikahan sesama jenis terus berlanjut dalam level negara bagian.

### 3.3 Kelompok Kepentingan Agama

Meskipun amandemen pertama Amerika Serikat telah menjamin kebebasan untuk beragama maupun tidak bagi setiap warga negaranya, berdasarkan sensus-sensus keagamaan, masyarakat Amerika Serikat jauh lebih religius dibandingkan masyarakat Eropa Barat. Salah satunya, pada tahun 2009, sosiolog Jerman Hans Joas mengamati bahwa *“it is widely accepted that the United States is far more religious than practically any comparable European state.”*<sup>40</sup>

Dalam hasil pengamatan Hans Joas tersebut dikatakan bahwa AS jauh lebih religius dibandingkan dengan negara-negara yang sebanding di Eropa. Ada banyak

---

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Pew Research Center. 2015. *Gay Marriage Around the World*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2015/06/26/gay-marriage-around-the-world-2013/> pada 18 Mei 2016

<sup>40</sup>E. Brooks Holifield. *Why Do Americans Seem So Religious?*. Diakses dari <https://scholarblogs.emory.edu/sacredmatters/2014/01/21/why-do-americans-seem-so-religious/> pada 18 Mei 2016

faktor yang menjadikan Amerika jauh lebih religius dibandingkan negara-negara Eropa. Salah satu faktor yang mungkin dapat dipertimbangkan adalah seberapa pentingkah agama bagi masyarakat AS. Berdasarkan survey oleh *Pew Research Center* pada tahun 2014, 53% mengatakan bahwa agama sangat penting, 24% penting, 11% tidak begitu penting, dan 11% tidak penting sama sekali.<sup>41</sup>

Selain itu, sebagian besar orang Amerika dewasa—sekitar tiga perlima atau seperempatnya—“menjadi bagian” dari gereja-gereja, sinagog-sinagog, atau perkumpulan keagamaan lainnya.<sup>42</sup> Meskipun terdapat penurunan dalam aktivitas keagamaan, namun lanskap keagamaan di AS masih relatif stabil dibandingkan dengan negara industri lainnya.<sup>43</sup> Selain itu, penurunan religiusitas di AS bukan disebabkan oleh berkurangnya orang beragama di AS, namun dikarenakan semakin meningkatnya “*the none*”, yaitu mereka yang tidak mengafiliasikan dirinya dengan keyakinan agama apapun. Namun demikian, sebagian besar masyarakat AS masih mengafiliasikan dirinya dengan kelompok keagamaan (77%).<sup>44</sup>

Kelompok agama didefinisikan sebagai serangkaian lembaga keagamaan terutama gereja lokal dan misionaris yang terkait, badan-badan pendidikan dan administratif yang secara formal berkaitan satu sama lain dan memiliki seperangkat keyakinan dan komitmen bersama.<sup>45</sup> Eksistensi kelompok agama diatur oleh Konstitusi AS pada Amandemen Pertama, yaitu “*Freedom of (or from) religion. Freedom of speech. Freedom to assemble. Freedom to petition the government.*” Bukannya menurunkan jumlah kelompok keagamaan, menurut Bryan A. S Rasmussen hal tersebut justru mendorong

---

<sup>41</sup>Pew Research Center. *Importance of Religious in One's Life*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/importance-of-religion-in-ones-life/> pada 18 Mei 2016

<sup>42</sup>David C. Leege. 2006. *Agama dan Politik dalam Perspektif Teoritis*. Jakarta:Yayasan Obor Indonesia. Hlm. 3

<sup>43</sup>Pew Research Center. 2015. *U.S. Public Becoming Less Religious*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2015/11/03/u-s-public-becoming-less-religious/> pada 18 Mei 2016

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>David C.Leege & Lyman A. Kellstedt. 2006. Dalam Linda Rachmawati. 2008. “*Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat*”. Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember. Hlm. 32

tumbuh pesatnya gereja-gereja dan kelompok keagamaan di AS.<sup>46</sup> Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat menjamin pasar bebas untuk ide-ide agama sehingga gereja-gereja bebas bersaing untuk mendapatkan pengikut yang kemudian memunculkan demam religius dalam komunitas di Amerika Serikat.<sup>47</sup>

Tidak hanya dalam kehidupan sosial masyarakat AS, agama juga memiliki pengaruh yang besar dalam politik AS dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Meskipun Konstitusi AS secara jelas menyatakan bahwa pemerintah dilarang mengambil tindakan yang berbasis agama, sangat jarang para politisi AS yang dapat memberikan statemen atau pidato tanpa mengutip agama.<sup>48</sup> Setiap Presiden AS selalu mengucapkan *'God bless America'*, mengucapkan doa untuk korban bencana, dan memuji nilai-nilai agama.<sup>49</sup> Menurut Andrew Kohut, agama lebih berpartisipasi secara langsung dengan terlibat dalam proses politik, dibandingkan dengan sebelumnya dimana agama hanya menjadi pengamat.<sup>50</sup> Kelompok-kelompok keagamaan mulai menjalin hubungan dengan partai konservatif Amerika sehingga partai tersebut banyak mendapat dukungan dari kelompok-kelompok keagamaan. Partai Republik, misalnya, tidak dapat memenangkan pemilu tanpa adanya dukungan dari para pemilih Kristen.<sup>51</sup>

Lebih lanjut, ada dua alasan mengapa partisipasi kelompok agama dalam politik semakin meningkat. Pertama, karena adanya perubahan yang terjadi dalam agama, sehingga mengubah arti penting agama dalam politik. Kelompok agama konservatif

---

<sup>46</sup> Bryan A.S. Rasmussen. *Agama dan Politik dalam Amerika Serikat*. Dalam John T. Ishiyama dan Marijke Breuning (editor). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Nigel Barber. 2012. *Why Religion Rules American Politics*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-religion-rules-america\\_b\\_1690433.html](http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-religion-rules-america_b_1690433.html) pada 18 Mei 2016

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Andre Kohut, dkk. 2001. *The Diminishing Divide: Religion's Changing Role in American Politics*. Diakses dari [https://books.google.co.id/books/about/The\\_Diminishing\\_Divide.html?id=UKltOVFYNP4C&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/The_Diminishing_Divide.html?id=UKltOVFYNP4C&redir_esc=y) pada 18 Mei 2016

<sup>51</sup> Eduardo Porter. 2016. *Donald Trump's Rise Shows Religion is Losing Its Political Power*. Diakses dari [http://www.nytimes.com/2016/04/06/business/economy/trumps-rise-shows-religion-is-losing-its-political-power.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2016/04/06/business/economy/trumps-rise-shows-religion-is-losing-its-political-power.html?_r=0) pada 18 Mei 2016

mulai mendukung politisi konservatif ketika para politisi liberal mendapatkan dukungan dari populasi yang non-religius.<sup>52</sup> Ketika para politisi liberal mendapatkan banyak dukungan dari kelompok non-religius, hal tersebut akan mempengaruhi keputusan pemerintah terpilih dan bukan tidak mungkin kebijakan tersebut akan mengancam keyakinan kelompok agama. Alasan kedua mengapa partisipasi kelompok agama dalam politik semakin meningkat adalah karena adanya perubahan dalam agenda politik yang meningkatkan pentingnya agama. Munculnya isu aborsi dan homoseksualitas menghubungkan agama lebih dekat dengan politik.<sup>53</sup> Hubungan yang semakin meningkat dan semakin langsung, menyebabkan kelompok agama memasuki arena politik jauh semakin dalam.<sup>54</sup>

Dalam politik, jumlah massa merupakan modal yang sangat penting. Untuk melihat komunitas agama di AS, biasanya kelompok agama dibedakan menjadi enam tradisi agama mayoritas di AS, yaitu:

- a. Protestan Evangelis (*Evangelical Protestants*)
- b. Protestan Garis Utama (*Mainline Protestants*)
- c. Protestan Kulit Hitam (*Black Protestants*)
- d. Katolik Roma (*Roman Catholics*)
- e. Yahudi (*Jews*)
- f. Sekuler (*nonreligious people*)<sup>55</sup>

Kelompok protestan merupakan komunitas agama terbesar di AS yang terbagi lagi menjadi beberapa kelompok protestan yang berbeda-beda. Kelompok protestan evangelis cenderung memiliki pandangan literatur yang mengacu pada *bible*, menekankan pengalaman terlahir-kembali, dan memiliki misi kuat untuk membawa

---

<sup>52</sup> Andrew Kohut, dkk. 2000. Dalam Åse Meistad. *Lobbying on Behalf of God: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act of 2001*. Disertasi untuk gelar *Candidatus Rerum Politicarum* departemen perbandingan politik: University in Bergen. Hlm.17

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

<sup>55</sup> Åse Meistad. *Lobbying on Behalf of God: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act of 2001*. Disertasi untuk gelar *Candidatus Rerum Politicarum* departemen perbandingan politik: University in Bergen. Hlm. 14

masyarakat menganut agamanya.<sup>56</sup> Protestan kulit hitam pada dasarnya sama dengan protestan evangelis, akan tetapi protestan kulit hitam memiliki pandangan yang lebih liberal dalam hal politik.<sup>57</sup> Protestan garis utama memiliki pandangan *historical-critical* terhadap *Bible* dan tidak seagresif protestan evangelis dalam misinya membawa anggota baru.<sup>58</sup> Katolik roma juga merupakan salah satu kelompok agama yang sangat aktif berpartisipasi dalam politik AS, terutama menyangkut isu kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan isu-isu moral lainnya.<sup>59</sup>

Dengan semakin meningkatnya kepentingan kelompok agama dalam politik AS, kemudian mendorong kelompok agama untuk membentuk kelompok kepentingan yang bertugas berhubungan secara langsung dengan pejabat publik di AS. *Pew Research Center* secara luas mendefinisikan kelompok kepentingan keagamaan sebagai kelompok yang mengadvokasi pembentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan agama.<sup>60</sup> Kelompok-kelompok kepentingan agama utamanya mempromosikan kebebasan beragama di seluruh dunia. Akan tetapi, kelompok keagamaan juga mempromosikan pandangan agama dan prinsip moral dalam menanggapi isu-isu sosial.<sup>61</sup>

Seberapa banyak kelompok kepentingan yang merupakan bentukan kelompok agama atau setidaknya berafiliasi dengan kelompok agama dapat dilihat dalam gambar berikut:

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

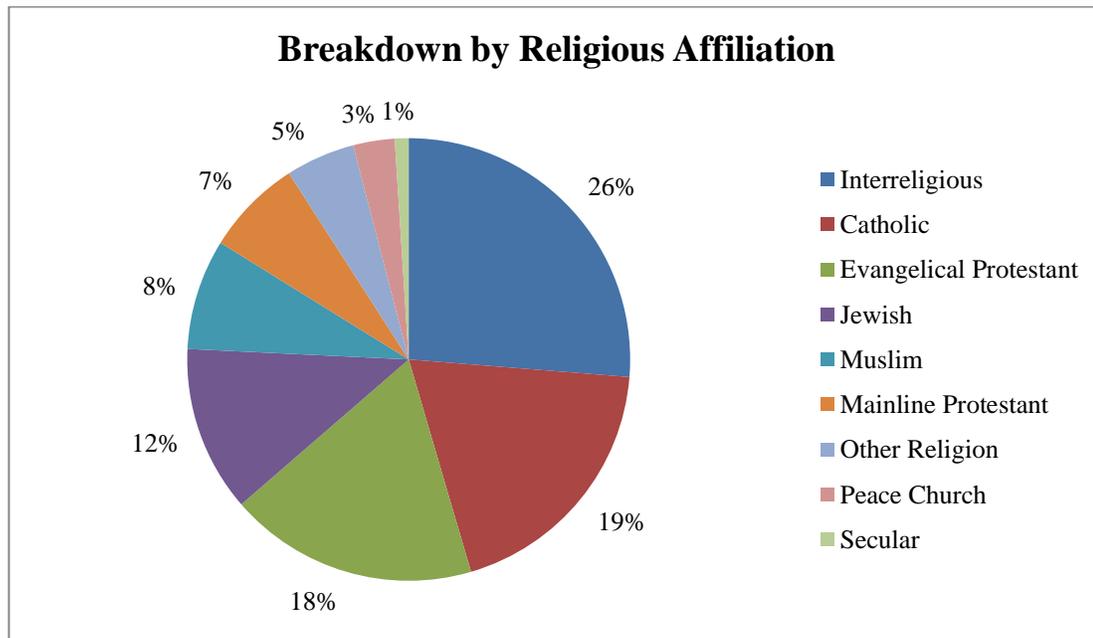
<sup>57</sup>Daniel J.B. Hofrenning. 2001. Dalam Åse Meistad. *Lobbying on Behalf of God: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act of 2001*. Disertasi untuk gelar *Candidatus Rerum Politicarum* departemen perbandingan politik: University in Bergen. Hlm. 15

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>Anne Marie Cammisa dan Paul Christoper Manuel. 2016. *Religious Groups as Interest Groups: The United States Catholic Bishop in the Welfare Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform Debate of 2009-2010*. Diakses dari <http://www.mdpi.com/2077-1444/7/2/16/htm> pada 19 Mei 2016

<sup>60</sup>Pew Reesearch Center. 2011. *Lobbying for the Faithful*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-exec/> pada 19 Mei 2016

<sup>61</sup>Pew Research Center. 2011. *Major Characteristic of Religious Advocacy Groups*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-characteristics/#issue> pada 19 Mei 2016



Gambar 3.1 Persentase Pelobi Kelompok Agama di AS

Sumber: Pew Research Center. 2011. *Major Characteristic of Religious Advocacy Groups*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-characteristics/#issue>

Gambar 3.1 diatas menunjukkan bahwa protestan evangelis dan katolik merupakan dua agama yang memiliki kelompok kepentingan cukup besar dibandingkan dengan agama lainnya. Jumlah kelompok kepentingan katolik 1% lebih besar dibandingkan dengan kelompok kepentingan protestan evangelis. Hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah pengikut kedua agama dimana protestan evangelis memiliki lebih banyak pengikut (26,3%) dibandingkan katolik (23,9%).<sup>62</sup>

Kelompok-kelompok kepentingan agama di AS memiliki bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan struktur organisasinya. *Pew Research Center* membagi bentuk struktur organisasi kelompok kepentingan agama menjadi 6, yaitu:

- a. Organisasi keanggotaan, yaitu kelompok yang konstituen dan atau sumber dananya berasal dari anggota individu. Contoh dari kelompok ini yaitu *Family Research Council* dan *Unitarian Universalist Service Committee*.

<sup>62</sup>*Ibid.*

- b. Institusional, yaitu kelompok kepentingan yang mewakili institusi, bukan hanya individu. Kelompok ini memperjuangkan kepentingan sekolah menengah, perguruan tinggi, rumah sakit, badan-badan bantuan dan pembangunan internasional, penyedia layanan sosial, siaran organisasi media dan perintah agama.
- c. Kelompok yang mewakili kelompok agama secara resmi. Kelompok ini biasanya mewakili kelompok agama tertentu, termasuk Katolik, Protestan, Islam, dan Judaisme.
- d. *Think tanks*, yaitu kelompok yang melakukan penelitian dan menyediakan rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan isu keagamaan dan atau pendekatan penelitian yang berangkat dari dasar-dasar agama.
- e. Koalisi permanen, yaitu beberapa gabungan *think tank* yang terdiri dari berbagai keyakinan agama. Berbeda dengan aliansi sementara, kelompok ini cenderung memiliki staf yang permanen. Contohnya *Jubilee USA Network*, sebuah koalisi antara lembaga pembangunan dan kelompok bantuan dari tradisi agama yang berbeda.
- f. Kelompok *Hybrid*, yaitu kelompok kepentingan yang bentuk organisasinya strukturalnya campuran dari bentuk-bentuk sebelumnya. Contohnya *Becket Fund for Religious Liberty*, yang melakukan penelitian hukum dan menghasilkan publikasi seperti halnya *think tank*, tetapi juga menyediakan perwakilan hukum *pro bono* untuk individu atau badan-badan agama yang menyangkut kebebasan beragama.

Dari keenam bentuk diatas, organisasi keanggotaan yang mewakili anggota individu adalah bentuk yang paling umum. Agama terbesar yang terafiliasi dengan kelompok ini adalah protestan, katolik dan yahudi. Selengkapnya, mengenai afiliasi agama di AS dengan bentuk-bentuk kelompok diatas dapat dilihat dalam tabel gambar 3.2 berikut:

## Organizational Structure by Religious Tradition

Percentage of groups from each faith tradition that have various organizational structures

	REPRESENTS INDIVIDUALS	REPRESENTS INSTITUTIONS	REPRESENTS RELIGIOUS BODIES	HYBRID	PERMANENT COALITION	THINK TANK	TOTAL	NUMBER OF GROUPS
Interreligious	43%	6%	0%	11%	22%	19%	<b>100%</b>	54
Catholic	37	39	2	10	7	5	<b>100</b>	41
Evangelical Prot.	41	23	15	13	8	0	<b>100</b>	39
Jewish	56	20	12	0	4	8	<b>100</b>	25
Muslim	53	0	18	6	0	24	<b>100</b>	17
Mainline Prot.	25	25	50	0	0	0	<b>100</b>	16
Other religion	56	0	44	0	0	0	<b>100</b>	9
Other Christian	17	0	67	17	0	0	<b>100</b>	6
Peace church	33	0	67	0	0	0	<b>100</b>	3
Secular	50	0	0	0	50	0	<b>100</b>	2
All groups	42	17	15	8	9	8	<b>100</b>	212

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pelobi Kelompok Agama di AS

Sumber: Pew Research Center. 2011. *Major Characteristic of Religious Advocacy Groups*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-characteristics/#issue>

Keterlibatan kelompok agama dalam politik memfokuskan pada isu-isu moral. Akan tetapi dalam perkembangannya, kelompok agama juga terlibat dalam isu-isu sosial dengan menekankan pandangan agama. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh *Pew Research Center*, yang melakukan survei terhadap 216 kelompok advokasi keagamaan, ada sekitar 12 isu domestik yang menjadi fokus kelompok tersebut, yaitu: isu gereja-negara, hak sipil dan kebebasan, isu bioetika dan kehidupan, keluarga dan pernikahan, kemiskinan dan keadilan ekonomi, pelayanan kesehatan, imigrasi, toleransi, energi dan lingkungan, sistem pengadilan, isu fiskal dan pajak, dan pendidikan.<sup>63</sup> Dari kedua belas isu tersebut, isu pernikahan sesama jenis dapat dikategorikan kedalam isu keluarga dan pernikahan, yang mengambil perhatian kelompok agama sekitar 39 % dari total kelompok kepentingan agama yang disurvei oleh *Pew Research Center*.

<sup>63</sup>*Ibid.*

Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan pada isu pernikahan sesama jenis di AS, khususnya bagaimana kelompok agama sebagai kelompok kepentingan di AS berupaya untuk mempengaruhi kebijakan dan peraturan pemerintah AS. Penelitian serupa pernah dilakukan dan dipublikasikan oleh Linda Rahmawati, mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember serta Anne Marie Cammisa dan Paul Christopher Manuel, mahasiswa *Department of Government*, Georgetown University dan American University. Kedua tulisan tersebut menggunakan kelompok agama yang sama, yaitu *United States Conference of Catholic Bishops* (USCCB). Akan tetapi dalam tulisan Rahmawati menggunakan dua studi kasus yaitu isu aborsi dan pendidikan, serta kelompok agama lainnya, yaitu *Association of Christian Schools International* (ACSI). Sementara tulisan Cammisa dan Manuel fokus pada isu kesejahteraan dan kesehatan. Berikut penulis merangkum isi dari penelitian-penelitian tersebut, khususnya bagaimana kelompok agama mempengaruhi kebijakan pemerintah AS dalam isu aborsi dan kesejahteraan.

### **3.4 Kelompok Agama dalam Isu Aborsi dan Kesejahteraan**

#### **3.4.1 Isu Aborsi**

Dalam penelitiannya yang berjudul *Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan dalam Politik Amerika Serikat*,<sup>64</sup> Linda Rahmawati memfokuskan penelitiannya pada dua isu, yaitu isu aborsi dan isu pendidikan. Dari rumusan masalah yang ditetapkan, Rahmawati mencoba untuk menganalisa kepentingan kelompok agama dalam mempengaruhi politik di AS dan bagaimana kelompok tersebut mencoba mempengaruhi politik AS.

Rahmawati menggunakan klasifikasi kelompok agama dalam buku Kenneth D. Wald untuk melihat perbedaan tradisi ideologi kelompok agama di AS. Dalam klasifikasi tersebut digambarkan bahwa kelompok Protestan Evangelis merupakan

---

<sup>64</sup> Linda Rachmawati. 2008. "*Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat*". Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember.

kelompok agama yang paling konservatif. Selanjutnya kelompok agama Katolik menjadi kelompok agama paling konservatif kedua. Akan tetapi Rahmawati menggunakan kelompok agama Katolik sebagai objek penelitiannya dikarenakan perjuangan kelompok agama Katolik terhadap isu aborsi lebih besar dibandingkan dengan kelompok agama lainnya.

Pada awalnya aborsi merupakan hal yang dilarang di AS karena aborsi memberikan dampak buruk yang juga bisa berujung kematian bagi wanita yang melakukan aborsi. Hukum AS, terutama hukum negara bagian menyatakan bahwa aborsi merupakan hal yang illegal. Hingga kemudian muncul kelompok sosial yang mengadvokasikan hak-hak wanita termasuk hak untuk menentukan reproduksi mereka. Menurut kelompok ini (utamanya kelompok feminis, dan disebut dengan kelompok *Pro Choice*) aborsi merupakan hak pribadi yang tertera dalam Konstitusi AS. Kelompok *Pro Choice* berhasil mempengaruhi masyarakat AS dan juga pemerintah negara bagian. Sampai pada tahun 1970, peraturan mengenai aborsi diatur oleh masing-masing negara bagian dimana beberapa negara bagian ada yang melarang dan memperbolehkan praktek aborsi.

Isu aborsi mulai menjadi perhatian pemerintah federal ketika pada awal tahun 1970 Mahkamah Agung AS menyetujui untuk mendengarkan dua kasus aborsi yaitu *Roe v. Wade* dan *Doev. Bolton*. Kasus tersebut muncul karena adanya hukum negara bagian Texas dan Georgia yang melarang praktek aborsi kecuali dalam keadaan tertentu. Keputusan final Mahkamah Agung AS dalam kedua kasus tersebut menyatakan bahwa pelarangan aborsi melanggar Konstitusi AS. Pada 1973 Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa Konstitusi AS menjamin hak pribadi dan hak dasar yang memperbolehkan wanita untuk mengakhiri kehamilannya.

Sebagai pintu terakhir dalam pengambilan keputusan, keputusan Mahkamah Agung AS tidak hanya mempengaruhi hukum di negara bagian Texas dan Georgia, tetapi juga diseluruh negara bagian AS. Namun demikian, Mahkamah Agung AS juga menetapkan pembatasan dimana negara bagian masih bisa mengatur mengenai aborsi dalam rangka melindungi kesehatan ibu (*maternal protection*) dan melindungi potensi

kelahiran manusia (*fetal protection*). Singkatnya, dalam periode kehamilan 1-3 bulan, negara bagian tidak diperbolehkan melarang praktek aborsi. Dalam periode 4-6 bulan, negara bagian masih tidak memiliki wewenang untuk melarang aborsi akan tetapi negara bagian bisa menetapkan peraturan untuk melindungi nyawa sang ibu. Dalam periode 7-9 bulan, barulah pemerintah negara bagian memiliki wewenang untuk melarang atau memperbolehkan aborsi karena pada periode ini janin sudah mulai terbentuk (*fetal protection*).

Tata cara aborsi di AS dilakukan melalui prosedur *partial-birth*, yaitu aborsi yang dilakukan pada akhir masa kehamilan dimana janin sudah mendekati bentuk sempurna. Berdasarkan tata caranya, prosedur *partial-birth* sangat tidak manusiawi karena melibatkan kekerasan terhadap janin. Sebagai kelompok yang sangat menentang aborsi, kelompok agama katolik (disebut dengan kelompok *Pro Life*) mengutuk prosedur *partial-birth* dan berupaya mempengaruhi pemerintah untuk melarang prosedur tersebut melalui rancangan undang-undang *Partial-Birth Abortion Ban Act* (PBA *Ban Act*). Tabel 3.2 berikut menunjukkan bagaimana aktivitas kelompok agama Katolik dalam upayanya menolak legalisasi aborsi di AS:

Tabel 3.2 Aktivitas Kelompok Katolik dalam Isu Aborsi

Tahun	Aktivitas
1974	Setelah Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan yang melegalkan aborsi pada tahun 1973, kelompok Katolik di AS membentuk <i>National Committee for a Human Life Amendment</i> , yaitu sebuah komite untuk memperjuangkan amandemen terhadap isu-isu kehidupan manusia. Tujuan dari komite ini untuk mengubah keputusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung AS tentang legalitas aborsi dengan upaya mengajukan amandemen terhadap Konstitusi AS yang memfokuskan pada pemberian perlindungan kehidupan kepada janin. Ketika amandemen tersebut sampai di komite pengadilan Senat untuk dilakukan

	pembahasan, perdebatan tidak dapat dihindarkan dan tidak ada jalan keluar yang menyebabkan RUU tersebut gagal
1975	Sebagai upaya untuk mengkoordinasikan usaha Katolik untuk mengubah keputusan Mahkamah Agung AS, kelompok Katolik merancang suatu pedoman yang dinamakan <i>Pastoral Plan for Pro-Life Activities</i> . Selain berisikan pedoman kepada seluruh umat Katolik dalam isu aborsi, pedoman tersebut juga menyerukan untuk berjuang secara nasional dalam isu aborsi melalui suatu organisasi yang bernama <i>National Conference Catholic Bishops</i> (NCCB). NCCB kemudian menggunakan organisasi staf lobi mereka di Washington yang bernama <i>United States Catholic Conference</i> (USCC) untuk mempengaruhi cabang legislatif agar membuat undang-undang yang dapat membatasi aktivitas aborsi. NCCB memperoleh keberhasilan ketika pada tahun 2003 presiden menandatangani PBA Ban Act yang melarang prosedur <i>partial-birth</i> .
1976	Kelompok Katolik berupaya mempengaruhi Kongres untuk mengesahkan suatu amandemen bernama <i>Hyde Amendment</i> . Amandemen tersebut berisikan pengurangan penggunaan dan federal untuk digunakan sebagai uang kesehatan bagi wanita yang melakukan aborsi.
Mulai 1977	Kelompok Katolik mulai menggunakan jalur yudikatif. Namun baru pada tahun 1989 memperoleh keberhasilan dengan kasus yang dinamakan <i>Webster v. Reproductive Health Services</i> . Kasus tersebut memfokuskan pelarangan penggunaan fasilitas publik untuk menjadi tempat aborsi dan melarang pekerja kesehatan pemerintah melakukan aborsi kecuali dapat mengancam nyawa sang ibu.

1995	Sebagai hasil dari suatu pertemuan yang dihadiri oleh semua keuskupan Katolik di AS, kelompok Katolik membuat sebuah dokumen yang mengutuk dan menyalahkan aborsi dan tindakan euthanasia. Dokumen tersebut bernama " <i>Faithful for Life</i> ".
------	---

Dari tabel diatas dapat dilihat bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Katolik di AS dalam menolak legalisasi aborsi. Menariknya, kelompok ini juga membentuk sebuah organisasi khusus untk berpartisipasi dalam politik AS, yaitu NCCB. NCCB terbentuk atas dasar perintah dari Gereja Katolik Roma sebagai perwakilan resmi Vatikan di AS. Gereja Vatikan perlu memprioritaskan AS sebagai negara besar yang pada masa itu menunjukkan penyelewengan terhadap ajaran katolik terutama dalam isu aborsi. NCCB melakukan lobi kepada pemerintah melalui staf lobinya, *United States Catholic Conference (USCC)*. Pada tahun 2001, NCCB berubah menjadi USCCB (*United States Conference of Catholic Bishops*) dan melakukan lobi-lobi keagamaan sendiri tanpa melalui USCC.

Selain melalui lobi terhadap anggota Kongres AS, USCCB juga menggunakan cara tidak langsung dengan mendorong seluruh umat Katolik AS untuk menghubungi anggota Kongres AS melalui *mail* atau kartu pos. Pada tahun 1997, USCCB mensponsori pengiriman kartu pos secara besar-besaran kepada Kongres AS setelah Presiden Bill Clinton memveto rancangan PBA *Ban Act*. Kegiatan tersebut dinamakan *Postcard Campaign* dan diatur dalam *Pastoral Plan for Pro-Life Activites*. Selain berisi *Postcard Campaign*, *Pastoral Plan for Pro-Life Activites* juga berisi imbauan kepada seluruh umat Katolik untuk bersatu melindungi dan menghormati setiap kehidupan manusia termasuk janin.

Meskipun hingga saat ini aborsi masih dinyatakan legal di AS, keberhasilan USCCB untuk memperjuangkan penolakan terhadap legalisasi aborsi dapat dilihat melalui keberhasilannya meloloskan PBA *Ban Act* serta kemenangan dalam kasus *Webster v. Reproductive Health Services* yang membatasi aborsi di AS. Selain karena

faktor organisasi yang memiliki staf profesional untuk melobi cabang legislatif, keberhasilan USCCB juga disebabkan oleh banyaknya massa yang dimiliki oleh USCCB di AS. Sebagai kelompok agama yang konservatif, kelompok Katolik memiliki ikatan yang kuat satu sama lain, terutama terhadap institusi agamanya. Dengan demikian, sangat mudah bagi USCCB untuk mempengaruhi umat katolik yang juga merupakan salah satu kelompok agama besar di AS. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh USCCB sebagai daya tawar terhadap anggota Kongres AS.

### 3.4.2 Kesejahteraan

Anne Marie Cammisa dan Paul Christopher Manuel membuat tulisan yang membahas mengenai kesejahteraan dan reformasi kesehatan di Amerika dengan judul *Religious Groups as Interest Groups: The United States Catholic Bishop in the Welfare Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform Debate of 2009-2010*.<sup>65</sup> Peranan USCCB dalam isu kesehatan merupakan salah satu upayanya untuk mempengaruhi pemerintah AS membatasi penggunaan dana federal untuk aborsi. Karena hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan isu aborsi yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan lebih fokus pada isu kesejahteraan dalam merangkum tulisan Cammisa dan Manuel.

Kelompok Katolik di AS memiliki keyakinan bahwa gereja dan negara memiliki kewajiban moral terhadap kaum miskin di AS. Dalam tulisan Cammisa dan Manuel, membahas mengenai rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan pada masa kepresidenan Bill Clinton. Berbeda dengan isu aborsi dimana USCCB berupaya untuk meloloskan rancangan undang-undang, dalam hal ini USCCB melakukan lobi untuk menolak rancangan undang-undang tersebut. Menurut USCCB, dalam rancangan undang-undang tersebut, pemerintah AS berupaya untuk melepaskan diri dari tanggung

---

<sup>65</sup> Anne Marie Cammisa dan Paul Christopher Manuel. 2016. *Religious Groups as Interest Groups: The United States Catholic Bishop in the Welfare Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform Debate of 2009-2010*. Diakses dari <http://www.mdpi.com/2077-1444/7/2/16/htm> pada 19 Mei 2016

jawabnya kepada kaum miskin di AS. Secara detail, rancangan undang-undang tersebut menghilangkan status hak kesejahteraan rakyat dan juga menciptakan *the block grant*.

Dengan menghilangkan status hak kesejahteraan rakyat, artinya masyarakat AS yang memenuhi persyaratan terhadap akses kesejahteraan, tidak lagi secara otomatis bisa menggunakan haknya. Sementara dengan adanya *the block grant* artinya pemerintah federal akan mengurangi pemberian dana kepada pemerintah negara bagian untuk membayar kesejahteraan rakyat di negara bagian tersebut. Menurut kelompok Katolik, dengan mengesahkan undang-undang tersebut pemerintah AS hanya berfokus pada permasalahan dependensi kesejahteraan masyarakat miskin yang bergantung pada bantuan pemerintah, tanpa berupaya untuk mengatasi kemiskinan yang sebenarnya merupakan sumber masalah di AS. *The block grant* juga melanggar prinsip *subsidiarity* yang menekankan komunitas besar untuk membantu komunitas kecil dalam menyediakan bantuan kepada masyarakat miskin.

Upaya kelompok agama dalam menggagalkan rancangan undang-undang tersebut adalah melalui lobi terhadap anggota Kongres serta berupaya untuk mempengaruhi Presiden Bill Clinton untuk memveto rancangan undang-undang tersebut. Pada 24 Januari 1994, *Catholic Charities* yang merupakan aliansi USCCB dalam menolak rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan, mempublikasikan pernyataan berjudul *Transforming the Welfare System*. Dalam pernyataan tersebut, *Catholic Charities* menekankan kebutuhan lapangan kerja dan upah keluarga di AS. Pada 1995, USCCB (pada masa itu masih bernama NCCB) juga mengeluarkan statemen mengenai prinsip kesejahteraan yang dinamakan *Moral Principles and Policy Priorities for Welfare Reform*. Dalam pernyataan tersebut, USCCB menekankan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama, bukan ketergantungan kesejahteraan. Selain itu, dalam pernyataan tersebut juga berisi peringatan tentang penghapusan hak kesejahteraan.

Tidak hanya mengeluarkan statemen resmi, USCCB juga bertemu dengan anggota Kongres AS dari negara bagian Florida, Clay Shaw dan dari negara bagian Missouri, Jim Talent. Keduanya anggota kongres tersebut merupakan perancang utama

dari rencana reformasi kesejahteraan. Dalam pertemuan tersebut kelompok Katolik berupaya untuk menyampaikan permasalahan dalam rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan yang bersangkutan dengan kepentingan atau keyakinan umat Katolik di AS. Sementara anggota Kongres AS berusaha menjelaskan alasan rasional dari rancangan undang-undang tersebut. Pandangan kelompok Katolik diterima dengan baik, akan tetapi pertemuan tersebut tidak menghasilkan dampak apapun terhadap rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan. Lebih lanjut, meskipun pertemuan dengan anggota Kongres AS diatas mengalami kegagalan, USCCB terus berupaya untuk mempengaruhi cabang legislatif dengan terus melakukan pertemuan dengan staf ahli anggota Kongres serta dengan mengirimkan surat-surat pernyataan kepada media berita di AS, salah satunya *the Washington Post*.

Upaya kelompok Katolik untuk menggagalkan rancangan undang-undang reformasi kesejahteraan tidak berhasil ketika rancangan undang-undang tersebut lolos di Kongres AS dan Presiden Bill Clinton memutuskan untuk menandatangani. Namun demikian, kelompok Katolik juga berhasil untuk merubah beberapa bagian dalam rancangan undang-undang tersebut. Bagian tersebut adalah mengenai *Medicaid block grant*, yang membatasi penggunaan dana federal yang diberikan kepada pemerintah negara bagian untuk menggunakan dana tersebut dalam hal asuransi kesehatan. keberhasilan kelompok Katolik dalam hal ini utamanya adalah merupakan hasil lobi terhadap bidang eksekutif serta janji politik Presiden Bill Clinton untuk tidak mengubah pertauran mengenai *Medicaid*. Selain itu, kelompok Katolik juga berhasil mengubah pasal atau ketentuan mengenai cap keluarga yang membatasi keuntungan kesejahteraan bagi wanita yang memiliki anak.

## **BAB 4 UPAYA KELOMPOK AGAMA DALAM MENOLAK PERNIKAHAN SESAMA JENIS DI AMERIKA SERIKAT**

Meskipun Mahkamah Agung AS telah melegalisasi pernikahan sesama jenis di AS pada 26 Juni 2015, penolakan kelompok agama terhadap pernikahan sesama jenis juga masih terus berlanjut, terutama ditingkat negara bagian. Untuk melihat bagaimana kelompok agama memperjuangkan oposisinya terhadap pernikahan sesama jenis di AS, penulis menggunakan konsep kelompok kepentingan. Melalui konsep kelompok kepentingan, kelompok agama diposisikan sebagai sebuah kelompok kepentingan yang mengadvokasikan anti pernikahan sesama jenis di AS.

Agar mendapatkan penjelasan yang lebih komprehensif, dalam bab ini penulis akan menjelaskan upaya-upaya yang digunakan oleh kelompok agama mulai dari upaya mereka mempengaruhi cabang legislatif AS agar meloloskan *Defense of Marriage Act* (DOMA) pada tahun 1996. Selanjutnya kelompok agama juga terus melakukan upaya untuk meloloskan undang-undang serupa dengan DOMA yang bertujuan untuk mempatenkan definisi pernikahan menjadi (hanya) pernikahan heteroseksual dalam Konstitusi AS. Undang-undang tersebut disebut dengan *Federal Marriage Amendment* (FMA) dan *Marriage Protection Act* (MPA)

Selain berupaya mempengaruhi cabang legislatif secara langsung, kelompok agama juga berupaya untuk mempengaruhi masyarakat AS untuk mendukung DOMA, FMA, MPA, serta membentuk opini masyarakat mengenai pernikahan melalui kampanye media massa. Kelompok agama juga berusaha untuk membangun jaringan yang mengadvokasikan kepentingannya dalam pemerintahan AS dengan mendukung calon-calon pejabat publik yang mendukung pernikahan heteroseksual dan berupaya menggalkan calon pejabat publik yang mendukung pernikahan homoseksual. Upaya-upaya tersebut juga dilengkapi dengan aksi demonstrasi untuk menggalkan dukungan lebih besar. Keseluruhan upaya tersebut kemudian akan dibahas dalam bab ini.

#### 4.1 Lobbying

Lobi merupakan salah satu jalur utama yang sering digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Melalui lobi, kelompok kepentingan mencoba menyampaikan kepada pejabat pemerintah mengenai opini atau kepentingannya terhadap suatu isu. Kongres AS menuliskan dalam *websitenya* bahwa lobi merupakan kegiatan yang mencoba untuk membujuk anggota Kongres AS untuk mengajukan, meloloskan, atau menolak undang-undang atau untuk mengubah hukum yang ada.<sup>1</sup> Peraturan mengenai lobi disebutkan dalam *Lobbying Disclosure Act 1995*. Dalam undang-undang tersebut aktivitas lobi didefinisikan sebagai:

*“... lobbying contacts and effort in support of such contacts, including preparation and planning activities, research and other background work that is intended, at the time it is performed, for use in contacts, and coordination with the lobbying activities or others.”<sup>2</sup>*

Sementara apa yang dimaksud dengan *lobbying contact* juga didefinisikan dengan jelas sebagai:

*“... any oral or written communication (including an electronic communication) to a covered executive branch official or a covered legislative branch official that is made on behalf of a client...”<sup>3</sup>*

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa meskipun sebegini besar lobi di AS banyak dilakukan terhadap cabang legislatif AS, akan tetapi cabang eksekutif maupun yudikatif juga seringkali menerima aktivitas lobi dari kelompok-kelompok kepentingan. Hal tersebut juga dilakukan oleh kelompok agama dalam hal pernikahan sesama jenis, baik dalam tingkat federal maupun negara bagian

Untuk dapat melihat bagaimana kelompok agama berupaya untuk mempengaruhi cabang pemerintahan di AS dalam isu homoseksual, penulis akan

---

<sup>1</sup>United States Senate. *Lobbying*. Diakses dari [http://www.senate.gov/reference/reference\\_index\\_subjects/Lobbying\\_vrd.htm](http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Lobbying_vrd.htm) pada 5 Juni 2016

<sup>2</sup>Office of the Clerk. *Lobbying Disclosure Act*. Diakses dari <http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html> pada 5 Juni 2016

<sup>3</sup>*Ibid.*

menggunakan beberapa undang-undang federal ataupun negara bagian dimana kelompok agama mengambil peranan baik untuk mendukung ataupun menolak.

#### 4.1.1 *Defense of Marriage Act (DOMA)*

DOMA diusulkan oleh anggota HoR pada 7 Mei 1996.<sup>4</sup> Dalam Kongres AS, DOMA tercatat sebagai H.R.3396 dan terdiri dari 3 bagian.<sup>5</sup> Bagian pertama memperjelas bahwa undang-undang tersebut disebut dengan DOMA. Bagian kedua berjudul '*Powers Reserved to the States*' dan berisi:

*'No State, territory, or possession of the United States, or Indian tribe, shall be required to give effect to any public act, record, or judicial proceeding of any other State, territory, possession, or tribe respecting a relationship between persons of the same sex that is treated as a marriage under the laws of such other State, territory, possession, or tribe, or a right or claim arising from such relationship.'*<sup>6</sup>

Dari statemen diatas dijelaskan bahwa setiap negara bagian tidak dipaksa untuk mengakui undang-undang, kebijakan publik, maupun proses pengadilan dari negara bagian lain dalam hal pernikahan. Dengan demikian, klausul *Full Faith and Credit* tidak berlaku ketika menyangkut hal pernikahan. Setiap negara bagian juga memiliki kebebasan tersendiri untuk membuat kebijakan mengenai pernikahan sesama jenis: apakah pernikahan tersebut diakui dimata hukum negara bagian atau tidak. Sebagai contoh dari bagian kedua DOMA adalah apabila pasangan sesama jenis menikah di salah satu negara bagian AS yang telah mengakui pernikahan homoseksual kemudian pergi atau tinggal di negara bagian yang tidak mengakui pernikahan sesama jenis, pasangan tersebut tidak diakui sebagai pasangan yang telah menikah di negara bagian dimana mereka bepergian atau tinggal.

<sup>4</sup>Congress.gov. *H.R.3396 – Defense of Marriage Act*. Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3396/summary> pada 5 Juni 2016

<sup>5</sup>Congress.gov. *H.R.3396 – Defense of Marriage Act*. Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3396/text/enr> pada 5 Juni 2016

<sup>6</sup>U.S. Government Publishing Office. *H.R.3396*. Diakses dari <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf> pada 5 Juni 2016

Sementara bagian kedua mengatur mengenai pernikahan di negara bagian, bagian ketiga DOMA mengatur mengenai pernikahan dalam level federal. Bagian ketiga tersebut berjudul '*Definition of Marriage*' dan berisi:

*"In determining the meaning of any Act of Congress, or of any ruling, regulation, or interpretation of the various administrative bureaus and agencies of the United States, the word 'marriage' means only a legal union between one man and one woman as husband and wife, and the word 'spouse' refers only to a person of the opposite sex who is a husband or a wife."*<sup>7</sup>

Bagian ketiga diatas menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pemerintah AS dalam hal pernikahan, khususnya ketika berkaitan dengan hak-hak kaum LGBT. Dengan adanya bagian ketiga diatas, pernikahan sesama jenis tidak diakui oleh pemerintah federal AS, sehingga pemerintah AS tidak memiliki kewajiban untuk memberikan keuntungan seperti halnya kepada pasangan heteroseksual. Salah satu contohnya adalah keringanan pajak.

Bagaimana DOMA kemudian diusulkan adalah dikarenakan keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii dalam kasus *Baehr v. Lewin*. Dalam kasus tersebut Nina Baehr bersama dengan dua pasangan homoseksual lainnya menggugat negara bagian Hawaii yang menolak untuk mengeluarkan lisensi pernikahan sesama jenis. Keputusan final pengadilan negara bagian Hawaii memberikan kemenangan kepada Nina Baehr dengan menyatakan bahwa larangan pernikahan sesama jenis di negara bagian Hawaii melawan konstitusi negara bagian Hawaii.

Keputusan negara bagian Hawaii tersebut menjadikan masyarakat AS terbelah menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang mendukung pernikahan sesama jenis dan menyambut baik keputusan tersebut. Kelompok ini umumnya adalah kelompok LGBT atau kelompok-kelompok yang pro terhadap kaum LGBT. Kedua, kelompok yang mengutuk keputusan pengadilan negara bagian Hawaii dan memandangnya sebagai ancaman terhadap masyarakat AS. Dari kedua kelompok tersebut, kelompok

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

kedua memiliki jumlah massa yang lebih besar. Kelompok ini memandang bahwa pernikahan sesama jenis salah secara moral.<sup>8</sup>

Berdasarkan klausul *Full Faith and Credit* Konstitusi AS, setiap negara bagian harus mengakui keputusan hukum di negara bagian lain. Ketika pengadilan negara Hawaii menyatakan bahwa pasangan sesama jenis berhak untuk mendapatkan lisensi pernikahan seperti halnya pasangan heteroseksual, maka negara bagian lain juga harus mematuhi putusan tersebut. Sementara pada masa itu tidak satupun negara bagian AS yang menyetujui tindakan atau bahkan pernikahan sesama jenis. Tidak hanya di negara bagian lainnya, mayoritas masyarakat negara bagian Hawaii juga tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Jajak pendapat yang dilakukan pasca keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii menunjukkan bahwa lebih dari 70% masyarakat negara bagian Hawaii menolak legalisasi pernikahan sesama jenis.<sup>9</sup> Bahkan dengan adanya keputusan pengadilan tinggi negara bagian Hawaii persentase masyarakat yang menolak pernikahan sesama jenis tidak menurun, sebaliknya persentase tersebut cenderung meningkat.

Keputusan fenomenal pengadilan tinggi negara bagian Hawaii dan adanya klausul *Full Faith and Credit* kemudian memicu reaksi kelompok-kelompok yang menolak pernikahan sesama jenis. Katolik Roma, *Latter-day Saint*, dan komunitas Protestan Evangelis memobilisasi masyarakat (negara bagian Hawaii) untuk menegaskan kembali definisi pernikahan tradisional.<sup>10</sup> Kelompok agama tersebut mendorong badan legislatif negara bagian Hawaii pada tahun 1994 untuk menyatakan bahwa keputusan pengadilan negara bagian adalah salah dan menegaskan kembali pernikahan adalah antara satu lelaki dengan satu perempuan. Merespon hal tersebut,

---

<sup>8</sup>Todd Donovan, dkk. 2014. *State and Local Politics*. US: Cengage Learning. Hlm. 476. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzIUrcXOY0w5qHqnje9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHxK\\_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false](https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzIUrcXOY0w5qHqnje9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHxK_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false) pada 5 Juni 2016

<sup>9</sup>David Orgon Coolidge. 1997. *Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ...*. Diakses dari <http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes> pada 5 Juni 2016

<sup>10</sup>*Ibid.*

badan legislatif negara bagian Hawaii kemudian berupaya untuk mengamandemen konstitusi negara bagian Hawaii. Akan tetapi upaya tersebut mengalami kegagalan.<sup>11</sup> Selain itu, pada tahun 1995 pemerintah negara bagian Hawaii menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis.<sup>12</sup>

Sementara itu di negara bagian lainnya, kelompok yang menolak pernikahan sesama jenis juga berupaya melobi pemerintahnya untuk membuat peraturan yang melarang pernikahan sesama jenis. Kelompok kepentingan aktif di negara bagian-negara bagian yang memiliki afiliasi dengan kelompok agama, khususnya kelompok Katolik Roma dan Protestan Evangelis, menekankan pada alasan moral dalam melakukan aktivitas lobi.<sup>13</sup> Kelompok ini menyamakan isu pernikahan sesama jenis seperti isu aborsi yang dilarang secara tegas oleh agama. Belajar dari isu aborsi, kelompok agama melihat pentingnya untuk mendefinisikan sebuah isu secara tegas dengan melandaskan pada prinsip moral untuk menarik perhatian masyarakat.<sup>14</sup> Selain itu, untuk menarik dukungan massa yang lebih besar, kelompok tersebut juga menekankan pernikahan sesama jenis sebagai ancaman terhadap *sacred institution*, yaitu pernikahan heteroseksual. Sebagai ancaman terhadap pernikahan lawan jenis, pernikahan homoseksual juga mengancam pondasi moral masyarakat AS yang akan menyebabkan poligami, perzinahan, dan kerusuhan dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Pasca keputusan negara bagian Hawaii, kedua kelompok yang berkepentingan—kelompok pro pernikahan sesama jenis dan kelompok agama yang menolak pernikahan

---

<sup>11</sup>Arthur S. Leonard. 1997. *Going for the Brass Ring: The Case for Same-Sex Marriage*. Cornell Law Review. Hlm. 572. Diakses dari <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol82/iss3/3/> pada 5 Juni 2016

<sup>12</sup>David Orgon Coolidge. 1997. *Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ...*. Diakses dari <http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes> pada 5 Juni 2016

<sup>13</sup>Todd Donovan, dkk. 2014. *State ... Loc. Cit.*

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Ronald L. Steiner. 2009. Dalam Todd Donovan, dkk. 2014. . *State and Local Politics*. US: Cengage Learning. Hlm. 476. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzIUrcXOY0w5qHqnije9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWmt48KHXX\\_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false](https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzIUrcXOY0w5qHqnije9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWmt48KHXX_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false) pada 5 Juni 2016

sesama jenis—membawa isu pernikahan sesama jenis ke tingkat pemerintah federal.<sup>16</sup> Pemerintah federal, khususnya badan legislatif, pada tahun 1996 didominasi oleh partai Republik yang memiliki pandangan konservatif dibandingkan liberal. Selain itu, Partai Republik pada tahun 1990-an memiliki jumlah konstituen yang besar dari kelompok agama.<sup>17</sup> Hal tersebut sedikit banyak kemudian mempengaruhi keberhasilan kelompok agama dalam melobi Kongres AS untuk mencapai tujuannya. Namun demikian, terlepas dari upaya lobi kelompok agama, Kongres AS juga menyadari adanya potensi konflik antar negara bagian yang mungkin dapat terjadi dalam hal pernikahan sesama jenis. Maka dari itu untuk mencegah adanya konflik antar negara bagian di masa depan, Kongres AS kemudian membuat undang-undang yang bernama DOMA.

DOMA diusulkan oleh anggota HoR, Bob Barr, pada 7 Mei 1996.<sup>18</sup> Bob Barr merupakan perwakilan dari negara bagian Georgia dari Partai Republik AS. Ia dikenal sebagai Kristen konservatif dan konstitusionalis yang memiliki pendukung terbanyak dari kalangan pemilih evangelis.<sup>19</sup> Selain pernah bekerja sebagai karyawan *Central Intelligence Agency* (CIA) dan pengacara, pada tahun 2008 Bob Barr sempat mencalonkan diri sebagai Presiden dari Partai *Libertarian*. Sebagai politisi yang banyak mendapatkan dukungan dari kaum evangelis, selama menjadi anggota HoR, Bob Barr banyak mengadvokasi nilai-nilai moral yang diusung oleh agama seperti peperangan terhadap narkoba dan pernikahan kaum gay. Begitu pula selama masa

<sup>16</sup>Todd Donovan, dkk. 2014. *State ... Op. Cit.* Hlm. 477.

<sup>17</sup>John C. Green. Dalam Mary Beth Altier, dkk. 2014. *Violence, Elections, and Party Politics*. United Kingdom: Routledge. Hlm. 32. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=VNq\\_CwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=republican+party+religious+affiliation+in+1990&source=bl&ots=bQXrzCDaDG&sig=qHRMY00nebeUMWrXRU4p0UCxZhs&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV0bCcms7NAhUFqY8KHUJRAj0Q6AEIXzAJ#v=onepage&q=republican%20party%20religious%20affiliation%20in%201990&f=false](https://books.google.co.id/books?id=VNq_CwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=republican+party+religious+affiliation+in+1990&source=bl&ots=bQXrzCDaDG&sig=qHRMY00nebeUMWrXRU4p0UCxZhs&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV0bCcms7NAhUFqY8KHUJRAj0Q6AEIXzAJ#v=onepage&q=republican%20party%20religious%20affiliation%20in%201990&f=false) pada 5 Juni 2016

<sup>18</sup>Congress.gov. *H.R.3396 – Defense of Marriage Act*. Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3396/summary> pada 5 Juni 2016

<sup>19</sup>Conservapedia. *Bob Barr*. Diakses dari [http://www.conservapedia.com/Bob\\_Barr](http://www.conservapedia.com/Bob_Barr). Sebagai seorang Kristen konservatif, Bob Barr cenderung mengikuti nilai-nilai agama konservatif mengenai apa yang dilarang dan diperbolehkan, terutama ketika berkaitan dengan moralitas. Sementara sebagai konstitusionalis, ia sangat berpegang teguh pada *text book* Konstitusi AS dan menentang berbagai usulan yang bertujuan merubah Konstitusi AS.

kampanyenya sebagai bakal calon Presiden, Bob Barr mengkampanyekan anti-aborsi yang secara tegas ditolak oleh kelompok agama.

Setelah dikenalkan di *chamber* HoR, pada 9 Juli 1996 *Committee on Judiciary* yang bertanggung jawab untuk melakukan penelitian mengenai rancangan DOMA, melaporkan mengenai hasil investigasinya. Dalam laporan tersebut dituliskan secara lengkap mengenai urgensi dari DOMA, mulai dari latar belakang DOMA hingga *hearings* yang dilakukan *sub-committee* HoR untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat. Pada latar belakangnya, disebutkan kembali bahwa diusulkannya DOMA adalah karena adanya keputusan pengadilan negara bagian Hawaii mengenai pernikahan sesama jenis.<sup>20</sup>

Dalam *hearings* yang dilakukan oleh *Committee of Justice*, Evgan Wolfson, *Director of the Marriage Project for the Lambda Legal Defense and Education Fund, Inc.* mengatakan bahwa setiap keputusan bersejarah yang mengubah paham tradisional masyarakat tentang suatu hal, selalu memicu reaksi yang besar. Pada pertengahan 1995, bahkan sebelum keputusan pengadilan negara bagian Hawaii di keluarkan, tiga negara bagian telah mengajukan rancangan undang-undang yang menolak pernikahan sesama jenis.<sup>21</sup> Perbedaan hukum atau undang-undang antar negara bagian di AS kemudian dapat memicu konflik lebih lanjut antar negara bagian, sehingga penting bagi pemerintah AS untuk membuat undang-undang yang mencegah konflik berkelanjutan antar negara bagian.<sup>22</sup> Selain itu, dalam *hearings* yang dilakukan dalam Kongres AS, para saksi maupun anggota cabang legislatif menyampaikan bahwa apabila laki-laki diijinkan untuk menikahi sesamanya, selanjutnya mereka akan diijinkan untuk

---

<sup>20</sup>Congress.gov. *H.R.3396 – Defense of Marriage Act*. Diakses dari <https://www.congress.gov/congressional-report/104th-congress/house-report/664> pada 5 Juni 2016

<sup>21</sup>US. G.P.O. *Full Text of “Defense of Marriage Act hearing before the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, second session, on H.R. 3396, Defense of Marriage Act, May, 15, 1996”*. Diakses dari [https://archive.org/stream/defenseofmarriag1996unit/defenseofmarriag1996unit\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/defenseofmarriag1996unit/defenseofmarriag1996unit_djvu.txt) pada 5 Juni 2016

<sup>22</sup> *Committee of Judiciary. 1996. H.Repy 104-664 – 104<sup>th</sup> Congress (1995-1996)*. Diakses dari <https://www.congress.gov/congressional-report/104th-congress/house-report/664> pada 5 Juni 2016

menikahi anak-anak dan hewan.<sup>23</sup> Hal tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran mengenai kolapsnya perdaban barat.<sup>24</sup>

Tiga hari setelah laporan yang disampaikan oleh *Committee of Justice*, rancangan DOMA lolos tahap voting di HoR. Dari keseluruhan anggota HoR pada masa itu 342 memberikan dukungan terhadap DOMA sementara 67 menolak DOMA.<sup>25</sup> Begitu pula dalam *chamber* Senat, DOMA lolos tanpa adanya amandemen dengan jumlah dukungan 85, 14 menolak, dan 1 tidak memberikan suaranya.<sup>26</sup> Meskipun pada tahun 1996 sebagian besar anggota Kongres AS mendukung DOMA, anggota Kongres yang hingga saat ini masih menjabat sebagian besar banyak yang beralih posisi untuk menghapus DOMA. Akan tetapi, dalam karya tulis ini, penulis akan lebih banyak menggunakan dan menganalisa argumentasi anggota Kongres atau data pada tahun 1996 untuk melihat kaitan antara kelompok agama dengan DOMA.

Formulasi DOMA 1996 memiliki kaitan yang besar dengan kelompok advokasi yang dibentuk oleh kelompok agama konservatif di AS. Didasari oleh keputusan pengadilan negara bagian Hawaii, kelompok *Christian Rights*<sup>27</sup> membuat koalisi bernama *National Campaign to Protect Marriage*.<sup>28</sup> *National Campaign to Protect Marriage* (NCPM) beranggotakan pemimpin-pemimpin dari *American Family Association*, *Colorado for Family Values*, *the Traditional Values Coalition*, *Family*

---

<sup>23</sup>Craig A. Rimmerman. *The Presidency, Congress, and Same-Sex Marriage*. Dalam Craig A. Rimmerman dan Clyde Wilcox (eds.) 2007. *The Politics of Same Sex-Marriage*. London: The University of Chicago Press. Hlm. 276

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>Clerk.house.gov. *Final Vote Results Roll Call 316*. Diakses dari <http://clerk.house.gov/evs/1996/roll316.xml> pada 5 Juni 2016

<sup>26</sup>United States Senate. *U.S. Senate Roll Call Votes 104<sup>th</sup> Congress – 2<sup>nd</sup> Session*. Diakses dari [http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll\\_call\\_lists/roll\\_call\\_vote\\_cfm.cfm?congress=104&session=2&vote=00280](http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=104&session=2&vote=00280) pada 5 Juni 2016

<sup>27</sup>*Christian Rights* merupakan kelompok aktivis umat Kristen di AS yang umumnya dipimpin oleh kelompok Evangelis konservatif yang sangat tegas dan keras terhadap pandangan-pandangannya. Dalam berpolitik, kelompok ini seringkali dilihat sebagai kelompok yang otoriter dan intoleran terhadap lawannya. Salah satu tokoh kelompok ini yaitu James Dobson. Selengkapnya mengenai *Christian Rights* dapat dilihat dalam *Not by Politics Alone: The Enduring Influence of the Christian Rights* oleh Sara Diamond.

<sup>28</sup>Sara Diamond. 1998. *Not by Politics Alone: The Enduring Influence of the Christian Rights*. New York: The Guilford Press. Hlm. 169

*Research Council, Concerned Women for America,*<sup>29</sup>*Focus on the Family* dan beberapa organisasi Kristen konservatif lainnya. Tujuan utama NCPM adalah mengkampanyekan anti pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian AS dan juga ditingkat federal.

Dalam upayanya mempengaruhi pemerintah negara bagian, NCPM memiliki perwakilan di 50 negara bagian AS dan membuat proposal '*marriage protection resolution*' untuk diusulkan di setiap cabang legislatif negara bagian AS.<sup>30</sup> Selain itu, anggota dari koalisi NCPM juga terkadang melakukan lobi independen yang mendukung tujuan NCPM. Contohnya, *Focus on the Family* yang mendistribusikan literatur atau referensi mengenai pernikahan sesama jenis kepada anggota legislatif di seluruh negara bagian AS.<sup>31</sup> Sementara dalam tingkatan federal, NCPM mendorong pembuatan DOMA di Kongres AS. Lou Sheldon, perwakilan dari *Traditional Values Coalition* yang merupakan koalisi dari NCPM membantu menuliskan proposal DOMA.<sup>32</sup> Lou Sheldon sendiri adalah seorang pastor Prebistarian yang memandang pernikahan sesama jenis sebagai '*D-day (death day)*'.<sup>33</sup>

Selain NCPM, ada pula organisasi Kristen lain yang memiliki peranan penting terhadap DOMA, yaitu *The National Legal Foundation* dan *Citizens for Community Values*. *The National Legal Foundation* adalah sebuah firma hukum Kristen yang berdedikasi terhadap pelestarian kebebasan Amerika dan hak konstitusional, serta bertujuan untuk merestorasi pondasi keagamaan (*America's Biblical*).<sup>34</sup> Sementara *Citizens for Community Values* adalah organisasi keagamaan yang bertujuan untuk

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup>Donald P. Haider-Markel. *Lesbian and Gay Politics in the States: Interest Groups, Electoral Politics, and Policy*. Dalam Craig A. Rimmerman, dkk (eds.) 2000. *The Politics of Gay Rights*. AS: The University of Chicago Press. Hlm. 307

<sup>32</sup>Jyl J. Josephson. 2016. *Rethinking Sexual Citizenship*. Albany: State University of New York. Hlm. 124

<sup>33</sup>Hanna Rosin. 2004. A Family Business: For the Rev. Lou Sheldon and His Daughter, Marriage Means Only One Thing. *The Washington Post*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A41187-2004May19.html> pada 5 Juni 2016

<sup>34</sup>Selengkapnya mengenai *the National legal Foundation*: <http://www.nlf.net/> pada 6 Juni 2016

mempromosikan nilai-nilai moral *Judeo-Christian*, dan untuk mengurangi perilaku destruktif yang berlawanan dengan nilai-nilai tersebut melalui pendidikan, kerjasama komunitas, dan pembedayaan individu pada level lokal, negara bagian, dan nasional.<sup>35</sup> Kedua organisasi tersebut memiliki peranan penting dalam mempromosikan DOMA dan mendorong pemerintah negara bagian untuk mengamandemen DOMA sebagai undang-undang di negara bagiannya.<sup>36</sup>

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, DOMA berhasil lolos dalam Kongres AS dengan dukungan yang besar baik dari HoR maupun Senat. Dari 85 anggota Senat yang mendukung DOMA, salah satunya adalah Barbara A. Mikulski. Barbara A. Mikulski merupakan anggota senat Partai Demokrat dari negara bagian Maryland.<sup>37</sup> Barbara menyatakan bahwa ada dua alasan mengapa pada tahun 1996 ia mendukung DOMA karena dua alasan. *Pertama*, kekhawatiran mengenai amandemen konstitusi yang akan melarang pernikahan sesama jenis di AS di tingkatan federal secara keseluruhan. *Kedua*, karena menurutnya pembebasan agama dari hukum negara pada masa itu masih belum efektif.<sup>38</sup> Sementara menurut Elizabeth Birch, dukungan Mikulski terhadap DOMA disebabkan oleh banyaknya konstituen Mikulski di Maryland yang beragama Katolik.<sup>39</sup>

Hubungan antara konstituen dengan perwakilan di Kongres AS memang merupakan jalur lobi yang paling potensial dan sering digunakan oleh kelompok-kelompok di AS. Konstituen anggota Kongres AS yang banyak berasal dari kelompok keagamaan, baik Katolik maupun Protestan, memberikan dorongan kepada anggota Kongres AS untuk meloloskan DOMA. Bob Barr, yang memperkenalkan DOMA, juga

---

<sup>35</sup>Selengkapnya mengenai *Citizens for Community Values*: <http://www.ccv.org/about-us/> pada 6 Juni 2016

<sup>36</sup>Jyl J. Josephson. 2016. *Rethinking Sexual Citizenship*. Albany: State University of New York. Hlm. 124

<sup>37</sup>Barbara A. Mikulski. *Senator Barbara A. Mikulski*. Diakses dari <https://www.mikulski.senate.gov/about-barbara/biography> pada 6 Juni 2016

<sup>38</sup>Chris Johnson. 2015. *Mikulski Rallies Behind Clinton on DOMA History*. Diakses dari <http://www.washingtonblade.com/2015/10/27/mikulski-rallies-behind-clinton-on-doma-history/> pada 6 Juni 2016

<sup>39</sup>*Ibid.*

menggunakan argumentasi kelompok agama dalam melihat isu pernikahan sesama jenis. Pada masa itu, ia mengatakan kepada koleganya bahwa dasar-dasar masyarakat AS sedang berada dalam bahaya.<sup>40</sup> Argumen tersebut adalah argumen yang sama yang sebelumnya digunakan oleh kelompok agama untuk menarik simpati masyarakat AS menolak pernikahan sesama jenis.

Lebih lanjut, dalam perdebatan selama proses pembuatan DOMA di Kongres AS, Bob Barr menyampaikan pentingnya DOMA bagi masyarakat AS karena hedonism, narsisme dan moralitas yang egois sedang menggerogoti dasar masyarakat, yaitu keluarga.<sup>41</sup> Hal tersebut sama dengan yang disampaikan oleh ketua *Committee of Judiciary*, Charles T. Canady, Perwakilan Partai Republik dari negara bagian Florida, yang menyatakan bahwa pernikahan tradisional<sup>42</sup> yang menekankan pada penyatuan hukum antara seorang perempuan dan seorang lelaki, sesuai dengan alam dan tradisi moral AS, yaitu *Judeo-Christian*.<sup>43</sup> Negara bagian Florida merupakan salah satu negara bagian yang termasuk dalam wilayah *the South*. Berdasarkan hasil survei, wilayah *the South* hingga saat ini merupakan wilayah yang tingkat religiusitas masyarakatnya tinggi.<sup>44</sup>

Dengan lolosnya DOMA menjadi undang-undang resmi di AS, maka kelompok agama tidak hanya berhasil untuk mencegah legalitas pernikahan homoseksual di

<sup>40</sup>Nick Ramsey. 2013. *How-and why-DOMA became Law in 1996*. Diakses dari <http://www.msnbc.com/the-last-word/how-and-why-doma-became-law-1996> pada 6 Juni 2016

<sup>41</sup>Jerry Gray. 1996. *House Passes Bar to U.S Sanction of Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/07/13/us/house-passes-bar-to-us-sanction-of-gay-marriage.html> pada 6 Juni 2016

<sup>42</sup>Ketika berkaitan dengan pernikahan sesama jenis di AS, definisi pernikahan tradisional seringkali menjadi diperdebatkan. *Discussingmarriage.org* menjelaskan terdapat 2 pandangan berbeda ketika menyangkut definisi pernikahan. Pertama, pandangan *conjugal*, yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara lelaki dengan perempuan. Kedua, pandangan *revisionist*, yang mendefinisikan pernikahan lebih sebagai persatuan emosional dan seksual tanpa memandang jenis kelamin. Dalam penelitian ini, arti pernikahan tradisional yang digunakan adalah pandangan *conjugal* yang mendefinisikan pernikahan sebagai persatuan antara lelaki dengan perempuan. Selengkapnya dapat dilihat di <http://discussingmarriage.org/the-conjugal-vs-revisionist-views-of-marriage/#.V-jm34h97IU>

<sup>43</sup>*Ibid.*

<sup>44</sup>Tingkat religiusitas negara bagian Amerika dapat dilihat di <https://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2015/02/26/the-religious-states-of-america-in-22-maps/> atau <http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/>

seluruh negara bagian AS, akan tetapi kelompok agama juga berhasil untuk mendefinisikan (atau mempertahankan) pernikahan tradisional antara lelaki dengan perempuan. Secara tidak langsung, hal tersebut melarang adanya pernikahan sesama jenis di AS dalam kacamata pemerintah federal AS. Selain itu, karena pemerintah federal AS dengan jelas memberikan keleluasaan kepada pemerintah negara bagian untuk mengakui ataupun menolak pernikahan sesama jenis di wilayah bagiannya, perjuangan kelompok LGBT kemudian turun ke level negara bagian. Begitu pula dengan perjuangan kelompok agama yang terus berupaya untuk mencegah pemerintah negara bagian untuk mengakui pernikahan sesama jenis. Meskipun, pada masa itu, sebagian besar masyarakat (67%) AS menolak untuk mendefinisikan kembali konsep pernikahan tradisional menjadi pernikahan yang mengakui penyatuan sesama jenis.<sup>45</sup>

Namun demikian, perjuangan kelompok agama dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah federal juga tidak seketika berhenti dengan adanya DOMA. Akan tetapi perjuangan kelompok tersebut terus berlanjut untuk target yang jauh lebih paten daripada DOMA. Melalui *Federal Marriage Amendment*, kelompok kontra legalisasi pernikahan sesama jenis di AS berupaya untuk mengamandemen konstitusi AS agar mendefinisikan secara jelas pernikahan menjadi pernikahan antara lelaki dengan perempuan. Apabila *Federal Marriage Amendment* berhasil dibuat, maka pernikahan sesama jenis di seluruh negara bagian AS akan menjadi ilegal.

#### 4.1.2 *Federal Marriage Amendment (FMA)* dan *Marriage Protection Act (MPA)*

Perusahaan FMA pertama kali diusulkan oleh anggota Kongres yang berasal dari Partai Demokrat yang secara umum jauh lebih liberal dibandingkan Partai Republik. Ronnie Shows, yang pertama kali memperkenalkan FMA pada 15 Mei

---

<sup>45</sup>David Orgon Coolidge. 1997. *Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ...*. Diakses dari <http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes> pada 6 Juni 2016

2002.<sup>46</sup> Selain Ronnie Shows sebagai sponsor, FMA juga didukung oleh 22 anggota HoR sebagai co-sponsor. Dari 22 co-sponsor tersebut, 19 diantaranya berasal dari Partai Republik dan 3 berasal dari Partai Demokrat. Namun demikian, FMA hanya sampai pada tahap pengenalan di HoR dan tidak sempat berlanjut pada tahap selanjutnya.

Kegagalan FMA pada tahun 2002 tidak menjadikan kelompok agama berhenti mempengaruhi Kongres untuk kembali meloloskan undang-undang yang sama. Pada tahun 2003, FMA dua kali diusulkan oleh anggota Kongres yang berbeda namun dengan teks yang sama. Pertama, pada 21 Mei 2003 oleh Marilyn Musgrave yang merupakan perwakilan HoR dari Partai Republik dari negara bagian Colorado. Usulan Marilyn Musgrave didukung oleh 131 co-sponsor dengan komposisi 122 dari Partai Republik dan 9 dari Partai Demokrat. Kedua, FMA diusulkan oleh anggota Senat, Wayne Alard, dari partai Republik dari negara bagian Colorado. Diusulkan pada 25 November 2003, FMA didukung oleh 10 co-sponsor dengan komposisi 9 dari Partai Republik dan 1 dari Partai Demokrat. Kedua usulan tersebut hanya sampai pada tahap pengenalan di HoR atau Senat tanpa melalui voting di kedua *chamber*. Sama seperti kegagalan FMA pertama kali, rancangan amandemen tersebut gagal ketika di serahkan kepada Komite di HoR ataupun di Senat yang menyatakan bahwa FMA tidak dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya.

Tiga kali diusulkan di Kongres AS, teks FMA tidak berubah semenjak diusulkan pertama kali oleh Ronnie Shows, yaitu:

*“Marriage in the United States shall consist only of the union of a man and a woman. Neither this Constitution or the constitution of any State, nor state or federal law, shall be construed to require that marital status or the legal incidents thereof be conferred upon unmarried couples or groups.”*

---

<sup>46</sup>Semua tanggal dan komposisi co-sponsor FMA diakses dari Govtrack.us. Diakses dari <https://www.govtrack.us/congress/bills/browse?text=federal+marriage+amendment#congress=108&sort=relevance> pada 8 Juni 2016

Dari isi teksnya, FMA secara jelas mendefinisikan pernikahan di AS hanya antara lelaki dengan perempuan. Berbeda dengan DOMA yang memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian untuk mendefinisikan pernikahan sesuai dengan keinginan masyarakat di wilayahnya, FMA tidak memberikan kewenangan serupa kepada pemerintah negara bagian.

Pada 7 Juli 2004, Senator Wayne Allard kembali memperkenalkan FMA dengan sedikit perubahan teks, yaitu:

*“Marriage in the United States shall consist only of the union of a man and a woman. Neither this Constitution, nor the constitution of any State, shall be construed to require that marriage or the legal incidents thereof be conferred upon any union other than the union of a man and a woman.”*

Pada isi teks diatas, terdapat perubahan antara ‘*marital status*’ menjadi ‘*marriage*’ dan ‘*unmarried couples or groups*’ menjadi ‘*any union other than the union of a man and a woman*’. *Marital status* mengacu pada keadaan seseorang apakah ia menikah, berpisah, bercerai, lajang atau janda/duda.<sup>47</sup> Sementara *marriage* secara eksplisit mengacu pada persatuan hukum antara lelaki dan perempuan. Kata ‘*groups*’ pada teks pertama mengacu pada beberapa hubungan yang melibatkan lebih dari individu (poligami).<sup>48</sup> Sementara pada teks kedua, yang menggunakan ‘*any union other than the union of a man and a woman*’, FMA secara spesifik mengacu pada pernikahan sesama jenis. Dengan sedikit perubahan tersebut, FMA berhasil lolos di tahap Komite di Senat, dimana pada tanggal 8 Juli 2004, *Senate Committee on Judiciary* merekomendasikan agar FMA didiskusikan lebih lanjut.<sup>49</sup> akan tetapi, FMA

---

<sup>47</sup>Oxford Dictionaries. Diakses dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-status> pada 8 Juni 2016

<sup>48</sup>Religious Tolerance.org. *Proposed Federal Marriage Amendment to the U.S. Constitution: Introduction to the Bill as Originally Worded in 2002*. Diakses dari [http://www.religioustolerance.org/mar\\_amend1.htm](http://www.religioustolerance.org/mar_amend1.htm) pada 8 Juni 2016

<sup>49</sup>Govtrack.us. *S.J.Res. 40 (108<sup>th</sup>): Federal Marriage Amendment*. Diakses dari <https://www.govtrack.us/congress/bills/108/sjres40> pada 8 Juni 2016

kembali gagal ketika pada 14 Juli 2004 Senat menggunakan *cloture rule*<sup>50</sup> untuk menggagalkan FMA melangkah pada tahap selanjutnya.

Hingga tahun 2015, FMA terus menerus diusulkan kembali oleh anggota Kongres AS baik melalui Senat ataupun HoR. Dalam pengenalan kembali tersebut naskah atau isi dari FMA tidak berubah. Akan tetapi nama FMA berubah menjadi *Marriage Protection Amendment*. *Marriage Protection Amendment* terakhir diusulkan kembali pada 12 Februari 2015 oleh Tim Huelskamp yang merupakan anggota HoR Partai Republik dari negara bagian Kansas. Hingga penelitian ini dituliskan, MPA masih dalam tahap *review* oleh *House Committee of Judiciary*.

Selain FMA, kelompok agama juga berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah AS melalui usulan undang-undang *Marriage Protection Act* (MPA). MPA diusulkan oleh John Hostettler, anggota HoR Partai Republik dari negara bagian Indiana pada 16 Oktober 2003. Usulan John Hostettler tersebut didukung oleh 48 co-sponsor dengan komposisi 47 anggota HoR Partai Republik dan 1 anggota HoR Partai Demokrat. MPA bertujuan untuk melindungi DOMA dari pengadilan federal AS yang mungkin menyatakan DOMA tidak konstitusional. Latar belakang dari munculnya MPA adalah keputusan Mahkamah Agung AS dalam kasus *Lawrence v. Texas* pada Juni 2003. Melalui keputusan tersebut, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa undang-undang negara bagian Texas mengenai sodomi homoseksual tidak sesuai dengan konstitusi AS. Hal tersebut kemudian menimbulkan kekhawatiran kelompok agama bahwa kelompok LGBT akan menjadi lebih agresif dalam mengadvokasikan hak-haknya melalui Mahkamah Agung AS.

Berbeda dengan FMA yang gagal ketika diberikan kepada *House Committee of Judiciary* pada saat pertama kali diusulkan, MPA sempat melalui beberapa tahap sebelum akhirnya gagal menjadi undang-undang. Pada 14 Juli 2004, *House Committee*

---

<sup>50</sup>*Cloture rule* adalah prosedur formal yang digunakan oleh Senat AS untuk mengakhiri filibuster, yaitu upaya untuk memblok atau menunda keputusan Senat terhadap sebuah rancangan undang-undang. Selengkapnya mengenai *cloture rule* dapat dilihat di [http://www.senate.gov/reference/reference\\_index\\_subjects/Cloture\\_vrd.htm](http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Cloture_vrd.htm)

*of Judiciary* Kongres AS merekomendasikan agar MPA dibahas lebih lanjut namun dengan beberapa perubahan didalamnya. MPA lolos dalam proses di HoR dan kemudian dikirimkan kepada Senat untuk dibahas dan disetujui. Namun MPA kemudian gagal dalam Senat. Sebelumnya dalam rangka meloloskan MPA di tingkat HoR, kelompok agama menggunakan momentum pemilu untuk mendapatkan dukungan dari salah satu kandidat presiden pada masa itu. Hal tersebut akan penulis bahas pada sub-bab pemilu dalam bab ini.

FMA dan MPA adalah dua rancangan undang-undang yang saling berkaitan satu sama lain. Kedua rancangan undang-undang tersebut didukung penuh oleh kelompok agama yang menolak pernikahan sesama jenis dan merasakan adanya ancaman dari kelompok LGBT. FMA sendiri pertama kali diusulkan kepada Kongres AS pada tahun 2002 oleh persatuan organisasi, *the Alliance for Marriage*, dan komentator Kristen terkenal, James Dobson.<sup>51</sup> *The Alliance for Marriage* merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada 1999 oleh Matt Daniels. Tujuan utama dari *the Alliance for Marriage* adalah untuk mempromosikan amandemen terhadap konstitusi AS yang mengatur mengenai pernikahan.

Sementara James Dobson adalah pendiri *Focus on the Family*, sebuah organisasi non-profit yang memproduksi program radio internasional yang juga dipandu oleh James Dobson.<sup>52</sup> Selain itu, James Dobson juga merupakan seorang penulis buku yang memfokuskan pada isu-isu keluarga. Ia juga pendiri sekaligus direktur dari beberapa organisasi yang mengadvokasikan isu-isu keluarga, di antaranya *Family Research Council* dan *Family Talk*. Sebagai seorang Kristen Protestan

---

<sup>51</sup>Anna Grzymala-Busse. 2015. *Nations Under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy*. New Jersey: Princeton University Press. Hlm. 284. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxH\\_e0MIAtLU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false](https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxH_e0MIAtLU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false) pada 8 Juni 2016

<sup>52</sup>New Release Today. *Dr. James Dobson Author Profile*. Diakses dari [http://www.newreleasetoday.com/authordetail.php?aut\\_id=206](http://www.newreleasetoday.com/authordetail.php?aut_id=206) pada 8 Juni 2016

Evangelis, James Dobson sangat tegas terhadap definisi pernikahan tradisional. Dalam website *Family Talk* ia menyatakan misinya adalah:

*"To help preserve and promote the institution of the family and the biblical principles on which it is based, and to seek to introduce as many people as possible to the gospel of Jesus Christ. Specifically, the focus of the ministry is on marriage, parenthood, evangelism, the sanctity of human life and encouraging righteousness in the culture."*<sup>53</sup>

Tidak hanya mengusulkan, *the Alliance for Marriage* merupakan organisasi yang membuat draft FMA.<sup>54</sup> Matt Daniels berargumen bahwa pernikahan homoseksual adalah ancaman terbesar terhadap pernikahan tradisional.<sup>55</sup> Selain itu, Daniels juga menekankan pentingnya ibu dan ayah dalam sebuah keluarga. Pandangan Daniels tersebut banyak dipengaruhi oleh pengalaman hidup serta afiliasinya dengan gereja kulit hitam. Daniels berpegang teguh pada perjuangannya untuk melindungi hal yang tidak pernah dimilikinya, yaitu figure seorang ayah yang membesarkan seorang anak dalam keluarga tradisional.<sup>56</sup> Selain itu, Daniels juga merupakan anggota dari Gereja Kulit Hitam. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kelompok agama Protestan Kulit Hitam merupakan kelompok agama kedua yang paling menolak legalisasi pernikahan sesama jenis di AS. Kelompok Protestan Kulit Hitam mendasarkan pandangannya mengenai homoseksualitas pada interpretasi literatur Al-Kitab.<sup>57</sup> Akan tetapi karena aliansi politiknya dengan sosial liberal dalam Partai Demokrat,

<sup>53</sup>Family Talk. *Our Mission*. Diakses dari <http://drjamesdobson.org/about/Statement-of-Faith> pada 8 Juni 2016

<sup>54</sup>Katherine Setenger. *Religiously Motivated Political Action and Same-Sex Marriage*. Dalam Ann W. Duncan dan Steven L. Jones (ed.). 2008. *Church States-Issues in America Today: Religions Convictions and Practices in Public Life*. Hlm. 52. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP\\_Aa4PoX&sig=qW\\_4bazDJusi8X7iGoA\\_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj4zLaK-dXNAhXJr48KHYdvA90Q6AEILzAD#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false](https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP_Aa4PoX&sig=qW_4bazDJusi8X7iGoA_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj4zLaK-dXNAhXJr48KHYdvA90Q6AEILzAD#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false) pada 8 Juni 2016

<sup>55</sup>Franklin Foer. 2014. Marriage Counselor. *The Atlantic*. Diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/03/marriage-counselor/302893/> pada 8 Juni 2016

<sup>56</sup>Karen S. Peterson. 2004. Man Behind the Marriage Amendment. *USA Today*. Diakses dari [http://usatoday30.usatoday.com/life/people/2004-04-12-matt-daniels\\_x.htm](http://usatoday30.usatoday.com/life/people/2004-04-12-matt-daniels_x.htm) pada 8 Juni 2016

<sup>57</sup>Franklin Foer. 2014. Marriage Counselor. *The Atlantic*. Diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/03/marriage-counselor/302893/> pada 8 Juni 2016

menjadikan kelompok Protestan Kulit Hitam terbatas dalam mengadvokasikan pandangannya.<sup>58</sup>

Meskipun Daniels adalah orang yang sangat dekat dengan kelompok agamanya, ia belajar dari keterbatasan gerakan kelompok *pro-life* dalam kasus aborsi yang sebagian besar hanya beranggotakan umat Katolik dan Evangelis dan kemudian berupaya untuk membuat gerakan multirasial.<sup>59</sup> Dengan motonya '*more children raise at home with a mother and a father*', *the Alliance for Marriage* terdiri dari berbagai anggota yang beragam secara etnis, agama dan politis.<sup>60</sup> Selain Katolik dan Protestan, anggota kelompok agama Yahudi dan Muslim yang menolak legalisasi pernikahan sesama jenis juga bergabung dalam *the Alliance for Marriage*.<sup>61</sup> Seorang pastor Cina bahkan menjadi anggota *board of advisor* dalam *the Alliance for Marriage*.<sup>62</sup>

Apabila *the Alliance for Marriage* banyak berjasa dalam penyusunan FMA, James Dobson banyak berperan dalam melobi pemerintah AS untuk mendukung FMA. Presiden AS pada masa itu, George W. Bush adalah salah satu pejabat publik yang berhasil dipengaruhi oleh James Dobson. Sebagai seorang aktivis Kristen yang aktif, James Dobson memiliki banyak pengikut dalam komunitas agamanya. Hal ini menjadi daya tawar bagi James Dobson untuk mendapatkan dukungan Bush. Pada tahun 2004, James Dobson mendekati ketua kampanye Bush dan menawarkan suara dari kelompok Kristen konservatif dengan ultimatum Bush harus mendukung FMA.<sup>63</sup> Pada tahun 2006, setelah Bush berhasil menjabat menjadi Presiden AS, membahas mengenai FMA

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>David C. Campbell dan Carin Robinson. *Religious Coalition For and Against Same Sex Marriage: The Culture War Rages On*. Dalam Craig A. Rimmerman dan Clyde Wilcox (eds.) 2007. *The Politics of Same-Sex Marriage*. London: The University of Chicago Press. Hlm. 147

<sup>60</sup>Sheryl Henderson Blunt. 2004. The Man Behind the Marriage Amendment. Christianity Today. Diakses dari <http://www.christianitytoday.com/ct/2004/september/15.46.html> pada 8 Juni 2016

<sup>61</sup>Alan Cooperman. 2003. Opponents of Gay Marriage Divided. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/11/29/opponents-of-gay-marriage-divided/f31eac80-8d4e-4008-910b-0941ec5ae274/> pada 8 Juni 2016

<sup>62</sup>David C. Campbell dan Carin Robinson. *Religious Coalition ... Loc.Cit.*

<sup>63</sup>Anna Grzymala-Busse. 2015. *Nations ... Loc.Cit*

pada acara siaran minggunya. Selain itu, Bush juga mengundang pendukung FMA ke Gedung Putih untuk mempromosikan FMA.<sup>64</sup>

Selain *the Alliance of Marriage*, kelompok agama di AS juga membentuk koalisi yang bernama *Religious Coalition for Marriage* untuk mendukung FMA maupun MPA. Berbeda dengan *the Alliance of Marriage* yang beragam tidak hanya dari segi agama, tetapi juga etnis dan politis, *Religious Coalition for Marriage* hanya beragam dari segi agama. Kelompok ini tidak hanya beranggotakan pemimpin kelompok agama Kristen, *National Association of Evangelicals*, tetapi juga termasuk pemimpin *the Southern Baptist Convention*, Katolik Roma, dan *the Union of Orthodox Jewish Congregations*.<sup>65</sup> Kelompok Katolik Roma memberikan dukungan terhadap FMA setelah Vatikan memberikan perintah untuk mempertahankan pernikahan tradisional.<sup>66</sup> *Religious Coalition for Marriage* dibentuk untuk melakukan lobi terhadap Kongres AS untuk mengamandemen Konstitusi AS sesuai dengan draft FMA. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok ini adalah melobi Senat untuk meloloskan FMA.<sup>67</sup>

Upaya kelompok agama untuk meloloskan FMA terus berlanjut hingga tahun 2015. Sementara MPA tidak dapat diusulkan kembali setelah adanya keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan bahwa DOMA tidak konstitusional. Ketika perjuangan kelompok agama mengalami kegagalan di tingkat federal, aktivis moral

---

<sup>64</sup>Peter Barker. 2006. Bush to Revisit Same-Sex Marriage Debate. *Pittsburgh Post-Gazette* – 3 Juni 2006. Diakses secara online di <https://news.google.com/newspapers?nid=1129&dat=20060603&id=TvVRAAAAIBAJS&sjid=OnIDAAAIBAJS&pg=6197,913833&hl=id> pada 8 Juni 2016

<sup>65</sup>Lodi News-Sentinel. 2006. Religious Leaders Clash Over Proposed Federal Marriage Amendment. *Lodi News-Sentinel*, 26 Mei 2006. Diakses secara online dari <https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=20060526&id=bPA0AAAIBAJS&sjid=SCEGA AAAIBAJS&pg=5215,3174980&hl=id> pada 10 Juni 2016

<sup>66</sup>The Associated Press. 2003. Catholic Bishops Back Marriage Amendment. *The Register-Guard National*, 11 September 2003. Diakses secara online dari <https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=20030911&id=10xWAAAAIBAJS&sjid=8esDAAAIBAJS&pg=5160,2115252&hl=id> pada 10 Juni 2016

<sup>67</sup>Jill Zuckman dan Anastasia Ustinova. Senate is New Arena in Battle to Ban Gay Marriage. *The Hour*, 11 Juli 2004. Diakses secara online dari <https://news.google.com/newspapers?nid=1916&dat=20040711&id=SQ4hAAAIBAJS&sjid=5HQFA AAAIBAJS&pg=1311,1446193&hl=id> pada 10 Juni 2016

dan politik lebih banyak berhasil di level negara bagian, dengan sebagian besar negara bagian meloloskan amandemen konstitusi negara bagian untuk melarang pernikahan sesama jenis.<sup>68</sup> Selain itu, dengan alasan bahwa keadaan Kongres AS yang didominasi oleh Partai Demokrat menjadi tidak kondusif untuk memperjuangkan FMA, sehingga kelompok oposisi pernikahan sesama jenis memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya dalam cabang legislatif negara bagian.<sup>69</sup>

#### 4.1.3 Kebijakan Negara Bagian

##### 4.1.3.1 Vermont

Pada Desember 1999, Mahkamah Agung negara bagian Vermont mengeluarkan perintah kepada cabang legislatif negara bagian Vermont untuk merancang sebuah metode yang menyediakan pasangan gay hak untuk menikah di negara bagian Vermont.<sup>70</sup> Keputusan tersebut dikeluarkan dalam kasus *Baker v. Vermont*, dimana pasangan gay, Jack Baker dan Mike McConnell, menuntut negara (Vermont) karena menolak mengeluarkan lisensi pernikahan. Dalam pengadilan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung Vermont, beberapa kelompok agama kembali menjadi *amicus curiae* untuk menolak ataupun mendukung legalisasi pernikahan sesama jenis di negara bagian Vermont.<sup>71</sup> Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kelompok agama di AS, seperti Yahudi, memang mendukung pernikahan sesama jenis dengan argumen hak asasi manusia. Sementara kelompok agama Katolik Roma dan *Latter-DaySaint* merupakan kelompok yang menentang pernikahan sesama jenis.

Setelah Mahkamah Agung Vermont mengeluarkan perintah agar cabang legislatif Vermont menyediakan platform bagi kaum gay untuk menikah, perdebatan

---

<sup>68</sup>Jyl J. Josephson. 2016. *Rethinking Sexual Citizenship*. Albany: State University of New York. Hlm. 126

<sup>69</sup>David Weber. 2007. Gay Marriage Opponents to Look to States. *Fox News*. Diakses dari [http://www.foxnews.com/printer\\_friendly\\_wires/2007Feb26/0,4675,GayMarriage,00.html](http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2007Feb26/0,4675,GayMarriage,00.html) pada 10 Juni 2016

<sup>70</sup>Katherine Setenger. *Religiously ... Op.Cit.* Hlm. 50

<sup>71</sup>*Ibid.*

mengenai pernikahan sesama jenis beralih ke cabang legislatif Vermont. Kelompok agama kembali menjadi saksi dalam *hearings* yang dilakukan dalam cabang legislatif. Lou Sheldon, pemimpin *Traditional Values Coalition* datang ke Vermont untuk menyampaikan penolakannya terhadap anggota legislatif Vermont.<sup>72</sup> Dua pertiga dari testimoni yang disampaikan kepada cabang legislatif Vermont yang menolak pernikahan sesama jenis menggunakan alasan kehendak Tuhan untuk membenarkan kesaksiannya.<sup>73</sup>

Pada tahun 2000, cabang legislatif Vermont akhirnya membuat undang-undang bernama *Civil Union*. Dalam undang-undang tersebut, pernikahan sipil tetap didefinisikan sebagai persatuan antara lelaki dengan perempuan. Sementara pernikahan kaum LGBT dinamakan dengan persatuan sipil (*civil union*). Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Mereka yang menolak pernikahan sesama jenis mengatakan bahwa dengan membuat undang-undang *Civil Union*, pemerintah Vermont mengabaikan suara masyarakat Vermont yang sebagian besar menolak pernikahan sesama jenis. Salah satunya adalah Pendeta Craig Bensen, wakil presiden *Take It to the People*, sebuah kelompok masyarakat di Vermont yang mengadvokasikan pernikahan tradisional. Ia mengatakan:

*“... the reason given on both the House and Senate floor for individuals who came right out and said, “Look, I know that the people in my district are overwhelmingly opposed to this, but this is a matter of principle or rights. Therefore, I’m going to vote my conscience.” That was the catchphrase. Our response to that is, so when do we get a chance to vote our conscience? We asked the Senate to begin the constitutional amendment process to put one man, one woman marriage into the Vermont Constitution and to clearly delineate that the assignment of benefits for any arrangement was a prerogative of the legislature, not the judiciary. The Senate denied us that opportunity, so we feel shut out on both sides.”*<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup>*Ibid.*

<sup>73</sup>*Ibid.* Hlm. 51

<sup>74</sup>Craig Bensen. 2000. Dalam wawancaranya dengan Amy Goodman. Diakses secara online dari [http://www.democracynow.org/2000/4/27/vermont\\_civil\\_union\\_bill\\_becomes\\_law](http://www.democracynow.org/2000/4/27/vermont_civil_union_bill_becomes_law) pada 10 Juni 2016

#### 4.1.3.2 Massachusetts

Melangkah lebih jauh dibandingkan negara bagian Vermont, pada tahun 2003 Mahkamah Agung negara bagian Massachusetts menyatakan bahwa hukum negara bagian yang hanya memberikan lisensi pernikahan terhadap pasangan heteroseksual tidak konstitusional dan bahwa pasangan homoseksual memiliki hak untuk menikah dibawah konstitusi negara bagian Massachusetts.<sup>75</sup> Keputusan tersebut berawal dari gugatan 7 pasangan gay terhadap *Department of Public Health* di Massachusetts yang menolak untuk memberikan lisensi pernikahan pada pasangan-pasangan tersebut pada tahun 2001.<sup>76</sup> Selain menyatakan bahwa tindakan negara (Massachusetts) tidak konstitusional, Mahkamah Agung AS juga memberikan waktu selama 6 bulan untuk menghapuskan undang-undang yang melarang pernikahan sesama jenis dan membuat undang-undang baru yang mendukung pernikahan sesama jenis.

Semenjak tahun 2001, terutama setelah gugatan terhadap *Department of Public Health* di Massachusetts, kelompok agama di negara bagian tersebut terus berupaya untuk mencegah legalnya pernikahan sesama jenis. Bahkan pasca keputusan tersebut, penolakan terhadap pernikahan sesama jenis masih tinggi. Dari hasil survey yang dilakukan oleh *Boston Globe Poll*, sebanyak 53% dari responden menolak legalisasi pernikahan sesama jenis, sementara hanya 35% yang mendukungnya.<sup>77</sup> Perjuangan kelompok agama di Massachusetts dapat dilihat dari berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok tersebut untuk mempengaruhi keputusan pemerintah Massachusetts dalam hal pernikahan sesama jenis, salah satunya dengan usulan amandemen terhadap Konstitusi Massachusetts.

Pada tahun 2001, Jaksa Agung Massachusetts mengabulkan usulan untuk mengamandemen Konstitusi Massachusetts yang dikenal dengan *Protection of*

---

<sup>75</sup>Terence Neilan. 2003. High Court in Massachusetts Rules Gays Have Right to Marry. *The New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2003/11/18/national/18CND-GAYS.html> pada 10 Juni 2016

<sup>76</sup>*Ibid.*

<sup>77</sup>Frank Phillips. 2004. Majority in Mass. poll oppose Gay Marriage. *The Boston Globe*. Diakses dari [http://archive.boston.com/news/local/articles/2004/02/22/majority\\_in\\_mass\\_poll\\_oppose\\_gay\\_marriage/](http://archive.boston.com/news/local/articles/2004/02/22/majority_in_mass_poll_oppose_gay_marriage/) pada 10 Juni 2016

*Marriage Amendment* (POMA).<sup>78</sup> Untuk mengamandemen konstitusi negara bagian Massachusetts tidaklah mudah. Mekanisme amandemen konstitusi di Massachusetts salah satunya menggunakan mekanisme *initiated petition amendment*, yaitu mekanisme dimana amandemen atas sebuah konstitusi dilakukan melalui proses inisiatif dari pihak yang berkepentingan, utamanya masyarakat.<sup>79</sup> Tahap pertama adalah dengan mengirimkan petisi awal kepada Jaksa Agung negara bagian yang berisi 10 tanda tangan pemilih atau masyarakat Massachusetts yang memenuhi syarat. Dalam POMA, inisiatif tersebut diusulkan oleh *Massachusetts for Marriage Alliance*,<sup>80</sup> yaitu sebuah aliansi konservatif yang bertujuan untuk mempertahankan pernikahan tradisional di Massachusetts. Karena Konstitusi Massachusetts secara tegas melarang inisiatif yang berkaitan dengan agama, POMA diajukan dengan berlandaskan institusi sosial, yaitu institusi pernikahan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Massachusetts, inisiatif amandemen tersebut harus mendapatkan minimal 0,5% tandatangan dari total pemilih pada pemilihan gubernur Massachusetts sebelumnya, seperempat anggota HoR dan Senat yang sedang menjabat dan seperempat anggota HoR dan Senat yang menjabat setelahnya.<sup>81</sup> Maka pada tahun 2001, persyaratan yang harus dipenuhi oleh *Massachusetts for Marriage Alliance* setelah mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Massachusetts adalah 57.100 tanda tangan dari masyarakat Massachusetts pada akhir tahun 2001, persetujuan seperempat anggota HoR dan Senat yang menjabat pada

---

<sup>78</sup>Massachusetts News. 2001. *'Protection of Marriage' Amendment is Approved*. Diakses dari [http://massnews.com/past\\_issues/2001/oct%202001/1001mar.htm](http://massnews.com/past_issues/2001/oct%202001/1001mar.htm) pada 10 Juni 2016

<sup>79</sup>Ballotpedia. *Initiated Constitutional Amendment*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Initiated\\_constitutional\\_amendment](https://ballotpedia.org/Initiated_constitutional_amendment) pada 10 Juni 2016

<sup>80</sup>Josh Israel. 2015. *Marriage Equality Almost Didn't Happen: The Strange Tale of How It All Started*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2015/12/23/3728213/massachusetts-marriage-equality-fight/> pada 10 Juni 2016

<sup>81</sup>Selengkapnya mengenai *initiative petitions* dapat dilihat di <https://malegislature.gov/laws/constitution#cart048.htm> pada 10 Juni 2016 atau [https://ballotpedia.org/Laws\\_governing\\_the\\_initiative\\_process\\_in\\_Massachusetts](https://ballotpedia.org/Laws_governing_the_initiative_process_in_Massachusetts) pada 10 Juni 2016

tahun 2002, serta persetujuan anggota HoR dan Senat yang baru terpilih pada tahun 2002.<sup>82</sup>

Pada 10 April 2002 atas perintah dari Tom Birmingham, Presiden Senat negara bagian Massachusetts, diadakan *hearing* yang membahas mengenai POMA. *Hearing* tersebut dipimpin oleh Senator Harriatte L. Chandler dari partai Demokrat yang secara tegas menolak ratifikasi DOMA.<sup>83</sup> Dalam *hearing* tersebut, Chandler mendengarkan kesaksian yang mendukung maupun yang menolak POMA. Salah satu diantara para saksi yang menolak yaitu Chester Darling, jaksa yang memenangkan kasus pelarangan kelompok gay dalam parade *St. Patrick's Day* di South Boston.<sup>84</sup> Selain itu, *hearing* tersebut juga dihadiri oleh Daniel Avila, direktur *Massachusetts Catholic Conference* yang mendukung POMA, dan Gerry D'Avolio, pelobi dari *Massachusetts Catholic Conference* untuk cabang legislatif Massachusetts. Meskipun keduanya tidak ikut diminta sebagai saksi dalam *hearing*, Avila mengakui bahwa *Catholic bishops* membantu untuk mengumpulkan tanda tangan untuk POMA.<sup>85</sup>

Meskipun POMA mendapatkan dukungan cukup besar dari masyarakat Massachusetts, POMA tidak berhasil mendahului keputusan Mahkamah Agung Massachusetts yang memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis di Massachusetts adalah legal. Hal tersebut dikarenakan Tom Birmingham melakukan manuver politik untuk mencegah POMA dilanjutkan pada tahap voting dalam *constitutional convention* yang seharusnya dilaksanakan setelah *hearing* yang kemudian memicu protes dari para pendukung POMA. Pada 1 Mei 2002, Birmingham mengumumkan bahwa *constitutional convention* diundur hingga 19 Juni yang kemudian diundur kembali

---

<sup>82</sup>Josh Israel. 2015. *Marriage Equality Almost Didn't Happen: The Strange Tale of How It All Started*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2015/12/23/3728213/massachusetts-marriage-equality-fight/> pada 10 Juni 2016

<sup>83</sup>*Ibid.*

<sup>84</sup>Stephanie Ebbert. 2001. Three Proest Oppose Ban on Gay Marriage. *The Boston Globe*. Diakses dari <http://wwwn.org/articles/2124/?&place=north-america&section=christianity> pada 11 Juni 2016

<sup>85</sup>*Ibid.*

menjadi 17 July.<sup>86</sup> Penundaan tersebut memberikan waktu bagi kelompok LGBT untuk membangun dan memenangkan pertarungan di Mahkamah Agung Massachusetts pada 18 November 2003.

Upaya untuk mengamandemen Konstitusi Massachusetts kembali dilaksanakan pada tahun 2003, ketika proses pengadilan *Goodridge v. Department of Public of Health* masih berjalan. Upaya tersebut diajukan oleh *Massachusetts Family Institute* (MFI), yaitu kelompok Kristen fundamentalis yang memfokuskan pada isu-isu keluarga. Dalam websitenya, MFI menuliskan bahwa keluarga yang sehat sangat diperlukan untuk pelestarian masyarakat yang kuat dan bebas, maka dari itu MFI didekasikan untuk memperkuat keluarga dan menegaskan nilai-nilai *Judeo-Christian*.<sup>87</sup> MFI berperan dalam menyusun draft amandemen yang dikenal dengan *Marriage Affirmation and Protection Amendment* (MA & PA) tersebut, yang berbunyi:

*“It being the public policy of this Commonwealth to protect the unique relationship of marriage in order to promote among other goals, the stability and welfare of society and the best interests of children, only the union of one man and one woman shall be valid or recognized as a marriage in Massachusetts. Any other relationship shall not be recognized as a marriage or its legal equivalent.”*<sup>88</sup>

Selain MFI, kelompok Katolik juga terus berupaya untuk melobi cabang legislatif Massachusetts. Tidak hanya dengan melalui *Massachusetts Catholic Conference*, lobi juga dilakukan oleh kelompok Katolik dengan cara mengirimkan surat langsung kepada pejabat publik Massachusetts. Surat tersebut dikirimkan oleh Uskup Richard G. Lennon dari Keuskupan Boston; Uskup Daniel P. Reilly dari Keuskupan Worcester; Uskup Thomas L. Dupre dari Keuskupan Springfield; serta Uskup George W. Coleman dari Keuskupan Fall River, dan ditujukan kepada Presiden

---

<sup>86</sup>Josh Israel. 2015. *Marriage Equality Almost Didn't Happen: The Strange Tale of How It All Started*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2015/12/23/3728213/massachusetts-marriage-equality-fight/> pada 10 Juni 2016

<sup>87</sup>Selengkapnya mengenai MFI dapat dilihat di <http://www.mafamily.org/about-mfi/>

<sup>88</sup>Religious Tolerance.org. *Same Sex Marriage (SSM) in Massachusetts: Initial Attempt to Create A Constitutional Amendment*. Diakses dari [http://www.religioustolerance.org/hom\\_marm2.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_marm2.htm) pada 10 Juni 2016

Senat Massachusetts pada tahun 2003, Robert E. Travaglini, ketua HoR, Thomas M. Finneran, dan anggota pengadilan umum Massachusetts. Berikut kutipan isi surat tersebut:

*“Our position on this issue is rooted in a profound regard for the sexual union between a man and a woman. Only this union bears the natural capacity to beget human life in a setting that provides both a mother and a father for the child. This union is called the “first society” because both halves of society are always represented in the home and must continue to co-exist, even when no children are involved. Thus, the importance of this union to the smooth continuation and the general stability of the larger society, especially its young, is unequalled. No other private relationship possesses such public significance or enjoys such a time-proven record of benefiting society. It is this public character that explains history’s regard for the union between a man and a woman as marriage.”<sup>89</sup>*

Berbeda dengan usulan amandemen sebelumnya yang melalui *initiative petitions*, amandemen kali ini diusulkan oleh Phillip Travis, anggota HoR negara bagian Massachusetts dari Partai Demokrat.<sup>90</sup> Tidak hanya Phillip Travis, ketua HoR pada masa itu, Thomas M. Finneran juga memberikan dukungan terhadap MA & PA. Finneran mengatakan bahwa ia akan terus mendukung pembatasan pernikahan hanya pada pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>91</sup>

Hingga Mahkamah Agung Massachusetts mengeluarkan putusan dan perintahnya, perdebatan mengenai amandemen dalam cabang legislatif Massachusetts terus berlanjut. Ultimatum Mahkamah Agung Massachusetts yang memberikan waktu selama 6 bulan kepada cabang legislatif agar menghapuskan segala undang-undang yang mendiskriminasi LGBT dan membuat undang-undang baru bagi pernikahan kaum gay menjadikan perdebatan dalam cabang legislatif semakin keras. Kedua pihak, baik

---

<sup>89</sup>Catholic Online. 2003. *Communication from the Catholic Bishops of Massachusetts to Members of the General Court on the Definition of Marriag.* Diakses dari <http://www.catholic.org/featured/headline.php?ID=447> pada 10 Juni 2016

<sup>90</sup>Religious Tolerance.org. *Same Sex Marriage (SSM) in Massachusetts: Initial Attempt to Create A Constitutional Amendment.* Diakses dari [http://www.religioustolerance.org/hom\\_marm2.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_marm2.htm) pada 10 Juni 2016

<sup>91</sup>*Ibid.*

kelompok LGBT maupun kelompok agama terus melobi anggota cabang legislatif untuk memperjuangkan kepentingannya. Salah satu dukungan terhadap MA & PA datang dari mantan gay, Alan Chambers. Selain pernah menjadi seorang gay, Alan Chambers juga pernah dihormati sebagai seorang pahlawan dalam kelompok Kristen Konservatif karena berhasil mengatasi orientasi seksualnya dari homoseksual menjadi heteroseksual. Dalam kesaksiannya didepan Komite Hukum legislatif Massachusetts yang membahas mengenai MA & PA, Alan Chambers memberikan statemen, diantaranya:

*“Today, I exhort you: vote in favor of the Marriage Affirmation and Protection Amendment; reaffirm what every culture in history has held sacred: marriage between one man and one woman. A vote in favor of this amendment is a public declaration in support of the bedrock of this great nation. A vote against this amendment is a bullet fired at the family. Corporately, you have the ability to head off a decision that could forever negatively alter the hallowed and deified uniting of one man and one woman by redefining holy matrimony. I urge you to uphold what is moral, legal and right and what honors those leaders who have gone before you.”<sup>92</sup>*

Setelah perdebatan panjang, pada 29 Maret 2004 cabang legislatif Massachusetts mencapai kesepakatan untuk menyetujui amandemen yang akan mempertahankan definisi pernikahan tradisional, namun pada waktu yang sama juga membuat persatuan sipil dengan keuntungan yang identik dengan pernikahan (dikenal dengan *compromise amendment*).<sup>93</sup> Amandemen tersebut menjadi solusi bagi cabang legislatif untuk tetap mempertahankan definisi pernikahan tradisional dan tetap patuh terhadap keputusan Mahkamah Agung Massachusetts. Pada voting tahap pertama, *compromise amendment* berhasil lolos dengan margin suara yang tipis.<sup>94</sup> Namun

---

<sup>92</sup>Alan Chambers. 2004. *Massachusetts Marriage Affirmation and Protection Amendment*. Diakses dari [http://alanchambers.org/massachusetts\\_m/](http://alanchambers.org/massachusetts_m/) pada 10 Juni 2016

<sup>93</sup>Meghan Dorney. 2004. Legislature Passes ‘Compromise’ Marriage Amendment. *The Boston Pilot*. Diakses dari <http://www.thebostonpilot.com/articleprint.asp?id=1930> pada 10 Juni 2016

<sup>94</sup>Anne Marie Cammisa. *Massachusetts Political and Religious Culture*. Dalam Edward L. Cleary dan Allen D. Hertzke. 2006. *Representing God at the Statehouse: Religion and Politics in the American States*. USA: Eowman & Littlefield Publishers, Inc. Hlm. 50

demikian, agar amandemen tersebut dapat diberlakukan, usulan amandemen tersebut harus berhasil lolos dalam voting selanjutnya yang dijadwalkan pada September 2005. Ketika voting dilakukan, usulan amandemen tersebut gagal dengan 157 suara menolak dan 39 mendukung.<sup>95</sup>

Kegagalan *compromise amendment* yang diusulkan langsung oleh anggota HoR Massachusetts, tidak menghentikan kelompok agama untuk kembali mengajukan *initiative petition* untuk kembali mengusulkan amandemen dan menggagalkan keputusan Mahkamah Agung Massachusetts. MFI berhasil mengumpulkan tanda tangan untuk petisi tersebut pada bulan Desember 2005.<sup>96</sup> Usulan amandemen tersebut mendapat dukungan dari Gubernur Massachusetts pada masa itu, Mitt Romney, dan kelompok agama Katolik.<sup>97</sup> Pada voting pertama tahun 2006, usulan tersebut mendapatkan 62 suara dan berhasil melangkah pada tahap voting kedua. Akan tetapi ketika voting kedua dilakukan pada tahun 2007, usulan tersebut kembali gagal karena gubernur dan ketua HoR yang baru terpilih, Deval Patrick dan Salvatore F. “Sal” DiMasi, secara tegas menolak amandemen.<sup>98</sup>

#### 4.1.3.3 Negara Bagian pada Tahun 2015-2016

Hingga 24 Maret 2015, lebih dari 85 rancangan undang-undang anti-LGBT diusulkan di 28 cabang legislatif negara bagian AS.<sup>99</sup> Berdasarkan data dari *Human Rights Campaign (HRC)*<sup>100</sup>, tahun 2015 merupakan gelombang pengenalan undang-undang anti-LGBT dalam cabang legislatif negara bagian AS.

---

<sup>95</sup>Michael J. Klarman. 2013. *From the Closet to the Altar: Court, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage*. New York: Oxford University Press. Hlm. 96

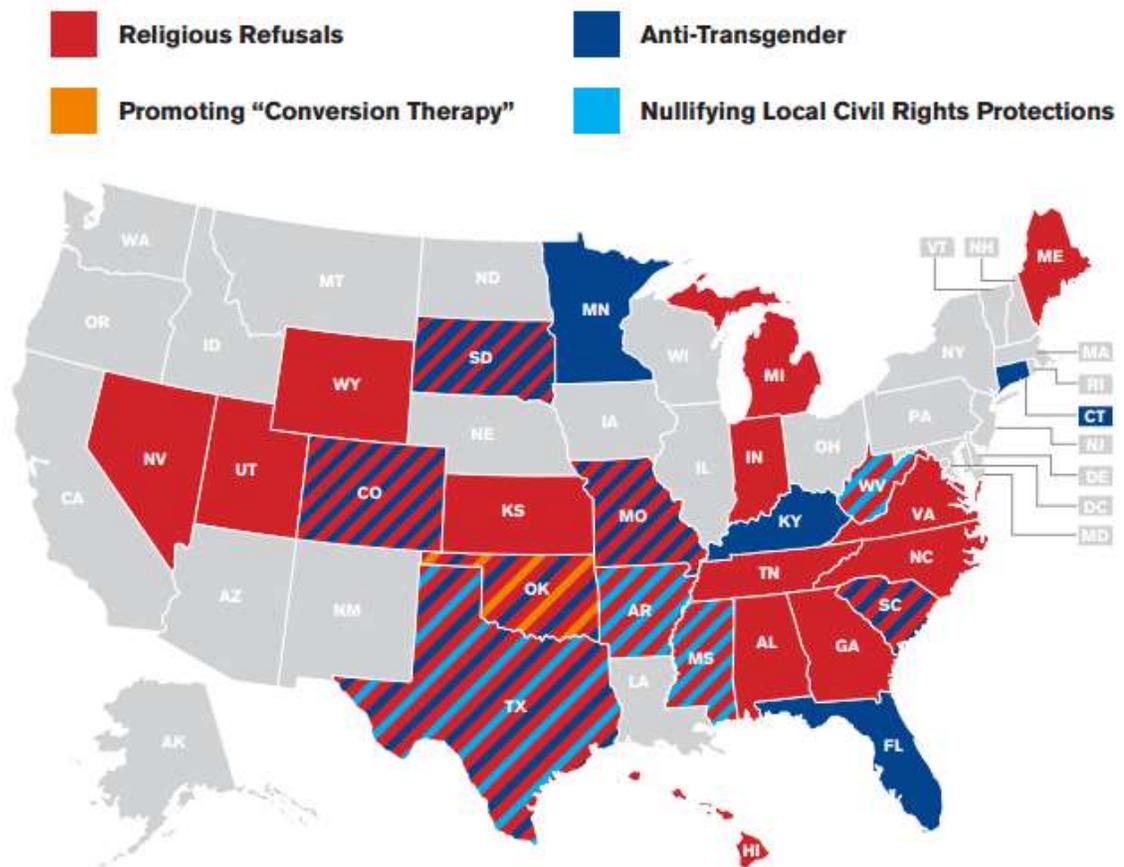
<sup>96</sup>Michael J. Klarman. 2013. *From the Closet to the Altar: Court, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage*. New York: Oxford University Press. Hlm. 97

<sup>97</sup>Michael J. Klarman. 2013. *From the Closet to the Altar: Court, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage*. New York: Oxford University Press. Hlm. 97

<sup>98</sup>Michael J. Klarman. 2013. *From the Closet to the Altar: Court, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage*. New York: Oxford University Press. Hlm. 97

<sup>99</sup>HRC Staff. 2015. *Anti-LGBT Bills Introduced in 28 States*. Diakses dari <http://www.hrc.org/blog/anti-lgbt-bills-introduced-in-28-states> pada 12 Juni 2016

<sup>100</sup>HRC merupakan kelompok advokasi hak LGBT dan organisasi pelobi politik terbesar di AS. Selengkapnya mengenai HRC dapat dilihat di <http://www.hrc.org/>



Gambar 4.1 Peta Penolakan Pernikahan Sesama Jenis di AS

Sumber: Human Rights Campaign. 2015. *Wave of Anti-LGBT Bills in 2015 State Legislative Session*. Diakses dari [http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015\\_StateLegislation-Documents\\_2.pdf](http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015_StateLegislation-Documents_2.pdf)

Pada gambar 4.1 diatas, rancangan undang-undang yang mendasarkan pada kepercayaan agama untuk menolak hak kaum LGBT ditunjukkan oleh warna merah. Dalam penelitian ini penulis hanya akan memfokuskan pada data yang berwarna merah. HRC mendeskripsikan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan penolakan agama menjadi 4 kategori, yaitu:

- a. **Meloloskan *Religious Freedom Restoration Act (RFRA)***: rancangan undang-undang ini akan memperbolehkan individu untuk menolak (atau menggugat)

peraturan negara bagian berdasarkan keyakinan agama, termasuk peraturan yang melindungi kaum LGBT dari diskriminasi.

- b. **Rancangan undang-undang yang menolak kesetaraan pernikahan (*marriage equality*):** rancangan undang-undang ini berfokus hanya dalam hal pernikahan, contohnya pemilik usaha diperbolehkan untuk menolak melayani pasangan homoseksual apabila ia tidak menyetujui pernikahan sesama jenis atau negara bagian dilarang untuk mengeluarkan lisensi pernikahan bagi pasangan homoseksual.
- c. **Rancangan undang-undang yang menolak adopsi:** rancangan undang-undang ini memperbolehkan penyedia adopsi untuk menolak memberikan izin adopsi kepada pasangan homoseksual berdasarkan keyakinan agama.
- d. **Super-RFRAs:** rancangan undang-undang ini memungkinkan individu untuk menggugat pemerintah, perusahaan dan individu lain yang dirasa menyinggung keyakinan agama, termasuk mengumumkan pernikahan sesama jenis dalam sebuah rapat perusahaan.<sup>101</sup>

Dapat dilihat bahwa hampir separuh cabang legislatif negara bagian AS mempertimbangkan undang-undang anti-LGBT yang berkaitan dengan penolakan agama. Namun pada tahun 2015, hanya dua rancangan undang-undang yang berhasil menjadi undang-undang, yaitu di negara bagian Indiana dan negara bagian Arkansas.<sup>102</sup> Dari kedua undang-undang tersebut, undang-undang di negara bagian Indian mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan di negara bagian Arkansas. Dikenal dengan *Indiana Religious Freedom Restoration Act*, undang-undang tersebut ditandatangani oleh Gubernur Indiana Mike Pence pada 26 Maret 2015. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah Indiana memberikan perlindungan hukum

---

<sup>101</sup>Human Rights Campaign. 2015. *Wave of Anti-LGBT Bills in 2015 State Legislative Session*. Diakses dari [http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015\\_StateLegislation-Documents/Document\\_2.pdf](http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015_StateLegislation-Documents/Document_2.pdf) pada 12 Juni 2016

<sup>102</sup>*Ibid.*

kepada para pengusaha di Indiana yang menolak untuk melayani pasangan homoseksual atas dasar kepercayaan agamanya.<sup>103</sup>

Bagaimana undang-undang tersebut berhasil di Indiana tidak terlepas dari advokasi kelompok agama di Indiana. Adalah *Advance America*, yaitu kelompok agama Kristen konservatif di Indiana yang mengadvokasikan nilai-nilai *pro-family*, *pro-church*, *pro-private* dan *home school*, serta *pro-tax reformation*.<sup>104</sup> *Advance America* didirikan oleh Eric Miller yang memiliki peranan penting dalam melobi anggota legislatif Indiana dan Gubernur Mike Pence untuk meloloskan *Indiana Religious Freedom Restoration Act*.<sup>105</sup> Eric Miller secara eksplisit menyatakan pentingnya *Indiana Religious Freedom Restoration Act* untuk melindungi gereja, pebisnis maupun individu atas kepercayaan agamanya, ia menyatakan:

*“It is vitally important to protect religious freedom in Indiana. It’s the right thing to do. It was therefore important to pass Senate Bill 101(Indiana Religious Freedom Restoration Act) in 2015 in order to help protect churches, Christian businesses and individuals from those who want to punish them because of their Biblical beliefs!”*<sup>106</sup>

*Indiana Religious Freedom Restoration Act* resmi menjadi undang-undang sebelum legalisasi pernikahan sesama jenis di AS. Namun demikian, pasca Mahkamah Agung AS melegalisasi pernikahan homoseksual, undang-undang serupa juga terus diusulkan di negara bagian lainnya. Dengan menggunakan taktik yang sama ketika berupaya untuk mencegah legalisasi pernikahan sesama jenis pada tahun 1990-an, kelompok agama membuat draft rancangan undang-undang yang kemudian diusulkan dicabang legislatif negara bagian AS. Salah satunya adalah *Liberty Counsel*.

---

<sup>103</sup>Jonathan Cohn. 2015. Why Indiana’s Religious Freedom Law is Such A Big Deal. *The Huffington Post*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2015/04/01/indiana-religious-freedom\\_n\\_6984156.html](http://www.huffingtonpost.com/2015/04/01/indiana-religious-freedom_n_6984156.html) pada 12 Juni 2016

<sup>104</sup>Advance America. Diakses dari <http://www.advanceamerica.com/about.html> pada 12 Juni 2016

<sup>105</sup>Aaron Morrison. 2015. Meet The Christian Group Behind Indiana’s Religious Freedom Bill: Eric Miller, Advance America Have National Conservative Support. *International Business Times*. Diakses dari <http://www.ibtimes.com/meet-christian-group-behind-indianas-religious-freedom-bill-eric-miller-advance-1866770> pada 12 Juni 2016

<sup>106</sup>Eric Miller. Dalam Advance America. *Victory At The State House*. Diakses dari <http://www.advanceamerica.com/blog/?p=1849> pada 12 Juni 2016

Berdasarkan laporan dari CBS News, *Liberty Counsel* merupakan firma hukum Kristen yang berbasis di Florida yang membantu anggota legislatif konservatif untuk menuliskan undang-undang anti-LGBT setidaknya di 20 negara bagian.<sup>107</sup> *Liberty Counsel* didirikan oleh Mat Staver pada 1989 dengan tujuan untuk memperjuangkan kebebasan beragama, kesucian hidup manusia, dan keluarga.<sup>108</sup> Untuk memperjuangkan kepercayaan mengenai pernikahan tradisional, *Liberty Counsel* memiliki afiliasi dengan kejaksaan di 50 negara bagian AS yang berfungsi untuk menyusun rancangan undang-undang, dan memberikan saran pada cabang legislatif, dan membela orang-orang yang mempertahankan keyakinannya diatas pernikahan sesama jenis.<sup>109</sup>

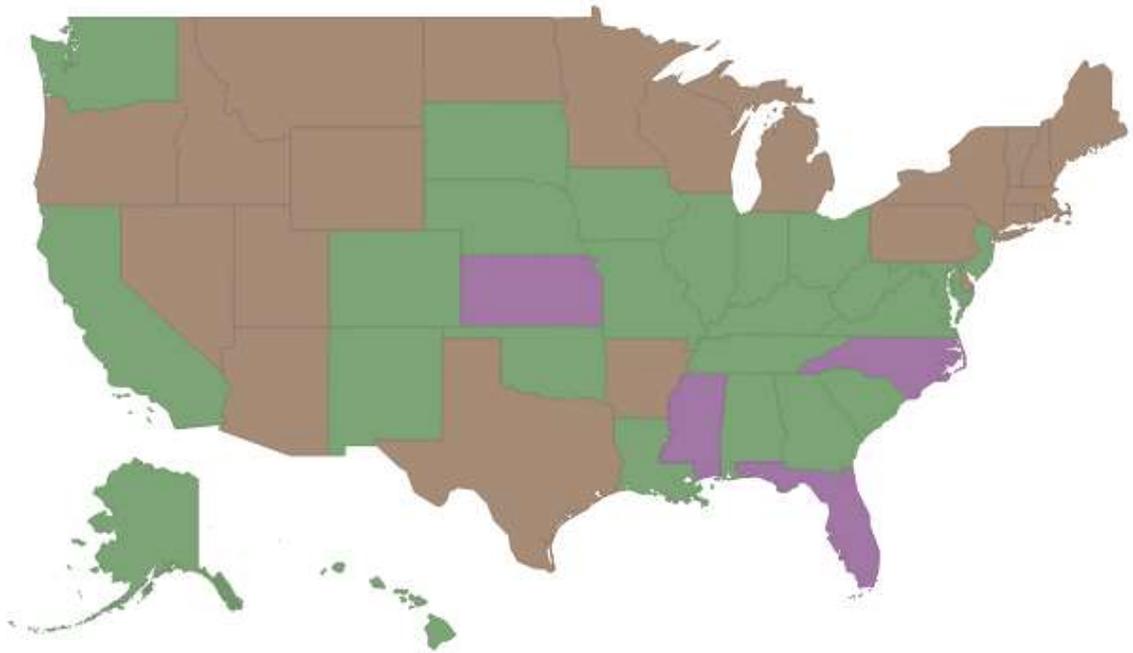
Pada tahun 2016 rancangan undang-undang yang mengacu pada penolakan kelompok agama terhadap kelompok LGBT dan pernikahan sesama jenis terus diperjuangkan di cabang legislatif negara bagian. Undang-undang tersebut dikenal dengan *Religious Freedom Bills (Acts)*, mengatur mengenai kebebasan beragama ketika menyangkut pernikahan sesama jenis atau kelompok LGBT. Beberapa dari rancangan undang-undang yang diajukan telah lolos di cabang legislatif dan ditandatangani oleh cabang eksekutif seperti digambarkan dalam gambar 4.2 berikut:

---

<sup>107</sup>German Lopez. 2016. *Meet the Little-Known Christian Law Firm Behind the New Wave of Anti-LGBTQ Bills*. Diakses dari <http://www.vox.com/2015/11/23/9770610/liberty-counsel-mat-staver-kim-davis> pada 12 Juni 2016

<sup>108</sup>*Ibid.*

<sup>109</sup>Dean Reynolds. 2010. Who's Behind the New LGBT Bathroom Laws?. *CBS News*. Diakses dari <http://www.cbsnews.com/news/whos-behind-the-new-lgbt-bathroom-laws/> pada 12 Juni 2016



Gambar 4.2 Peta *Religious Bills* di AS

Sumber: Kelsey Dallas dan Ginny Romney. 2016. The Status of Religious Freedom Bills From 2016 Across America. *Desert News*. Diakses dari <http://www.deseretnews.com/article/765685548/The-status-of-religious-freedom-bills-from-2016-across-America.html?pg=all>

Warna ungu pada gambar diatas menunjukkan rancangan undang-undang yang telah ditandatangani. Warna hijau menunjukkan rancangan undang-undang yang diusulkan atau dibahas pada tahun 2016. Sementara warna coklat menunjukkan negara bagian yang belum diajukan undang-undang anti-LGBT. Dapat dilihat bahwa terdapat empat negara bagian yang telah meloloskan undang-undang *Religious Freedom*, yaitu Florida, Kansas, Mississippi, dan North Carolina. Dari keempat undang-undang di empat negara bagian, undang-undang di negara bagian Florida dan Mississippi secara jelas mengacu pada penolakan kelompok agama. Sementara undang-undang di Kansas dan North Carolina meskipun tidak sejelas di Florida dan Mississippi, namun didukung penuh oleh kelompok agama di AS.

*Religious Freedom* di Florida yang dikenal dengan *Churces or Religious Organizations* (HB 43) berbunyi:

*“Provides that churches or religious organizations, related organizations, or certain individuals may not be required to solemnize any marriage or provide services, accommodations, facilities, goods, or privileges for related purposes if such action would violate sincerely held religious belief; prohibits certain legal actions, penalties, or governmental sanctions against such individuals or entities.”*<sup>110</sup>

Undang-undang diatas disponsori oleh anggota HoR Florida, Scott Plakon, dan anggota Senat Florida, Aaron Bean, yang didukung oleh *Christian Family Coalition* (CFC)Florida.<sup>111</sup> Seperti halnya dalam rancangan undang-undang lain, CFC memiliki peranan penting dalam menuliskan rancangan undang-undang HB 43. Selain itu, untuk meloloskan HB 43 CFC memobilisasi pastor-pastor serta aktivis *grassroots* diseluruh negara bagian Florida untuk hadir dan bersaksi dalam *hearing* yang dilakukan oleh cabang legislatif Florida di Tallahassee.<sup>112</sup> Selain CFC, HB 43 juga didukung penuh oleh *Liberty Counsel* yang turut hadir ketika HB 43 dibahas dalam cabang legislatif Florida.

Sementara undang-undang *Religious Freedom* di negara bagian Mississippi dikenal dengan *Protecting Freedom of Conscience from Government Discrimination Act* (HB 1523). Dengan adanya HB 1523, pemerintah Mississippi dilarang memberikan ‘diskriminasi’ melawan ‘orang’ untuk bertindak berdasarkan keyakinan agama mereka mengenai seksualitas dan perkawinan.<sup>113</sup> ‘Diskriminasi’ diartikan dengan tindakan memberikan pajak, denda, pemotongan keuntungan pemerintah serta bentuk-bentuk

---

<sup>110</sup>The Florida Senate. *HB 43: Churces or Religious Organizations*. Diakses dari <https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2016/0043> pada 12 Juni 2016

<sup>111</sup>Rich Swier. 2016. *Governor Rick Scott signs Florida Pastor Protection Act*. Diakses dari <http://drrichswier.com/2016/03/30/governor-rick-scott-signs-florida-pastor-protection-act/> pada 12 Juni 2016

<sup>112</sup>*Ibid.*

<sup>113</sup>Sarah Kaplan. 2016. Mississippi’s Senate Just Approved a Sweeping ‘Religious Liberty’ Bill That Critics Say is The Worst Yet for LGBT Rights. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/03/31/mississippis-senate-just-approved-a-sweeping-religious-liberty-bill-that-critics-say-is-the-worst-yet-for-lgbt-rights/> pada 12 Juni 2016

yang merugikan lainnya. Sementara ‘orang’ didefinisikan sebagai individu, organisasi agama, asosiasi, perusahaan dan bentuk usaha lainnya yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga seperti institusi adopsi.

HB 1523 diusulkan dan disponsori oleh 8 anggota HoR Mississippi yaitu Philip Gun, Andy Gipson, William Arnold, William Shirley, Scott Bounds, Randy Boyd, Lester Carpenter, dan Dan Eubanks.<sup>114</sup> Dari kedelapan anggota HoR tersebut, hanya satu orang yang merupakan anggota Partai Demokrat, yaitu Scott Bounds. Sementara tujuh lainnya berasal dari Partai Republik. Pada bulan yang sama, yaitu Februari 2016, HB 1523 berhasil lolos HoR dengan 80 anggota yang mendukung dan hanya 39 menolak.<sup>115</sup> Dibulan selanjutnya undang-undang tersebut berhasil lolos Senat Mississippi dengan dukungan sebanyak 32 anggota Senat dan 17 menolak. Segera setelah lolos dalam cabang legislatif Mississippi, HB 1523 ditandatangani oleh Gubernur Mississippi, Phil Bryant, pada bulan April 2016.

Sama seperti halnya di negara bagian Florida, pembuatan HB 1523 tidak terlepas dari perananan kelompok agama di Mississippi maupun kelompok agama yang beroperasi secara nasional di AS. HB 1523 dirancang oleh pengacara dan pembuat kebijakan *Alliance Defending Freedom*, yaitu sebuah koalisi organisasi Kristen seperti *American Family Association* dan *Focus on the Family*.<sup>116</sup> Penulisan HB 1523 oleh *Alliance Defending Freedom* diakui secara tertulis oleh *Alliance Defending Freedom* dalam statemennya kepada Mississippi Today:

*“Alliance Defending Freedom has been asked to advise many state legislators, including in Mississippi, on the constitutionality of religious liberty, government discrimination and privacy legislation as they work to affirm and uphold citizens' fundamental freedoms.”*<sup>117</sup>

<sup>114</sup>Legiscan. *Mississippi House Bill 1523 (Adjourned Sine Die)*. Diakses dari <https://legiscan.com/MS/bill/HB1523/2016> pada 12 Juni 2016

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>Adam Ganecheau. 2016. *Mississippi's 'religious freedom' Law Drafted Out of State*. Mississippi Today. Diakses dari <https://mississippitoday.org/2016/05/17/mississippis-religious-freedom-law-drafted-out-of-state/> pada 12 Juni 2016

<sup>117</sup>*Ibid.*

Selain *Alliance Defending Freedom*, HB 1523 juga merupakan hasil upaya lobi politikus agama Ron Matis. Sebagai direktur politik di *United Pentecostal Church of Mississippi*, Ron Matis merupakan salah satu pejabat agama terkemuka yang secara teratur melakukan lobi keagamaan dalam cabang legislatif Mississippi.<sup>118</sup> Pada bulan Maret 2016, Ron Matis menghadiri pembahasan HB 1523 dalam Senat Mississippi sebagai bentuk dukungannya terhadap undang-undang tersebut.<sup>119</sup>

## 4.2 Mass Media Campaign

### 4.3.1 Kampanye Dukungan Terhadap Penolakan Pernikahan Sesama Jenis

Media massa merupakan alat yang sangat penting bagi kelompok kepentingan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat. Begitu pula bagi kelompok agama di AS. Setelah keberhasilan kelompok LGBT untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis di negara bagian Massachusetts, kelompok agama semakin menyadari pentingnya amandemen Konstitusi AS mengenai definisi pernikahan. Selain melakukan lobi terhadap anggota Kongres dan Presiden AS pada masa itu, kelompok agama juga terus berusaha untuk menjaring dukungan masyarakat AS. *Focus on the Family* membuat iklan di berita harian yang tersebar di 13 negara bagian di AS mempromosikan MPA.<sup>120</sup> James Dobson juga menggunakan program siarannya untuk mempromosikan MPA dan membujuk masyarakat AS untuk mengkontak perwakilannya di Kongres AS agar mendukung MPA.<sup>121</sup>

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup> Paul Boger. 2016. Senate Passes Anti-Gay Religious Freedom Bill. *MPB Online*. Diakses dari <http://www.mpbonline.org/blogs/news/2016/03/31/senate-passes-anti-gay-religious-freedom-bill/> pada 12 Juni 2016

<sup>120</sup>Katherine Setenger. *Religiously Motivated Political Action and Same-Sex Marriage*. Dalam Ann W. Duncan dan Steven L. Jones (ed.). 2008. *Church States-Issues in America Today: Religions Convictions and Practices in Public Life*. Hlm. 54. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP\\_Aa4PoX&sig=qW\\_4bazDJusi8X7iGoA\\_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKewj4zLaK-dXNAhXJr48KHYdvA90Q6AEILzAD#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false](https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP_Aa4PoX&sig=qW_4bazDJusi8X7iGoA_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKewj4zLaK-dXNAhXJr48KHYdvA90Q6AEILzAD#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false) pada 12 Juni 2016

<sup>121</sup>*Ibid.*

Dalam mempromosikan anti pernikahan sesama jenis, kelompok agama menyadari pentingnya *mediaframing* untuk menyadarkan masyarakat AS mengenai isu pernikahan sesama jenis. Pembingkai sebuah isu agar lebih menarik untuk didukung juga perlu diperhatikan. Promosi *Focus on the Family* dalam iklan koran dan James Dobson dalam program siarannya juga telah dibingkai sedemikian rupa agar menjadi lebih menarik bagi masyarakat. Moralitas menjadi sebuah pembingkai yang menarik masyarakat AS untuk mendukung atau menolak pernikahan sesama jenis. Bagi kelompok LGBT, aspek persamaan hak merupakan dasar yang dijadikan bingkai perjuangannya. Sementara bagi kelompok agama, nilai-nilai tradisional keluarga menjadi alat promosi dalam menolak pernikahan sesama jenis. Aspek-aspek moral yang ditekankan oleh kedua kelompok memiliki kesamaan, yaitu mempertanyakan mengenai hal yang benar dan yang salah.<sup>122</sup>

Nilai-nilai keluarga terbukti efektif untuk mendapatkan dukungan masyarakat dalam menolak legalisasi pernikahan sesama jenis. Pernikahan memiliki kaitan erat dengan institusi keluarga yang merupakan pondasi dasar masyarakat. Dalam institusi keluarga, individu diajarkan dan ditanamkan nilai-nilai sosial yang nantinya menjadi bekal dalam bermasyarakat dan bernegara. Pentingnya peranan sosok Ayah dan Ibu juga menjadi pendukung dalam institusi keluarga. Studi yang menunjukkan bahwa orang yang dibesarkan dalam keluarga tradisional dengan Ayah dan Ibu jauh lebih baik dibandingkan orang yang dibesarkan oleh pasangan homoseksual turut mendukung argumentasi pentingnya institusi keluarga tradisional.<sup>123</sup> Selain itu, hasil studi tersebut kemudian juga membawa dampak pada hal lain seperti adopsi, dimana beberapa institusi penyedia adopsi yang berbasis agama memilih untuk menolak pengajuan adopsi oleh pasangan homoseksual.

---

<sup>122</sup>*Ibid.* Hlm. 59

<sup>123</sup>Cheryl Wetzstein. 2012. Study: Children Fare Better in Traditional Mom-Dad Families. *The Washington Time*. Diakses dari <http://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/10/study-children-fare-better-traditional-mom-dad-fam/> pada 13 Juni 2016

Pada tahun 2010, Uskup Harry R. Jackson Jr. menuliskan sebuah artikel khusus di CNN yang membahas mengenai institusi pernikahan, keluarga dan pernikahan sesama jenis. Dalam artikel tersebut, ia menuliskan bahwa institusi pernikahan merupakan sebuah lembaga yang mengikat perempuan dan laki-laki untuk bersama-sama membentuk sebuah keluarga yang bertujuan untuk melayani masyarakat luas.<sup>124</sup> Pernikahan sesama jenis yang hanya mengikat dua orang dengan gender yang sama akan mendegradasi nilai-nilai keluarga inti yang terdiri dari Ayah dan Ibu. Selain itu, legalisasi pernikahan sesama jenis kemudian juga akan memberikan dampak pada kurikulum sekolah, dimana pihak sekolah akan mengajarkan arti pernikahan sesama jenis. Hal tersebut sudah terjadi di negara bagian Massachusetts yang melegalisasi pernikahan sesama jenis dimana guru disekolah umum diperkenankan untuk mengajarkan pernikahan sesama jenis dan menggunakan literatur yang berbau homoseksual.

Uskup Harry R. Jackson Jr. adalah seorang pastor senior di Hope Christian Church yang terletak di Beltsville, Maryland.<sup>125</sup> Ia juga merupakan pendiri sekaligus pemimpin *High Impact Leadership Coalition* (HILC). Pemikirannya yang dipublikasikan oleh CNN merupakan bagian dari *The Black Pulpit*, opini mingguan yang mengeksplorasi keyakinan kelompok kulit hitam di AS. Sebagai pemuka agama, opini Uskup Harry tersebut mewakili pandangan kelompok Kristen kulit hitam di AS. Dapat dilihat dalam tabel 1.1 pada bab 1 bahwa penolakan dari kelompok Kristen kulit hitam masih tinggi dibandingkan dengan kelompok Kristen minoritas lainnya.

Hal serupa juga pernah dilakukan oleh kelompok agama Yahudi yang menolak pernikahan sesama jenis, terutama kelompok Yahudi Ortodoks. Kelompok ini berbeda jauh dengan kelompok Yahudi pada umumnya yang menyatakan dukungannya atas legalisasi pernikahan sesama jenis. Kelompok Yahudi Ortodoks berpegang teguh pada

---

<sup>124</sup>Harry R. Jackson Jr. 2010. Same-Sex Marriage Will Hurts Families, Society. *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/07/jackson.same.sex.marriage/> pada 13 Juni 2016

<sup>125</sup>Editor CNN. Same-Sex Marriage Will Hurts Families, Society. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/07/jackson.same.sex.marriage/> pada 13 Juni 2016

kitab Taurat yang melarang segala jenis aktivitas hubungan sesama jenis. Untuk menyampaikan pandangannya, kelompok Yahudi Ortodoks mempublikasikan *joint statement* yang ditandatangani oleh *Agudath Israel of America, Central Rabbinical Congress of the U.S.A and Canada, National Council of Young Israel, Rabbinical Alliance of America, Rabbinical Council of America*, dan *Union of Orthodox Jewish Congregations of America* pada Mei 2011.<sup>126</sup> Berikut isi *joint statement* tersebut:

*“On the issue of legalizing same-sex marriage, the Orthodox Jewish world speaks with one voice, loud and clear:*

*We oppose the redefinition of the bedrock relationship of the human family.*

*The Torah, which forbids homosexual activity, sanctions only the union of a man and a woman in matrimony. While we do not seek to impose our religious principles on others, we believe the institution of marriage is central to the formation of a healthy society and the raising of children. It is our sincere conviction that discarding the historical definition of marriage would be detrimental to society.*

*Moreover, we are deeply concerned that, should any such redefinition occur, members of traditional communities like ours will incur moral opprobrium and may risk legal sanction if they refuse to transgress their beliefs. That prospect is chilling, and should be unacceptable to all people of good will on both sides of this debate.*

*The integrity of marriage in its traditional form must be preserved.”<sup>127</sup>*

Dari teks diatas dapat dilihat argumen utama kelompok Yahudi Ortodoks dalam menolak pernikahan sesama jenis adalah dikarenakan kepercayaan agamanya yang meyakini bahwa Kitab Taurat hanya memperbolehkan hubungan heteroseksual. Selain

---

<sup>126</sup>Failed Messiah.com. 2011. *Joint Orthodox Ans Ultra-Orthodox Statement Against Same Sex Marriage*. Diakses dari [http://failedmessiah.typepad.com/failed\\_messiahcom/2011/05/joint-orthodox-and-ultra-orthodox-statement-against-same-sex-marriage-234.html](http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/joint-orthodox-and-ultra-orthodox-statement-against-same-sex-marriage-234.html) pada 13 Juni 2016

<sup>127</sup>*Ibid.*

itu, masyarakat dan keluarga juga menjadi argumen utama dalam teks tersebut. Kelompok Yahudi Ortodoks meyakini bahwa keluarga normal yang terdiri dari Ayah dan Ibu merupakan pondasi utama untuk kepentingan masyarakat serta anak-anak.

Pernyataan penolakan kelompok Yahudi diatas kembali ditegaskan pada akhir tahun 2011 dengan komposisi dukungan yang lebih besar. 100 Rabi atau pendeta Yahudi menandatangani Deklarasi Pernikahan Sesama Jenis yang intinya menyatakan bahwa pandangan kelompok Yahudi Ortodoks tidak dapat dirubah dan tidak akan pernah berubah.<sup>128</sup>

Pada tahun 2015, bingkai kampanye penolakan pernikahan sesama jenis mulai mengalami perubahan. Tidak lagi mempertahankan bingkai keluarga untuk menolak legalisasi pernikahan sesama jenis, kelompok agama menggunakan ‘kebebasan beragama’ untuk melindungi mereka yang menolak pernikahan homoseksual. Hal tersebut ditunjukkan dalam materi-materi kampanye yang disebarluaskan oleh kelompok agama dalam media massa. Salah satunya melalui video yang dirilis online di YouTube dengan judul ‘*Not Alone*’. Video tersebut diunggah oleh *CatholicVote* pada 25 Juni 2015.<sup>129</sup> Dalam video yang berdurasi 2 menit 38 detik tersebut, menunjukkan 6 muda yang mengakui bahwa mereka percaya pada definisi pernikahan tradisional, yaitu antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Lebih lanjut, dalam video tersebut ditunjukkan bahwa kepercayaan dan keyakinan mereka tentang pernikahan tradisional menjadi ancaman yang didiskriminasi oleh pendukung pernikahan sesama jenis.

Hal tersebut terbukti ketika pada akhir tahun 2015 seorang juru tulis di Kentucky dipenjarakan karena menolak memberikan lisensi pernikahan terhadap pasangan homoseksual berdasarkan keyakinan agamanya. Kelompok agama kemudian segera memberikan bantuan kepada Kim Davis. *Liberty Counsel*, sebuah firma hukum

---

<sup>128</sup>Algemeiner. 2011. *100 Orthodox Rabbist Issue Same Sex Marriage Declaration*. Diakses dari <http://www.algemeiner.com/2011/12/05/100-orthodox-rabbis-issue-same-sex-marriage-declaration/#> pada 13 Juni 2016

<sup>129</sup>Dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=I6PPk2NOQXs>

kelompok Kristen di AS, membantu menyediakan pengacara untuk membela Kim Davis. Sementara umat Kristen melalui *The Christian Nation* membuat laman di Facebook dengan nama ‘Support Kim Davis’.<sup>130</sup> *The Christian Nation* juga mengeluarkan statemen dukungan terhadap Kim Davis dalam websitenya. Pastor Juan Rivera menuliskan:

*“Without Mommys and Daddys committing to procreating children the human race would naturally cease to exist. Natural MARRIAGE is the committed union between one FEMALE and one MALE. Anything else is just a cheap imitation, and Christians shouls say this boldly and without fear of intimidation because the TRUTH always wins.”*<sup>131</sup>

Selain itu, dukungan secara online juga diberikan melalui *change.org*, sebuah platform petisi online masyarakat mengenai isu tertentu. Petisi online tersebut dibuat oleh Joyce Fultz dari Kentucky untuk mendukung Kim Davis. Petisi tersebut berhasil mendapatkan 2.432 pendukung dengan target 2.500. Dalam pembukaannya, Joyce Fultz menuliskan:

*“As Christians, We need to support God's word, live by God's set morals and in return support God's people when man made laws fail to do so. Christians, you DO have a voice, speak up NOW, because with each passing day we are losing God's favor. By remaining quiet we have already lost prayer in school. Christians aren't allowed to stand up for our faith...if we do we are "spreading hate". True Christians are to love yes, but as true Christians, we will not compromise God's word, but to make it our foundation to stand upon.”*<sup>132</sup>

Pasca keputusan Mahkamah Agung AS pada 26 Juni 2015 dan adanya kasus Kim Davis, beberapa organisasi agama terus melakukan kampanye untuk menolak pernikahan sesama jenis di AS, terutama dalam level negara bagian. *People For The American Way* (PFAW) memaparkan delapan organisasi keagamaan yang terus mengkampanyekan dan mendukung penolakan terhadap keputusan Mahkamah Agung

<sup>130</sup>Dapat dilihat di [https://web.facebook.com/ClerkKimDavis/?\\_rdr](https://web.facebook.com/ClerkKimDavis/?_rdr)

<sup>131</sup>Pastor Juan Rivera. 2015. *KIM DAVIS, Natural Marriage and Christian Activism*. Diakses dari <https://thechristiannation.org/2015/09/08/kim-davis-natural-marriage-and-christian-activism/> pada 13 Juni 2016

<sup>132</sup>Change.org. *Keep and Support Kim Davis*. Diakses dari <https://www.change.org/p/kentucky-governor-rowan-county-clerk-kim-davis-keep-and-support-kim-davis> pada 13 Juni 2016

AS mengenai pernikahan homoseksual. Kedelapan organisasi tersebut adalah *Family Research Council*, *Heritage Foundation* dan *Heritage Action*, *National Organization for Marriage*, *Alliance Defending for Freedom*, *Liberty Counsel*, *American Family Association*, *Becket Fund for Religious Liberty*, dan *The American Principles Projects*.<sup>133</sup> Dalam hal kampanye penolakan, media massa menjadi alat yang penting bagi organisasi-organisasi tersebut. Selain dengan mengirimkan *email blast* atau *newsletter* berkala kepada anggotanya, organisasi-organisasi tersebut juga memiliki *website* masing-masing untuk menginformasikan dan mengedukasi masyarakat AS mengenai perjuangannya.

Pada bulan Desember 2015, *Family Research Council* melalui *email blast* mengingatkan anggotanya bahwa kelompok ‘seksual radikal’ telah mendeklarasikan perang terhadap nilai-nilai agama kelompok Kristen.<sup>134</sup> Kelompok seksual radikal tidak hanya mengacu kepada kelompok LGBT, tetapi juga anggota pemerintahan di Washington D.C. Selain itu, dalam artikel yang berjudul *Miss. Guided by Facts, Not Fear*, *Family Research Council* memberikan pujian kepada Gubernur Mississippi atas keberaniannya menandatangani HB 1523 dan bahwa undang-undang tersebut harus menjadi model untuk melindungi kebebasan agama di negara bagian lainnya.<sup>135</sup> Strategi yang sama juga dilakukan oleh organisasi lainnya dalam *website* mereka dengan membujuk masyarakat AS untuk menghubungi perwakilannya dalam cabang legislatif agar mendukung rancangan undang-undang yang melindungi keyakinan agama mengenai pernikahan heteroseksual.

---

<sup>133</sup>PFAW. *Who Is Weaponizing Religious Liberty?*. Diakses dari <http://www.pfaw.org/media-center/publications/who-weaponizing-religious-liberty> pada 13 Juni 2016

<sup>134</sup>*Ibid.*

<sup>135</sup>Family Research Council. 2016. *Miss. Guided by Facts, Not Fear*. Diakses dari <http://www.frc.org/get.cfm?i=WA16D04&f=WU16D02> pada 13 Juni 2016

#### 4.3.2 Kampanye dalam Ballot Negara Bagian: California Prop. 8

Salah satu media demokrasi yang ada di sebagian besar negara bagian AS adalah *ballot measure*. Ballotpedia mendefinisikan *ballot measure* sebagai: “*a broad, generic term used to describe questions or issues that appear on ballots where voters can approve or reject them*”.<sup>136</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ballot measure* merupakan salah satu cara yang digunakan oleh pemerintah untuk mendapatkan aspirasi masyarakat mengenai suatu isu.<sup>137</sup>

Hingga tahun 2012, sebagian besar negara bagian AS melakukan *ballot measure* untuk menentukan apakah pernikahan harus didefinisikan sebagai ‘persatuan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan’ atau sebagai ‘persatuan dua orang tanpa memandang jenis kelaminnya’. Dari *ballot measure* tersebut, masyarakat di 30 negara bagian AS memilih untuk mendukung definisi pernikahan sebagai persatuan antara lelaki dengan seorang perempuan. Berikut daftar 30 negara bagian tersebut:

Tabel 4.1 Ballot untuk Menolak Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Negara Bagian AS

No	Negara	Tahun	No	Negara	Tahun	No	Negara	Tahun
1	Alaska	1998	11	Montana	2004	21	Idaho	2006
2	Nebraska	2000	12	North Dakota	2004	22	South Carolina	2006
3	Nevada	2002	13	Ohio	2004	23	South Dakota	2006
4	Arkansas	2004	14	Oklahoma	2004	24	Tennessee	2006
5	Georgia	2004	15	Oregon	2004	25	Virginia	2006
6	Kentucky	2004	16	Utah	2004	26	Wisconsin	2006
7	Louisiana	2004	17	Kansas	2005	27	Arizona	2008
8	Michigan	2004	18	Texas	2005	28	California	2008
9	Mississippi	2004	19	Alabama	2006	29	Florida	2008
10	Missouri	2004	20	Colorado	2006	30	North Carolina	2012

<sup>136</sup>Ballotpedia. *Ballot Measure*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Ballot\\_measure](https://ballotpedia.org/Ballot_measure) pada 13 Juni 2016

<sup>137</sup>Selengkapnya mengenai *ballot measure* dapat dilihat di [https://ballotpedia.org/Ballot\\_measure](https://ballotpedia.org/Ballot_measure)

Sumber:Ballotpedia. Diakses dari <https://ballotpedia.org/Search?q=marriage%20amendment>

Bagaimana masyarakat lebih memilih untuk mendefinisikan pernikahan sebagai ‘persatuan antara seorang lelaki dengan perempuan’ tidak terlepas dari peranan kelompok agama yang terus mengkampanyekan definisi tersebut dalam berbagai cara. Sebagai sebuah kelompok, kelompok agama memiliki banyak anggota atau pengikut yang secara umum mentaati berbagai peraturan yang ditetapkan oleh Kitab atau pemimpin mereka. Hal tersebut menjadi cara yang efektif bagi kelompok agama untuk mendapatkan massa yang mendukung upaya mereka dalam menolak pernikahan sesama jenis. Namun demikian, kelompok agama juga tidak mengeliminasi pentingnya suara dari masyarakat yang mungkin bukan merupakan bagian dari kelompok agama tersebut. Dalam *ballot measure* di beberapa negara bagian, kelompok agama berkampanye melalui media massa yang kemudian tidak hanya dapat menjaring suara dari para pengikut kelompok agama tersebut, tetapi juga masyarakat yang bukan merupakan bagian dari kelompok tersebut. Salah satunya di negara bagian California.

*Ballot measure* di negara bagian California dilakukan pada tahun November 2008 yang dikenal dengan *proposition 8 (prop. 8)* dan bertujuan untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Agung California yang melegalkan pernikahan sesama jenis pada awal tahun 2008. Dalam *ballot measure* tersebut, kelompok agama maupun kelompok LGBT berupaya untuk mempengaruhi masyarakat California untuk mendukung atau menolak *prop. 8*. Kedua kelompok memiliki pendanaan besar yang dihabiskan untuk mengkampanyekan kepentingannya dalam *prop. 8*. US\$38.000.000 terkumpul untuk megkampanyekan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis dan US\$32.000.000 untuk melarang pernikahan sesama jenis.<sup>138</sup> Kelompok agama Mormon merupakan penyumbang dana terbesar dalam kampanye tersebut.<sup>139</sup> Selain Mormon, beberapa kelompok agama besar yang mendukung *prop. 8* diantaranya

---

<sup>138</sup>Tamara Audi, Austin Schechk dan Christopher Lawton. 2008. California Votes for Prop 8. *The Wall Street Journal*. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB122586056759900673> pada 13 Juni 2016

<sup>139</sup>*Ibid.*

adalah Katolik Roma, Kristen Evangelis, seta pastor latin dan kulit hitam konservatif.<sup>140</sup>

Dana kampanye yang sedemikian besar yang dimiliki oleh kedua kelompok memicu kampanye sengit yang ditandai dengan aksi unjuk rasa, boikot, dukungan selebriti dan iklan televisi untuk membujuk masyarakat bergabung dengan salah satu kelompok tersebut.<sup>141</sup> Iklan kelompok LGBT yang menentang *prop. 8* berjudul “*The Thorons – Don’t Eliminate Marriage for Anyone*”, sementara kelompok agama yang mendukung dan mensponsori *prop. 8* menggunakan judul “*Whether You Like It Or Not*”.<sup>142</sup> Judul “*Whether You Like It Or Not*”<sup>143</sup> diambil pidato Gavin Newsom, walikota San Fransisco, yang mengkampanyekan pernikahan sesama jenis pada 15 Mei 2008. Dalam iklan televisi tersebut diperlihatkan bahwa Newsom mengatakan “...it’s gonna happen. Whether you like ot or not.” Cuplikan pidato Newsom tersebut kemudian menjadi bahan bagi kelompok agama untuk menunjukkan bahwa pernikahan sesama jenis akan segera terjadi di AS dan dapat mengancam stabilitas masyarakat.

Setelah *Whether You Like Or Not*, pendukung *prop. 8* beberapa kali juga membuat iklan televisi yang memperlihatkan dampak negatif dari pernikahan sesama jenis.<sup>144</sup> Salah satunya berjudul “*It’s Already Happened*” yang dirilis pada Oktober 2008. Dalam iklan tersebut diperlihatkan bahwa apabila pernikahan sesama jenis dilegalkan, sekolah akan diwajibkan untuk mengajari murid-muridnya mengenai pernikahan sesama jenis yang kemudian akan memotivasi anak-anak menjadi lesbian atau gay. Iklan *It’s Already Happened* diinspirasi oleh kejadian di Massachusetts dimana pada tahun 2006 seorang guru di Massachusetts membacakan buku berjudul

---

<sup>140</sup>Jesse McKinley dan Kirk Johnson. 2008. Mormons Tipped Scale in Bay on Gay Marriage. *The New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2008/11/15/us/politics/15marriage.html?register=facebook> pada 13 Juni 2016

<sup>141</sup>Tamara Audi, Austin Schechk dan Christopher Lawton. 2008. California Votes for Prop 8. *The Wall Street Journal*. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB122586056759900673> pada 13 Juni 2016

<sup>142</sup>Institute of Governmental Studies, University of California. *Proposition 8*. Diakses dari <https://igs.berkeley.edu/library/elections/proposition-8> pada 13 Juni 2016

<sup>143</sup>Dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=4kKn5LNhNto>

<sup>144</sup>Dapat dilihat di <https://www.youtube.com/user/VoteYesonProp8/videos>

*Kind and King* kepada murid kelas duanya.<sup>145</sup> Dalam buku *King and King*, diceritakan mengenai seorang pangeran yang menikah dan berciuman dengan seorang pangeran. Dengan kalimat lain buku tersebut menggambarkan hubungan homoseksual sehingga membingungkan murid-murid di Massachusetts yang kemudian bertanya kepada orang tuanya.

Selain membuat iklan televisi, kelompok pro *prop. 8* juga menggunakan media internet untuk menjaring dukungan masyarakat California. Diantaranya adalah dengan membuat website yang berisi artikel mengenai *prop. 8* dan mengapa pernikahan tradisional harus dipertahankan.. Salah satu website yang dibuat adalah *iProtectMarriage.com* yang ditujukan kepada kalangan muda di California. Melalui website tersebut, kelompok *pro. 8* mendesak kaum muda di California untuk ikut mendukung *prop. 8*.<sup>146</sup>

Selain membuat website, kelompok agama juga menggunakan taktik *Family Home Emailing*, yaitu taktik dengan mengirimkan surat online yang berisikan imbauan untuk memvoting ‘yes’ dalam *ballot prop. 8*. Dalam *Family Home Emailing*, kelompok agama juga mengutip Al-Kitab untuk membujuk masyarakat California bergabung mendukung *prop. 8* dan video mengenai persatuan umat Katolik dalam menentang pernikahan sesama jenis.<sup>147</sup> Selain itu, agar *e-mail* yang dikirimkan lebih menarik, *e-mail* tersebut disarankan untuk menyertakan artikel atau gambar-gambar, diantaranya:

---

<sup>145</sup>Christian Newswire. 2008. *Protect Marriage – Yes on Prop 8 Campaign Releases Second Television Commercial: ‘It’s Already Happened’*. Diakses dari <http://www.christiannewswire.com/news/785528191.html> pada 15 Juni 2016

<sup>146</sup>Andrew. 2008. *Anti-Gay Nup Site For Youth, But Keeps Old Tactics*. Diakses dari <http://www.queerty.com/anti-gay-nup-site-goes-for-youth-but-keeps-old-tactics-20080923> pada 15 Juni 2016

<sup>147</sup>Dapat dilihat di [http://digital.library.ucla.edu/websites/2008\\_993\\_105/index.htm](http://digital.library.ucla.edu/websites/2008_993_105/index.htm).



Gambar 4.3 Poster Kampanye Kelompok Agama untuk Mendukung *Prop. 8*

Sumber: [http://digital.library.ucla.edu/websites/2008\\_993\\_105/index.htm](http://digital.library.ucla.edu/websites/2008_993_105/index.htm)

Gambar 4.3 diatas merupakan beberapa contoh poster yang dikirimkan oleh kelompok agama. Dengan menggunakan foto bayi yang bertuliskan ‘bagaimana dengan hak saya untuk memiliki ibu dan ayah?’, kelompok agama mencoba menggugah para pemilih di California untuk mendukung *prop. 8*. Selain itu, kelompok agama juga menggunakan keputusan Perancis yang melarang legalisasi pernikahan sesama jenis di negara tersebut.

Keberhasilan kampanye kelompok agama dalam membujuk masyarakat California memilih ‘yes’ dalam voting *prop. 8* terbukti ketika pada 4 November 2008 sebanyak 52,24% masyarakat California mendukung *prop. 8* dan hanya 47,76% yang menolaknya.<sup>148</sup> *LGBT Mentoring Project*, dalam websitenya menjelaskan bahwa hasil voting *prop. 8* dipengaruhi oleh iklan televisi yang dibuat oleh kelompok agama, terutama iklan *Whether You Like It Or Not* dan *It’s Already Happened*. Berdasarkan hasil analisa *LGBT Mentoring Project*, pada pertengahan September 2008, sebelum iklan televisi dibuat oleh kedua pihak (kelompok agama maupun kelompok LGBT), polling menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih ‘no’ untuk *prop. 8*. Namun

<sup>148</sup>Ballotpedia. *California Proposition 8, the “Eliminates Right of Same-Sex Couples to Marry” Initiative (2008)*. Diakses dari

[https://ballotpedia.org/California\\_Proposition\\_8,\\_the\\_%22Eliminates\\_Right\\_of\\_Same-Sex\\_Couples\\_to\\_Marry%22\\_Initiative\\_\(2008\)](https://ballotpedia.org/California_Proposition_8,_the_%22Eliminates_Right_of_Same-Sex_Couples_to_Marry%22_Initiative_(2008)) pada 15 Juni 2016

setelah iklan *Wether You Like It Or Not* mengudara pada 29 September 2008, polling menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan dalam masyarakat California untuk memilih 'yes'. Iklan *It's Already Happened* yang mengudara pada 8 Oktober 2008 juga menjadikan dukungan terhadap *prop. 8* tetap berada di atas 50%. Bahkan setelah voting dilakukan, berdasarkan survey oleh *Binder Research*, menunjukkan bahwa antara 6 November dan 16 November 2008, 16,23% pemilih merasa iklan *It's Already Happened* tidak terlupakan dan meyakinkan mereka untuk memilih 'yes'.<sup>149</sup>

#### **4.3 Membangun Jaringan dalam Pemerintahan Amerika Serikat Melalui Pemilu**

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan adalah melalui pemilihan umum, baik ditingkat negara bagian maupun di tingkat federal. Beberapa kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya juga bertepatan dengan pemilihan umum di AS, sehingga sangat penting bagi kelompok agama untuk mencari kandidat pejabat publik yang dapat mengadvokasikan kepentingannya. Contohnya, pada musim pemilihan Partai Republik pada 1996 bertepatan dengan upaya legalisasi pernikahan sesama jenis di negara bagian Hawaii. Hal tersebut kemudian digunakan dengan baik oleh NCPM untuk mendapatkan dukungan para calon kandidat Presiden dari Partai Republik. Satu minggu sebelum pemilihan di negara bagian Iowa, NCPM menggelar rapat umum di Des Moines dan menantang para calon kandidat untuk menandatangani ikrar penolakan terhadap pernikahan sesama jenis.<sup>150</sup>

Ketika calon pejabat pemerintah setuju untuk mendukung sebuah isu yang diadvokasikan oleh kelompok kepentingan, sebagai balasannya kelompok kepentingan akan mendorong anggotanya untuk mendukung calon pejabat tersebut dalam pemilu. Pada tahun 2004, sebagai salah satu upayanya untuk meloloskan FMA, James Dobson bersedia memberikan dukungan kelompok koalisi Kristen konservatif di AS dengan

---

<sup>149</sup>LGBT Mentoring Project. *Finding 2: The Yes on 8 Ads That Worked*. Diakses dari <http://prop8report.lgbtmentoring.org/read-the-report/findings-overview/findings-1-7-prejudice/finding-2-newsom-princes> pada 15 Juni 2016

<sup>150</sup>Sara Diamond. 1998. *Not by Politics Alone: The Enduring Influence of the Christian Rights*. New York: The Guilford Press. Hlm. 169

syarat calon Presiden George W. Bush menyatakan kesediaannya untuk mendukung FMA.<sup>151</sup> Hal serupa juga terus dilakukan kelompok agama dalam pemilu-pemilu selanjutnya, terutama pemilu Presiden.

Dalam memilih calon pejabat publik yang akan didukung, kelompok agama tidak hanya asal pilih, tetapi dengan menggunakan metode tertentu. Salah satunya yaitu *the ratings game*. Dalam metode tersebut kelompok kepentingan melihat bagaimana calon pejabat publik, baik anggota Kongres maupun kandidat Presiden AS, dalam menanggapi sebuah isu. Apabila si calon memiliki *track record* yang sesuai dengan kepentingan kelompok, dukungan akan diberikan kepada calon tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila calon tidak mendukung isu yang diadvokasikan oleh kelompok kepentingan, maka anggota kelompok kepentingan akan mencari calon lain yang lebih sejalan dengan ideologi kelompok kepentingan.

Salah satu kelompok agama yang menggunakan *the ratings game* untuk memilih perwakilan yang akan didukungnya adalah *Heritage Action*. *Heritage Action* merupakan organisasi pelobi dan bagian dari *The Heritage Foundation* yang mengadvokasikan kebijakan-kebijakan konservatif.<sup>152</sup> Organisasi tersebut secara aktif bertemu dengan anggota Kongres, khususnya anggota Kongres dari Partai Republik. Dalam websitenya, *Heritage Action* menampilkan skor performa dari anggota Kongres, baik dari Senat maupun HoR.<sup>153</sup> Skor tersebut kemudian menjadi referensi bagi kelompok agama maupun anggotanya untuk mendukung ataupun tidak anggota Kongres.

---

<sup>151</sup>Anna Grzymala-Busse. 2015. *Nations Under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy*. New Jersey: Princeton University Press. Hlm. 284. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxH\\_e0MIAtLU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false](https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxH_e0MIAtLU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false) pada 15 Juni 2016

<sup>152</sup>Selengkapnya mengenai *Heritage Action* dapat dilihat di <http://heritageaction.com/about/>

<sup>153</sup>Dapat dilihat di <http://heritageactionscorecard.com/>

#### 4.3.1 Super PAC dan PAC: *Family Research Council*

Dalam pemilihan Kongres AS pada tahun 2014, tiga calon dari Partai Republik dikalahkan oleh calon anggota Kongres dari partai Demokrat. Calon-calon tersebut adalah Monica Wehby dari negara bagian Oregon, Carl DeMaio dari California, dan Richard Tisei dari Massachusetts.<sup>154</sup> Ketiga calon tersebut mengalami kekalahan karena satu hal yang sama, yaitu mendukung pernikahan sesama jenis. Berkaitan dengan kekalahan tersebut, *National Organization for Marriage* mengakui secara terbuka bahwa kekalahan ketiga calon anggota Senat di negara bagian masing-masing merupakan hasil perjuangan *National Organization for Marriage*. Brian Brown, presiden *National Organization for Marriage* mengatakan:

*“I hope that our success in defeating three Republicans candidates sends a message to the Republicans leadership in Washington that the GOP<sup>155</sup> faithful demands candidates who are committed to defending marriage, which is a critical element of the Republican platform.”<sup>156</sup>*

*“Marriage is the most pro-family, pro-child institution ever devised, one that brings men and women together and forms the ideal environment for any children born of their union. When candidates speak out in support of marriage, voters will reward them; when candidates ignore marriage or actually want to redefine it, they are rejected.”<sup>157</sup>*

Cara yang digunakan oleh kelompok kepentingan seperti *National Organization for Marriage* untuk mengalahkan calon anggota Kongres yang tidak disukai adalah dengan mengarahkan pemilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum.

---

<sup>154</sup>Patrick Caldwell. 2014. *This Anti-Gay-Marriage Group Is Really Excited That It Just Helped Elect Pro-Gay-Marriage Candidates*. Diakses dari <http://www.motherjones.com/politics/2014/11/national-organization-marriage-rob-portman> pada 17 Juni 2016

<sup>155</sup>GOP atau *Grand Old Party* adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut Partai Republik di Amerika

<sup>156</sup>Brian Brown. 2014. Dalam NOM Blog. *National Organization for Marriage Defeats Every Republican It Targeted Who Embraced Same-Sex ‘Marriage’; Group will Target Sen. Rob Portman for defeat in 2016*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/39827/> pada 17 Juni 2016

<sup>157</sup>*Ibid.*

Dalam pemilihan ketiga calon anggota Kongres dari Partai Republik yang mendukung pernikahan sesama jenis, kelompok konservatif merasa tidak terpengaruhi oleh hasil pemilihan sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal di rumah dan tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh Partai Republik.<sup>158</sup>

Selain berusaha mengalahkan calon-calon anggota Kongres yang mendukung pernikahan sesama jenis, pada pemilihan Kongres tahun 2014 kelompok agama yang menolak pernikahan sesama jenis juga mendukung calon-calon yang mempertahankan definisi pernikahan tradisional. *National Organization for Marriage* mengarahkan calon-calon tersebut kepada Thom Tillis, Tom Cotton, Joni Ernst, dan Ben Sasse. *National Organization for Marriage* menghabiskan lebih dari US\$ 200.000 untuk iklan televisi dan surat dalam kampanye mendukung Thom Tillis dan Tom Cotton serta mensponsori tur kampanye Joni Ernst dan Ben Sasse.<sup>159</sup>

Selain *National Organization for Marriage*, *Family Research Council* (FRC) juga berkontribusi dalam pemilihan anggota Kongres AS pada tahun 2014. Melalui Super PAC-nya yang bernama *Faith Family Freedom Fund*, FRC menghabiskan US\$312.023 pada pemilihan tahun 2014. Dana tersebut digunakan untuk mendukung dan menggalkan kandidat Kongres AS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 *Independent Expenditure Faith Family Freedom Fund* pada Pemilu Pertengahan Tahun 2014

No	Nama Kandidat	Negara Bagian	Partai	Anggota	Kampanye		Jumlah Pengeluaran (US\$)
					Mendukung	Menggagalkan	
1	Chris McDaniel	Mississippi	Republik	Senat	✓		49.000
2	Kirk Jorgensen	California	Republik	HoR	✓		32.178

<sup>158</sup>Chris Johnson. 2014. Don't Blame Election Results on Gay Marriage. *The Washington Blade*. Diakses dari <http://www.washingtonblade.com/2014/11/10/dont-blame-results-for-election-2014-on-marriage/> pada 17 Juni 2016

<sup>159</sup>NOM Blog. 2014. *National Organization for Marriage Defeats Every Republican It Targeted Who Embraced Same-Sex 'Marriage'; Group will Target Sen. Rob Portman for defeat in 2016*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/39827/> pada 17 Juni 2016

3	Steve Lonegan	New Jersey	Republik	HoR	✓		20.000
4	Pat Roberts	Kansas	Republik	Senat	✓		18.258
5	David Young	Iowa	Republik	Hor	✓		9.015
6	Rod Blum	Iowa	Republik	HoR	✓		8.572
7	Joni Ernst	Iowa	Republik	Senat	✓		8.572
8	Ben Sasse	Nebraska	Republik	Senat	✓		8.572
9	Steven A King	Iowa	Republik	HoR	✓		8.129
10	Rob Maness	Loisiana	Republik	Senat	✓		5.640
11	Todd Akin	Missouri	Republik	Senat	✓		2.648
12	Bill Cassidy	Louisiana	Republik	Senat		✓	5.640

Sumber: OpenSecrets.org. *Faith Family Freedom Fund: Independent Expenditures*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/indexpend.php?cycle=2014&cmte=C00489625>

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pengeluaran FRC terbanyak melalui *Faith Family Freedom Fund* digunakan untuk mendukung Chris McDaniel untuk menjadi anggota Senat AS. Namun ia dikalahkan oleh Thad Cochran yang juga berasal dari Partai Republik. Terlepas dari kekalahannya, Chris McDaniel merupakan seorang konservatif yang sangat menentang pernikahan sesama jenis.<sup>160</sup> Pada tahun 2015 ia terpilih kembali menjadi Senator di negara bagian Mississippi dan hingga kini masih menjabat aktif.<sup>161</sup> Selain itu, ia juga anggota beberapa organisasi yang memperjuangkan nilai-nilai konservatif termasuk *American Family Association*.<sup>162</sup>

Selain mendukung HB 1523, Chris McDaniel juga sangat menentang keputusan Mahkamah Agung AS yang melegalisasi pernikahan sesama jenis di AS. Ketika

<sup>160</sup>On The Issues. *Mississippi Senator: Chris McDaniel*. Diakses dari [http://senate.ontheissues.org/Senate/Chris\\_McDaniel.htm#q3](http://senate.ontheissues.org/Senate/Chris_McDaniel.htm#q3) pada 17 Juni 2016

<sup>161</sup>Ballotpedia. *Chris McDaniel*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Chris\\_McDaniel](https://ballotpedia.org/Chris_McDaniel) pada 17 Juni 2016

<sup>162</sup>Mississippi Legislature. *Mississippi State Senate: Chris McDaniel*. Diakses dari <http://billstatus.ls.state.ms.us/members/senate/mcdaniel.xml> pada 17 Juni 2016

Mahkamah Agung AS mengeluarkan keputusan tersebut, McDaniel mengeluarkan pernyataan:

*“The “right” announced today by this court has absolutely no basis in the Constitution. Nor does it have any basis in the common law. Consequently, it should have been left up to the respective states to decide the controversial issue of gay marriage.”*<sup>163</sup>

Selain Chris McDaniel, sumbangan terbesar *Faith Family Freedom Fund* diberikan kepada Kirk Jorgensen dan Steve Lonegan yang juga gagal dalam merebut kursi Kongres AS dalam pemilu 2014. Kirk Jorgensen dan Steve Lonegan, keduanya berasal dari Partai Republik. Posisi Kirk Jorgensen dalam isu pernikahan sesama jenis memang tidak jelas, tetapi dukungan tersebut adalah strategi FRC untuk mengalahkan Carl DeMaio yang juga berasal dari Partai Republik namun merupakan seorang gay dan mendukung pernikahan sesama jenis.<sup>164</sup> Sementara Steve Lonegan secara tegas menolak pernikahan sesama jenis. Dalam debat pencalonannya, ia mengatakan:

*“Marriage between a man and a woman is the greatest institution ever devised by the minds of man to raise a child and that’s what this is about. It’s about children... I do not want other groups forcing their new value system down the throats of my Catholic Church, evangelical church, protestant churches, and overriding our institutional religious beliefs.”*<sup>165</sup>

Sama halnya dengan dukungan yang diberikan kepada calon-calon yang kontra terhadap pernikahan sesama jenis, upaya untuk mengalahkan juga diberikan kepada calon-calon anggota Kongres yang pro terhadap pernikahan homoseksual. Kay R Hagan yang mendapatkan dana kampanye penolakan terbesar dari *Faith Family*

---

<sup>163</sup>Chris McDaniel. 2015. Senator Chris McDaniel Releases Statement Regarding Supreme Court Gay Marriage Ruling. *Mississippi Conservative Daily*. Diakses dari <https://mississippiconservativedaily.com/2015/06/26/senator-chris-mcdaniel-releases-statement-regarding-supreme-court-gay-marriage-ruling/> pada 17 Juni 2016

<sup>164</sup>Zack Ford. 2014. *NOM Attacks Gay Republican Candidate For ‘Holding The Hand of His Gay Lover’*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2014/02/20/3313741/nom-attacks-gay-republican-candidate-holding-hand-gay-lover/> pada 17 Juni 2016

<sup>165</sup>Zack Ford. 2014. *New Jersey Senate Candidate: Same-Sex Parenting Would Be A ‘Biological Phenomenon’*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2013/10/10/2764441/new-jersey-senate-candidate-same-sex-parenting-would-be-a-biological-phenomenon/> pada 17 Juni 2016

*Freedom Fund*, menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis pada tahun 2013 melalui laman Facebooknya.<sup>166</sup> Dalam wawancaranya dengan *the News & Observer*, ia mengatakan:

*“After conversations I’ve had with family members, with people I go to church with and with North Carolinians from all walks of life, I’ve come to my own personal conclusion that we should not tell people who they can love, or who they can marry... It’s time to move forward with this issue.”*<sup>167</sup>

Selain memberikan dukungan melalui Super PAC-nya, FRC juga memiliki PAC tradisional yang memberikan bantuan dana langsung kepada calon-calon anggota Kongres pada pemilihan 2014. Dari total US\$115.455, sumbangan terbesar FRC diberikan kepada Steven A King (Steve King), Mark R Meadows, dan Chris Smith. Steve King adalah calon anggota HoR dari negara bagian Iowa, Mark R Meadows dari negara bagian North Carolina dan Chris Smith dari negara bagian New Jersey. Ketiganya merupakan para politisi yang secara tegas menolak legalisasi pernikahan sesama jenis.

Dalam *scoring record* HRC, Steve King mendapatkan skor 0% dari 100%.<sup>168</sup> Berikut kutipannya dalam menanggapi pernikahan sesama jenis:

*“The definition of marriage from the beginning of time has been a man and woman joined together, hopefully in holy matrimony, for the purposes of encouraging a family unit and raising children and pouring our values down through that crucible of marriage into the next generation because that’s the most successful and effective way that we can advance civilization.”*<sup>169</sup>

---

<sup>166</sup>Laura Candler. 2013. *Kay Hagan Announces Support For Gay Marriage*. Diakses dari <http://wunc.org/post/kay-hagan-announces-support-gay-marriage> pada 17 Juni 2016

<sup>167</sup>Kay Hagan. 2013. Dalam Sabrina Siddiqui. *Kay Hagan Backs Gay Marriage*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/03/27/kay-hagan-gay-marriage\\_n\\_2963759.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/03/27/kay-hagan-gay-marriage_n_2963759.html) pada 17 Juni 2016

<sup>168</sup>0% = Sangat Menentang Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis; 100% = Sangat Mendukung Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis. Skoring dapat dilihat di <http://www.hrc.org/your-elected-officials/>

<sup>169</sup>Steve King. Dalam HRC. Diakses dari <http://www.hrc.org/your-elected-officials/profile?id=107> pada 17 Juni 2016

Selain itu, pada tahun 2009 Steve King mengatakan dalam sebuah wawancara radio bahwa pernikahan sesama jenis merupakan agenda kelompok sosialis untuk merusak pondasi kebebasan dan hak individu.<sup>170</sup> Begitu pula pasca legalisasi pernikahan sesama jenis diputuskan oleh Mahkamah Agung AS, Steve King berupaya untuk mengajukan sebuah resolusi mengenai ketidaksetujuan Kongres terhadap keputusan Mahkamah Agung AS.<sup>171</sup>

Penolakan Steve King sama halnya dengan penolakan oleh Mark R Meadows dan Chris Smith yang masing-masing memperoleh skor 30%<sup>172</sup> dan 0%<sup>173</sup> dari HRC. Keduanya percaya bahwa pernikahan adalah persatuan antara lelaki dengan perempuan. Mark R Meadows mengatakan bahwa ia percaya institusi pernikahan tradisional sangat penting dan berjanji untuk mempertahankan definisi pernikahan tradisional dalam Kongres AS.<sup>174</sup> Begitu pula dengan Chris Smith yang selalu mendukung amandemen Konstitusi AS untuk menetapkan definisi pernikahan tradisional. Ia juga mengatakan: *“I am a strong believer in traditional marriage and do not construe homosexual rights as human rights ... Others have a different view and I certainly respect them”*<sup>175</sup>

Selain ketiga calon-calon anggota Kongres diatas, FRC juga mendukung calon-calon anggot HoR lainnya yang menolak pernikahan sesama jenis. Beberapa politisi mungkin tidak memberikan pernyataan langsung dan tegas yang menentang

<sup>170</sup>Michael O’Brien. 2009. Congressman: Same Sex Marriage Part of Push for Socialism. *The Hill*. Diakses dari <http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/60007-congressman-same-sex-marriage-part-of-push-for-socialism> pada 20 Juni 2016

<sup>171</sup>Ed O’Keefe. 2015. Steve King Wants Resolution Denouncing Supreme Court Same-Sex Marriage Ruling. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/07/06/steve-king-wants-resolution-denouncing-supreme-court-same-sex-marriage-ruling/> pada 20 Juni 2016

<sup>172</sup>HRC. Diakses dari <http://www.hrc.org/your-elected-officials/profile?id=201> pada 20 Juni 2016

<sup>173</sup>HRC. Diakses dari <http://www.hrc.org/your-elected-officials/profile?id=210> pada 20 Juni 2016

<sup>174</sup>Mark Meadows. Dalam HRC. Diakses dari <http://www.hrc.org/your-elected-officials/profile?id=201> pada 20 Juni 2016

<sup>175</sup>Jonathan D. Salant. 2015. N.J. Rep. Smith’s Gay Marriage Comments Draw Rebuke From Fellow N.J. Rep. Pallone. *N.J.com*. Diakses dari [http://www.nj.com/politics/index.ssf/2015/02/nj\\_rep\\_smiths\\_comments\\_on\\_gay\\_rights\\_draw\\_rebuke\\_f.html](http://www.nj.com/politics/index.ssf/2015/02/nj_rep_smiths_comments_on_gay_rights_draw_rebuke_f.html) pada 20 Juni 2016

pernikahan sesama jenis, namun seluruh politisi tersebut—terutama mereka yang menjabat—selalu mendukung undang-undang yang menolak pernikahan sesama jenis. Lebih jauh, mereka juga menolak memberikan dukungan terhadap undang-undang yang dapat memberikan jalan bagi legalisasi pernikahan homoseksual seperti rancangan undang-undang *Respect For Marriage Act*.

Sama halnya dengan calon anggota HoR, anggota Senat yang mendapatkan dukungan dari FRC juga merupakan anggota Partai Republik yang sangat vokal dalam menolak pernikahan sesama jenis. Terri Lynn Land contohnya. Meskipun ia tidak berhasil menjadi anggota Kongres AS dalam pemilu tahun 2014, ia merupakan salah satu anggota Partai Republik yang mendukung *platform* GOP untuk menolak pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2012, Terri L. Land menjadi *Republican National Committeewoman* dan mendukung *Platform* GOP yang menyebut pernikahan sesama jenis sebagai '*serangan terhadap pondasi masyarakat*'.<sup>176</sup>

Dalam pemilu 2016, FRC juga melakukan hal yang sama untuk mendukung ataupun menolak calon anggota Kongres AS. Hingga 17 Juli 2016, tercatat bahwa FRC menghabiskan US\$43.000 untuk dana kampanye calon-calon anggota HoR:

Tabel 4.3 PAC FRC Pada Pemilu 2016

No	Nama	Negara Bagian	Jumlah Dana yang Diberikan (US\$)
1	James Bridenstine	Oklahoma	5.000
2	Ron DeSantis	Florida	5.000
3	Scott Garrett	New Jersey	5.000
4	Louis B Jr Gohmert	Texas	5.000
5	Barry Loudermilk	Georgia	4.000
6	Jim Banks	Indiana	3.000

<sup>176</sup>Michigan Democratic Party (MDP). *Terri Lynn Land Can't Hide Her LGBT Discriminatory Agenda*. Diakses dari <http://www.michigandems.com/terri-lynn-land-can-t-hide-her-lgbt-discriminatory-agenda> pada 20 Juni 2016

7	Tim Huelskamp	Kansas	3.000
8	Mike Johnson	Louisiana	3.000
9	Denise Gitsham	California	2.000
10	George Holding	North Carolina	2.000
11	Steven A King	Iowa	2.000
12	Chris Smith	New Jersey	2.000
13	Claudia Tenney	New York	2.000

Sumber : Open Secret.org. *Family Research Council Contributions to Federal Elections, Cycle 2016*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/pacgot.php?cmte=C00452383&cycle=2016> pada 20 Juni 2016

Para politisi yang mendapatkan dana dari FRC diatas merupakan para politisi yang menentang pernikahan sesama jenis bahkan setelah keputusan Mahkamah Agung AS. Tim Huelskamp bahkan tercatat sebagai politisi AS yang paling kontra terhadap kelompok LGBT.<sup>177</sup> Ia juga merupakan anggota HoR yang terus aktif memperkenalkan ataupun mensponsori FMA dan MPA dalam Kongres AS.

Selain FRC, beberapa organisasi agama lainnya juga melakukan strategi serupa. *Family PAC* contohnya. *Family PAC* merupakan organisasi yang berafiliasi dengan *Illinois Family Institute*, sebuah organisasi *pro-family* Kristen konservatif di Illinois. Namun berbeda dengan FRC yang bergerak dalam level federal, *Family PAC* bergerak di level negara bagian, khususnya negara bagian Illinois. Pada awal tahun 2016, *Family PAC* mengumumkan dukungannya untuk calon-calon anggota legislatif Illinois. Dalam e-mail yang dikirimkan kepada anggotanya, pemimpin *Family PAC* mengatakan bahwa

<sup>177</sup>Josh Israel dan Adam Peck. 2012. *The 7 Most Anti-Gay U.S. Representatives*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2012/06/26/506455/the-7-most-anti-gay-us-representatives/> pada 20 Juni 2016

dukungannya hanya diberikan kepada kandidat yang mengisi kuisioner *Illinois Family Institute* dan memiliki ‘*excellent record*’ dalam isu pernikahan.<sup>178</sup>

#### 4.3.2 Partai Politik: *Platform* GOP

Selain PAC dan Super PAC, akses politik kelompok kepentingan juga dapat melalui partai politik. Ketika kelompok kepentingan telah memiliki afiliasi yang kuat dengan partai politik, maka lebih mudah bagi kelompok kepentingan untuk berhubungan dengan pejabat publik. Di AS, kelompok kepentingan konservatif biasanya berhubungan kuat dengan Partai Republik. Begitu pula dengan kelompok kepentingan agama konservatif. Hal tersebut tercermin dalam *platform* Partai Republik yang seringkali mengadvokasikan kepentingan kelompok agama konservatif di AS.

*Platform* Partai Republik atau seringkali dikenal dengan *platform* GOP, adalah statemen mengenai siapa dan apa yang dipercayai oleh anggota Partai Republik sebagai sebuah partai.<sup>179</sup> *Platform* GOP memuat sejumlah isu-isu penting yang dihadapi AS dan bagaimana Partai Republik menghadapi isu-isu tersebut. Bagaimana *platform* tersebut dibuat dijelaskan dalam *website Republican National Convention (RNC)*, yaitu setiap empat tahun sekali dalam acara perwakilan Partai Republik dari setiap negara bagian AS berkumpul bersama dalam RNC dan membahas mengenai berbagai masalah yang terjadi di AS dan bagaimana mereka harus mengatasi masalah tersebut.<sup>180</sup>

Sebelumnya pada tahun 2012, GOP membuat 6 *headline* dalam dokumennya yang berjudul *2012 Republican Platform: We Believe in America*. Keenam *headline* tersebut adalah:

- a. *Restoring the American Dream: Rebuilding the Economy and Creating Jobs*
- b. *We The People: A Restoration of Constitutional Government*
- c. *America’s Natural Resources: Energy, Agriculture and the Environment*

---

<sup>178</sup>Illinois Review. 2016. *Family PAC Announces Primary Election Endorsements*. Diakses dari <http://illinoisreview.typepad.com/illinoisreview/2016/02/family-pac-announces-primary-election-endorsements.html> pada 20 Juni 2016

<sup>179</sup>RNC Platform 2016. Diakses dari <https://www.platform.gop/> pada 1 Juli 2016

<sup>180</sup>RNC Platform 2016. Diakses dari <https://www.platform.gop/> pada 1 Juli 2016

- d. *Reforming Government to Serve People*
- e. *Renewing American Values to Build Healthy Families, Great Schools and Safe Neighborhoods*
- f. *American Exceptionalism*<sup>181</sup>

Isu mengenai pernikahan sesama jenis disebutkan dalam *headline* kedua dan kelima. Dalam pembukaannya di *headline* kedua, dituliskan bahwa Partai Republik adalah partai yang dijamin oleh Konstitusi AS yang secara kompak dan tegas menegakkan hak-hak individu yang diberikan Tuhan dan memastikan bahwa semua orang Amerika setara didepan hukum.<sup>182</sup> Dalam *headline* kedua, Partai Republik menyebutkan dua resolusi tentang pernikahan, yaitu mempertahankan pernikahan melawan aktivis hukum dan mempertahankan DOMA.<sup>183</sup> Sementara dalam *headline* kelima adalah dengan memberdayakan dan mempertahankan dan melindungi pernikahan tradisional.<sup>184</sup>

Pada *platform* GOP tahun 2016, isu pernikahan sesama jenis masih menjadi bagian dari resolusi Partai Republik. Bahkan isu pernikahan sesama jenis jauh lebih menjadi perhatian dalam pemilu yang akan datang setelah keputusan Mahkamah Agung AS. Dalam *draft* final GOP *platform* 2016 yang dipublikasikan pada Juli 2016, Partai Republik kembali membuat 6 *headline*, yaitu:

- a. *Restoring the American Dream*
- b. *A Rebirth of Constitutional Government*
- c. *America's Natural Resources: Agriculture, Energy, and the Environment*
- d. *Government Reform*
- e. *Great American Families, Education, Healthcare, and Criminal Justice*

---

<sup>181</sup>Republican National Committee. 2012. *2012 Republican Platform: We Believe in America*. Diakses dari <https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/docs/2012GOPPlatform.pdf> pada 1 Juli 2016

<sup>182</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup>Republican National Committee. 2012. *Republican Platform: We The People: A Restoration of Constitutional Government*. Diakses dari <https://www.gop.com/platform/we-the-people/> pada 1 Juli 2016

<sup>184</sup>Republican National Committee. 2012. *Republican Platform: Renewing American Values*. Diakses dari <https://www.gop.com/platform/renewing-american-values/#> pada 1 Juli 2016

f. *American Resurgent*<sup>185</sup>

Resolusi mengenai isu pernikahan sesama jenis kembali disebutkan dalam *headline* kedua dan kelima. Dalam *headline* kedua, resolusi yang dirumuskan oleh Partai Republik adalah dengan mempertahankan pernikahan melawan aktivis hukum dan mempromosikan amandemen Konstitusi AS mengenai kebebasan beragama.<sup>186</sup> Secara eksplisit Partai Republik menentang keputusan Mahkamah Agung AS yang menyatakan bahwa DOMA tidak konstitusional:

*“Traditional marriage and family, based on marriage between one man and one woman, is the foundation for a free society and has for millennia been entrusted with rearing children and instilling cultural values. We condemn the Supreme Court’s ruling in United States v. Windsor, which wrongly removed the ability of Congress to define marriage policy in federal law. We also condemn the Supreme Court’s lawless ruling in Obergefell v. Hodges, which in the words of the late Justice Antonin Scalia, was a “judicial Putsch” – full of “silly extravagances” – that reduced “the disciplined legal reasoning of John Marshall and Joseph Storey to the mystical aphorism of a fortune cookie.””*<sup>187</sup>

Sementara dalam *headline* kelima, Partai Republik membuat resolusi ‘pernikahan, keluarga, dan masyarakat’ yang mengadvokasikan pernikahan tradisional antara lelaki dengan perempuan. Selain itu, setiap anak berhak untuk mendapatkan ayah dan ibu yang menikah secara sah sehingga pemerintah harus menetapkan pernikahan hanya terbatas pada pasangan heteroseksual melalui *judicial review* ataupun amandemen konstitusi baik federal maupun negara bagian. Pentingnya peranan keluarga dalam masyarakat juga ditekankan oleh Partai Republik:

*“Foremost among those institutions is the American family. It is the foundation of civil society, and the cornerstone of the family is natural marriage, the union of one man and one woman. Its daily lessons —*

<sup>185</sup>Republican National Committee 2016. 2016. *Republican Platform 2016*. Diakses dari [https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT\\_12\\_FINAL\[1\]-ben\\_1468872234.pdf](https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL[1]-ben_1468872234.pdf) pada 1 Juli 2016

<sup>186</sup>Republican National Committee 2016. 2016. *Republican Platform 2016*. Hlm. 11. Diakses dari [https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT\\_12\\_FINAL\[1\]-ben\\_1468872234.pdf](https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/media/documents/DRAFT_12_FINAL[1]-ben_1468872234.pdf) pada 1 Juli 2016

<sup>187</sup>*Ibid.*

*cooperation, patience, mutual respect, responsibility, self-reliance — are fundamental to the order and progress of our Republic. Strong families, depending upon God and one another, advance the cause of liberty by lessening the need for government in their daily lives.*"<sup>188</sup>

Resolusi Partai Republik dalam isu pernikahan sesama jenis tidak terlepas dari peranan kelompok-kelompok agama konservatif yang berupaya untuk mengadvokasikan kepentingannya dalam RNC. Salah satunya adalah Tony Perkins, pemimpin FRC. Dalam RNC 2012 maupun 2016, Tony Perkins terpilih menjadi anggota *committee* RNC mewakili negara bagian Louisiana.

Sebagai pemimpin FRC, Tony Perkins secara aktif mempromosikan nilai-nilai yang dijunjung oleh FRC termasuk *pro-life*, *pro-natural marriage* dan *pro-religious*. Dalam RNC, Tony Perkins terus mendorong agar *platform* GOP mengenai pernikahan sesama jenis tetap sama dengan *platform* GOP tahun 2012. Selain itu, ia juga memperkenalkan resolusi baru mengenai kelompok LGBT, yaitu dengan mengusulkan agar Partai Republik mendukung *conversion therapy*.<sup>189</sup> *Conversion therapy* merupakan serangkaian perawatan bagi anak-anak yang teridentifikasi sebagai homoseksual agar kembali normal menjadi tertarik pada lawan jenisnya.

Setelah *platform* GOP dibuat, Tony Perkins mengunggah sejumlah *press release* yang menyatakan dukungannya terhadap *platform* GOP 2016. Selain itu, ia juga menyebutkan beberapa organisasi konservatif yang membantu dalam pembuatan *platform* tersebut, diantaranya FRC Action, March for Life, Eagle Forum dan Concerned Women for America.<sup>190</sup> *March for Life* merupakan organisasi yang didekiasikan untuk *pro-life*.<sup>191</sup> *Eagle forum* merupakan organisasi *pro-family* yang juga berbasis di Washington D.C.<sup>192</sup> Sementara *Concerned Women for America* merupakan

---

<sup>188</sup>*Ibid.* Hlm. 31

<sup>189</sup>Zeke J Miller. 2016. GOP Platform Contemplates Anti-Porn Provision, Embrace of 'Conversion Therapy'. *Time*. Diakses dari <http://time.com/4401600/gop-platform-contemplates-anti-porn-provision-embrace-of-conversion-therapy/> pada 1 Juli 2016

<sup>190</sup>Tony Perkins. 2016. *The GOP Platform: Solid, Conservative*. Diakses dari <https://www.frcaction.org/get.cfm?i=WA16G10&f=WU16G03> pada 1 Juli 2016

<sup>191</sup>Selengkapnya mengenai *March for Life* dapat dilihat di <http://marchforlife.org/> pada 1 Juli 2016

<sup>192</sup>Selengkapnya mengenai *Eagle Forum* dapat dilihat di <http://www.eagleforum.org/> pada 1 Juli 2016

organisasi yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai Al-Kitab kepada masyarakat Amerika.<sup>193</sup> Keempat organisasi tersebut memiliki kesamaan yaitu organisasi pelobi kelompok konservatif yang mengusung dan mempromosikan nilai-nilai moral termasuk prinsip agama.

Setelah dipublikasikan, *platform* GOP mendapat kritikan dari berbagai kelompok *pro*-LGBT dan juga anggota Partai Republik yang merupakan homoseksual, salah satunya Gregory T. Angelo. Ia mengatakan: “*Opposition to marriage equality, nonsense about bathrooms, an endorsement of the debunked psychological practice of ‘pray the gay away’ — it’s all in there... This isn’t my GOP.*”<sup>194</sup>

Menanggapi kritikan tersebut, Tony Perkins mengeluarkan statemen melalui *press release*:

*“Not all were celebrating the clearly enunciated conservative principles that underscored the party’s pro-military, pro-life, pro-natural marriage, pro-religious freedom stands. In the concluding moments of the platform gathering, a small group of delegates were engaged in an outright deceptive effort to derail the platform and potentially the convention. After repeated efforts to redefine marriage for the Republican party and interject special LGBT provisions in the platform, an effort was launched to create a Minority Report promoting items for an LGBT agenda, under the guise of creating a preamble for the platform from the 1860 Republican platform.”*<sup>195</sup>

#### 4.3.3 Kandidat Presiden: Pemilu 2016

Selain Kongres AS atau cabang legislatif, cabang eksekutif juga merupakan pejabat publik yang paling penting bagi kelompok kepentingan. Dengan adanya mekanisme *check and balances*, advokasi dalam satu cabang dapat dihambat oleh cabang lainnya. Selain itu, komposisi sebelumnya juga memberikan pelajaran penting

<sup>193</sup>Selengkapnya mengenai *Concerned Women for America* dapat dilihat di <http://concernedwomen.org/about/vision-mission/> pada 1 Juli 2016

<sup>194</sup>Nico Lang. 2016. *Log Cabin Republicans: GOP Platform Is The Most Anti-LGBT Ever*. Diakses dari <http://www.advocate.com/election/2016/7/14/log-cabin-republicans-gop-platform-most-anti-lgbt-ever> pada 1 Juli 2016

<sup>195</sup>Tony Perkins. 2016. *LGBT Activist Attempt to Hijack GOP Platform*. Diakses dari <https://www.frcaction.org/updatearticle/20160713/lgbt-activists-hijack-platform> pada 1 Juli 2016

bagi kelompok kepentingan agama yang menolak pernikahan sesama jenis. Pada saat ini, Partai Republik menjadi partai mayoritas dalam Kongres AS dan memungkinkan bagi kelompok agama untuk terus mempromosikan kepentingannya melalui perwakilan Partai Republik. Namun, dengan Barack Obama yang berasal dari Partai Demokrat sebagai Presiden AS, pergerakan kelompok agama banyak mengalami hambatan termasuk dalam isu pernikahan sesama jenis.

Semenjak menjadi Presiden kedua kalinya, Obama telah menyatakan dukungan terhadap pernikahan sesama jenis. Pada tahun 2011, Obama memerintahkan Departemen Kehakiman agar tidak lagi mempertahankan DOMA.<sup>196</sup> Pada tahun 2012, Obama juga menyatakan dukungannya terhadap kelompok LGBT untuk menikah dalam sebuah wawancara televisi. Ia mengatakan: *“At a certain point I’ve just concluded that for me, personally, it is important for me to go ahead and affirm that I think same-sex couples should be able to get married.”*<sup>197</sup>

Pada pemilu presiden tahun 2012, dukungan kelompok agama—terutama Kristen—di AS banyak diberikan kepada Mitt Romney yang berasal dari Partai Republik. Mitt Romney berasal dari kelompok agama Mormon sehingga dukungan kelompok agama banyak menimbulkan pertanyaan. Namun demikian, dari sudut pandang kelompok *pro-life* dan *pro-family*, dukungan tersebut merupakan hal yang wajar. Mitt Romney memang dikenal sebagai kandidat presiden yang menentang aborsi dan pernikahan sesama jenis. Ia mengatakan:

*“I believe we should have a federal amendment in the constitution that defines marriage as a relationship between a man and woman, because*

---

<sup>196</sup>Brian Montopoli. 2011. Obama Administration Will No Longer Defend DOMA. *CBS News*. Diakses dari <http://www.cbsnews.com/news/obama-administration-will-no-longer-defend-doma/> pada 2 Juli 2016

<sup>197</sup>Barack Obama. 2012. Dalam Phil Gast. Obama Announces He Support Same-Sex Marriage. *CNN News*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2012/05/09/politics/obama-same-sex-marriage/> pada 2 Juli 2016

*I believe the ideal place to raise a child is in a home with a mom and a dad.*<sup>198</sup>

Dukungan tersebut juga dijelaskan oleh pastor Robert Jeffress dari *Dallas First Baptist Church* yang mengatakan:

*“Given the choice between a Christian like Barack Obama who embraces very unbiblical principles like abortion and a Mormon like Mitt Romney who supports biblical values like the sanctity of life and marriage, I think there’s a good biblical case for voting for Mitt Romney.”*<sup>199</sup>

Pada pemilu 2016, pernikahan sesama jenis juga menjadi salah satu isu penting dimana posisi setiap calon Presiden AS baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat menjadi perhatian publik AS. Sebelum Partai Republik membuat dan mempublikasikan *platformnya*, berbagai media dan *think tank* di AS telah mengulas posisi calon-calon potensial dari kedua partai. Dari partai Republik, terdapat 17 calon kandidat yang bersaing untuk memperebutkan posisi sebagai perwakilan partai untuk pemilu Presiden AS, sementara Partai Demokrat memiliki 6 calon kandidat.

Posisi calon-calon kandidat presiden dari Partai Republik dalam hal isu pernikahan sesama jenis sama dengan *platform* GOP 2012. Meskipun beberapa memiliki kepercayaan bahwa kaum LGBT berhak mendapatkan pengakuan melalui *civil union*, namun semua menentang redefinisi pernikahan tradisional untuk mengikutsertakan pernikahan homoseksual.<sup>200</sup> Hingga akhir tahun 2015, enam dari 17 calon kandidat AS menandatangani ikrar untuk memperjuangkan *religious rights bill* dalam tingkat federal yang dikenal dengan FADA (*First Amendment Defense Act*). Calon kandidat tersebut adalah Ted Cruz, Marco Rubion, Ben Carson, Carly Fiorina,

---

<sup>198</sup>ProCon.org. 2012. *2012 Presidential Election: Should Gay Marriage be Legal?*. Diakses dari <http://2012election.procon.org/view.answers.election.php?questionID=1727#mitt-romney> pada 2 Juli 2016

<sup>199</sup>Ed Kilgore. 2012. *Why Christian Right Doesn’t Care That Mitt Romney is a Mormon*. Diakses dari <https://newrepublic.com/article/102771/romney-mormon-religion-backlash-election-obama> pada 2 Juli 2016

<sup>200</sup>Ballotpedia.org. 2016. *2016 Presidential Candidates on Gay Rights*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/2016\\_presidential\\_candidates\\_on\\_gay\\_rights](https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_gay_rights) pada 2 Juli 2016

Rick Santorum, dan Mike Huckabee.<sup>201</sup> Sementara 11 lainnya ada yang mendukung FADA namun tidak menandatangani ikrar tersebut dan ada juga yang memilih untuk tidak mendukung. Donald Trump, Jeb Bush, Lindsey Graham, dan Rand Paul adalah calon kandidat yang menyatakan dukungannya namun tidak ikut menandatangani.<sup>202</sup>

Sama halnya dengan tahun 1966, ikrar diatas merupakan upaya kelompok agama untuk mempengaruhi calon pejabat publik dalam cabang yudikatif. Dilaksanakan oleh *American Principles Project, Heritage Action for America, dan Family Research Council*, ikrar tersebut berbunyi: *If elected, I pledge to push for the passage of the First Amendment Defense Act (FADA) and sign it into law during the first 100 days of my term as President.*<sup>203</sup>

Sementara itu, calon kandidat presiden dari Partai Demokrat semuanya menyatakan dukungannya terhadap pernikahan sesama jenis.<sup>204</sup> Akan tetapi, berbeda dengan calon kandidat lainnya yang memang telah mendukung pernikahan sesama jenis semenjak lama, Hillary Clinton, salah satu calon kandidat potensial Partai Demokrat baru mendukung pernikahan sesama jenis secara terbuka ketika mencalonkan sebagai calon kandidat Presiden AS. Pada tahun 1996, Hillary Clinton menyatakan dukungannya terhadap Bill Clinton dalam menandatangani DOMA. Pada tahun 2000, ketika ia mencalonkan diri menjadi anggota Senat negara bagian New York, ia mengatakan: *“Marriage has got historic, religious and moral content that goes back to the beginning of time, and I think a marriage is as a marriage has always been, between a man and a woman.”*<sup>205</sup>

---

<sup>201</sup>Michael Gryboski. 2015. *6 Presidential Candidates Pledge to Support Bill to Protect Gay Marriage Opponents*. Diakses dari <http://www.christianpost.com/news/6-presidential-candidates-pledge-bill-protect-gay-marriage-opponents-152903/> pada 2 Juli 2016

<sup>202</sup>*Ibid.*

<sup>203</sup>*Ibid.*

<sup>204</sup>Ballotpedia.org. *2016 Presidential Candidates on Gay Rights*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/2016\\_presidential\\_candidates\\_on\\_gay\\_rights](https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_gay_rights) pada 2 Juli 2016

<sup>205</sup>Endtime Ministries. 2016. *What do the Democratic Candidates Believe About Same-Sex Marriage / Civil Unions?*. Diakses dari <http://www.endtime.com/blog/same-sex-marriage-2016-democratic-presidential-candidates/> pada 2 Juli 2016

Namun pada tahun 2003, Hillary Clinton mulai menunjukkan perubahan posisinya dari kontra menjadi pro ketika ia menyatakan bahwa kaum LGBT berhak mendapatkan hak yang sama seperti pernikahan melalui *civil union*. Pada tahun 2013, ia secara eksplisit mengatakan mendukung pernikahan homoseksual: “*L.G.B.T. Americans are our colleagues, our teachers, our soldiers, our friends, our loved ones, and they are full and equal citizens and deserve the rights of citizenship. That includes marriage.*”<sup>206</sup>

Dengan posisi para calon kandidat presiden AS diatas, dukungan terbesar dari kelompok agama diberikan kepada calon kandidat presiden AS dari Partai Republik. Thomas Lake dari CNN menganalisa bagaimana kelompok agama Kristen dimotivasi oleh isu pernikahan sesama jenis dalam memberikan dukungan kepada calon kandidat dari Partai Republik. Ia mengatakan bahwa dalam pemilu 2016, kelompok agama Kristen berupaya untuk melindungi kepercayaan agamanya mengenai pernikahan tradisional agar tidak berdampak pada ekonomi mereka.<sup>207</sup> Ketika Mahkamah Agung AS melegalisasi pernikahan sesama jenis di AS, secara otomatis seluruh warga negara AS juga harus mengakui pernikahan homoseksual. Namun, masyarakat AS yang masih percaya bahwa pernikahan merupakan ketetapan Tuhan, seringkali menolak untuk melayani kaum LGBT dalam berbagai hal seperti layanan gereja, gedung pernikahan, kue pernikahan, dan lisensi pernikahan. Hal tersebut kemudian menimbulkan konflik bagi masyarakat agamis di AS. Satu-satunya jalan bagi kelompok agama untuk melindungi umatnya adalah dengan berupaya mempengaruhi pemerintah untuk melindungi mereka yang menolak pernikahan sesama jenis karena keyakinan agama, atau dengan menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung AS tidak konstitusional melalui Kongres AS.

---

<sup>206</sup>Endtime Ministries. 2016. *What do the Democratic Candidates Believe About Same-Sex Marriage / Civil Unions?*. Diakses dari <http://www.endtime.com/blog/same-sex-marriage-2016-democratic-presidential-candidates/> pada 2 Juli 2016

<sup>207</sup>Thomas Lake. 2016. *Fear and Voting on the Christian Right*. *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/interactive/2015/10/politics/fear-voting-christian-right/> pada 12 Juli 2016

Selain dari organisasi agama, dukungan dan penolakan kepada calon-calon kandidat presiden di atas juga dilakukan oleh pemuka agama Kristen AS, Pastor Steven Andrew. Pastor Steven Andrew membuat *American Christian Voting Guide*, sebuah *checklist* calon kandidat presiden AS berdasarkan *the Five Biblical Qualifications for Choosing Leaders* yang menunjukkan:

- a. Kandidat mana yang yang bisa membawa kebebasan, lapangan kerja lebih baik, dan keamanan nasional dari berkat Tuhan
- b. Seberapa dekat calon kandidat presiden sesuai dengan pembangun bangsa Amerika<sup>208</sup>

Dari sekian calon kandidat yang ada pilihan utama Steven Andrew jatuh pada Mike Huckabee, Rand Paul, Ben Carson, dan Ted Cruz. Sementara penolakan paling tinggi diberikan kepada Hillary Clinton dan Donald Trump. Dalam upayanya mempengaruhi umat Kristen, Steven Andrew menuliskan ringkasan *American Christian Voting Guide* sebagai berikut:

- a. Memilih melawan Tuhan adalah ancaman keamanan nasional: Tuhan memberkati pemimpin yang berani mengatakan bahwa pernikahan sesama jenis bukan hukum, mengakhiri aborsi, memajukan negara Kristen (AS) dan mematuhi Konstitusi.
- b. Hillary Clinton dan Donald Trump gagal memenuhi persyaratan Tuhan: keduanya dapat mengekang umat Kristen untuk menolak pernikahan sesama jenis, menginginkan *transgender* dalam toilet wanita, berdoa dengan umat Muslim dan menodai Konstitusi AS
- c. Berdoa kepada Tuhan agar memiliki pemimpin politik Kristen, dari Presiden hingga dewan sekolah: Mike Huckabee merupakan kandidat Kristen potensial untuk presiden.<sup>209</sup>

---

<sup>208</sup>USA Church. 2016. *Christian Voting Guide*. Diakses dari <https://www.usa.church/christian-voting-guide/> pada 12 Juli 2016

<sup>209</sup>USA Church. 2016. *Christian Voting Guide*. Diakses dari <https://www.usa.church/christian-voting-guide/> pada 12 Juli 2016

#### 4.4 Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu hal yang dijamin oleh Konstitusi AS. Di AS, demonstrasi dikenal dengan *peaceful assembly* dimana masyarakat berkumpul disatu tempat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai suatu hal. Selain sebagai pondasi utama demokrasi, demonstrasi juga merupakan hak dasar setiap individu di AS. Untuk melengkapi hak tersebut dan melindungi intervensi dari negara bagian, Konstitusi AS juga mengatur bagaimana negara bagian harus bersikap terhadap hak-hak individu melalui Amandemen Keempatbelas:

*“... No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizen of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person withing its jurisdiction the equal protection of the laws.”*<sup>210</sup>

Dengan jaminan Konstitusi AS, hampir seluruh negara bagian AS mengikutsertakan perlindungan untuk demonstrasi dalam konstitusi masing-masing negara bagian.<sup>211</sup> Setiap negara bagian memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai bagaimana demonstrasi dapat dilakukan. Satu hal yang harus dilakukan sebelum melakukan demonstrasi di AS adalah ijin untuk berdemonstrasi. Di Washington D.C., untuk mendapatkan ijin berdemo, pendemo harus memberikan keterangan lengkap mengenai panggung, *speaker*, tenda, makanan, dan potensi adanya kekerasan atau *counter-protest*.<sup>212</sup> Begitu pula di New York, para pendemo harus mengantongi izin sebelum menggunakan pengeras suara.<sup>213</sup>

Tempat, waktu, dan cara berdemonstrasi merupakan hal utama yang seringkali dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah negara bagian New York, misalnya, melarang

---

<sup>210</sup>Diakses dari [http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution\\_amendments\\_11-27.html](http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html) pada 12 Juli 2016

<sup>211</sup>Andrew M. Winston. 2014. *Right to Peaceful Assembly: United States*. Diakses dari <https://www.loc.gov/law/help/peaceful-assembly/us.php> pada 12 Juli 2016

<sup>212</sup>Washington Peace Center. *Guide to the DC Permit Process*. Diakses dari <http://washingtonpeacecenter.org/permitprocess> pada 12 Juli 2016

<sup>213</sup>NYPD. Dalam Jewish Community Relations Council of NY. *Applying for Permits of Demonstrations*. Diakses dari <http://www.jrcny.org/wp-content/uploads/2014/03/Getting-permits-for-demonstrations.pdf> pada 12 Juli 2016

demonstrasi yang berlokasi di 500 langkah dari sekolah, pengadilan, gereja, dan rumah sakit.<sup>214</sup> Sementara di Washington D.C., setiap tempat strategis memiliki petugas ketertiban atau polisi yang berbeda. Di *Capitol Bulding*, U.S Capitol Police melarang demonstrasi di dalam bangunan Kongres, Jalan gedung Kongres, tempat terbatas yang digunakan anggota Kongres, dan jalur keluar masuk kendaraan.<sup>215</sup>

Ketika masyarakat atau organisasi mengadakan demonstrasi di tempat-tempat pemerintah, umumnya mereka bertujuan untuk mempengaruhi pemerintah mengenai sebuah kebijakan atau isu tertentu. Namun demikian, demonstrasi juga dapat dilakukan di tempat-tempat keramaian seperti taman kota dan mall. Demonstrasi yang dilakukan di tempat-tempat tersebut umumnya menargetkan masyarakat umum agar mengetahui sebuah isu tertentu dan mendorong mereka untuk menghubungi pejabat publik yang didukungnya. Seringkali demonstrasi juga dilakukan di kedua tempat agar lebih maksimal.

Hak dasar untuk berdemo dimiliki oleh semua orang termasuk pejabat pemerintah. Namun demikian, aturan tersebut tidaklah absolut. Pemerintah dapat membuat batasan yang beralasan mengenai waktu, tempat dan bagaimana protes tersebut dilakukan, sepanjang batasan tersebut bersifat netral.<sup>216</sup> Sebagai contoh, apabila anggota gereja ingin memprotes mengenai pernikahan sesama jenis di sebuah pemakaman militer, dengan argumen bahwa korban militer AS di Iraq dan Afghanistan adalah hukuman Tuhan atas toleransi pemerintah AS terhadap homoseksual. Pemerintah tidak dapat melarang protes tersebut karena argumentasi protes yang *homophobic*, namun pemerintah dapat melarang protes berkaitan dengan ketertiban di pemakaman.<sup>217</sup>

---

<sup>214</sup>*Ibid.*

<sup>215</sup>US Capitol Police. *Guidelines for Conducting an Event on United States Capitol Grounds*. Diakses dari [http://www.uscapitolpolice.gov/special\\_events/Special-Events\\_Guidelines-Application.pdf](http://www.uscapitolpolice.gov/special_events/Special-Events_Guidelines-Application.pdf) pada 12 Juli 2016

<sup>216</sup>Braden Gayette. 2016. *Just How Much Can the State Restrict a Peaceful Protest?*. Diakses dari <https://www.propublica.org/article/explainer-just-how-much-can-the-state-restrict-a-peaceful-protest> pada 12 Juli 2016

<sup>217</sup>*Ibid.*

Meskipun Amandemen Pertama Konstitusi AS melarang pemerintah untuk membuat dan menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan agama tertentu, selain alasan keluarga, kepercayaan agama seringkali menjadi argumen dalam protes kelompok agama menolak pernikahan sesama jenis. Contohnya dapat dilihat dalam lampiran 3.

Sepanjang sejarah protes kelompok agama, protes di Puerto Rico pada tahun 2013 merupakan protes terbesar untuk menolak pernikahan sesama jenis di AS. Protes tersebut diorganisir oleh *Puerto Rico for the Family* dan dihadiri lebih dari 200.000 umat Kristen.<sup>218</sup> Cesar Vazquez Muñiz yang mewakili *Puerto Rico for the Family* mengatakan bahwa protes mereka didasari oleh kepedulian terhadap gereja dan anak-anak:

*“We are concerned that laws will be created to discriminate against the church... We are concerned that public education will be used to change our children, presenting them with behaviors their parents don’t think are correct. This demonstration tells the government that there are things that they cannot touch and those are marriage and family.”*

Sementara itu, dalam level federal, salah satu kelompok yang aktif melakukan protes menolak pernikahan sesama jenis di AS adalah *National Organization for Marriage*. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan afiliasinya dengan kelompok agama, ancaman terhadap kebebasan beragama menjadi salah satu argumen *National Organization for Marriage* untuk menolak pernikahan homoseksual. Protes secara damai menjadi salah satu strategi utama kelompok tersebut semenjak tahun 2013 dan dikenal dengan *March for Marriage*. Setelah tahun 2013, *March for Marriage* kemudian menjadi agenda tahunan *National Organization for Marriage*.

*March for Marriage* 2015 dilakukan pada 26 Maret 2013, bertepatan dengan waktu *hearing* kasus *Windsor v. United States* dalam Mahkamah Agung AS. Partisipan

---

<sup>218</sup>Les Fabian Brathwaite. 2013. *Over 200,000 “Stand Up” Against Gay Rights In Puerto Rico*. Diakses dari <http://www.queerty.com/over-200000-stand-up-against-gay-rights-in-puerto-rico-20130220> pada 12 Juli 2016

demonstrasi tersebut juga beragam, berasal dari berbagai negara bagian, diantaranya dari North Carolina dan New York.<sup>219</sup> Dengan membawa poster yang bertuliskan, ‘*Every Child Deserveve A Mom & Dad*’, para pendemo berpendapat bahwa negara tidak berhak untuk mendefinisikan sebuah institusi yang telah ada ada sejak lama dan berakar secara alamiah dan biologis (institusi pernikahan). Mereka berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan secara alamiah ditakdirkan bersama untuk membua anak, dan pernikahan didesain untuk mencerminkan realitas yang unik.<sup>220</sup>

Berdasarkan dokumentasi *March for Marriage* 2013 (dapat dilihat pada lampiran 5) peserta demonstrasi juga berasal dari pemuka agama, terutama kelompok agama Kristen Evangelis yang paling banyak menolak pernikahan sesama jenis di AS (Dapat dilihat dalam Tabel 1.1 pada bab 1). Hal tersebut serupa dengan *March for Marriage* 2014 yang juga dihadiri oleh sebagian besar umat Kristen Evangelis. Dilaksanakan pada 19 Juni 2014, *Marching for Marriage* tahun kedua juga menggunakan poster dengan tulisan yang sama: *Every Child Deserve A Mom and Dad*. Selain itu, demonstrasi tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pembicara yang mendukung pelestarian pernikahan tradisional, seperti Mantan Gubernur Arkansas, Mike Huckabee, dan produser radio FRC, Chase Jennings.<sup>221</sup>

Sebagian besar pembicara dalam *Marching for Marriage* 2014 menggunakan sudut pandang Alkitab bahwa Tuhan menciptakan lelaki dan perempuan untuk saling melengkapi.<sup>222</sup> Chase Jennings mengatakan:

*“When you look at the biblical definition of marriage is that God created man and woman for them to be together, there’s a missing piece and God said it’s not good for man to be alone.”*<sup>223</sup>

---

<sup>219</sup>Adelaide Dariling. 2013. *Thousand flood DC to Stand Up for Marriage*. Diakses dari <http://www.catholicnewsagency.com/news/thousands-flood-dc-to-stand-up-for-marriage/> pada 12 Juli 2016

<sup>220</sup>*Ibid.*

<sup>221</sup>Kellan Howell. 2014. Thousand March in Defense of Traditional Marriage. *The Washington Post*. Diakses dari <http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/19/hundreds-march-at-capitol-to-defend-traditional-ma/> pada 12 Juli 2016

<sup>222</sup>*Ibid.*3

<sup>223</sup>*Ibid.*4

Sementara Mike Huckabee menekankan pada pentingnya pernikahan tradisional dan keluarga dalam masyarakat dan pemerintah. Ia mengatakan:

*“It’s not just conservatives, there was a time at one point in America where liberals and conservatives both agreed that marriage was foundational to the structure to the stability and to the longevity of society, Some of us just haven’t given up on that notion that families still matter and that a family is the most foundational form of any government.”*<sup>224</sup>

Publikasi *Marching for Marriage* 2014 oleh *National for Marriage* dirilis dalam bentuk video.<sup>225</sup> Dalam video yang berdurasi 2 jam tersebut terlihat kumpulan pendemo yang menolak pernikahan sesama jenis dari kelompok agama. Selain itu, video tersebut juga berisi pidato-pidato yang disampaikan oleh para pemuka agama dan politisi yang hadir.

Pada tahun 2015, *March for Marriage* kembali diadakan pada 25 April 2015. Dalam *March for Marriage* 2015 esensi agama sangat terlihat dibandingkan dengan *March fro Marriage* pada tahun-tahun sebelumnya. Tidak hanya kelompok agama Kristen Evangelis, beberapa kelompok agama yang sebelumnya tidak terlalu vokal turut hadir dalam demo tersebut, di antaranya adalah Protestan Hispanic dan Kristen Ortodoks.<sup>226</sup> Selain itu, para pembicara yang berasal dari kelompok-kelompok agama menggunakan argumentasi agama dan Tuhan dalam pidatonya. Tabel 4.4 berikut adalah ringkasan kutipan dari pidato-pidato tersebut yang dipublikasikan oleh *the Washington Times*:

Tabel 4.4 Kutipan Pidato dalam *March for Marriage* 2015

No	Nama	Jabatan dan Instansi/Kelompok	Kutipan

<sup>224</sup>*Ibid.*5

<sup>225</sup>Dapat dilihat di <https://www.marriagemarch.org/2014/watch/>

<sup>226</sup>Zack Ford. 2015. *29 Revealing Photos From This Weekend’s Anti-Gay March For Marriage*. Diakses dari <http://think8progress.org/lgbt/2015/04/27/3651426/nom-marriage-march-2015-photos/> pada 12 Juli 2016

1	Joseph E. Kurtz	Presiden di USCCB	<p><i>“Marriage is, and can only be, the union of one man and one woman. This is a beautiful truth.”</i></p> <p><i>“Redefining marriage in law is the greatest social experiment of our time. Children do not need experiments. They need love of their mother and father, where ever possible.”</i></p> <p><i>“Marriage, like the gift of human life itself, cannot be essentially changed.”</i></p>
2	Johannes Jacobse	Pastor di St. Peter the Apostle Antiochian Orthodox Mission	<p><i>“Render unto Caesar the things that are Caesar’s and [render] unto God the things that are God’s. Marriage begins with the Lord, not with the State.’ The codification of law in marriage is merely a recognition of that which already exists. Marriage is one man and one woman because it takes one man and one woman to create a child. This is written in nature.</i></p> <p><i>“If you give to Caesar the things that are God’s, he never gives it back. And in the end, the State will be telling you how to live, and you will lose your freedom, and the family will be weakened, and the society will crumble and might even be destroyed.”</i></p>

			<i>“Make your voice heard, and do it with clarity, do it with benevolence and deep charity of heart, because God loves all. Jesus Christ died for everyone, not just the believers... Stand up. Stand up.”</i>
3	Brandon Burdette Porter	Uskup di Church in God in Christ	<i>“We believe in marriage God’s way.” “I often view God as a parent. I see the Heart of God more and more each day through the act of marriage. What is the one thing that parents want from their married children? You got it: Grandchildren. And God wants the same. He wants us to multiply and replenish the Earth. Same-sex marriage cannot provide that Kingdom request.”</i>
4	Mat Staver	Pendiri dan Pimpinan Liberty Counsel	<i>“ends with some of these words: Make no mistake about our resolve. While there are many things we can endure, redefining marriage is so fundamental to the natural order and the common good that this is the line we must draw, and one we cannot — and will not — cross.”</i>
5	Carlos Luis Vargas Silva	Pendiri dan Presiden Central Biblicon International	<i>“There is no authority outside of God. And the ones that exist — whether it be a president, or senator or congressman or the Supreme Court — they have been</i>

			<i>given power by God. And for one purpose only: to honor the Creator.”</i>
6	Cathy Ruse	Senior Fellow di FRC	<i>“President Obama likes to say that no one should lose their job because of who they love. What if who they love is Jesus Christ?”</i>
7	Bill Owens	Pendiri dan Presiden Coalition of African American Pastors	<i>“I am a loving father, and I can tell you it’s a difference between a mother and a father. They love me, but boy they love their mother. How can a man be a mother? A man cannot be a mother. I cannot be a mother to my children, but I can be a good father to my children.”</i>
8	Ruben Diaz	Senator cabang legislatif Negara Bagian New York dan pastor di Christian Community Neighborhood Church	<i>“I’m going to say this with a lot of pride. When the same-sex marriage act came to the legislators in Albany, this little black man right here, with kinky hair and broken English, was the only Democrat of the State of New York that voted against this legislation.”</i> <i>“I am the only elected official here, and I belong to the Democratic Party of New York and New York City, a liberal state where everybody is liberal. But me — I am a senator of New York, and I say that marriage between man with man is not biblical. No, no, no.”</i>

Sumber: Cheryl Wetzstein. 2015. March for Marriage Attracts Thousands to Capitol Hill.  
*The Washington Times.* Diakses dari

<http://www.washingtontimes.com/news/2015/apr/25/march-marriage-expected-bring-thousands-capitol-hi/>

Dalam tabel diatas dapat dilihat para pembicara menekankan bahwa pernikahan merupakan ketetapan Tuhan yang wajib ditaati oleh semua umat beragama. Karena datangnya dari Tuhan, maka ketetapan tersebut merupakan hal yang sakral dan tidak dapat diubah oleh siapapun, sebab tidak ada kuasa yang lebih tinggi daripada kuasa Tuhan.

Meskipun tahun 2015 menjadi momentum legalisasi pernikahan sesama jenis, tahun 2016 *National Organization for Marriage* tetap melaksanakan *March for Marriage*. Dilaksanakan pada 25 Juni 2016, *March for Marriage* 2016 dihadiri oleh sekitar 200 orang.<sup>227</sup> Jumlah tersebut merosot jauh dari tahun-tahun sebelumnya yang selalu berjumlah sekitar diatas 2000 orang. Banyak faktor yang menyebabkan sedikitnya peserta *March for Marriage* 2016 tersebut, diantaranya adalah kurangnya persiapan *National Organization for Marriage*—yang mengumumkan *March for Marriage* hanya 3 minggu sebelum 25 Juni 2016—dan berkurangnya kampanye penggalangan dana untuk memfasilitasi partisipan dari gereja.<sup>228</sup>

Selain berkurangnya partisipan, jumlah pembicara *March for Marriage* 2016 dari kalangan politik juga berkurang. Namun demikian, beberapa pembicara dari kelompok advokasi pernikahan tradisional berbasis agama memberikan pidato untuk tetap berjuang melawan legalisasi pernikahan sesama jenis. Mereka menekankan pentingnya dukungan terhadap FADA dan undang-undang serupa di level negara bagian.<sup>229</sup> Selain itu, mereka juga menyampaikan penolakan mereka terhadap

---

<sup>227</sup>Ciera Horton. 2016. *Marching for Marriage A Year After Obergefell*. Diakses dari [https://world.wng.org/2016/06/marching\\_for\\_marriage\\_a\\_year\\_after\\_obergefell](https://world.wng.org/2016/06/marching_for_marriage_a_year_after_obergefell) pada 12 Juli 2016

<sup>228</sup>Zack Ford, dkk. 2016. *The 2016 Anti-LGBT March for Marriage Was A Complete Flop*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2016/06/28/3793047/march-for-marriage-2016-flop/> pada 12 Juli 2016

<sup>229</sup>*Ibid.*

Eksekutif Order yang dikeluarkan oleh Pemerintah Obama agar kelompok transgender menggunakan toilet perempuan.<sup>230</sup>

#### **4.5 Keberhasilan Upaya Kelompok Agama dalam Menolak Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat**

Dua kelompok kepentingan yang berperan penting dalam isu ini adalah kelompok LGBT yang menuntut hak legalisasi pernikahan homoseksual kepada pemerintah AS, serta kelompok agama yang menolak untuk mengakui pernikahan sesama jenis karena dianggap salah secara moral dan agama. Keduanya berupaya untuk mempengaruhi pemerintah agar kepentingannya dapat terpenuhi. Dari keempat metode yang digunakan oleh kelompok agama, lobi terhadap cabang legislatif menjadi cara utama yang efektif untuk mengamankan kepentingannya.

Keberhasilan utama kelompok agama dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah AS terlihat jelas dengan adanya DOMA yang resmi menjadi undang-undang pada tahun 1996. Melalui DOMA, kelompok agama mendorong pemerintah federal AS untuk mendefinisikan pernikahan terbatas pada pernikahan heteroseksual. Dengan demikian, kelompok LGBT tidak dapat mengklaim pernikahan mereka dalam tataran hukum federal. Selain itu, dengan adanya bagian '*Powers Reserved to the States*', memberikan kesempatan bagi kelompok agama untuk juga mempengaruhi pemerintah negara bagian dalam membatasi ruang gerak kelompok LGBT dalam memperjuangkan legalisasi pernikahan sesama jenis.

Ketika kemudian beberapa negara bagian mulai memperkenalkan konsep '*civil union*' serta mengakui pernikahan sesama jenis secara hukum, perjuangan kelompok agama untuk menolak mengakui pernikahan sesama jenis masih tetap berlanjut. Ketika kelompok agama tidak berhasil mempengaruhi keputusan pemerintah negara bagian secara langsung, kelompok agama melakukan kampanye yang mendorong dilaksanakannya *popular vote* untuk menggagalkan keputusan Mahkamah Agung

---

<sup>230</sup>*Ibid.*

negara bagian dan juga membatasi definisi pernikahan tradisional yang mengecualikan pernikahan homoseksual. Bahkan, kelompok agama berhasil untuk mempengaruhi masyarakat California yang dikenal sebagai salah satu negara bagian AS yang liberal untuk memvoting 'yes' dalam mempertahankan pernikahan tradisional.

Sebagian besar legalisasi pernikahan sesama jenis di negara bagian didapatkan melalui cabang yudikatif. Selain itu, undang-undang yang melarang hubungan homoseksual juga dinyatakan tidak konstitusional melalui *judicial review*. Hal tersebut kemudian menyadarkan kelompok agama bahwa posisi kepentingan mereka dalam isu homoseksualitas belum sepenuhnya aman. Seperti halnya undang-undang negara bagian, DOMA juga dapat dinyatakan tidak konstitusional melalui *judicial review*. Meskipun pada tahun 2000-an kelompok agama berhasil mempengaruhi sebagian besar negara bagian untuk menolak legalisasi pernikahan sesama jenis, kekhawatiran kelompok agama mendorong kelompok agama untuk mengusulkan undang-undang federal lain yang dapat memperkuat DOMA dan mempertahankan pernikahan tradisional.

Melalui jaringan perwakilannya dalam cabang legislatif, kelompok agama mengusulkan FMA dan MPA. FMA bertujuan untuk mengamandemen Konstitusi AS tentang definisi pernikahan. Sementara MPA diperkenalkan setelah kasus *Lawrence v. Texas* untuk melindungi DOMA dari pengadilan federal AS yang mungkin menyatakan DOMA tidak konstitusional. Untuk mendorong lolosnya FMA dan MPA dalam Kongres AS, kelompok agama mengkampanyekan pentingnya keluarga tradisional untuk kebaikan anak-anak di AS. Selain itu, kelompok agama juga menjangkau dukungan dari cabang eksekutif untuk mendukung FMA dan MPA. Namun bahkan dengan pernyataan dukungan dari presiden AS, FMA maupun MPA tidak berhasil menjadi undang-undang.

Upaya kelompok agama untuk melindungi pernikahan tradisional melalui pemerintah federal semakin sulit ketika Mahkamah Agung AS pada tahun 2013 menyatakan bahwa DOMA bagian ketiga tidak konstitusional. Implikasinya, pernikahan kelompok LGBT diakui secara hukum dalam tataran federal AS, sehingga

pasangan homoseksual memiliki hak dan akses yang sama terhadap fasilitas pemerintah federal seperti halnya pasangan heteroseksual.

Akan tetapi, pada tahun 2013, Mahkamah Agung AS hanya menyatakan tidak konstitusionalnya bagian ketiga pada DOMA, sedangkan bagian kedua masih bertahan. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi kelompok agama untuk terus memperjuangkan penolakan terhadap legalisasi pernikahan homoseksual dalam level negara bagian, salah satunya melalui *Indiana Religious Freedom Restoration Act*. Berbeda dengan sebelumnya yang sering mengutip moralitas, keluarga dan pentingnya isu pernikahan, bingkai perjuangan kelompok agama berubah menjadi kebebasan beragama.

Pada tahun 2015, Mahkamah Agung AS kembali menyatakan bahwa DOMA tidak konstitusional. Keputusan tersebut resmi menghapuskan DOMA dari hukum federal AS. Selain itu, dengan adanya keputusan tersebut, pernikahan sesama jenis menjadi legal diseluruh negara bagian AS. Negara bagian AS yang pada awalnya memiliki kebebasan untuk menentukan apakah pemerintahnya mengakui pernikahan sesama jenis atau tidak, secara hukum tidak lagi mendapatkan kebebasan tersebut. Seluruh pejabat publik di AS dari tataran lokal hingga federal dilarang mendiskriminasi atau menolak pasangan homoseksual. Demikian halnya dengan seluruh masyarakat AS, dilarang mendiskriminasi kelompok LGBT dalam hal pernikahan.

Keputusan Mahkamah Agung AS merupakan keputusan final yang harus dipatuhi oleh semua elemen masyarakat AS, nasional maupun negara bagian. Hal itu merupakan bagian dari supremasi hukum nasional AS yang diatur dalam Konstitusi AS. Klausul Supremasi Hukum tersebut tertulis dalam *Article VI, Paragraph 2*, yang menyatakan:

*“This Constitution and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made ... under the Authority of the United States, shall be the Supreme Law of the Land; and the Judges in*

*every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.*"<sup>231</sup>

Dengan adanya *article* diatas, artinya pemerintah negara bagian tidak diperbolehkan menentang keputusan atau kebijakan pemerintah federal. Barbara A. Bardes dkk, menjelaskan bahwa seluruh pejabat publik federal dan negara bagian harus terikat dengan sumpah mendukung Konstitusi AS.<sup>232</sup>

Uniknya, meskipun Konstitusi AS menyebutkan supremasi hukum federal AS, penolakan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis masih terus berlanjut. Bahkan pemimpin negara bagian-negara bagian yang belum mengakui pernikahan sesama jenis menyatakan keberatannya. Mereka menekankan bahwa keputusan Mahkamah Agung AS lebih merupakan sebuah tirani federal dibandingkan hasil demokrasi. Pemerintah negara bagian kemudian berusaha membuat peraturan baru yang dapat melindungi masyarakat yang tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung AS. Peraturan tersebut terimplementasikan dalam *religious freedom bill*.

*Religious freedom bill* merupakan rancangan undang-undang yang melindungi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pengusaha dan pejabat publik negara bagian yang menolak untuk melayani pernikahan pasangan homoseksual. Rancangan undang-undang ini diperkenalkan disebagian besar negara bagian AS dan beberapa diantaranya telah resmi menjadi undang-undang. Kelompok agama memiliki peranan penting dalam menyusun rancangan undang-undang tersebut. Namun demikian, peranan pemerintah negara bagian yang memang menolak keputusan Mahkamah Agung AS tidak dapat dikesampingkan. Selain itu, secara tidak langsung, *religious freedom bill* (atau *act*) merupakan bentuk penentangan pemerintah negara bagian kepada pemerintah federal dalam hal pernikahan sesama jenis.

Selain mencerminkan penolakan pemerintah negara bagian terhadap keputusan Mahkamah Agung AS, dalam undang-undang *religious freedom* juga dapat dilihat

---

<sup>231</sup>Barbara A. Bardes, dkk. 1998. *American Government and Politics Today: The Essentials*. United States: Wadsworth Publishing Company. Hlm. 74

<sup>232</sup>*Ibid.*

adanya perubahan bingkai isu yang digunakan oleh kelompok agama. Sebelum keputusan Mahkamah Agung AS yang melegalisasi pernikahan sesama jenis diseluruh negara bagian, kelompok agama seringkali mengutip alasan moralitas dan keluarga. Namun semenjak tahun 2015, kelompok agama membingkai penolakan terhadap legalisasi pernikahan sesama jenis dengan ‘kebebasan beragama’.

Dalam bingkai kebebasan beragama, kelompok agama memposisikan diri sebagai pihak yang rentan didiskriminasi dengan adanya keputusan pengadilan federal. Karena tidak memungkinkan bagi kelompok agama untuk melindungi kepentingannya melalui pemerintah federal, pemerintah bagian menjadi target utama bagi kelompok agama untuk berjuang melindungi kebebasannya, termasuk kebebasan untuk menolak pernikahan sesama jenis. Sementara pemerintah bagian sebagai perwakilan masyarakat merasa perlu melindungi kepentingan masyarakat, setidaknya masyarakat di negara bagian tersebut. Meskipun hal tersebut tidak sejalan dengan keputusan Mahkamah Agung AS.

Dari sejarah panjang pernikahan sesama jenis di AS, keberhasilan kelompok agama untuk meloloskan *religious freedom bill* menjadi undang-undang di beberapa negara bagian merupakan salah satu capaian terbesar selain DOMA. Melalui DOMA, kelompok agama berhasil mengartikulasikan kekuatannya untuk mendorong pemerintah federal menolak pernikahan sesama jenis. Sementara melalui undang-undang *religious freedom* kelompok agama membuktikan bahwa ketika pemerintah federal tidak berpihak kepada kelompok tersebut, pemerintah negara bagian dapat membuat peraturan yang memihak kelompok agama dan bahwa pemerintah negara bagian masih memiliki *power* penting dalam sistem pemerintahan AS.

## BAB 5 KESIMPULAN

Keberadaan kelompok kepentingan di AS merupakan salah satu pilar demokrasi yang dijamin keberadaannya. Tidak hanya dijamin oleh konstitusi, namun secara *de facto* pemerintah AS memberikan banyak ruang bagi kelompok kepentingan untuk member masukan kepada pemerintah. Begitu pula kepada kelompok kepentingan agama. Meskipun AS merupakan negara yang sekuler, dalam berbagai isu yang menyangkut moralitas, kelompok agama turut bermain dalam politik AS. Skripsi ini akan membahas mengenai isu pernikahan sesama jenis di AS yang merupakan salah satu perhatian kelompok agama. Dengan menggunakan konsep kelompok kepentingan, tulisan ini akan memaparkan bagaimana upaya kelompok agama untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah AS menyangkut pernikahan sesama jenis.

Kelompok agama memandang bahwa pernikahan merupakan sebuah perintah Tuhan yang sakral. Pernikahan tersebut juga telah ditetapkan sebagai persatuan antara lelaki dan perempuan yang disimbolkan oleh Adam dan Eve (Hawa). Hal tersebut kemudian menjadi dasar perjuangan kelompok agama untuk menolak kelompok homoseksual di AS. Dalam perjuangannya, empat metode yang digunakan oleh kelompok agama, yaitu melalui lobi, kampanye media massa, memperluas jaringan dukungan dalam pemerintah AS, dan demonstrasi.

Metode utama dan pertama yang sering digunakan oleh kelompok kepentingan agama adalah lobi. Upaya lobi kelompok agama terutama dilakukan dalam cabang legislatif AS baik dalam pemerintah federal maupun pemerintah bagian. Upaya ini berhasil membantu kelompok agama untuk membatasi pernikahan dalam level federal melalui DOMA dan berbagai amandemen Konstitusi Negara Bagian AS. Efektivitas atau keberhasilan upaya lobi kelompok agama dalam cabang legislatif sangat ditentukan oleh banyaknya anggota legislatif yang pro terhadap kepentingan kelompok agama. Maka dari itu penting bagi kelompok agama untuk membangun jaringan dukungan dalam cabang legislatif terutama melalui pemilu. Pemilu menjadi

momentum penting bagi kelompok agama untuk membuat kontrak politik dengan para politisi yang akan menjabat ataupun menggagalkan mereka yang tidak sejalan dengan kelompok agama.

Namun demikian, sebagai negara demokrasi, lobi kelompok agama dalam pemerintahan tidak dapat berhasil tanpa adanya dukungan dari masyarakat. Para pejabat publik AS sangat memperhatikan suara masyarakat sebagai pihak yang diwakilinya. Sehingga penting bagi kelompok agama untuk juga mempengaruhi masyarakat agar tidak mendukung pernikahan sesama jenis. Kampanye media massa terbukti efektif bagi kelompok agama untuk mendapatkan simpati masyarakat, terutama menyangkut amandemen Konstitusi Negara Bagian dalam hal pernikahan. Selain secara *online*, kelompok agama juga berusaha mendapatkan dukungan masyarakat AS dengan cara *offline*. Demonstrasi kemudian menjadi metode yang sering digunakan oleh kelompok agama untuk mendapatkan perhatian masyarakat. Bahkan, demonstrasi untuk menolak pernikahan sesama jenis menjadi acara tahunan di AS.

Ketika Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa pernikahan sesama jenis legal di seluruh negara bagian AS, perjuangan kelompok agama terus berlanjut terutama ditingkat negara bagian. Sebelumnya, kelompok agama juga terus berusaha untuk memperjuangkan kepentingannya dalam negara bagian melalui berbagai cara seperti halnya kelompok agama berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah federal. Sistem pemerintahan AS yang federalis dan terdiri dari banyak pemerintah bagian yang juga memiliki kedaulatan, memberikan kesempatan besar bagi kelompok agama untuk mendorong kebijakan yang sesuai dengan kepentingan kelompok agama.

Dari berbagai kebijakan yang ada mengenai pernikahan sesama jenis, dapat dilihat adanya dinamika tarik-menarik kekuatan antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah federal AS. Hal tersebut terutama berlangsung setelah keputusan monumental Mahkamah Agung AS yang menghilangkan kekuasaan pemerintah negara bagian untuk menolak pernikahan sesama jenis di AS. Dengan dorongan dari kelompok agama pemerintah bagian kemudian membuat berbagai aturan yang melindungi

masyarakat negara bagian yang menolak legalisasi pernikahan sesama jenis atas dasar agama.

Dengan demikian, upaya kelompok agama untuk melindungi kepercayaannya (bahwa pernikahan hanya terbatas pada pernikahan heteroseksual) terus dilakukan melalui jalur-jalur pembuatan kebijakan lainnya meskipun pengadilan federal memutuskan bahwa pemerintah AS juga harus mengakui pernikahan homoseksual. Ketika kelompok tersebut tidak berhasil mempengaruhi pemerintah federal, pemerintah bagian menjadi target selanjutnya bagi kelompok agama untuk meneruskan perjuangannya. Begitu pula sebaliknya, ketika kelompok agama tidak berhasil membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingannya dalam level negara bagian, pemerintah federal menjadi arena utama kelompok agama untuk melanjutkan perjuangannya. Dinamika tarik-menarik kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian sebagai akibat dari upaya kelompok kepentingan mungkin terus berlanjut dan menjadi salah satu ciri pemerintahan AS untuk menjamin berlangsungnya proses demokrasi di AS.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Altier, Mary Beth, dkk. 2014. *Violence, Elections, and Party Politics*. United Kingdom: Routledge. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=VNq\\_CwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=republican+party+religious+affiliation+in+1990&source=bl&ots=bQXrzCDaDG&sig=qHRMY00nebeUMWrXRU4p0UCxZhs&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV0bCcms7NAhUFqY8KHUJRAj0Q6AEIXzAJ#v=onepage&q=republican%20party%20religious%20affiliation%20in%201990&f=false](https://books.google.co.id/books?id=VNq_CwAAQBAJ&pg=PA32&lpg=PA32&dq=republican+party+religious+affiliation+in+1990&source=bl&ots=bQXrzCDaDG&sig=qHRMY00nebeUMWrXRU4p0UCxZhs&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiV0bCcms7NAhUFqY8KHUJRAj0Q6AEIXzAJ#v=onepage&q=republican%20party%20religious%20affiliation%20in%201990&f=false) pada 5 Juni 2016
- Bardes, Barbara A., dkk. 1998. *American Government and Politics Today: The Essentials*. United States: Wadsworth Publishing Company.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Donovan, Todd, dkk. 2014. *State and Local Politics*. US: Cengage Learning. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzlUrcXOY0w5qHqnije9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHXX\\_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false](https://books.google.co.id/books?id=e-rKAgAAQBAJ&pg=PA476&lpg=PA476&dq=group+protest+on+hawaii+same+sex+marriage+decision+in+1993&source=bl&ots=g8UChd7RBC&sig=DV7RrtzlUrcXOY0w5qHqnije9Kc&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi7lbehgM7NAhWMt48KHXX_CgwQ6AEIOjAE#v=onepage&q=group%20protest%20on%20hawaii%20same%20sex%20marriage%20decision%20in%201993&f=false) pada 5 Juni 2016
- Cleary, Edward L. dan Allen D. Hertzke. 2006. *Representing God at the Statehouse: Religion and Politic in the American States*. USA: Eowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Cummings, Milton C. dan David Wise. 1971. *Democracy Under Pressure: An Introduction to the American Political System*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Diamond, Sara. 1998. *Not by Politics Alone: The Enduring Influence of the Christian Rights*. New York: The Guilford Press.
- Duncan, Ann W. dan Steven L. Jones (ed.). 2008. *Church States-Issues in America Today: Religions Convictions and Practices in Public Life..* Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP\\_Aa4PoX&sig=qW\\_4bazDJusi8X7iGoA\\_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj4zLaK-](https://books.google.co.id/books?id=R3BpGU4EnwgC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=religious+alliance+drafted+federal+marriage+amendment&source=bl&ots=GAP_Aa4PoX&sig=qW_4bazDJusi8X7iGoA_XA-T2TQ&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj4zLaK-)

[dXNAhXJr48KHYdvA90Q6AEILzAD#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false](https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxnH_e0MIAtlU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20alliance%20drafted%20federal%20marriage%20amendment&f=false) pada 8 Juni 2016

- Ginsberg, Benjamin, dkk. 2007. *We The People: An Introduction to American Politics*. New York: W.W. Norton & Company, Inc.
- Grzymala-Busse, Anna. 2015. *Nations Under God: How Churches Use Moral Authority to Influence Policy*. New Jersey: Princeton University Press. Diakses dari [https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxnH\\_e0MIAtlU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false](https://books.google.co.id/books?id=INTyBQAAQBAJ&pg=PA283&lpg=PA283&dq=religious+group+supporter+of+DOMA+in+1996&source=bl&ots=eOZDHynz0p&sig=s9nqM9VTd6yzJKvxnH_e0MIAtlU&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj6qsadxtDNAhUGt48KHcviDWwQ6AEIPDAE#v=onepage&q=religious%20group%20supporter%20of%20DOMA%20in%201996&f=false) pada 8 Juni 2016
- Heywod, Andrey. 2014. *Politik*. Ahmad Lintang Lazuardi (Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P. dan Joan Nelson. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ishiyama, John T. dan Marijke Breuning (editor). *Ilmu Politik Dalam Paradigma Abad ke-21 Sebuah Referensi Panduan Tematis*. Terj. Tri Wibowo B.S. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Josephson, Jyl J.. 2016. *Rethinking Sexual Citizenship*. Albany: State University of New York.
- Keefe, William J., dkk. 1983. *American Democracy: Institutions, Politics, and Policies*. California: The Dorsey Press.
- Klarman, Michael J.. 2013. *From the Closet to the Altar: Court, Backlash, and the Struggle for Same-Sex Marriage*. New York: Oxford University Press.
- Kohut, Andrew, dkk. 2001. *The Diminishing Divide: Religion's Changing Role in Americal Politics*. Diakses dari [https://books.google.co.id/books/about/The\\_Diminishing\\_Divide.html?id=UkltOVFYNP4C&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/The_Diminishing_Divide.html?id=UkltOVFYNP4C&redir_esc=y) pada 18 Mei 2016
- Leege, David C.. 2006. *Agama dan Politik dalam Perspektif Teoritis*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Magstadt, Thomas M.. *Understanding Politics: Ideas, Institutions, and Issues*. Amerika Serikat: Wadsworth Cengage Learning.
- Mas'ood, Mochtar dan Colin MacAndrews. 1986. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

- Meissner, Richard. 2015. *Interest Groups, Water Politics and Governance: The Case of the Lesotho Highlands Water Project*. South Africa: Springer.
- Patterson, Thomas E.. 2003. *The American Democracy*. New York: McGraw-Hill.
- Ponton, Geoffrey dan Peter Gill. 1993. *Introduction to Politics*. United Kingdom: Wiley-Blackwell.
- Rimmerman, Craig A. dan Clyde Wilcox (eds.) 2007. *The Politics of Same Sex Marriage*. London: The University of Chicago Press.
- Serikat, Departemen Luar Negeri Amerika. *Garis Besar Pemerintahan Amerika Serikat*.
- Strong, C.F.. 2015. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern*. Terj. Derta Sri Widowatie. Bandung: Penerbit Nusa Media.

**Sumber Artikel, Jurnal, Laporan:**

- Algemeiner. 2011. *100 Orthodox Rabbist Issue Same Sex Marriage Declaration*. Diakses dari <http://www.algemeiner.com/2011/12/05/100-orthodox-rabbis-issue-same-sex-marriage-declaration/#> pada 13 Juni 2016
- Andrew. 2008. *Anti-Gay Nup Site For Youth, But Keeps Old Tactics*. Diakses dari <http://www.queerty.com/anti-gay-nup-site-goes-for-youth-but-keeps-old-tactics-20080923> pada 15 Juni 2016
- Audi, Tamara, Austin Schechk dan Christopher Lawton. 2008. California Votes for Prop 8. *The Wall Street Journal*. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/SB122586056759900673> pada 13 Juni 2016
- Audi, Tamara dan Jacob Gershman. 2015. Religious Groups Vow to Fight Gay Marriage Despite Supreme Court. *Wall Street Journal*. Diakses dari <http://www.wsj.com/articles/religious-groups-vow-to-fight-same-sex-marriage-despite-supreme-court-1435329751> pada 12 April 2016
- Barber, Nigel. 2012. *Why Religion Rules American Politics*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-religion-rules-america\\_b\\_1690433.html](http://www.huffingtonpost.com/nigel-barber/why-religion-rules-america_b_1690433.html) pada 18 Mei 2016
- Barker, Peter. 2006. Bush to Revisit Same-Sex Marriage Debate. *Pittsburgh Post-Gazette* – 3 Juni 2006. Diakses secara online di <https://news.google.com/newspapers?nid=1129&dat=20060603&id=TvVRAA-AAIBAJ&sjid=OnIDAAAIBAJ&pg=6197,913833&hl=id> pada 8 Juni 2016
- Barker, Peter. 2013. Now in Defense of Gay Marriage, Bill Clinton. *New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2013/03/26/us/politics/bill-clintons-decision-and-regret-on-defense-of-marriage-act.html> pada 12 April 2016

- Belonsky, Andrew. 2010. *Remembering The Ariston Baths, New York's First Anti-Gay Raid*. Diakses dari <http://www.towleroad.com/2010/10/remembering-the-ariston-baths-new-yorks-first-anti-gay-raid/> pada 10 Mei 2016
- Blunt, Sheryl Henderson. 2004. *The Man Behind the Marriage Amendment*. *Christianity Today*. Diakses dari <http://www.christianitytoday.com/ct/2004/september/15.46.html> pada 8 Juni 2016
- Boger, Paul. 2016. *Senate Passes Anti-Gay Religious Freedom Bill*. *MPB Online*. Diakses dari <http://www.mpbonline.org/blogs/news/2016/03/31/senate-passes-anti-gay-religious-freedom-bill/> pada 12 Juni 2016
- Brathwaite, Les Fabian. 2013. *Over 200.000 "Stand Up" Against Gay Rights In Puerto Rico*. Diakses dari <http://www.queerty.com/over-200000-stand-up-against-gay-rights-in-puerto-rico-20130220> pada 12 Juli 2016
- Brown, Brian. 2014. *National Organization for Marriage Defeats Every Republican It Targeted Who Embraced Same-Sex 'Marriage'; Group will Target Sen. Rob Portman for defeat in 2016*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/39827/> pada 17 Juni 2016
- Caldwell, Patrick. 2014. *This Anti-Gay-Marriage Group Is Really Excited That It Just Helped Elect Pro-Gay-Marriage Candidates*. Diakses dari <http://www.motherjones.com/politics/2014/11/national-organization-marriage-rob-portman> pada 17 Juni 2016
- Cambers, Alan. 2004. *Massachusetts Marriage Affirmation and Protection Amendment*. Diakses dari [http://alanchambers.org/massachusetts\\_m/](http://alanchambers.org/massachusetts_m/) pada 10 Juni 2016
- Cammisa, Anne Marie dan Paul Christopher Manuel. 2016. *Religious Groups as Interest Groups: The United States Catholic Bishop in the Welfare Reform Debate of 1995-1996 and the Health Care Reform Debate of 2009-2010*. Diakses dari <http://www.mdpi.com/2077-1444/7/2/16/htm> pada 19 Mei 2016
- Candler, Laura. 2013. *Kay Hagan Announces Support For Gay Marriage*. Diakses dari <http://wunc.org/post/kay-hagan-announces-support-gay-marriage> pada 17 Juni 2016
- Center, Pew Research. 2011. *Major Characteristic of Religious Advocacy Groups*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-major-characteristics/#issue> pada 19 Mei 2016
- Center, Pew Research. 2011. *Lobbying for the Faithful*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2011/11/21/lobbying-for-the-faithful-exec/> pada 19 Mei 2016

- Center, Pew Research. 2015. *U.S. Public Becoming Less Religious*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2015/11/03/u-s-public-becoming-less-religious/> pada 18 Mei 2016
- Chockshi, Niraj. 2015. *The Religious States of America, in 22 Maps*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/blogs/govbeat/wp/2015/02/26/the-religious-states-of-america-in-22-maps/> pada 13 April 2016
- Cohn, Jonathan. 2015. Why Indiana's Religious Freedom Law is Such A Big Deal. *The Huffington Post*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2015/04/01/indiana-religious-freedom\\_n\\_6984156.html](http://www.huffingtonpost.com/2015/04/01/indiana-religious-freedom_n_6984156.html) pada 12 Juni 2016
- Coolidge, David Orton. 1997. *Same-Sex Marriage: As Hawaii Goes ...*. Diakses dari <http://www.firstthings.com/article/1997/04/003-same-sex-marriage-as-hawaii-goes> pada 6 Juni 2016
- Cooperman, Alan. 2003. Opponents of Gay Marriage Divided. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/archive/politics/2003/11/29/opponents-of-gay-marriage-divided/f31eac80-8d4e-4008-910b-0941ec5ae274/> pada 8 Juni 2016
- Dariling, Adelaide. 2013. *Thousand flood DC to Stand Up for Marriage*. Diakses dari <http://www.catholicnewsagency.com/news/thousands-flood-dc-to-stand-up-for-marriage/> pada 12 Juli 2016
- Dorney, Meghan. 2004. Legislature Passes 'Compromise' Marriage Amendment. *The Boston Pilot*. Diakses dari <http://www.thebostonpilot.com/articleprint.asp?id=1930> pada 10 Juni 2016
- Dugger, Ashley. *Full Faith & Credit Clause: Definition & Examples*. Diakses dari <http://study.com/academy/lesson/full-faith-credit-clause-definition-examples.html> pada 3 Mei 2016
- Ebbert, Stephanie. 2001. Three Proest Oppose Ban on Gay Marriage. *The Boston Globe*. Diakses dari <http://www.wrn.org/articles/2124/?&place=north-america&section=christianity> pada 11 Juni 2016
- Fishman, Hollis J.. *The Effect of United States v. Windsor on Same Sex Estate Planning*. Diakses dari <http://www.curtinheefner.com/the-effect-of-united-states-v-windsor-on-same-sex-estate-planning/> pada 18 Mei 2016
- Foer, Franklin. 2014. Marriage Counselor. *The Atlantic*. Diakses dari <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2004/03/marriage-counselor/302893/> pada 8 Mei 2016
- Ford, Zack. 2014. *New Jersey Senate Candidate: Same-Sex Parenting Would Be A 'Biological Phenomenon'*. Diakses dari

- <http://thinkprogress.org/lgbt/2013/10/10/2764441/new-jersey-senate-candidate-same-sex-parenting-would-be-a-biological-phenomenon/> pada 17 Juni 2016
- Ford, Zack. 2014. *NOM Attacks Gay Republican Candidate For 'Holding The Hand of His Gay Lover'*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2014/02/20/3313741/nom-attacks-gay-republican-candidate-holding-hand-gay-lover/> pada 17 Juni 2016
- Ford, Zack, dkk. 2016. *The 2016 Anti-LGBT March for Marriage Was A Complete Flop*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2016/06/28/3793047/march-for-marriage-2016-flop/> pada 17 Juni 2016
- Ford, Zack. 2015. *29 Revealing Photos From This Weekend's Anti-Gay March For Marriage*. Diakses dari <http://think8progress.org/lgbt/2015/04/27/3651426/nom-marriage-march-2015-photos/> pada 17 Juni 2016
- Ganecheau, Adam. 2016. *Mississippi's 'religious freedom' Law Drafted Out of State*. Mississippi Today. Diakses dari <https://mississippitoday.org/2016/05/17/mississippis-religious-freedom-law-drafted-out-of-state/> pada 12 Juni 2016
- Gast, Phil. Obama Annouces He Support Same-Sex Marriage. *CNN News*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2012/05/09/politics/obama-same-sex-marriage/> pada 2 Juli 2016
- Gayette, Braden. 2016. *Just How Much Can the State Restrict a Peaceful Protest?*. Diakses dari <https://www.propublica.org/article/explainer-just-how-much-can-the-state-restrict-a-peaceful-protest> pada 12 Juli 2016
- Gray, Jerry. 1996. *House Passes Bar to U.S Sanction of Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/07/13/us/house-passes-bar-to-us-sanction-of-gay-marriage.html> pada 6 Juni 2016
- Gryboski, Michael. 2015. *6 Presidential Candidates Pledge to Support Bill to Protect Gay Marriage Opponents*. Diakses dari <http://www.christianpost.com/news/6-presidential-candidates-pledge-bill-protect-gay-marriage-opponents-152903/> pada 2 Juli 2016
- Hays, R. Allen. *The Role of Interest Group*. Diakses dari <http://www.ait.org.tw/infousa/zhtw/DOCS/Demopaper/dmpaper9.html> pada 13 April 2016
- Holifield, E. Brooks. *Why Do Americans Seem So Religious?*. Diakses dari <https://scholarblogs.emory.edu/sacredmatters/2014/01/21/why-do-americans-seem-so-religious/> pada 18 Mei 2016
- Horton, Ciera. 2016. *Marching for Marriage A Year After Obergefell*. Diakses dari [https://world.wng.org/2016/06/marching\\_for\\_marriage\\_a\\_year\\_after\\_obergefell](https://world.wng.org/2016/06/marching_for_marriage_a_year_after_obergefell) pada 12 Juli 2016

- Howell, Kellan. 2014. Thousand March in Defense of Traditional Marriage. *The Washington Post*. Diakses dari <http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/19/hundreds-march-at-capitol-to-defend-traditional-ma/> pada 12 Juli 2016
- Israel, Josh. 2015. *Marriage Equality Almost Didn't Happen: The Strange Tale of How It All Started*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2015/12/23/3728213/massachusetts-marriage-equality-fight/> pada 10 Juni 2016
- Israel, Josh dan Adam Peck. 2012. *The 7 Most Anti-Gay U.S. Representatives*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2012/06/26/506455/the-7-most-anti-gay-us-representatives/> pada 20 Juni 2016
- Johnson, Chris. 2014. Don't Blame Election Results on Gay Marriage. *The Washington Blade*. Diakses dari <http://www.washingtonblade.com/2014/11/10/dont-blame-results-for-election-2014-on-marriage/> pada 12 Juli 2016
- Johnson, Chris. 2015. *Mikulski Rallies Behind Clinton on DOMA History*. Diakses dari <http://www.washingtonblade.com/2015/10/27/mikulski-rallies-behind-clinton-on-doma-history/> pada 6 Juni 2016
- Jr, Harry R. Jackson. 2010. Same-Sex Marriage Will Hurts Families, Society. *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/07/jackson.same.sex.marriage/> pada 13 Juni 2016
- Kaplan, Sarah. 2016. Mississippi's Senate Just Approved a Sweeping 'Religious Liberty' Bill That Critics Say is The Worst Yet for LGBT Rights. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/03/31/mississippis-senate-just-approved-a-sweeping-religious-liberty-bill-that-critics-say-is-the-worst-yet-for-lgbt-rights/> pada 12 Juni 2016
- Kenter, Jonathan A. dan Evelyn Small Traub. 2013. *United States v. Windsor: The Impact of the Supreme Court's DOMA Ruling on Employee Benefits*. Diakses dari <http://www.troutmansanders.com/united-states-v-windsor-the-impact-of-the-supreme-courts-doma-ruling-on-employee-benefits-07-01-2013/> pada 18 Mei 2016
- Kilgore, Ed. 2012. *Why Christian Right Doesn't Care That Mitt Romney is a Mormon*. Diakses dari <https://newrepublic.com/article/102771/romney-mormon-religion-backlash-election-obama> pada 2 Juli 2016
- Klapper, Ethan. 2013. *On This Day in 1993, Bill Clinton Announced 'Don't Ask, Don't Tell'*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell\\_n\\_3623245.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/07/19/bill-clinton-dont-ask-dont-tell_n_3623245.html) pada 10 Mei 2016

- Kuruwila, Matthai. 2008. *Catholics, Mormons allies to pass Prop. 8*. Diakses dari <http://www.sfgate.com/news/article/Catholics-Mormons-allied-to-pass-Prop-8-3185965.php> pada 12 April 2016
- Lake, Thomas. 2016. Fear and Voting on the Christian Right. *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/interactive/2015/10/politics/fear-voting-christian-right/> pada 12 Juli 2016
- Lang, Nico. 2016. *Log Cabin Republicans: GOP Platform Is The Most Anti-LGBT Ever*. Diakses dari <http://www.advocate.com/election/2016/7/14/log-cabin-republicans-gop-platform-most-anti-lgbt-ever> pada 1 Juli 2016
- Leonard, Arthur S.. 1997. *Going for the Brass Ring: The Case for Same-Sex Marriage*. Cornell Law Review. Diakses dari <http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol82/iss3/3/> pada 5 Juni 2016
- Lopez, German. 2016. *Meet the Little-Known Christian Law Firm Behind the New Wave of Anti-LGBTQ Bills*. Diakses dari <http://www.vox.com/2015/11/23/9770610/liberty-counsel-mat-staver-kim-davis> pada 12 Juni 2016
- McBride, Alex. *Lawrence v. Texas (2003)*. Diakses dari [http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/future/landmark\\_lawrence.html](http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/future/landmark_lawrence.html) pada 12 April 2016
- McDaniel, Chris. 2015. Senator Chris McDaniel Releases Statement Regarding Supreme Court Gay Marriage Ruling. *Mississippi Conservative Daily*. Diakses dari <https://mississippiconservativedaily.com/2015/06/26/senator-chris-mcdaniel-releases-statement-regarding-supreme-court-gay-marriage-ruling/> pada 17 Juni 2016
- McKinley, Jesse dan Kirk Johnson. 2008. Mormons Tipped Scale in Bay on Gay Marriage. *The New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2008/11/15/us/politics/15marriage.html?register=facebook> pada 13 Juni 2016
- McLaughlin, Elliott C.. 2015. Most states to abide by Supreme Court's same-sex marriage ruling but... *CNN*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2015/06/29/us/same-sex-marriage-state-by-state/> pada 12 April 2016
- Meistad, Åse. *Lobbying on Behalf of God: Religious Interest Groups and the No Child Left Behind Act of 2001*. Disertasi untuk gelar *Candidatus Rerum Politicarum* departemen perbandingan politik: University in Bergen
- Mikulski, Barbara A.. *Senator Barbara A. Mikulski*. Diakses dari <https://www.mikulski.senate.gov/about-barbara/biography> pada 6 Juni 2016

- Miller, Eric. *Victory At The State House*. Diakses dari <http://www.advanceamerica.com/blog/?p=1849> pada 12 Juni 2016
- Miller, Zeke J. 2016. GOP Platform Contemplates Anti-Porn Provision, Embrace of ‘Conversion Therapy’. *Time*. Diakses dari <http://time.com/4401600/gop-platform-contemplates-anti-porn-provision-embrace-of-conversion-therapy/> pada 1 Juli 2016
- Montopoli, Brian. 2011. Obama Administration Will No Longer Defend DOMA. *CBS News*. Diakses dari <http://www.cbsnews.com/news/obama-administration-will-no-longer-defend-doma/> pada 2 Juli 2016
- Morris, Bonnie J.. *History of Lesbian, Gay, & Bisexual Social Movements*. Diakses dari <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/history.aspx> pada 10 Mei 2016
- Morrison, Aaron. 2015. Meet The Christian Group Behind Indiana’s Religious Freedom Bill: Eric Miller, Advance America Have National Conservative Support. *International Business Times*. Diakses dari <http://www.ibtimes.com/meet-christian-group-behind-indianas-religious-freedom-bill-eric-miller-advance-1866770> pada 12 Juni 2016
- Neilan, Terence. 2003. High Court in Massachusetts Rules Gays Have Right to Marry. *The New York Times*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/2003/11/18/national/18CND-GAYS.html> pada 10 Juni 2016
- News-Sentinel, Lodi. 2006. Religious Leaders Clash Over Proposed Federal Marriage Amendment. *Lodi News-Sentinel*, 26 Mei 2006. Diakses secara online dari [https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=20060526&id=bPA0AAA\\_AIBAJ&sjid=SCEGAAAAIIBAJ&pg=5215,3174980&hl=id](https://news.google.com/newspapers?nid=2245&dat=20060526&id=bPA0AAA_AIBAJ&sjid=SCEGAAAAIIBAJ&pg=5215,3174980&hl=id) pada 10 Juni 2016
- O’Brien, Michael. 2009. Congressman: Same Sex Marriage Part of Push for Socialism. *The Hill*. Diakses dari <http://thehill.com/blogs/blog-briefing-room/news/60007-congressman-same-sex-marriage-part-of-push-for-socialism> pada 20 Juni 2016
- O’Keefe, Ed. 2015. Steve King Wants Resolution Denouncing Supreme Court Same-Sex Marriage Ruling. *The Washington Post*. Diakses dari <https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/07/06/steve-king-wants-resolution-denouncing-supreme-court-same-sex-marriage-ruling/> pada 20 Juni 2016
- Peterson, Karen S.. 2004. Man Behind the Marriage Amendment. *USA Today*. Diakses dari [http://usatoday30.usatoday.com/life/people/2004-04-12-matt-daniels\\_x.htm](http://usatoday30.usatoday.com/life/people/2004-04-12-matt-daniels_x.htm) pada 8 Juni 2016
- Perkins, Tony. 2016. *LGBT Activist Attempt to Hijack GOP Platform*. Diakses dari <https://www.frcaction.org/updatearticle/20160713/lgbt-activists-hijack-platform> pada 1 Juli 2016

- Perkins, Tony. 2016. *The GOP Platform: Solid, Conservative*. Diakses dari <https://www.frcaction.org/get.cfm?i=WA16G10&f=WU16G03> pada 1 Juli 2016
- Phillips, Frank. 2004. Majority in Mass. poll oppose Gay Marriage. *The Boston Globe*. Diakses dari [http://archive.boston.com/news/local/articles/2004/02/22/majority\\_in\\_mass\\_poll\\_oppose\\_gay\\_marriage/](http://archive.boston.com/news/local/articles/2004/02/22/majority_in_mass_poll_oppose_gay_marriage/) pada 10 Juni 2016
- Pitas, Jeannine. *History of the Gay Rights Movement in the US*. Diakses dari <http://www.lifeintheusa.com/people/gaypeople.htm> pada 13 Mei 2016
- Porter, Eduardo. 2016. *Donald Trump's Rise Show Religion is Losing Its Political Power*. Diakses dari [http://www.nytimes.com/2016/04/06/business/economy/trumps-rise-shows-religion-is-losing-its-political-power.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2016/04/06/business/economy/trumps-rise-shows-religion-is-losing-its-political-power.html?_r=0) pada 18 Mei 2016
- Rahwamati, Linda. 2008. "Partisipasi Kelompok Agama Sebagai Kelompok Kepentingan Dalam Politik di Amerika Serikat". Skripsi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Jember: Universitas Jember.
- Ramsey, Nick. 2013. *How-and why-DOMA became Law in 1996*. Diakses dari <http://www.msnbc.com/the-last-word/how-and-why-doma-became-law-1996> pada 6 Juni 2016
- Reilly, Ryan J. dan Sabrina Siddiqui. 2013. Supreme Court DOMA Decision Rules Federal Same-Sex Marriage Ban Unconstitutional. *Huffington Post*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/supreme-court-doma-decision\\_n\\_3454811.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/06/26/supreme-court-doma-decision_n_3454811.html) pada 12 April 2016
- Reynolds, Dean. 2010. Who's Behind the New LGBT Bathroom Laws?. *CBS News*. Diakses dari <http://www.cbsnews.com/news/whos-behind-the-new-lgbt-bathroom-laws/> pada 12 Juni 2016
- Rivera, Pastor Juan. 2015. *KIM DAVIS, Natural Marriage and Christian Activism*. Diakses dari <https://thechristiannation.org/2015/09/08/kim-davis-natural-marriage-and-christian-activism/> pada 13 Juni 2016
- Roberts, Dan dan Sabrina Siddiqui. 2015. Gay marriage declared legal across the US in historic supreme court ruling. *The Guardian*. Diakses dari <http://www.theguardian.com/society/2015/jun/26/gay-marriage-legal-supreme-court> pada 12 April 2016
- Rosin, Hanna. 2004. A Family Business: For the Rev. Lou Sheldon and His Daughter, Marriage Means Only One Thing. *The Washington Post*. Diakses dari <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A41187-2004May19.html> pada 5 Juni 2016
- Salant, Jonathan D.. 2015. N.J. Rep. Smith's Gay Marriage Comments Draw Rebuke From Fellow N.J. Rep. Pallone. *N.J.com*. Diakses dari

[http://www.nj.com/politics/index.ssf/2015/02/nj\\_rep\\_smiths\\_comments\\_on\\_gay\\_rights\\_draw\\_rebuke\\_f.html](http://www.nj.com/politics/index.ssf/2015/02/nj_rep_smiths_comments_on_gay_rights_draw_rebuke_f.html) pada 20 Juni 2016

Savage, Charlie dan Sheryl Gay Stolberg. 2011. In Shift, U.S. Says Marriage Act Blocks Gay Rights. *New York Times*. Diakses dari [http://www.nytimes.com/2011/02/24/us/24marriage.html?pagewanted=all&\\_r=0](http://www.nytimes.com/2011/02/24/us/24marriage.html?pagewanted=all&_r=0) pada 12 April 2016

Siddiqui, Sabrina. *Kay Hagan Backs Gay Marriage*. Diakses dari [http://www.huffingtonpost.com/2013/03/27/kay-hagan-gay-marriage\\_n\\_2963759.html](http://www.huffingtonpost.com/2013/03/27/kay-hagan-gay-marriage_n_2963759.html) pada 17 Juni 2016

Swier, Rich. 2016. *Governor Rick Scott signs Florida Pastor Protection Act*. Diakses dari <http://drrichswier.com/2016/03/30/governor-rick-scott-signs-florida-pastor-protection-act/> pada 12 Juni 2016

Tech, Chicago-Kent College of Law at Illinois. *Lawrence v. Texas*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2002/02-102> pada 13 Mei 2016

Tech, Chicago-Kent College of Law at Illinois. *United States v. Windsor*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2012/12-307> pada 13 Mei 2016

Tech, Chicago-Kent College of Law at Illinois. *Obergefell v. Hodges*. Diakses dari <https://www.oyez.org/cases/2014/14-556> pada 18 Mei 2016

Weber, David. 2007. Gay Marriage Opponents to Look to States. *Fox News*. Diakses dari [http://www.foxnews.com/printer\\_friendly\\_wires/2007Feb26/0,4675,GayMarriage,00.html](http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2007Feb26/0,4675,GayMarriage,00.html) pada 10 Juni 2016

Wetzstein, Cheryl. 2012. Study: Children Fare Better in Traditional Mom-Dad Families. *The Washington Times*. Diakses dari <http://www.washingtontimes.com/news/2012/jun/10/study-children-fare-better-traditional-mom-dad-fam/> pada 13 Juni 2016

Winston, Andrew M.. 2014. *Right to Peaceful Assembly: United States*. Diakses dari <https://www.loc.gov/law/help/peaceful-assembly/us.php> pada 12 Juli 2016

Zuckman, Jill dan Anastasia Ustinova. Senate is New Arena in Battle to Ban Gay Marriage. *The Hour*, 11 Juli 2004. Diakses secara online dari <https://news.google.com/newspapers?nid=1916&dat=20040711&id=SQ4hAAA-AIBAJ&sjid=5HQFAAAAIBAJ&pg=1311,1446193&hl=id> pada 10 Juni 2016

### **Sumber Internet:**

Action, TFP Student. 2014. *10 Reasons Why Homosexual "Marriage" is Harmful and Must be Opposed*. Diakses dari <http://www.tfpstudentaction.org/politically->

- [incorrect/homosexuality/10-reasons-why-homosexual-marriage-is-harmful-and-must-be-opposed.html#disqus\\_thread](http://www.incorrect/homosexuality/10-reasons-why-homosexual-marriage-is-harmful-and-must-be-opposed.html#disqus_thread) pada 12 April 2016
- America, Advance. Diakses dari <http://www.advanceamerica.com/about.html> pada 12 Juni 2016
- Ballotpedia. *Ballot Measure*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Ballot\\_measure](https://ballotpedia.org/Ballot_measure) pada 15 Juni 2016
- Ballotpedia. *California Proposition 8, the "Eliminates Right of Same-Sex Couples to Marry" Initiative (2008)*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/California\\_Proposition\\_8,\\_the\\_%22Eliminates\\_Right\\_of\\_Same-Sex\\_Couples\\_to\\_Marry%22\\_Initiative\\_\(2008\)](https://ballotpedia.org/California_Proposition_8,_the_%22Eliminates_Right_of_Same-Sex_Couples_to_Marry%22_Initiative_(2008)) pada 15 Juni 2016
- Ballotpedia. *Chris McDaniel*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Chris\\_McDaniel](https://ballotpedia.org/Chris_McDaniel)
- Ballotpedia. *Initiated Constitutional Amendment*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Initiated\\_constitutional\\_amendment](https://ballotpedia.org/Initiated_constitutional_amendment) pada 17 Juni 2016
- Ballotpedia. *Obergefell v. Hodges*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/Obergefell\\_v.\\_Hodges](https://ballotpedia.org/Obergefell_v._Hodges) pada 20 Juni 2016
- Ballotpedia. *2016 Presidential Candidates on Gay Rights*. Diakses dari [https://ballotpedia.org/2016\\_presidential\\_candidates\\_on\\_gay\\_rights](https://ballotpedia.org/2016_presidential_candidates_on_gay_rights) pada 2 Juli 2016
- BBC. *The USA and The Wider World*. Diakses dari [http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/tch\\_wjec/usa19292000/3foreignpolicy1.shtml](http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/tch_wjec/usa19292000/3foreignpolicy1.shtml) pada 1 Mei 2016
- Blog, NOM. 2014. *National Organization for Marriage Defeats Every Republican It Targeted Who Embraced Same-Sex 'Marriage'; Group will Target Sen. Rob Portman for defeat in 2016*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/39827/> pada 17 Juni 2016
- California, Institute of Governmental Studies, University of. *Proposition 8*. Diakses dari <https://igs.berkeley.edu/library/elections/proposition-8> pada 13 Juni 2016
- Campaign, Human Rights. 2015. *Wave of Anti-LGBT Bills in 2015 State Legislative Session*. Diakses dari [http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015\\_StateLegislation-Document\\_2.pdf](http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/files/documents/2015_StateLegislation-Document_2.pdf) pada 12 Juni 2016
- Change.org. *Keep and Support Kim Davis*. Diakses dari <https://www.change.org/p/kentucky-governor-rowan-county-clerk-kim-davis-keep-and-support-kim-davis> pada 13 Juni 2016
- Church, USA. 2016. *Christian Voting Guide*. Diakses dari <https://www.usa.church/christian-voting-guide/> pada 12 Juli 2016

- Center, Pew Research. 2015. *Gay Marriage Around the World*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/2015/06/26/gay-marriage-around-the-world-2013/> pada 20 Juni 2016
- Center, Pew Research. *Importance of Religious in One's Life*. Diakses dari <http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/importance-of-religion-in-ones-life/> pada 18 Mei 2016
- Center, Washington Peace. *Guide to the DC Permit Process*. Diakses dari <http://washingtonpeacecenter.org/permitprocess> pada 12 Juli 2016
- Clerk, Office of the. *Lobbying Disclosure Act*. Diakses dari <http://lobbyingdisclosure.house.gov/lda.html> pada 5 Juni 2016
- Clerk.house.gov. *Final Vote Results Roll Call 316*. Diakses dari <http://clerk.house.gov/evs/1996/roll316.xml> pada 5 Juni 2016
- CNN, Editor. *Same-Sex Marriage Will Hurts Families, Society*. Diakses dari <http://edition.cnn.com/2010/OPINION/08/07/jackson.same.sex.marriage/> pada 13 Juni 2016
- College, U.S Electoral. *What is Electoral College?*. Diakses dari <http://www.archives.gov/federal-register/electoral-college/about.html> pada 1 Mei 2016
- Commission, Federal Election. 2007. *Coordinated Communication and Independent Expenditures*. Diakses dari <http://www.fec.gov/pages/brochures/indexp.shtml#CC> pada 13 April 2016
- Committee, Republican National. 2012. *2012 Republican Platform: We Believe in America*. Diakses dari <https://prod-static-ngop-pbl.s3.amazonaws.com/docs/2012GOPPlatform.pdf> pada 1 Juli 2016
- Congress.gov. *H.R.3396 – Defense of Marriage Act*. Diakses dari <https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3396/summary> pada 1 Mei 2016
- Congress.Gov. *The Legislative Process*. Diakses dari <https://www.congress.gov/legislative-process> Debate.org. *History and Debate of Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.debate.org/gay-marriage/> pada 1 Mei 2016
- Conservapedia. *Bob Barr*. Diakses dari [http://www.conservapedia.com/Bob\\_Barr](http://www.conservapedia.com/Bob_Barr) pada 5 Juni 2016
- Council, Family Research. 2016. *Miss. Guided by Facts, Not Fear*. Diakses dari <http://www.frc.org/get.cfm?i=WA16D04&f=WU16D02> pada 13 Juni 2016

- Courts, United States. *About the Supreme Court*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/about> pada 3 Mei 2016
- Court, United States. *Supreme Court Procedures*. Diakses dari <http://www.uscourts.gov/about-federal-courts/educational-resources/about-educational-outreach/activity-resources/supreme-1> pada 3 Mei 2016
- Dictionaries, Oxford. Diakses dari <http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-status> pada 8 Juni 2016
- Equality, Garden State. Diakses dari <http://www.gardenstateequality.org/about/> pada 12 April 2016
- FindLaw. *1993: The Hawaii Case of Baehr v. Lewin*. Diakses dari [http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com\\_marriage\\_1993-the-Hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf](http://files.findlaw.com/pdf/family/family.findlaw.com_marriage_1993-the-Hawaii-case-of-baehr-v-lewin.pdf) pada 12 April 2016
- GLAA. Diakses dari <http://www.glaa.org/aboutglaa.shtml> pada 12 April 2016
- Goodman, Amy. Diakses secara online dari [http://www.democracynow.org/2000/4/27/vermont\\_civil\\_union\\_bill\\_becomes\\_law](http://www.democracynow.org/2000/4/27/vermont_civil_union_bill_becomes_law) pada 10 Juni 2016
- Govtrack.us. *S.J.Res. 40 (108<sup>th</sup>): Federal Marriage Amendment*. Diakses dari <https://www.govtrack.us/congress/bills/108/sjres40> pada 8 Juni 2016
- G.P.O., US.. *Full Text of "Defense of Marriage Act hearing before the Subcommittee on the Constitution of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Fourth Congress, second session, on H.R. 3396, Defense of Marriage Act, May, 15, 1996"*. Diakses dari [https://archive.org/stream/defenseofmarriag1996unit/defenseofmarriag1996unit\\_djvu.txt](https://archive.org/stream/defenseofmarriag1996unit/defenseofmarriag1996unit_djvu.txt) pada 5 Juni 2016
- Guide, Ben's. *Check and Balances*. Diakses dari <http://bensguide.gpo.gov/j-check-balance> pada 3 Mei 2016
- Institute, Legal Information. *Article VI*. Diakses dari <https://www.law.cornell.edu/constitution/articlevi> pada 3 Mei 2016
- Institute, Legal Information. *First Amendment*. Diakses dari [https://www.law.cornell.edu/wex/first\\_amendment](https://www.law.cornell.edu/wex/first_amendment) pada 12 April 2016
- Issues, On The. *Mississippi Senator: Chris McDaniel*. Diakses dari [http://senate.ontheissues.org/Senate/Chris\\_McDaniel.htm#q3](http://senate.ontheissues.org/Senate/Chris_McDaniel.htm#q3) pada 17 Juni 2016
- Judiciary, Committee of. 1996. *H.Repy 104-664 – 104<sup>th</sup> Congress (1995-1996)*. Diakses dari <https://www.congress.gov/congressional-report/104th-congress/house-report/664> pada 5 Juni 2016

- Kids, National Geographic. *United States*. Diakses dari <http://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states/#united-states-golden-gate-bridge.jpg> pada 15 April 2016
- Legal, US. *United States Gay Couples*. Diakses dari <http://lawdigest.uslegal.com/family-laws/gay-couples/7343/> pada 13 Mei 2016
- Legiscan. *Mississippi House Bill 1523 (Adjourned Sine Die)*. Diakses dari <https://legiscan.com/MS/bill/HB1523/2016> pada 12 Juni 2016
- Legislature, Mississippi. *Mississippi State Senate: Chris McDaniel*. Diakses dari <http://billstatus.ls.state.ms.us/members/senate/mcdaniel.xml> pada 17 Juni 2016
- Library, Yale University. *Government Documents and Information: Executive Orders and Proclamations*. Diakses dari <http://guides.library.yale.edu/c.php?g=296022&p=1976184> pada 3 Mei 2016
- Mapnall. *Map – United States*. Diakses dari [http://www.mapnall.com/en/Map-United-States\\_1072816.html](http://www.mapnall.com/en/Map-United-States_1072816.html) pada 13 April 2016
- Messiah, Failed. 2011. *Joint Orthodox Ans Ultra-Orthodox Statement Against Same Sex Marriage*. Diakses dari [http://failedmessiah.typepad.com/failed\\_messiahcom/2011/05/joint-orthodox-and-ultra-orthodox-statement-against-same-sex-marriage-234.html](http://failedmessiah.typepad.com/failed_messiahcom/2011/05/joint-orthodox-and-ultra-orthodox-statement-against-same-sex-marriage-234.html) pada 13 Juni 2016
- Ministries, Endtime. 2016. *What do the Democratic Candidates Believe About Same-Sex Marriage / Civil Unions?*. Diakses dari <http://www.endtime.com/blog/same-sex-marriage-2016-democratic-presidential-candidates/> pada 2 Juli 2016
- NCSL. *Separation of Powers – An Overview*. Diakses dari <http://www.ncsl.org/research/about-state-legislatures/separation-of-powers-an-overview.aspx> pada 1 Mei 2016
- News, BBC. 2015. *US Supreme Court rules gay marriage is legal nationwide*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33290341> pada 12 April 2016
- News, Massachusetts. 2001. *'Protection of Marriage' Amendment is Approved*. Diakses dari [http://massnews.com/past\\_issues/2001/oct%202001/1001mar.htm](http://massnews.com/past_issues/2001/oct%202001/1001mar.htm) pada 10 Juni 2016
- Newswire, Christian. 2008. *Protect Marriage – Yes on Prop 8 Campaign Releases Second Television Commercial: 'It's Already Happened'*. Diakses dari <http://www.christiannewswire.com/news/785528191.html> pada 15 Juni 2016
- NOM. 2013. *NOM At the 2013 March For Marriage!*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/34125/> pada 20 Juli 2016

- NY, Jewish Community Relations Council of. *Applying for Permits of Demonstrations*. Diakses dari <http://www.jrcny.org/wp-content/uploads/2014/03/Getting-permits-for-demonstrations.pdf> pada 12 Juli 2016
- Obama, The White House: President Barack. *Presidential Actions*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions> pada 3 Mei 2016
- Obama, The White House: President Barack. *State & Local Government*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/state-and-local-government> pada 3 Mei 2016
- Obama, The White House: President Barack. *The Cabinet*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/administration/cabinet> pada 3 Mei 2016
- Obama, The White House: President Barack. *The Executive Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/executive-branch> pada 3 Mei 2016
- Obama, The White House: President Barack. *The Judicial Branch*. Diakses dari <https://www.whitehouse.gov/1600/judicial-branch> pada 3 Mei 2016
- Office, U.S. Government Publishing. *H.R.3396*. Diakses dari <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-104hr3396enr/pdf/BILLS-104hr3396enr.pdf> pada 5 Juni 2016
- Party, Michigan Democratic. *Terri Lynn Land Can't Hide Her LGBT Discriminatory Agenda*. Diakses dari <http://www.michigandems.com/terri-lynn-land-can-t-hide-her-lgbt-discriminatory-agenda> pada 20 Juni 2016
- PBS.org. *Introduction: Stonewall Uprising*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/introduction/stonewall-intro/> pada 10 Mei 2016
- PBS.org. *Timeline: Milestones in the American Gay Rights Movement*. Diakses dari <http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/timeline/stonewall/> pada 10 Mei 2016
- PFAW. *Who Is Weaponizing Religious Liberty?*. Diakses dari <http://www.pfaw.org/media-center/publications/who-weaponizing-religious-liberty> pada 13 Juni 2016
- Police, US Capitol. *Guidelines for Conducting an Event on United States Capitol Grounds*. Diakses dari [http://www.uscapitolpolice.gov/special\\_events/Special-Events\\_Guidelines-Application.pdf](http://www.uscapitolpolice.gov/special_events/Special-Events_Guidelines-Application.pdf) pada 12 Juli 2016
- Press, The Associated. 2003. Catholic Bishops Back Marriage Amendment. *The Register-Guard National*, 11 September 2003. Diakses secara online dari <https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=20030911&id=10xWAA-AAIABAJ&sjid=8esDAAAIAAJ&pg=5160,2115252&hl=id> pada 10 Juni 2016

- ProCon.org. 2012. *2012 Presidential Election: Should Gay Marriage be Legal?*. Diakses dari <http://2012election.procon.org/view.answers.election.php?questionID=1727#mitt-romney> pada 2 Juli 2016
- Project, LGBT Mentoring. *Finding 2: The Yes on 8 Ads That Worked*. Diakses dari <http://prop8report.lgbtmentoring.org/read-the-report/findings-overview/findings-1-7-prejudice/finding-2-newsom-princes> pada 15 Juni 2016
- Psychiatrist, The Association of LGBTQ. *The History of Psychiatry & Homosexuality*. Diakses dari [http://www.aglp.org/gap/1\\_history/](http://www.aglp.org/gap/1_history/) pada 10 Mei 2016
- Review, Illinois. 2016. *Family PAC Announces Primary Election Endorsements*. Diakses dari <http://illinoisreview.typepad.com/illinoisreview/2016/02/family-pac-announces-primary-election-endorsements.html> pada 20 Juni 2016
- Secret.org, Open. *Super PACs*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/superpacs.php?cycle=2014> pada 13 April 2016
- Secret.org, Open. *What is PAC?*. Diakses dari <https://www.opensecrets.org/pacs/pacfaq.php> pada 13 April 2016
- Senate, The Florida. *HB 43: Churches or Religious Organizations*. Diakses dari <https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2016/0043> pada 12 Juni 2016
- Senate, United States. *Lobbying*. Diakses dari [http://www.senate.gov/reference/reference\\_index\\_subjects/Lobbying\\_vrd.htm](http://www.senate.gov/reference/reference_index_subjects/Lobbying_vrd.htm) pada 5 Juni 2016
- Senate, United States. *U.S. Senate Roll Call Votes 104<sup>th</sup> Congress – 2<sup>nd</sup> Session*. Diakses dari [http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll\\_call\\_lists/roll\\_call\\_vote\\_cfm.cfm?congress=104&session=2&vote=00280](http://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=104&session=2&vote=00280) pada 5 Juni 2016
- Staff, HRC. 2015. *Anti-LGBT Bills Introduced in 28 States*. Diakses dari <http://www.hrc.org/blog/anti-lgbt-bills-introduced-in-28-states> pada 12 Juni 2016
- Talk, Family. *Our Mission*. Diakses dari <http://drjamesdobson.org/about/Statement-of-Faith> pada 8 Juni 2016
- Today, New Release. *Dr. James Dobson Author Profile*. Diakses dari [http://www.newreleasetoday.com/authordetail.php?aut\\_id=206](http://www.newreleasetoday.com/authordetail.php?aut_id=206) pada 8 Juni 2016
- Times, New York. 1996. *Ad Touts Clinton's Opposing Gay Marriage*. Diakses dari <http://www.nytimes.com/1996/10/15/us/ad-touts-clinton-s-opposing-gay-marriage.html> pada 12 April 2016

Tolerance.org, Religious. *Proposed Federal Marriage Amendment to the U.S. Constitution: Introduction to the Bill as Originally Worded in 2002*. Diakses dari [http://www.religioustolerance.org/mar\\_amend1.htm](http://www.religioustolerance.org/mar_amend1.htm) pada 20 Juni 2016

Tolerance.org, Religious. *Same Sex Marriage (SSM) in Massachusetts: Initial Attempt to Create A Constitutional Amendement*. Diakses dari [http://www.religioustolerance.org/hom\\_marm2.htm](http://www.religioustolerance.org/hom_marm2.htm) pada 10 Juni 2016

University, Utah Valley. *Milestones of LGBT History in the United States*. Diakses dari <https://www.uvu.edu/multicultural/lgbt/education/history.html> pada 13 Mei 2016

USA.gov. *How Laws Are Made and How to Research Them*. Diakses dari <https://www.usa.gov/how-laws-are-made> pada 3 Mei 2016

USA, American History. *LGBT History*. Diakses dari <https://www.americanhistoryusa.com/category/gay-lesbian-bisexual-transgender-history/> pada 3 Mei 2016

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Mekanisme Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Negara Bagian Amerika Serikat

<b>No</b>	<b>Negara Bagian</b>	<b>Tahun</b>	<b>Badan Yudisial</b>	<b>Badan Legislatif</b>	<b><i>Popular Vote</i></b>
1	Alabama	2015	✓		
2	Alaska	2014	✓		
3	Arizona	2014	✓		
4	California	2013	✓		
5	Colorado	2014	✓		
6	Connecticut	2008	✓		
7	Delaware	2013		✓	
8	Florida	2015	✓		
9	Hawaii	2013		✓	
10	Idaho	2014	✓		
11	Illinois	2014		✓	
12	Indiana	2014	✓		
13	Iowa	2009	✓		
14	Kansas	2014	✓		
15	Maine	2012			✓
16	Minnesota	2013		✓	
17	Montana	2014	✓		
18	Maryland	2013			✓
19	Massachussetts	2004	✓		
20	Nevada	2014	✓		
21	New Hampshire	2010		✓	

22	New Jersey	2013	✓		
23	New Mexico	2013	✓		
24	New York	2011	✓		
25	North Carolina	2014	✓		
26	Oklahoma	2014	✓		
27	Oregon	2014	✓		
28	Pennsylvania	2014	✓		
29	Rhode Island	2013		✓	
30	South Carolina	2014	✓		
31	Utah	2014	✓		
32	Vermont	2009		✓	
33	Virginia	2014	✓		
34	Washington	2012			✓
35	West Virginia	2014	✓		
36	Wisconsin	2014	✓		
37	Wyoming	2014	✓		

## Lampiran 2. Jumlah PAC yang Digunakan Oleh FRC Pada Pemilu 2014

No	Nama	Negara Bagian	Anggota		Jumlah Dana yang Diberikan (US\$)	Menjabat	
			HoR	Senat		Ya	Tidak
1	Steven A King	Iowa	✓		10.000	✓	
2	Mark R Meadows	North Carolina	✓		10.000	✓	
3	Chris Smith	New Jersey	✓		10.000	✓	
4	Alex Mooney	West Virginia	✓		9.000	✓	
5	Steve Southerland	Florida	✓		9.000		✓
6	Louis B Jr Gohmert	Texas	✓		6.000	✓	
7	Gary Palmer	Alabama	✓		5.500	✓	
8	Jody B Hice	Georgia	✓		5.000	✓	
9	Barry Loudermilk	Georgia	✓		5.000	✓	
10	Martha McSally	Arizona	✓		5.000	✓	
11	Joe Pitts	Pennsylvania	✓		5.000	✓	
12	Kirk Jorgensen	California	✓		4.955		✓
13	Kenneth R Buck	Colorado	✓		4.000	✓	
14	Clint Didier	Washington	✓		3.500		✓
15	Rod Blum	Iowa	✓		3.000	✓	
16	Dan Benishek	Michigan	✓		2.500	✓	
17	Dave Brat	Virginia	✓		2.500	✓	
18	Marilinda Garcia	New Hampshire	✓		2.000		✓
19	Bruce Westerman	Arkansas	✓		2.000	✓	
20	Igor A Birman	California	✓		1.000		✓

21	Zach Dasher	Louisiana	✓		1.000		✓
22	Alieta Eck	New Jersey	✓		1.000		✓
23	Bill Posey	Florida	✓		1.000	✓	
24	Wendy Rogers	Arizona	✓		1.000		✓
25	Steven Russels	Oklahoma	✓		1.000	✓	
26	Bobby Schiling	Illinois	✓		1.000		✓
27	Suzanne Scholte	Virginia	✓		1.000		✓
28	Jim Tracy	Tennessee	✓		1.000		✓
29	Lenar Whitney	Louisiana	✓		1.000		✓
30	David Young	Iowa	✓		1.000	✓	
31	Bob Johnson	Georgia	✓		500		✓
32	Tom McMillin	Michigan	✓		500		✓
33	Claudia Tenney	New York	✓		500		✓
34	David Schweikert	Arizona	✓		1.000	✓	
35	Terri Lynn Land	Michigan		✓	7.500		✓
36	George Allen	Virginia		✓	5.000		✓
37	Jeff Bell	New Jersey		✓	5.000		✓
38	Ben Sasse	Nebraska		✓	4.500	✓	
39	Rob Maness	Louisiana		✓	4.000		✓
40	Chris McDaniel	Mississippi		✓	4.000		✓
41	Ed Gillespie	Virginia		✓	3.500		✓
42	Pat Roberts	Kansas		✓	3.500	✓	
43	Joni Ernst	Iowa		✓	2.500	✓	
44	Mark Harris	North Carolina		✓	2.500		✓
45	Cam Cavasso	Hawaii		✓	1.000		✓
46	Tom Cotton	Arkansas		✓	1.000	✓	
47	Steven Daines	Montana		✓	1.000	✓	

48	James Lankford	Oklahoma		✓	1.000	✓	
49	Dan Sullivan	Alaska		✓	1.000	✓	
50	Thom Tillis	North Carolina		✓	1.000	✓	

### Lampiran 3. Penolakan Kelompok Agama Terhadap Legalisasi Pernikahan Sesama Jenis di Amerika Serikat

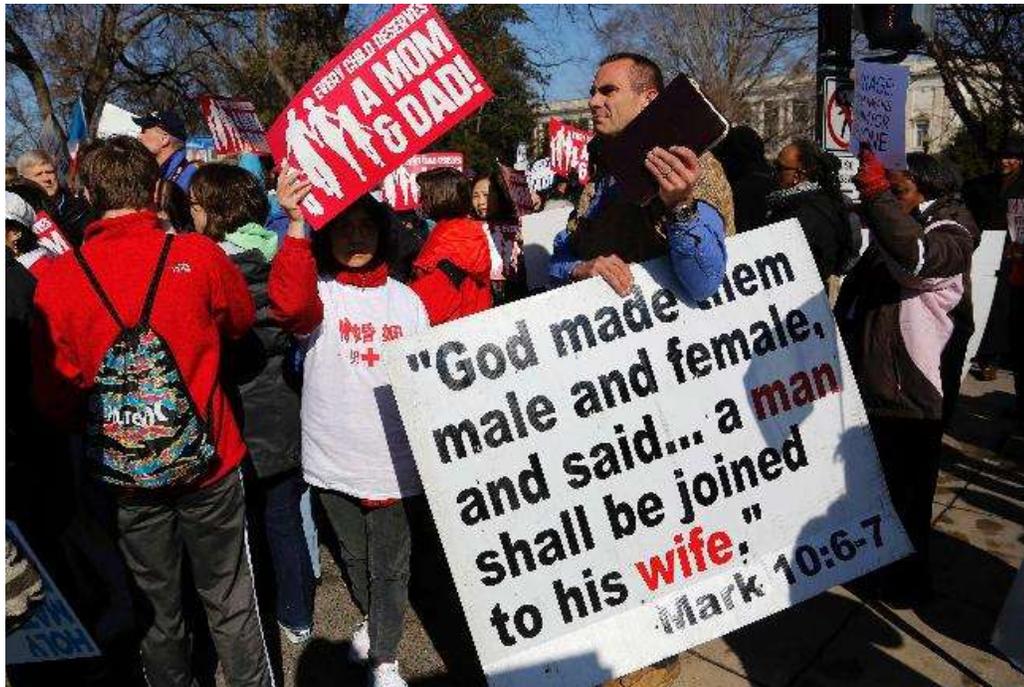


Foto Oleh: Jonathan Ernst/Reuters

Sumber: Samuel Smith. 2015. *Federal Judge Uses 'Wrong Side of History' Argument in Striking Down Florida Marriage Law*. Diakses dari <http://www.christianpost.com/news/federal-judge-uses-wrong-side-of-history-argument-in-striking-down-florida-marriage-law-125240/>

#### Lampiran 4. Protes Kelompok Kristen di Puerto Rico



Foto: Dennis A. Jones/El Vocero

Sumber: Les Fabian Brathwaite. 2013. *Over 200.000 "Stand Up" Against Gay Rights In Puerto Rico*. Diakses dari <http://www.queerty.com/over-200000-stand-up-against-gay-rights-in-puerto-rico-20130220>

### Lampiran 5. *March for Marriage* 2013



Sumber: NOM. 2013. *NOM At the 2013 March For Marriage!*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/34125/>



Sumber: NOM. 2013. *NOM At the 2013 March For Marriage!*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/34125/>



Sumber: NOM. 2013. *NOM At the 2013 March For Marriage!*. Diakses dari <http://www.nomblog.com/34125/>

## Lampiran 6. *March for Marriage* 2015



Sumber : Zack Ford. 2015. *29 Revealing Photos From This Weekend's Anti-Gay March For Marriage*. Diakses dari <http://think8progress.org/lgbt/2015/04/27/3651426/nom-marriage-march-2015-photos/>



Sumber: Zack Ford. 2015. *29 Revealing Photos From This Weekend's Anti-Gay March For Marriage*. Diakses dari <http://think8progress.org/lgbt/2015/04/27/3651426/nom-marriage-march-2015-photos/>



Sumber: Zack Ford. 2015. *29 Revealing Photos From This Weekend's Anti-Gay March For Marriage*. Diakses dari <http://think8progress.org/lgbt/2015/04/27/3651426/nom-marriage-march-2015-photos/>

## Lampiran 7. *March for Marriage* 2016



Sumber: Zack Ford, dkk. 2016. *The 2016 Anti-LGBT March for Marriage Was A Complete Flop*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2016/06/28/3793047/march-for-marriage-2016-flop/>



Sumber: Zack Ford, dkk. 2016. *The 2016 Anti-LGBT March for Marriage Was A Complete Flop*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2016/06/28/3793047/march-for-marriage-2016-flop/>



Sumber: Zack Ford, dkk. 2016. *The 2016 Anti-LGBT March for Marriage Was A Complete Flop*. Diakses dari <http://thinkprogress.org/lgbt/2016/06/28/3793047/march-for-marriage-2016-flop/>